



BERITA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT



BULAN JULI

TAHUN 2024

KLIPING KORAN



Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang Telp. (0751) 7057391 - 705753
Fax. (0751) 7059328 Padang 25133, Sumatera Barat

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	HALAMAN		
1. Giliran Komisi A DPRD Toba “Belajar” ke DPRD Sumbar	1	18. Ketua KI Sumbar Kangkangi UU 14/2008 dan Perki 4/2016	25
2. Nurnas : Gubernur dan DPRD Agar segera Bersikap	2	19. DPRD dan Pemprof Sumbar Sepakati KUPA PPAS 2024	26
3. Soal Dugaan Rangkap Jabatan Musfi Yendra	3	20. DPRD Sumbar Tetapkan KUA PPAS Tahun 2025	28
4. Komisi A Toba Pelajari Penyusunan KUPA PPAS ke DPRD Sumbar	4	21. Pembahasan KUPA PPAS Tahun 2024 Dioptimalkan	30
5. Supardi : Kebudayaan Serta Sejarah Mesti Dilestarikan dan Dieksplorasi	5	22. DPRD Sumbar Setujui Rancangan KUA-PPAS 2025 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024	34
6. Ketua KI Sumbar Nyatakan Siap Dipanggil DPRD	7	23. Pertumbuhan Ekonomi Sumbar 2025 di Angka 4,4 -5,4 Persen	38
7. Kebudayaan Adalah Potensi Pemajuan Daerah	8	24. Arkadius Berikan Politik bagi Tokoh Masyarakat	39
8. Kebudayaan dan Sejarah Adalah Aset Kekayaan Daerah	9	25. Atasi Kekerasan Anak, Semua Harus Terlibat	40
9. DPRD Toba Pelajari Penyusunan KUPA PPAS DPRD Sumbar	11	26. DPRD dan Pemprov Sumbar Sepakati KUA PPAS 2025	41
10. DPRD Sumbar Aktif Menerima Kunjungan dari Berbagai Unsur	12	27. Ketua KI Sumbar Diduga Rangkap Jabatan	45
11. Eksplorasi Kebudayaan, Majukan Daerah	14	28. DPRD Sumbar Tetapkan KUA-PPAS 2025 dan Perubahan KUA-PPAS 2024	46
12. Nofrizon Kritik Gubernur Banyak Bawa Kepala OPD ke Daerah	16	29. Tekan Kerawabab Sosial Butuh Kerja Sama	48
13. Komisi A DPRD Toba Adopsi Pola Penyusunan KUPA-PPAS Sumbar 2024	17	30. Pentingnya Sinergitas Pusat dan Daerah untuk Pengembangan Pertanian	50
14. DPRD dan Pemprov Sumbar Sepakati KUPA PPAS 2024 dan KUA PPAS 2025	18	31. Setop Kekerasan Terhadap Anak-Anak	51
15. Legislator Desak Aparat Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual KUA-PPAS Tahun 2025 dan	20	32. Supardi : Kita Tak Ingin Tamatan SMK di Sumbar jadi Pekerja	52
16. Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 Disepakati	21	33. Ketua DPRS Sumbar Ajak Lurah se-Payakumbuh Tingkatkan Kepekaan	53
17. Trend Penerimaan Daerah Cenderung Menurun Terutama dari Sektor PAD	23	34. Masyarakat Selingkat Danau Singkarak Tolak Pembangunan PLTS	55
		35. Lurah Berperan Penting Atasi Persoalan Sosial	56

36.	Ketua Dprd Sumbar Ajak Lurah Se-Payakumbuh Tingkatkan Kepekaan Sosial Masyarakat Selingkar Danau Singkarak Datangi DPRD Sumbar, Sampaikan Sejumlah Aspirasi Suwirpe Suib : Semoga Penyelenggaraan Pemilu Menjadi Lebih Baik	58	54.	Nagari Maek Berpotensi Jadi Ikon Pariwisata Peradaban Fraksi DPRD Sumbar Sampaikan Pandangan Akhir Dua Ranperda dan Peraturan Tata Beracara	86
37.		60	55.	Optimalkan Tupoksi, BK DPRD Sultra Belajar ke DPRD Sumbar	87
38.		62	56.	Perlindungan Anak Dari Kekerasan Merupakan Tanggungjawab Bersama	90
39.	DPRD Toba Konsultasi Ke DPRD Sumbar	63	57.	Festival Maek 2024 Resmi Bergulir	91
40.	Pembahasan 2 Ranperda dan Peraturan Beracara segera Rampung	64	58.	Festival Maek, Sumbar Bisa jadi Destinasi Tujuan	93
41.	Hidayat, SS, MH: Kesenian Minang Berkualitas	66	59.	Ketua DPRD Soroti Realisasi Anggaran	95
42.	Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 Resmi Disampaikan DPRD : Festival Maek Kenalkan Sejarah Megalitikum kepada Generasi Muda	68	60.	Wakil DPRD Sumbar Dorong Semua Pihak Berperan	96
43.		70	61.	Gambarkan Peradaban Masa Lalu Melalui Atraksi Budaya	98
44.	Festival Maek, Pintu Masuk Menggali Asal Usul Nenek Moyang Manusia	71	62.	Wakil Ketua DPRD Sumbar : Jadikan Evaluasi Untuk Pemilu yang Lebih Baik	100
45.	Cerita Dibalik Digelarnya Maek Festival 2024 di Payakumbuh	74	63.	Perkenalkan Peradaban Maek ke Masyarakat Luas	101
46.	Festival Maek yang Masih Berkabut Misteri Mesti segera Diungkap	75	64.	Wujudkan APBD yang Kredibel	103
47.	Membuka Misteri Peradaban Dunia Melalui Festival Maek	77	65.	Jawaban DPRD Akomodir	105
48.	Supardi Dukung Pelaksanaan Festifal Maek	78	66.	Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran	107
49.	DPRD Sumbar Dorong Pemprov Berinovasi	79	67.	Pameran Maek Sarana Membentangkan Sejarah	108
50.	Ketua DPRD Sumbar Dorong Pemd Akomodir Seniman	81	68.	Festival Maek Datangkan Peneliti Mancanegara	109
51.	Legislator Desak Pemprov Sumbar DOB Agama	82	69.	Maek harus Terkenalkan sebagai Negeri Seribu Menhir	111
52.	Sekretaris DPRD Sumatera Barat Terima Kunjungan Kerja DPRD Kalimantan Tengah	83	70.	BK Sulawesi Tenggara Kunker ke DPRD Sumbar	112
53.	Pembiayaan Daerah Membengkak, DPRD Sumbar Minta Pemprov Berinovasi	84	71.	Supardi : Tingkatkan Kepekaan Sisi Antisipasi Kerawanan	113
			72.	Tingkatkan Kualitas dan Tupoksi BK DPRD	114
			73.	Tingkatkan Kepekaan Sosial untuk Antisipasi Kerawanan	117
			74.	BK DPRD Sumbar Jadi Tujuan Kunjungan Kerja dari Daerah Lain	118

75.	BK DPRD Sejumlah Daerah Belajar ke BK DPRD Sumbar	120	95.	Ingin Kembangkan Pariwisata, Komisi III DPRD Provinsi Kalteng “Bertanya” ke DPRD Sumbar	149
76.	Keberhasilan BK Dilihat dari tak Adanya Persoalan	123	96.	Komisi I DPRD Kabupaten Agam Kembali Kunjungi DPRD Sumbar	150.
77.	Jangan Berimbas Saat Pilkada	125	97.	Fraksi-Fraksi DPRD Sumbar Sampaikan Pendapat Akhir	151
78.	Membuka Peradaban Tertua, Menuju Warisan Dunia	126	98.	BK DPRD Sulawesi Tenggara Belajar ke DPRD Sumbar	155
79.	Suwirpen Suib : Perlindungan Anak Tanggungjawab Bersama, Jangan Ragu Melapor	128	99.	Fraksi-Fraksi Sampaikan Pendapat Akhir	157
80.	Supardi Bangga Nagari Maek Mulai Jadi Perhatian Masyarakat	130	100.	Ketua DPRD Sumbar Supardi Risau dengan Merebaknya Judi Online	161
81.	Festival Maek 2024 Dimulai	131	101.	Pansus II Ranperda RPJPD Kabupaten Agam 2025-2045 KE DPRD Sumbar	162
82.	Destinasi Wisata Sejarah Bangkitkan Ekonomi Masyarakat	132	102.	Fraksi DPRD Sumbar Bahas 2 Ranperda	163
83.	Supardi : Maek harus Dikenal Sebagai Daerah Peradaban Tertua di Indonesia	133	103.	Ranperda RPJPD Sumbar 2025-2045 Bakal Segera Diparipurnakan	164
84.	Maek Festival 2024 dibuka, Wali Nagari : Terima kasih Pak Supardi DPRD Yakini Menhir Maek	135	104.	Masyarakat Terima Bantuan Benih dan Pakan Ikan Lele	168
85.	Potensial jadi Destinasi Wisata Internasional	136	105.	Fraksi DPRD Sumbar Bahs 2 Ranperda	169
86.	BK DPRD Sulawesi Tenggara Berkunjung ke BK DPRD Sumbar	137	106.	Ranperda RPJPD Sumbar 2025-2045 Segera Rampung	170
87.	Supardi Dorong Maek Jadi Destinasi Wisata Minat Khusus	138	107.	Penyelenggaraan Penyiaran Harus Sesuai Aturan	172
88.	Membuka Peradaban Tertua, Menuju Warisan Dunia	139	108.	Suwirpen Ingatkan Proyeksi Pendapatan harus Mencermati Target yang ditetapkan	174
89.	Maek Festival 2024 : dari Menhir hingga fosil Menguak Kejayaan Peradaban 4.000 SM	141	109.	KUA-PPAS 2025 Semakin Kompleks : Penyusunan Harus Berhati-hati	176
90.	Ekonomi Sumbar Triwulan I 2024 Tumbuh 4,37 Persen	142	110.	Maksimalkan Pendapatan Daerah Pemprov Sumbar Terapkan Pola Baru di 2025	177
91.	Supardi : Bisa Jadi Magnet Peneliti Dunia	144	111.	KUA PPAS Akomodir Pemenuhan Target Kinerja Pembangunan Daerah	180
92.	Terkait Kode Etik dan Tata Beracara, BK DPRD Sultra Kunjungan DPRD Sumbar	146	112.	DPRD Sumbar Siap Sahkan Dua Ranperda	182
93.	DPRD Sumbar Terima Kunker Komisi I Agam	147			
94.	Kalteng Dalam Sektor Pariwisata ke DPRD Sumbar	148			

113.	Rancangan KUA-PPAS 2025 Akomodir Target Pembangunan Daerah	184	131.	Jemaah Haji Kloter 8 Tiba dengan Selamat	216
114.	KUA-PPAS 2025 Akomodir Kebijakan Peralihan Kepemimpinan Hadil Pilkada 2024	188	132.	Sharing Informasi Pembahasan RPJPD 2025-2045	218
115.	Alokasikan Pokor, Rafdinal : Penyandang CP di Sumbar harus dapat perhatian	190	133.	Sumbar Butuh Perda Pengelolaan Kesehatan	219
116.	Setiap Hari 540 Ton Sampah di Sumbar Berakhir di Laut	191	134.	Beri Catatan Strategis Perda PPA 2023	220
117.	KUA-PPAS memiliki Fungsi Strategis Peptusunan APBD	192	135.	Komisi Optimalkan Pengawasan Bidang Keuangan	222
118.	KUA-PPAS Tahun 2025 Mulai dibahas	193	136.	Fosil Tengkorak Megalithikum dipajang di Pameran Maek	224
119.	Hidayat : Perbaikan Toilet Sekolah Penting	195	137.	Supardi : Cerita Tentang Peradaban Maek Masih dalam Tabir Misteri	227
120.	DPRD Sumbar Gelar Paripurna Tanggapan Gubernur Terkait Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran	197	138.	Suwirpen : Animo Masyarakat Menurun	228
121.	Wakil Ketua DPRD Sumbar Dorong Peningkatan Penyelenggaraan Pemilu	200	139.	Komisi C DPRD Kabupaten Toba Kunjungan Kerja ke DPRD Sumbar	230
122.	DPRD Sumbar Terima Kunjungan Kerja DPRD Toba	202	140.	Pengelolaan Administrasi Keuangan DPRD Sumbar Dinilai Baik	231
123.	KUPA-PPAS Tahun 2024 Mulai Dibahas	203	141.	Upaya Mengubah Paradigma Budaya dan Pariwisata	232
124.	DPRD Sumbar Dorong Pemprov Berinovasi	205	142.	Ketua DPRD Dukung Penuh Festival Maek	233
125.	Suwirpen Suib : Jangan Ragu Laporkan Kasus Kekerasan terhadap Anak	207	143.	Penyelenggaraan Pemilu diharapkan Lebih Baik Lagi	235
126.	Supardi : Karena Hilangnya Kepekaan Kita	208	144.	Ranperda Pelayanan Mutu Kesehatan Diperbaiki	236
127.	Pelajari Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok	210	145.	Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 Belum Maksimal	238
128.	Hentikan Kekerasan Terhadap Anak, Masyarakat Harus Berani Melapor	211	146.	Kinerja Pemprov Sumbar Belum Optimal	240
129.	Payakumbuh Menyimpan Berbagai Persoalan Sosial	213	147.	DPRD Sumbar Tetapkan Perda Tentang PPA Tahun 2023	241
130.	Perjuangkan Naiknya Tunjangan Guru Honor	215	148.	Sepakati Ranperda APBD 2023, DPRD Sumbar Dorong Perbaikan Keuangan Daerah	244
			149.	DPRD Sumbar Tekankan Perencanaan Anggaran Harus Lebih Baik Lagi	246

150.	Perda Pelaksanaan APBD Sumbar 2023 ditetapkan	249	153.	Dewan Solsel Konsultasi ke DPRD Sumbar	154
151.	DPRD Sumbar Tetapkan Perda Pertanggung-Jawabkan APBD 2023	251	154.	DPRD Kabupaten Solok Selatan Konsultasi ke DPRD Provinsi Sumbar	255
152.	Ranperda Pelayanan Mutu Kesehatan Disarankan Perubahan Judul	253	155.	Dewan Berantas Judol Tanggung Jawab Semua Pihak	256



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KHAZ	SELASA, 30 JULI 2024 SELASA, 24 MUHARRAM 1445 H	2

SOAL PENYUSUNAN KUPA-PPAS 2024

Giliran Komisi A DPRD Kabupaten Toba "Belajar" ke DPRD Sumbar

Padang, Khazimah — Komisi A DPRD Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berkunjung ke DPRD Provinsi Sumatera Barat mempelajari penyusunan komposisi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun 2024, Senin (29/7).

Kedatangan DPRD Kabupaten Toba ke DPRD Sumbar setelah mengerjakan KUPA-PPAS 2024 telah disepakati pihak legislatif dan eksekutif di Sumbar pada akhir pekan baru lalu.

"DPRD Kabupaten Toba perlu mempelajari pola pembahasan untuk melahirkan komposisi KUPA-PPAS yang mampu mengakomodir kebutuhan daerah," ujar Ketua Komisi A Kabupaten Toba, Fransendrik Tambunan saat diterima Sekretaris DPRD Sumbar Rafli.

Menurut Fransendrik Tambunan, pihaknya nanti akan coba memahami apa yang telah dijabarkan sekretaris DPRD Sumbar tentang pola penyusunan KUPA-PPAS 2024 tersebut.

"Hal-hal yang baik akan kita adopsi untuk optimalisasi penyusunan anggaran," katanya.

Dia menyebut dalam KUPA-PPAS 2024 arah prioritas anggaran Kabupaten Toba adalah pengembangan sektor pariwisata dan pertanian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga pembahasan harus detail untuk mengakomodir kebutuhan daerah.

Seperti diungkapkan Sekretaris DPRD Sumbar Rafli sebelumnya bahwa APBD tahun 2024 dihadapkan kepada kondisi yang tidak mudah. "Daerah membutuhkan belanja cukup besar untuk mendanai pelaksanaan program namun di sisi lain juga dihadapkan kepada keterbatasan fiskal," kata Rafli.

Sementara dalam penyusunan RKUA PPAS tahun 2023, tujuannya, pemerintah daerah mencermati kondisi perekonomian baik di tingkat daerah, regional, nasional maupun global. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat diprakirakan berada pada 4,4 sampai dengan 5,4 persen.

Dia menyebutkan, total perubahan PPAS tahun 2024 adalah sebesar Rp7,078 triliun dimana pendapatan daerah ditargetkan Rp6,87 triliun dan belanja daerah Rp7,03 triliun. Pembiayaan penerimaan sebesar Rp180,44 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar," katanya mengakhiri. (jer)



SEKRETARIS DPRD Sumbar Rafli (tengah) bersama rombongan Komisi A DPRD Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KHAZ	SELASA, 30 JULI 2024 SELASA, 24 MUHARRAM 1445 H	10

SOAL KISRUH KI SUMBAR

Nurnas: Gubernur dan DPRD Agar Segera Bersikap

Padang, Khazanah - Gubernur maupun DPRD Sumbar diminta segera mengambil sikap tegas untuk menyelesaikan krisis yang sedang berkejolak di tubuh Komisi Informasi Sumbar pasca diadunginya ketua lembaga tersebut telah melanggar UU 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) nomor 4 tahun 2016.

Salah seorang inisator lahirnya lembaga bentukan UU ini di Sumbar, H. M. Nurnas ketika dihubungi, Senin (29/7) menguak,

Dirinya mendapat informasi dari berbagai pemberitaan media menyatakan ada dugaan rangkap jabatan oleh Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, jelas telah menciderai kepercayaan DPRD dan Gubernur Sumbar.

Ia menyampaikan, lembaga Komisi Informasi tugasnya jelas, yakni sebagai pengawal keterbukaan, tentu individu yang dipercayakan jelas orang-orang pilihan yang punya integritas terhadap keterbukaan.

"Bagaimana orang yang tidak berintegritas, menciderai pernyataannya sendiri tidak dipenuhinya untuk mengambil putusan dalam memutus sengketa informasi publik," tambah Nurnas lagi.

Dirinya menjelaskan, semua calon sudah pasti menandatangani Pakta Integritas,



ANGGOTA DPRD Sumbar H. M. Nurnas.

pernyataan yang ditandatangani diatas meterai, seperti pernyataan siap mundur dan surat pernyataan siap bekerja penuh waktu.

Nurnas menerangkan, setiap calon jika terpilih harus mundur, sebagaimana Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi pasal 9 huruf f berbunyi "Bersedia melepaskan jabatan keanggotaan dan jabatan dalam Badan Publik, apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi".

"Jika semua yang ditemukan oleh salah satu kelompok kerja pengawal integritas ini be-

nar, Gubernur harus tegas untuk mengambil tindakan," pungkas Nurnas.

Sebelumnya, Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra yang dihubungi terpisah seperti dikutip *arunala.com*, Senin (29/7) mengaku sudah mengetahui kabar tentang sejumlah pihak yang dituding rangkap jabatan baik sebagai komisioner KI Sumbar maupun sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Padang.

"Selain jadi komisioner KI Sumbar, saya juga masih menjadi dosen, tapi posisi saya sebagai dosen biasa saja dan tidak ada jabatan struktural di kampus tempat saya mengajar," kata Musfi Yendra.

Dari sudut pandangnya, Musfi menerangkan, yang mundur dari jabatan itu apa bila dirinya berada dalam struktur kampus, misalnya menjadi dekan, wakil dekan, ketua prodi atau jabatan struktural lainnya.

"Namun saya hanya dosen biasa dan tidak berada dalam jabatan struktural. Bahkan jam mengajar saya, dilakukan diluar jam kerja sebagai komisioner KI Sumbar yaitu tiap Sabtu," jelas Musfi.

Jadi, lanjut dia, adanya dugaan bila dirinya melanggar aturan UU KIP atau pun Perki, itu tidak mungkin. (jer/?)



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	SELASA, 30 JULI 2024	9

Pemrakarsa KI Sumbar Ikut Bicara Soal Dugaan Rangkap Jabatan Musfi Yendra

Padang, Rakyat Sumbar —Dugaan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Musfi Yendra, memantik reaksi dari salah seorang pemrakarsa berdirinya KI di Sumbar, yakni H.M. Nurnas.

"Jika Ketua KI Sumbar (Musfi Yendra) seperti yang dilansir media benar, ini jelas telah membongkang kepercayaan DPRD dan Gubernur Provinsi Sumbar, yang telah memberikan kepercayaan kepadanya," kata Nurnas, Senin, (29/7).

Nurnas menyampaikan, lembaga Komisi Informasi tugasnya jelas, yakni sebagai pengawal keterbukaan, tentu individu yang dipercaya kan jelas orang-orang pilihan, punya integritas terhadap keterbukaan.

"Bagaimana orang yang tidak berintegritas, membongkang pernyataannya sendiri tidak dipenuhinya untuk mengambil putusan dalam memutuskan sengketa informasi publik," tambah Nurnas, anggota DPRD Sumbar, fraksi Demokrat.

Ia menjelaskan, semua calon sudah pasti menandatangani Pakta Integritas pernyataan yang ditandatangani diatas meterai, seperti pernyataan siap mundur dan surat pernyataan siap bekerja penuh waktu.

"Setiap calon jika terpilih harus mundur, sebagaimana Peraturan Komisi Informasi (Perki) nomor 4 tahun 2016 tentang



PEMRAKARSA KI Sumbar, H.M. Nurnas.

Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi pasal 9 huruf f berbunyi "Bersedia melepaskan jabatan keanggotaan dan jabatan dalam Badan Publik, apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi".

"Jika semua yang ditemukan dari kelompok kerja pengawal Integritas Lembaga Publik Jaringan Pimproed Sumbar (JPS) ini benar, Gubernur harus tegas untuk mengambil tindakan," pungkas Nurnas.

Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh waktu, Musfi Yendra, menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia untuk bekerja penuh waktu.

Di pojok kanan atas surat pernyataan kesediaan bekerja penuh waktu, tertulis Lampiran II.D peraturan komisi informasi nomor 4 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan seleksi dan penetapan anggota komisi informasi.

Sementara itu, pada surat pernyataan kesediaan mengurus diri, Musfi

Yendra, menyatakan bersedia mengurus diri dari keanggotaan dan jabatan pada badan publik tempat saya bekerja apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi.

Kedua surat pernyataan tersebut ditulis dan ditandatangani Musfi Yendra pada 30 September 2022, dengan meterai 10.000. Musfi Yendra menuliskan pekerjaannya sebagai dosen Universitas Eka Sakti di dalam surat pernyataan itu.

Di pojok kanan atas surat pernyataan kesediaan mengurus diri, tertulis Lampiran II.D peraturan komisi informasi nomor 4 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan seleksi dan penetapan anggota komisi informasi.

Pakar Keterbukaan Informasi Publik, Adrian Tuswandi, mengatakan, integritas Ketua KI Sumbar merembet ke Perki dan UU, mengingkari sendiri pernyataannya sendiri, membongkang DPRD dan Gubernur Sumbar yang meng SK-kan, sehingga harus mundur tak sekadar jabatan struktural saja.

"Di lampiran surat pernyataan itu juga di tuliskan peraturan Perki, yang seharusnya di patuhi oleh calon komisio-er peserta seleksi, bukan untuk dilanggar seperti yang dilakukan Ketua KI Sumbar saat ini, apalagi surat pernyataan itu juga dibubuhi dengan meterai diatas tanda tangan," kata Adrian Tuswandi, seka-ligus Ketua JPS.

Belum ada klarifikasi dari Musfi Yendra. Sewaktu di telepon Senin, (29/7) siang, yang bersangkutan menjawab, "Sedang ada kegiatan". (byr)



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	SELASA, 30 JULI 2024	9.

Komisi A Toba Pelajari Penyusunan KUPA PPAS ke DPRD Sumbar

Padang, Rakyat Sumbar — Komisi A DPRD Kabupaten Toba, Sumatera Utara (Sumut) mempelajari penyusunan komposisi Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA PPAS) 2024, di DPRD Sumbar, Senin (29/7).

"DPRD Toba perlu mempelajari pola pembahasan untuk melahirkan komposisi KUPA-PPAS yang mampu mengakomodir kebutuhan daerah," kata Ketua Komisi A Kabupaten Toba, Fransendrik Tambunan.

Ia melanjutkan, DPRD Sumbar telah menyepakati KUPA-PPAS 2024 dengan pemerintah provinsi (Pemprov) baru-baru ini.

"Terimakasih kepada sekretaris DPRD Sumbar telah menjabarkan pola penyusunan KUPA-PPAS 2024, hal-hal yang baik akan kita adopsi untuk optimalisasi penyusunan anggaran," ucap Fransendrik Tambunan.

Ia menyebutkan dalam KUPA-PPAS 2024 arah prioritas anggaran Kabupaten Toba adalah pengembangan sektor pariwisata dan pertanian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Selain itu pembahasan harus detail untuk mengakomodir kebutuhan daerah," Fransendrik Tambunan. Sementara itu, Sekretaris DPRD Sumbar, Rafli, mengatakan, APBD tahun 2024 dihadapkan kepada kondisi yang tidak mudah. Daerah membutuhkan belanja cukup besar untuk mendanai pelaksanaan program namun di sisi lain juga dihadapkan kepada keterbatasan fiskal.

Sementara dalam penyusunan RKUA PPAS tahun 2025, pemerintah daerah mencermati kondisi perekonomian baik di tingkat daerah, regional, nasional maupun global," beber Rafli.

Rafli menambahkan, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat diperkirakan berada pada 4,4 sampai dengan 5,4 persen.

Ia mengakhiri, total perubahan PPAS tahun 2024 adalah sebesar Rp7,058 triliun dimana pendapatan daerah ditargetkan Rp6,87 triliun dan belanja daerah Rp7,03 triliun. "Pembiayaan penerimaan adalah sebesar Rp180,44 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar," pungkas Rafli. (byr/rel)



SEKRETARIS DPRD Sumbar, Rafli, saat menjamu rombongan Komisi A DPRD Kabupaten Toba, mempelajari penyusunan komposisi Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA PPAS) 2024, di DPRD Sumbar, Senin (29/7).



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KHAZ	RABU, 30 JULI 2024 RABU, 25 MUHARRAM 1445 H	2

BERPOTENSI PACU PEMAJUAN DAERAH

Supardi: Kebudayaan Serta Sejarah Mesti Dilestarikan dan Dieks plorasi

Bukittinggi, Khazanah - Ketua DPRD Sumbang Supardi menegaskan, kebudayaan dan sejarah mesti dilestarikan dan dieksplorasi karena merupakan aset kekayaan yang berpotensi memacu pemaian daerah.

"Jika tidak, jelas daerah itu akan amat merugi," ujar Supardi saat membuka acara Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemangku Kebudayaan Kota Payakumbuh yang digelar di Hotel Triple Tree Bukittinggi, 26-28 Juli.

Lelbih lanjut Supardi mengatakan, Payakumbuh harus segera merubah nasib jika tidak ingin kota ini akan terparik.

Ia mengatakan, untuk merubah nasib maka harus ada pemacunya sementara Payakumbuh tidak memiliki banyak sumber daya alam dan tempat wisata yang bisa dijual untuk memajukan daerah.

"Kota ini banyak kota transit. Maka dari itu kita harus merubah nasib kota ini dengan kebudayaan dan sejarah. Inilah aset kekayaan kita," ujar Supardi memberi semangat peserta bimtek.

Ia mengatakan, selama ini penopang perekonomian Payakumbuh adalah UMKM dan kuliner. Kedua sektor ini pun terancam tergerus, apalagi jika tol Padang-Pekanbaru selesai.

"Kuliner dan UMKM bisa ikut mati, jika tak ada terobosan untuk merubah daerah ini menjadi kota tujuan," kata Supardi mengkhawatirkan.

Ia mengatakan, jika kebudayaan dan sejarah bisa diapungkan maka nasib Payakumbuh

akan berubah. Payakumbuh akan menjadi daerah besar.

"Itulah mengapa saya getol membuat festival Maek. Payakumbuh akan ikut terkena dampak positifnya jika kawasan Maek menjadi wilayah wisata khusus tempat berkumpulnya para peneliti dan arkeolog dunia," katanya.

Maek, tulukanya merupakan aset sejarah luar biasa yang dimiliki Sumbang. Bahkan peradabannya diprediksikan ada sejak 4 ribu tahun sebelum masehi. Maek harus meredunia.

Supardi menilai kebudayaan dan sejarah bukan tidak mungkin membuat suatu daerah maju. Bahkan Bali dan Yogyakarta telah membuktikan.

"Bali itu bukan hanya menjual pantai dan laut, mereka menjual budaya, ada tari Kecak, ada ritual ngaben. Itulah mengapa wisatawan berduyun-duyun datang ke sana sejak lama," katanya.

Yogyakarta juga serupa. Walaupun memiliki Borobudur dan banyak candi mereka juga mengadakan banyak festival yang menjadi magnet datangnya turis mancanegara.

Supardi mengatakan mengeksplorasi kebudayaan dan sejarah bukanlah hal yang buruk. Justru itu termasuk sebagai upaya melestarikannya. Bahkan tanpa kebudayaan maka daerah dan masyarakat akan kehilangan identitas.

Ia mengatakan jika daerah lain tak mau mengekspos budaya mereka, maka Sumbang termasuk Payakumbuh juga tak boleh malu.

"Kita punya banyak tarian hebat, tari payung, tadi pasambahan dan banyak yang lain. Sayangnya semua kekayaan budaya dan sejarah itu tak pernah serius diekspos selama ini," tegasnya.

Supardi mengatakan merubah nasib daerah akan merubah pula nasib masyarakatnya. Saat ini Payakumbuh mengalami banyak permasalahan mulai dari banyaknya kemiskinan ekstrem, tingginya angka pengangguran, LGBT, penyalahgunaan narkoba dan kem hingg permasalahan anak kelurahan

gizi atau stunting.

"Stunting ini yang sangat miris. Tidak ada dalam kamus orang Minang selama ini kelaparan. Rumah gadang dilengkapi lumbung, ini adalah konsep ketahanan pangan. Namun yang terjadi saat ini banyak rumah gadang yang dinantahkan," ujarnya.

Ia mengatakan tidak seharusnya lagi para pemangku kebudayaan. Nirik mamak, Datuk Bundo kandung, bahkan masyarakat untuk santai-santai saja melihat situasi di Payakumbuh saat ini. Angka kemiskinan





KLIPING BERITA

ekstrem dan pengangguran tinggi, ini bisa memicu kriminalitas.

Bahkan penyalahgunaan narkoba dan LGBT semakin marak yang tentu saja merusak generasi penerus. Ia mengatakan memang tanggung jawab pemerintah untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat. Namun tanpa dukungan seluruh pihak di masyarakat tersebut itu sendiri maka hal itu sulit terwujud.

Apalagi mengingat APBD Payakumbuh tidaklah besar. Hanya Rp799 miliar yang 90 persennya berasal dari bantuan pemerintah

pusat dan pemerintah provinsi.

"Sebagian besar pendapatan daerah banyak hanya berasal dari pajak kendaraan bermotor. Itu pun jumlahnya tak seberapa," katanya.

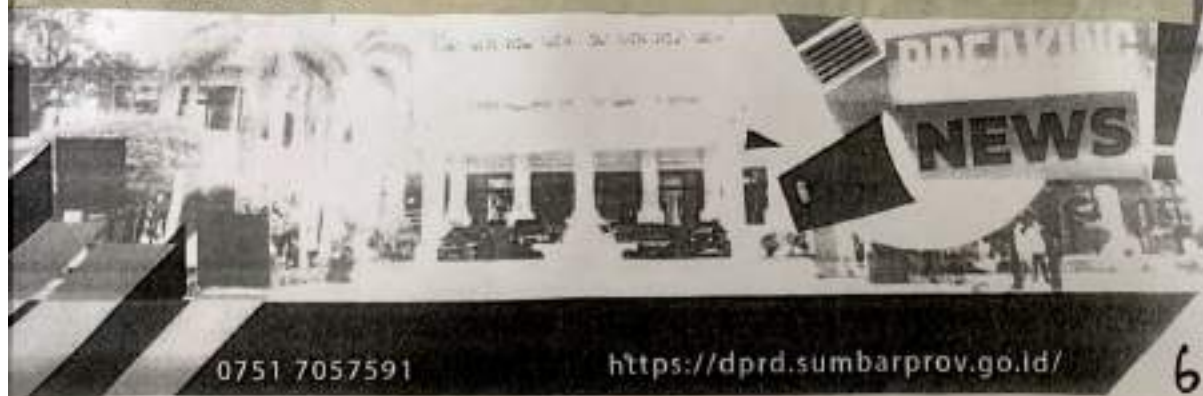
Itulah mengapa, lanjut Supardi, harus ada terobosan untuk menjadikan Payakumbuh kota yang besar dan maju. Salah satunya melalui eksplorasi kebudayaan dan sejarah.

Jika keduanya terekspos maka seluruh sektor lain akan ikut membaik," katanya mengakhiri. (Lili Yuniati)

HARI/TANGGAL	HALAMAN



A DPRD Sumbar Supardi (dua dari kanan) saat menghadiri Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemangku Kebudayaan Kota Payakumbuh digelar di Hotel Triple Tree Bukittinggi





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbang	RABU, 31 JULI 2024	9

Ketua KI Sumbang Nyatakan Siap Dipanggil DPRD

**Musfi Yendra: Saya
Bertanggung-jawab**

Laporan

► **HANDI YANUAR**

Harian Rakyat Sumbang

Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumbang, Musfi Yendra, mengatakan, bersedia di panggil dan akan memberikan penjelasan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Sumbang, menyoal statusnya sebagai dosen tetap di Universitas Eka Sakti (Unes) Padang, dan diduga rangkap jabatan.

"**SANGGUP** lah, (jika dipanggil). Ambo (saya) jelaskan. Saya sudah menjelaskan ini ke Pemprov, pak gub juga tahu," kata Musfi, menjawab telepon Rakyat Sumbang, Selasa, (30/7) siang.

"Sebelumnya sudah saya jelaskan, tadi sudah saya jelaskan ke pak asisten 3, pak asisten 2 saya, tidak ada masalah. Ambo bertanggungjawab," tutur Musfi, melanjutkan.

Musfi Yendra menyampaikan, Komisi I DPRD Provinsi Sumbang juga telah mengetahui statusnya dosen.

"Ke DPRD, komisi I, mereka tahu saya dosen, kalau dipanggil saya jelaskan apa pula saya takut, saya orangnya terbuka. Semua aktivitas saya terbuka, tidak ada yang saya tutup-tutupi," sebutnya.

Musfi menyebutkan, ia hanya bertugas sebagai dosen, yang tidak mempunyai jabatan, hanya fungsional saja.

"Pahami aturan itu, bahwa yang mundur itu, adalah jabatan struktural. Secara fungsional tidak ada aturan, ambo sudah jelaskan waktu rapat di Pansel (Panitia Seleksi)," heber Musfi.

Ia menyampaikan, mengajar di luar jam kerja sebagai Komisiner KI Sumbang, dan tidak mengganggu aktivitasnya di KI Sumbang, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaannya di KI karena mengajar.

"Saya mengajar tidak di jam kerja KI, saya mengajar di luar jam kerja, mengajar di hari Sabtu, mengajar online, tidak ada mengganggu aktivitas saya di

KI," ulasnya.

Saat ditanyakan mengapa masih mengajar di Unes padahal sudah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai dosen saat mengikuti seleksi KI.

"Tidak usah berdebat, saya sudah menjelaskan pemahaman saya seperti itu, dan sudah saya jelaskan ketika di Pansel dan di DPRD," ujarnya.

Ketika ditanyakan apakah juga sudah mengajukan surat pengunduran diri di Unes? "Apa alasan saya mengundurkan diri? Saya tidak punya jabatan struktural," sebut Musfi, yang mengakui sebagai dosen tetap di Unes.

"Kemudian, banyak kok di KI, ketua KI Pusat juga dosen di Universitas Peltahanan, gak ada masalah, kan tidak melanggar secara struktural," pangsas Musfi.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi, pasal 9 huruf F berbunyi "bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi Anggota Komisi Informasi". Pada pasal 9 huruf G berbunyi, "bersedia bekerja penuh waktu".

Sementara itu, Pakar Keterbukaan Informasi Publik, Adrian Tuswandi, mengatakan, integritasnya Ketua KI Sumbang merembes ke Perki dan ULL, mengingkari sendiri pernyataannya waktu mendaftar ke DPRD dan Gubernur Sumbang yang meng SK-kan, sehingga harus mundur tak sekadar jabatan struktural saja.

"Di lampiran surat pernyataan ini juga di tuliskan pecanran Perki, yang seharusnya di parahi oleh calon komisiner peserta seleksi, bukan untuk dilanggar seperti yang dilakukan Ketua KI Sumbang saat ini, apalagi surat pernyataan ini juga dibubuhi dengan meterai diatas tanda tangan," kata Toak, sapaan Adrian Tuswandi, sekaligus Ketua IPS (byr).



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	RABU, 31 JULI 2024	9

Kebudayaan Adalah Potensi Pemajuan Daerah

Pondong, Bakasat Sembur — Ketua DPRD Provinsi Sembur, Sumatra, mengemukakan kebudayaan dan sejarah merupakan aset kekayaan yang berpotensi bisa memacu pertumbuhan daerah.

"para pihak disarankan dan dikecualikan maka daerah akan menjadi," kata Supardi, saat menerima Gubernur Tegal (Banteng) Peningkatan Kapasitas Pemertuaan Kebudayaan Kota Panyabumbuh, di Hotel Triptere Bukittinggi, Jumat (26/7).

[illegible]

Menurut Soejarto, jika ke-
budayaan dan sejarah bisa di-
pungut maka disebut Payakum.

bagian akan bernilai. Payakumbuh akan menjadi daerah baru

"Inilah mengapa saya ingin membuat festival March Payer kumbuk akan lebih terkonsentrasi pada posisi ilmu kesehatan dan pendidikan, terutama kesehatan terutama bagi masyarakat Melayu, khususnya bertumbuhnya ilmu pada penelitian dan akademik dan lain sebagainya."

Seperti terlihat ketubuhan dan sejarah bukan tidak mungkin, kita membuat suatu daerah maju, sebuah Bali dan Yogyakarta telah



intertribal hybridization

"Tadi itu bukan hanya sekedar
pura-pura dan lain, mereka menaruh
hati-hati ada itu. Sebab, ada itu
tengah-tengah, itulah mengapa waktu
itu bertepatan dengan datang ke
sana waktu itu," sebut

"Vergaderingen zijn erom, was
laapten merendeel Bonboudard dan
danysk cuncti merendeel jage men-
geschden bynyk festival
methode maget danygwa tarte
manancanaga, tumbatunya, polk
kegiatan bootlangung 26-28 juli

1502

in menyempatkan. Merek me-
rupakan aset sejat yang harus
yang dimiliki Sumbar. Bahkan
pentabangannya diprediksi akan se-
jak 4 ribu tahun sebelum masehi.
Merek harus mendunia, katanya.

Tika Bati mengeskpos foto be-
cak bila juga jurai banyak taran
bercak, setipung bati pematian
han dan banyak bati. Sayangnya
semua bekangan bledara dan seja-
ralu ini tak pernah serius diekspos
selama ini. (beritanya. (byr)

KETUA DPRD
Sumber, saat
membuka him-
mah Peringkat
tan Kapasas
Pemasngu
Kabungayan
Kota Paya-
kumbuh, di
Hotel Tripletree
Bukittinggi,
Jumat (25/7)



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Rabu, 31 Juli 2024 (25 Muharram 1446 H)	16

KETUA DPRD SUMBAR, SUPARDI

Kebudayaan dan Sejarah Adalah Aset Kekayaan Daerah

Kebudayaan dan sejarah merupakan aset kekayaan yang berpotensi bisa memacu kemajuan daerah. Jika tidak dilestarikan dan dieksplorasi maka daerah amat rugi.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat membuka acara Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemangku Kebudayaan Kota Payakumbuh, 26 hingga 28 Juli di Hotel Tripletree Bukittinggi.

Supardi mengatakan Payakumbuh harus segera merubah nasib. Jika tidak maka kota ini akan terpuruk.

Ia mengatakan, untuk mengubah nasib maka harus ada pemacunya. Sementara Payakumbuh tidak memiliki banyak sumber daya alam dan tempat wisata yang bisa dijual untuk memajukan daerah.

"Kota ini hanya kota transit. Maka dari itu kita harus mengubah nasib kota ini dengan kebudayaan dan sejarah. Itulah aset kekayaan kita," ujar Supardi.

Ia mengatakan selama ini pelepasan perekonomian Payakumbuh adalah UMKM dan kuliner. Kedua sektor ini pun terancam tergerus, apalagi jika tol Padang-Pekanbaru selesai. Kuliner dan UMKM bisa ikut mati, jika tak ada terobosan untuk mengubah daerah ini menjadi kota tujuan.

Ia mengatakan, jika kebudayaan dan sejarah bisa diapungkan maka nasib Payakumbuh akan berubah. Payakumbuh akan menjadi daerah besar.

"Itulah mengapa saya ingin membuat festival Maek. Payakumbuh akan ikut terkena dampak positifnya jika kawasan Maek menjadi wilayah wisata khusus tempat berkumpulnya para peneliti dan arkeolog dunia," katanya.

Maek merupakan aset sejarah luar biasa yang dimiliki Sumbar. Bahkan peradabannya diprediksi ada sejak 4 ribu tahun sebelum masehi. Maek harus mendunia, katanya.

Supardi menilai kebudayaan dan sejarah bukan tidak mungkin membuat suatu daerah maju. Bahkan Bali dan Yogyakarta telah membuktikan.

"Bali itu bukan hanya menjual pantai dan laut, mereka

menjual budaya, ada tari Kecak, ada ritual ngaben. Itulah mengapa wisatawan berduyun-duyun datang ke sana sejak lama," katanya.

Yogyakarta juga serupa. Walaupun memiliki Borobudur dan banyak candi mereka juga mengadakan banyak festival yang menjadi magnet datangnya turis mancanegara.

Supardi mengatakan mengeksplorasi kebudayaan dan sejarah bukanlah hal yang buruk. Justru itu termasuk sebagai upaya melestarikannya. Bahkan tanpa kebudayaan maka daerah dan masyarakat akan kehilangan identitas.

Ia mengatakan jika daerah lain tak malu mengekspos bu-

daya mereka, maka Sumbar termasuk Payakumbuh juga tak boleh malu.

"Jika Bali mengekspos tari Kecak, kita juga punya banyak tarian hebat, tari payung, tadi pasambahan dan banyak lain. Sayangnya semua kekayaan budaya dan sejarah itu tak pernah serius diekspos selama ini," tegasnya.

Supardi mengatakan mengubah nasib daerah akan mengubah pula nasib masyarakatnya. Saat ini Payakumbuh mengalami banyak permasalahan. Mulai dari banyaknya kemiskinan ekstrim, tingginya angka pengangguran, LGBT, penyalahgunaan narkoba dan lain hingga permasalahan anak

kekurangan gizi atau stunting.

"Stunting ini yang sangat miris. Tidak ada dalam kamus orang Minang selama ini kelaparan. Rumah gadang dilengkapi lumbung, ini adalah konsep ketahanan pangan. Namun yang terjadi saat ini banyak rumah gadang yang diruntuhkan," ujarnya.

Ia mengatakan tidak seharusnya lagi para pemangku kebudayaan, Ninik mamak, Datuk Rundo kandung bahkan masyarakat untuk santai-santai saja melihat situasi di Payakumbuh saat ini. Angka kriminalitas ekstrem dan pengangguran tinggi, ini bisa memacu kriminalitas.

Bahkan penyalahgunaan

narkoba dan LGBT semakin marak yang tentu saja merusak generasi penerus.

"Apakah kita masih bisa santai-santai menghabiskan hari dengan main hp tanpa memikirkan nasib anak cucu kita? Marilah bersama-sama merubah nasib daerah ini," katanya.

Ia mengatakan memang tanggung jawab pemerintah untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat. Namun tanpa dukungan seluruh pihak di masyarakat tersebut itu sendiri maka hal itu sulit terwujud.

Apalagi mengingat APBD Payakumbuh tidaklah besar. Hanya Rp799 miliar yang 90 persennya berasal dari bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

"Sebagian besar pendapatan daerah banyak hanya berasal dari pajak kendaraan bermotor. Itupun jumlahnya tak seberapa," katanya.

Itulah mengapa, lanjut Supardi, harus ada terobosan untuk menjadikan Payakumbuh kota yang besar dan maju. Salah satunya melalui eksplorasi kebudayaan dan sejarah. Jika keduanya terekspos maka seluruh sektor lain akan ikut membaik.



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



0751 7057591

<https://dprd.sumbarprov.go.id/>

10

DPRD Toba Pelajari Penyusunan KUPA PPAS DPRD Sumbar

Dipindai dengan CamScanner



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	RABU, 31 JULI 2024	6

DPRD Sumbar Aktif Menerima Kunjungan dari Berbagai Unsur

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat terus menunjukkan komitmennya dalam menerima kunjungan dari berbagai daerah guna menyampaikan aspirasi masyarakat dan meningkatkan kinerja DPRD.

Baru-baru ini, DPRD Sumbar menerima kunjungan dari Komisi A DPRD Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Senin (29/7). Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun 2024. Delegasi dari Kabupaten Toba disambut oleh Sekretaris DPRD Sumbar, Rafli.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Toba, Fransendrik Tambunan, menjelaskan bahwa DPRD Sumbar baru-baru ini telah menyepakati KUPA-PPAS 2024 dengan Pemerintah Provinsi Sumbar. Dalam upaya untuk menyusun KUPA-PPAS yang efektif, DPRD Toba ingin mempelajari pola pembahasan yang diterapkan oleh DPRD Sumbar.

"Terima kasih kepada Sekretaris DPRD Sumbar atas penjelasan tentang penyusunan KUPA-PPAS 2024. Kami akan mengadopsi hal-hal yang baik untuk mengoptimalkan penyusunan anggaran di daerah kami," ujar Fransendrik Tambunan.

Dia menambahkan bahwa dalam KUPA-PPAS 2024, fokus prioritas anggaran Kabupaten Toba adalah pengembangan sektor pariwisata dan pertanian untuk mendorong perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan anggaran harus dilakukan dengan detail untuk memenuhi kebutuhan daerah.

Sekretaris DPRD Sumbar, Rafli, mengungkapkan bahwa penyusunan APBD tahun 2024 menghadapi tantangan signifikan. Daerah memerlukan belanja besar untuk mendenai berbagai program, namun dihadapkan pada keterbatasan fiskal.

Dalam penyusunan RKUA-PPAS tahun 2025, pemerintah daerah memperhatikan kondisi ekonomi yang berlaku di tingkat daerah, regional, nasional, dan global. Diperkirakan, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat akan berada dalam kisaran 4,4 hingga 5,4 persen.

Rafli juga menambahkan bahwa total peruba-

han PPAS tahun 2024 mencapai Rp7,058 triliun, dengan pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp6,87 triliun dan belanja daerah sebesar Rp7,03 triliun. Pembiayaan penerimaan diproyeksikan sebesar Rp180,44 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar.

MASYARAKAT SELINGKAR DANAU SINGKARAK SAMPAIKAN ASPIRASI

Masyarakat Selingkar Danau Singkarak mendenangi DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan sejumlah aspirasi yang diharapkan dapat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar.

Salah satu aspirasi utama adalah penolakan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dinilai berpotensi merusak kelestarian ekosistem dan keindahan danau.

Kedatangan masyarakat Selingkar Danau Singkarak diwakili oleh para Wali Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan Badan Pengembangan Kawasan Danau Singkarak (BPKDS).

Ketua BPKDS, Jasman, menyatakan bahwa dari

musyawarah perangkat nagari di Selingkar Danau Singkarak, pelaksanaan pengelolaan yang telah berjalan hingga kini tidak berpihak kepada masyarakat.

"Pihak pengelola Danau Singkarak (PLN) akan membangun PLTS. Dengan adanya PLTS, nantinya akan mengganggu perkembangan biota danau dan menyulitkan masyarakat nelayan untuk mencari ikan," katanya.

Jasman mengungkapkan bahwa saat ini masyarakat sudah kesulitan mencari ikan akibat adanya perubahan aturan. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, akan menambah angka kemiskinan. Tidak hanya persoalan ekosistem, sampah pun juga harus menjadi perhatian seluruh pihak.

Sementara itu, Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD Sumbar, Zardi Syahrir, mengatakan bahwa pertemuan dengan perangkat nagari Selingkar Danau Singkarak akan ditindaklanjuti dengan Komisi atau dewan yang bersangkutan.

Dia menyebutkan, aspirasi yang disampaikan akan diteruskan ke pimpinan untuk dibahas lebih lanjut. Jika aspirasi tersebut merupakan kewenangan pemerintahan daerah provinsi, maka akan dibicarakan bersama Pemprov Sumbar. (*)





KLIPING BERITA



TEKS GLOBAL - DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan dari berbagai daerah dan unsur masyarakat.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	RABU, 31 JULI 2024 25 Muharram 1446 H	16

KETUA DPRD SUMBAR SUPARDI

Eksplorasi Kebudayaan, Majukan Daerah

BUKITTINGGI, HALUAN-Kebudayaan dan sejarah merupakan aset kekayaan yang berpotensi besar untuk memacu kemajuan daerah. Jika tidak dilestarikan dan dieksplorasi maka daerah akan amallah merugi.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat membuka Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemangku Kebudayaan Kota Payakumbuh, 26 hingga 28 Juli di Hotel Tripleee Bukittinggi.

Supardi mengatakan Payakumbuh harus segera merubah nasib. Jika tidak maka kota ini akan tertinggal. Untuk mengubah nasib maka harus ada pemacunya. Sementara Payakumbuh tidak memiliki banyak sumber daya alam dan tempat wisata yang bisa dijual untuk memajukan daerah.

"Kota ini hanya kota transit. Maka dari itu kita harus mengubah nasib kota ini dengan kebudayaan dan sejarah. Itulah aset kekayaan kita," ujar Supardi.

Ia mengatakan selama ini penopang perekonomian Payakumbuh adalah UMKM dan kuliner. Kedua sektor ini pun terancam tergerus, apalagi jika tol Padang-Pekanbaru selesai. Kuliner dan UMKM bisa ikut mati, jika tak ada terobosan untuk mengubah daerah ini menjadi kota tujuan.

Ia menambahkan, jika kebudayaan dan sejarah bisa diapungkan maka nasib Payakumbuh akan berubah. Payakumbuh akan menjadi daerah besar.

"Inilah mengapa saya getol membuat Festival Maek. Payakumbuh akan ikut terkena dampak positifnya jika kawasan Maek menjadi wilayah wisata khusus tempat berkumpulnya para peneliti dan arkeolog dunia," katanya.

Maek, terang dia, merupakan aset sejarah luar biasa yang dimiliki Sumbar. Bahkan peradabannya diprediksi ada sejak 4 ribu tahun sebelum masehi. Maek harus mendunia, katanya.

Supardi menilai kebudayaan dan sejarah bukan tidak mungkin membuat suatu daerah maju. Bahkan Bali dan Yogyakarta telah membuktikan.

"Bali ini bukan hanya menjual pantai dan laut, mereka menjual budaya, ada tari Kecak, ada ritual ngaben. Itulah mengapa wisatawan berduyun-duyun datang ke sana sejak lama," ujarnya.

Yogyakarta juga serupa. Walaupun memiliki Borobudur dan banyak candi mereka juga mengadakan banyak festival yang menjadi magnet datangnya turis mancanegara.

Lebih lanjut ia menyampaikan, mengeksplorasi kebudayaan dan sejarah bukanlah hal yang buruk. Justru itu termasuk sebagai upaya melestarikannya. Bahkan tanpa kebudayaan maka daerah dan masyarakat akan kehilangan identitas.

Ia mengatakan jika daerah lain tak mau mengekspos budaya mereka, maka Sumbar termasuk Payakumbuh juga tak boleh malu.

"Jika Bali mengekspos tari Kecak, kita juga punya banyak tarian hebat, tari payung, tadi pasambahan dan banyak lain. Sayangnya semua kekayaan budaya dan sejarah itu tak pernah serius diekspos selama ini," tegasnya.

Supardi menutuskan, mengubah nasib daerah akan mengubah pula nasib masyarakatnya. Saat ini Payakumbuh mengalami banyak permasalahan. Mulai dari banyaknya kemiskinan ekstrem, tingginya angka pengangguran, LGBT, penyalahgunaan narkoba dan lain hingga permasalahan anak kekurangan gizi atau *stunting*.

"*Stunting* ini yang sangat miris. Tidak ada dalam kamus orang Minang selama ini kelaparan. Rumah gadang dilengkapi lumbung, ini adalah konsep ketahanan pangan. Namun yang terjadi saat ini

banyak rumah gadang yang diruntuhkan," ujarnya.

Ia mengatakan tidak seharusnya lagi para pemangku kebudayaan, ninik mamak, datuk bando kandang bahkan masyarakat untuk santai-santai saja melihat situasi di Payakumbuh saat ini. Angka kemiskinan ekstrem dan pengangguran tinggi, ini bisa memacu kriminalitas.

Bahkan penyalahgunaan narkoba dan LGBT semakin marak yang tentu saja merusak generasi penerus.

"Apakah kita masih bisa



KLIPING BERITA

santai-santai menghabiskan hari dengan main handphone tanpa memikirkan nasib anak cucu kita? Marilah bersama-sama merubah nasib daerah ini," katanya.

Ia menyebut, memang tanggung jawab pemerintah untuk memajukan dan men-
sejahterakan masyarakat. Namun tanpa dukungan seluruh pihak di masyarakat tersebut itu sendiri maka hal itu sulit terwujud.

Apalagi mengingat APBD Payakumbuh tidaklah besar. Hanya Rp799 miliar yang 90

persennya berasal dari bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

"Sebagian besar pendapatan daerah banyak hanya berasal dari pajak kendaraan bermotor. Itupun jumlahnya tak seberapa," katanya.

Itulah mengapa, lanjut Supardi, harus ada terobosan untuk menjadikan Payakumbuh kota yang besar dan maju. Salah satunya melalui eksplorasi kebudayaan dan sejarah. Jika keduanya terekspos maka seluruh sektor lain akan ikut membaik. (h/adv)



BIMTEK Peningkatan Kapasitas Pemangku Kebudayaan Kota Payakumbuh yang digelar di salah satu hotel di Bukittinggi



PESERTA Bimtek berfoto bersama dengan Ketua DPRD Sumbar, Supardi



Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat membuka Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemangku Kebudayaan Kota Payakumbuh di salah satu hotel di Bukittinggi



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SELASA, 30 JULI 2024	8

Nofrizon Kritik Gubernur Banyak Bawa Kepala OPD ke Daerah

PADANG, KP
- Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dari Partai PPP, Nofrizon, menyampaikan pandangan terkait kehadiran Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dalam acara keagamaan

yang melibatkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pemberian bantuan ke masjid-masjid.

Nofrizon mengapresiasi niat gubernur untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat, namun ia mengusulkan agar tidak melibatkan banyak kepala OPD dalam acara keagamaan.

"Gubernur aktif menghadiri berbagai kegiatan keagamaan belakangan ini, seperti tausiyah subuh dan dzikir gabungan. Namun, saya merasa bahwa melibatkan banyak kepala OPD dalam acara keagamaan mungkin tidak perlu. Hal ini bisa memberikan kesan bahwa kegiatan tersebut le-



bih bersifat kampanye menjelang Pilkada," ujar Nofrizon di Padang, Senin (29/7).

Nofrizon juga menekankan pentingnya kejelasan mengenai sumber dana bantuan yang diberikan kepada masjid. "Agar lebih transparan, perlu diperjelas apakah bantuan tersebut berasal dari anggaran resmi atau sumbangan dari OPD. Transparansi ini sangat penting," ungkapnya.

Sebagai contoh, Nofrizon menyoroti acara Dzikir Gabungan di Masjid Jami' Jamaah Syathariah, Andaleh, Batipuh, Tanah Datar pada Sabtu (27/07/2024). Dalam acara tersebut, gubernur hadir bersama Kepala Dinas Pariwisata,

Kepala BPIKAD, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Adpim, Kepala Biro Kesra, dan Kabid Kewaspadaan Kesbangpol Sumbar. "Saya bertanya-tanya tentang relevansi kehadiran semua kepala OPD dalam acara tersebut," tambah Nofrizon.

Sebelumnya dalam kegiatan itu, Gubernur Mahyeldi Ansharullah mengajak umat Muslim untuk terus menjaga ibadah dzikir sebagai bentuk pendekatan kepada Allah. Dalam sambutannya pada Dzikir Gabungan, Mahyeldi menyatakan bahwa dzikir membantu umat merasakan kedekatan dengan Allah dan mendapatkan bimbingan untuk berbuat baik. (fat)





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SELASA, 30 JULI 2024	

Komisi A DPRD Toba Adopsi Pola Penyusunan KUPA-PPAS Sumbar 2024



SEKRETARIS DPRD Sumbar, Rafli, foto bersama dengan Komisi A DPRD Kabupaten Toba saat kunjungan kerja ke DPRD Sumbar, Senin (29/7).

PADANG, KP - Komisi A DPRD Kabupaten Toba, Sumatera Utara (Sumut), mengunjungi DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Senin (29/7) untuk mempelajari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun 2024. Kedatangan delegasi dari Kabupaten Toba disambut oleh Sekretaris DPRD Sumbar, Rafli.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Toba, Fransendrik Tambunan, menjelaskan bahwa DPRD Sumbar baru-baru ini telah menyepakati KUPA-PPAS 2024 dengan Pemerintah Provinsi Sumbar. Dalam upaya untuk menyusun KUPA-PPAS yang efektif, DPRD Toba ingin mempelajari pola pembahasan yang diterapkan oleh DPRD Sumbar.

"Terima kasih kepada Sekretaris DPRD Sumbar atas penjelasan tentang penyusunan KUPA-PPAS 2024. Kami akan mengadopsi hal-hal yang baik untuk mengoptimalkan penyusunan anggaran di daerah kami," ujar Fransendrik Tambunan.

Dia menambahkan bahwa dalam KUPA-PPAS 2024, fokus prioritas anggaran Kabupaten Toba adalah pengembangan sektor pariwisata

dan pertanian untuk mendorong perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan anggaran harus dilakukan dengan detail untuk memenuhi kebutuhan daerah.

Sekretaris DPRD Sumbar, Rafli, mengungkapkan bahwa penyusunan APBD tahun 2024 menghadapi tantangan signifikan. Daerah memerlukan belanja besar untuk mendanai berbagai program, namun dihadapkan pada keterbatasan fiskal.

Dalam penyusunan RKUA-PPAS tahun 2025, pemerintah daerah memperhatikan kondisi ekonomi yang berlaku di tingkat daerah, regional, nasional, dan global. Diperkirakan, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat akan berada dalam kisaran 4,4 hingga 5,4 persen.

Rafli juga menambahkan bahwa total perubahan PPAS tahun 2024 mencapai Rp7,058 triliun, dengan pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp6,87 triliun dan belanja daerah sebesar Rp7,03 triliun. Pembiayaan penerimaan diproyeksikan sebesar Rp180,44 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar. (fal)





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SENIN, 29 JULI 2024	6

DPRD dan Pemprov Sumbar Sepakati KUPA PPAS 2024 dan KUA PPAS 2025

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA PPAS) 2024 serta KUA PPAS 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD pada Sabtu (27/7). Kesepakatan ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD tahun 2024 dan RAPBD tahun 2025.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Irsyad Syafat, yang memimpin rapat tersebut, menegaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, tren penerimaan daerah cenderung menurun, terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Penurunan penerimaan daerah ini berdampak pada pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD," ujarnya. Kondisi ini, menurut Irsyad, berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terus meningkat.

Pada tahun 2025, Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang mengacu pada UU nomor 1 tahun 2022 akan mulai diberlakukan. Peraturan baru ini mengubah penarikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta menurunkan tarif PKB dari 1,60 persen menjadi 1,05 persen dari nilai jual objek pajak.

"Perubahan ini tentu akan berdampak besar pada penurunan pendapatan, sehingga diperlukan inovasi untuk mengantisipasi kontraksi yang signifikan terhadap penerimaan daerah," kata Irsyad.

Irsyad juga mengingatkan bahwa KUA PPAS dan APBD 2025 merupakan kebijakan anggaran masa transisi kepemimpinan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Oleh karena itu, arah kebijakan, program, dan kegiatan harus lebih fleksibel dalam mengakomodir perubahan yang terjadi pada masa transisi tersebut.

Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam rapat paripurna itu menekankan bahwa APBD tahun 2024 dihadapkan pada kondisi yang tidak mudah. "Daerah membutuhkan belanja cukup besar untuk mendanai pelaksanaan program, namun juga dihadapkan pada keterbatasan fiskal," ungkapnya. Dalam penyusunan RKUA PPAS 2025,

pemerintah daerah mencermati kondisi perekonomian di tingkat daerah, regional, nasional, dan global. Pertumbuhan ekonomi Sumbar diperkirakan berada pada 4,4 hingga 5,4 persen.

Mahyeldi menyebutkan, total perubahan PPAS 2024 adalah sebesar Rp7,058 triliun dengan target pendapatan daerah Rp6,87 triliun dan belanja daerah Rp7,03 triliun. Pembiayaan penerimaan adalah sebesar Rp180,44 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar.

Untuk tahun 2025, PPAS diperkirakan sebesar Rp5,759 triliun dengan pendapatan daerah Rp5,658 triliun dan belanja daerah Rp5,727 triliun. Target penerimaan pembiayaan adalah Rp100,81 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp31 miliar.

"Setelah kesepakatan KUPA PPAS 2024 dan KUA PPAS 2025 ini, pemerintah daerah segera mengajukan Rancangan Perubahan APBD 2024 dan RAPBD tahun 2025 kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama," tutup Mahyeldi. (*)



KLIPING BERITA



UR Sumbang, Mahyeldi foto bersama dengan pimpinan DPRD Sumbang dan Sekwan DPRD Sumbang.



WAKIL Ketua DPRD Sumbang, Isyad Syafar didampingi Wakil Ketua Suwirpen Sulib dan dihadiri Cu-
kungan Sumbang, Mahyeldi foto bersama dengan pimpinan DPRD Sumbang dan Sekwan DPRD Sumbang.

d/

19



KORAN

HARI/TANGGAL

HALAMAN

KORAN PADANG, SENIN, 29 JULI 2024

2

Legislator Desak Aparat Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual

PADANG, KP - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Irsyad Syafar mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku kekerasan seksual yang semakin marak terjadi belakangan ini.

Menurut Irsyad, aparat harus segera melakukan deteksi dini untuk mencegah terjadinya korban-korban baru.

"Dengan apa yang terjadi sekarang, kita semua merasa malu. Seluruh pihak terkait, mulai dari orang tua, ninik mamak, dan lainnya, harus melindungi anak-anak dari potensi kekerasan seksual," ujar Irsyad saat diwawancarai di Padang, Sabtu (27/7).

Ia juga menekankan pentingnya peraturan ketat di lembaga pendidikan terkait interaksi antara murid dan guru. "Meskipun yang mengajar adalah bapak-bapak, tidak boleh sembarangan bersentuhan dengan murid," tambahnya.

Irsyad, yang juga politisi PKS, menyoroti ketiadaan kepastian hukum untuk menjerat pelaku Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT) yang berhubungan suka sama suka. Ia menyebut bahwa Sumbar pernah berada pada posisi tertinggi dalam kasus LGBT.

"Pelaku LGBT kini telah menggunakan aplikasi untuk mengetahui siapa yang aktif di sekitar. Perindakan tegas dan regulasi yang mendukung sangat diperlukan," tegasnya.

Di tempat yang sama Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Daswanto, menyatakan bahwa semua korban kekerasan seksual harus mendapatkan pendampingan untuk pemulihan fisik dan psikologis.

Ia meminta dinas terkait untuk terus melakukan sosialisasi intensif guna meminimalisir potensi kekerasan seksual terhadap anak. "Trend kasus kekerasan seksual terus meningkat, bahkan ada yang belum terungkap. Ini adalah kondisi serius yang memerlukan perhatian dari semua pihak," ujarnya.

Daswanto mengungkapkan bahwa Komisi V dan DPRD Sumbar berkomitmen untuk melanjutkan kasus-kasus yang muncul di masyarakat. Mereka terus berkoordinasi dengan seluruh pihak, termasuk penegak hukum.

Sejumlah kasus kekerasan seksual baru-baru ini menggemparkan beberapa daerah di Sumbar. Korbananya beragam, mulai dari anak-anak, orang tua, hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Mirisnya, beberapa kasus melibatkan pelaku yang memiliki hubungan keluarga dengan korban. (fal)



WAKIL Ketua DPRD Provinsi Sumbar Irsyad Syafar saat diwawancarai

id/

20



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KHAZ	SENIN, 29 JULI 2024 SENIN, 23 MUHARRAM 1445 H	8

DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD SUMBAR

KUA-PPAS Tahun 2025 dan Perubahan KUA- PPAS Tahun 2024 Dise- pakati

Padang, Khazanah — Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir, trend penerimaan daerah cenderung mengalami penurunan terutama dari sektor PAD yang menjadi indikator utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Kondisi ini berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan ekonomi dan HDBR Perkapita masyarakat yang terus meningkat," ujar Irsyad Syafar saat memimpin Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 bersama Wakil Ketua Sawirpen Sub didampingi Gubernur Malyeeldi di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Sabtu (27/7).

Dikatakan, menurutnya penerimaan daerah, tentu akan berdampak terhadap pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2025, lanjutnya, kita sudah sepenuhnya melaksanakan Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1: Tahun 2022, dimana pemungutan PKB dan BBNKB hanya dipungut yang menjadi hak dari Pemerintah Provinsi saja dan disamping itu terdapat penurunan tarif PKB dari 1,60 % dari nilai jual objek pajak menjadi 1,05 %. Ini tentu berdampak yang sangat besar terhadap penurunan pendapatan dari sektor PKB dan BBNKB yang selama ini menjadi andalan daerah.

"Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengantisipasi kontraksi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah, harus ada inovasi dan upaya yang lebih keras dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kembali penerimaan daerah, agar proses pembangunan daerah tidak mengalami hambatan," tuturnya.

Proyeksi pendapatan daerah dan rencana alokasi belanja yang difamping dalam KUA-PPAS Tahun 2025 serta Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 masih bersifat tentatif dan perlu di dalam kembali nanti dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda APBD Tahun 2025

dan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.

DPRD, katanya, melihat masih terdapat potensi-potensi yang masih bisa ditingkatkan, baik dari pos PAD maupun pendapatan transfer untuk dapat mengakomodir kebutuhan anggaran yang semakin meningkat.

APBD Tahun 2025 merupakan APBD transisi dari peralihan kepemimpinan daerah masa jabatan Tahun 2021-2025 dengan

hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 dan APBD transisi untuk penyeselarasan dengan RPJMD Kepala Daerah hasil Pilkada Tahun 2024 yang mengacu kepada RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Oleh sebab itu, arah kebijakan, program dan kegiatan harus lebih fleksibel dalam rangka mengakomodir perubahan-perubahan yang akan terjadi pada masa transisi tersebut," ujar

Irsyad.

Dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 91, PP Nomor 12 Tahun 2019, KUA-PPAS Tahun 2025 dan Perubahan KUA-PPAS tahun 2024 yang telah disepakati, menjadi pedoman OPD dalam penyusunan RKA Tahun 2025 dan Perubahan RKA Tahun 2024 dan menjadi pedoman pada dalam penyusunan Ranperda APBD Tahun 2025 dan Ranperda Perubahan APBD tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, nantinya, pihaknya mengingatkan kepada Pemerintah Daerah dan OPD untuk memedomani kebijakan anggaran yang telah disepakati dalam KUA-PPAS Tahun 2025 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 termasuk dalam penetapan target kinerja program dan kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, lanjutnya, dalam rangka konsisten perencanaan dan penganggaran, KUA-PPAS Tahun 2025 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024, akan menjadi acuan dalam penyusunan Ranperda APBD Tahun 2025 dan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.

Kebijakan anggaran, program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS terse-



KLIPING BERITA

but, tidak bisa lagi diganti dalam penyusunan Ranperda APBD Tahun 2025 dan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024," ujar Irsyad mengingatkan.

Sesuai dengan tahapan dan jadwal pembahasan yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan, mulai dari pembahasan pendahuluan oleh Komisi-Komisi bersama OPD mitra kerja dan dilanjutkan dengan pembahasan serta finalisasi oleh Badan Anggaran bersama TAPD.

Mengacu kepada materi muatan KUA-PPAS sebagaimana yang ditetapkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019, maknanya fokus pembahasan, diarahkan

pada asumsi makro ekonomi daerah, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang akan ditampung dan disepakati dalam KUA-PPAS Tahun 2025 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 yang sejalan dengan program prioritas RPJMD, potensi dan kemampuan keuangan daerah serta penyelesaiannya dengan target base line yang ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Dalam rapat paripurna ini, seluruh anggota DPRD yang hadir telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi keputusan dewan. (adv)



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syatar menandatangani nota persetujuan bersama



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Subi saat menandatangani nota persetujuan bersama



GUBERNUR Sumbar Mahyeldi sedang menandatangani nota persetujuan bersama



SEKRETARIS Badan Anggaran Rafis saat menyampaikan laporan Terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024



PIMPINAN rapat paripurna foto bersama gubernur usai penandatanganan nota persetujuan bersama

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KHAZ	SENIN, 29 JULI 2024 SENIN, 23 MUHARRAM 1445 H	10

WAKIL KETUA DPRD SUMBAR IRSYAD SYAFAR: Trend Penerimaan Daerah Cenderung Menu- run Terutama dari Sektor PAD

Padang, Khazanah - DPRD Sumbar menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dipimpin Wakil Ketua Irsyad Syafar dan Suwirpen Suib di ruang sidang utama dewan, Sabtu (27/7).

Didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi, Irsyad Syafar mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir, trend penerimaan daerah cenderung mengalami penurunan terutama dari sektor PAD yang menjadi indikator utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Kondisi ini berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB. Perkapita masyarakat yang terus meningkat," ujar Irsyad Syafar.

Dikatakan, menurunnya penerimaan daerah, tentu akan berdampak terhadap pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2025, lanjutnya, kita sudah sepenuhnya melaksanakan Perda

Pajak dan Restribasi Daerah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dimana pemungutan PKB dan BBNKB hanya dipungut yang menjadi hak dari Pemerintah

Provinsi saja dan disamping itu terdapat penurunan tarif PKB dari 1.60% dari nilai jual objek pajak menjadi 1.05%.

"Ini tentu berdampak yang sangat besar terhadap

hadap penurunan pendapatan dari sektor PKB dan BBNKB yang selama ini menjadi andalan daerah," tuturnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, katanya, untuk

mengantisipasi kontraksi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah, harus ada inovasi dan upaya yang lebih keras dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan

kembali penerimaan daerah, agar proses pembangunan daerah tidak mengalami hambatan.

Proyeksi pendapatan daerah dan rencana alokasi belanja yang ditampung dalam KUA-PPAS Tahun 2025 serta Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 masih bersifat tentatif dan perlu di dalam kembali nanti dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda APBD Tahun 2025 dan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.

DPRD, katanya, melihat masih terdapat potensi-potensi yang masih bisa ditingkatkan, baik dari pos PAD maupun pendapatan transfer untuk dapat mengakomodir kebutuhan anggaran yang semakin meningkat.

Apalagi, katanya, APBD Tahun 2025 merupakan APBD transisi dari peralihan kepemimpinan daerah masa jabatan Tahun 2021-2025 dengan hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 dan APBD transisi untuk penyesuaian dengan RPJMD Kepala Daerah hasil Pilkada Tahun 2024 yang mengacu kepada RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

"Oleh sebab itu, arah kebijakan, program dan

kegiatan harus lebih fleksibel dalam rangka mengakomodir perubahan-perubahan yang akan terjadi pada masa transisi tersebut," ujar Irsyad.

Untuk itu, pihaknya mengingatkan kepada Pemerintah Daerah dan OPD untuk mempedomani kebijakan anggaran yang telah disepakati dalam KUA-PPAS Tahun 2025 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 termasuk dalam penetapan target kinerja program dan kegiatan.

"Kebijakan anggaran, program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS tersebut, tidak bisa lagi diganti dalam penyusunan Ranperda APBD Tahun 2025 dan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024," ujar Irsyad mengingatkan.

Sesuai dengan tahapan dan jadwal pembahasan yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan, mulai dari pembahasan pendahuluan oleh Komisi-Komisi bersama OPD mitra kerja dan dilanjutkan dengan pembahasan serta finalisasi oleh Badan Anggaran bersama TAPD. (jer)





KLIPING BERITA



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar (tengah) dan Suwirpen Suib (kanan) saat memimpin rapat paripurna didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KHAZI	SENIN, 23 JULI 2024 SENIN, 23 MUHARRAM 1445 H	10

Ketua KI Sumbar Kangkangi UU 14/2008 dan Perki 4/2016?

Padang, Khazanah - Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumbar, Musli Yendra, diduga melanggar UU 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) nomor 4 tahun 2016, karena rangkap jabatan, sementara saat mendaftar calon komisioner KI Sumbar, Musli telah meneken pakta integritas dan menyatakan siap bekerja penuh waktu di KI.

Adanya dugaan tersebut, setelah adanya temuan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawal Integritas Lembaga Publik Jaringan Pemred Sumbar (JPS).

Seperti diungkapkan mantan komisioner KI Sumbar dua periode, Adrian Tuswandi yang juga Ketua JPS ketika dihubungi Minggu malam (28/7), dugaan tersebut juga diperkuat website unespadang.ac.id, dimana pada website tersebut Musli Yendra masih tercatat sebagai dosen tetap aktif di Universitas Eka Sakti (Unesa), Padang.

"Padahal itu dilarang dan telah termaktub di dalam Perki tersebut," tukasnya.

Sementara itu, pada unggahan di Facebook, bertanggal 8 Juni, Musli Yendra, mengupload foto dengan caption "Ujian komprehensif". Pengujian lengkap seorang mahasiswa dalam meraih gelar sarjana. Semoga bermanfaat dan barokah ilmunya, mahasiswa/ikatan. Aamin. #SabtuHariKampus, dengan latar spanduk berlogo, Unesa.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi, pasal 9 huruf F berbunyi "bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi Anggota Komisi Informasi", sementara pada pasal 9 huruf G berbunyi, "bersedia bekerja penuh waktu".

Diperkuat lagi temuan kelompok Kerja (Pokja) Pengawal Integritas Lembaga Publik Jaringan Pemred Sumbar (JPS) di berkas pendaftaran pun ditemukan pernyataan di atas materai 10.000 tentang siap mundur dan kerja penuh waktu.

Kedua hal tersebut diduga telah dilanggar oleh Musli Yendra, yakni tidak melepas pekerjaannya sebagai dosen, dan tidak bekerja penuh waktu, sebab ia mengajar di kampus tersebut sembari juga sebagai komisioner sekaligus Ketua KI Sumbar.

Ia menegaskan, Perki itu hukum positif, sebab telah melewati proses berita negara dan lembar negara, keduanya mempertegas azas fiksi atas UU yaitu sifat hukum semua orang tahu.

"Selain itu, Musli Yendra berbuat fatal karena mengelabui DPRD dan Gubernur Sumbar, dalam proses administrasi seleksi KI Sumbar periode ketiga. Dua lembaga ini (DPRD

dan Gubernur Sumbar-red), adalah lembaga paling terhormat dan mulia di Sumbar ini. Saya terkejut atas temuan Pokja ini," sebut Toaik, sapaan Adrian Tuswandi.

Apalagi, tukasnya, KI itu lembaga pengawal keterbukaan informasi publik, dia dibentuk oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), karena dibentuk UU tentunya lembaga ini punya marwah hebat yang harus diuji oleh komisioner yang berintegritas mestinya dia akan memutuskan sebuah sengketa informasi publik.

"Bagaimana pula kalau orang melanggar Perki lembaganya sendiri memutuskan sengketa yang akan berujung pada putusan adjudikasi non litigasi, jika putusan itu diajukan. Keberatan ke PTUN dia menjadi putusan adjudikasi," tambah dia.

Toaik justru menaruh hormat kepada Ahmad Lahmi saat mau ditetapkan DPRD disurati untuk memilih jabatan Wakil Rektor atau Komisioner KI.

"Ahmad Lahmi memilih jadi Wakil Rektor, dia gentle dan tahu soal marwah profesi. Karena hidup dan karir adalah pilihan," tutup Toaik.

Sementara Penasehat Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Sumbar, Novrianto berharap Musli Yendra memberi penjelasan ke publik untuk menjaga Marwah lembaga ini. (jer/)





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SENIN, 29 JULI 2024 23 Muharram 1445 H	9.

DPRD dan Pemprov Sumbang Sepakati KUPA PPAS 2024

PADANG, HALUAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbang menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun 2024 dan KUPA PPAS tahun 2025 dalam rapat paripurna, Sabtu (27/7).

KUPA PPAS dan KUPA PPAS tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD tahun 2024 dan APBD tahun 2025.

Wakil Ketua DPRD Sumbang, Irsyad Syafar saat membuka jalannya rapat tersebut menegaskan, dalam pembahasan yang telah dilakukan terhadap RKUPA PPAS dan RKUPA PPAS, dalam beberapa tahun terakhir tren penerimaan daerah cenderung menurun terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi tersebut menurutnya berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRD yang terus meningkat.

"Penurunan penerimaan daerah ini tentu berdampak terhadap pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan di dalam RPJMD," ujar Irsyad.

Selanjutnya, pada tahun 2025 menurut Irsyad, mulai diberlakukan Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang mengacu kepada UU nomor 1 tahun 2022. Dalam ketentuan baru tersebut ada perubahan pada penarikan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) serta penurunan tarif PKB dari 1,60

persen menjadi 1,05 persen dari nilai jual objek pajak.

"Ini tentu juga akan berdampak sangat besar terhadap penurunan pendapatan, harus ada inovasi untuk mengantisipasi kontraksi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah tersebut," ucapnya.

Pada kesempatan Irsyad juga mengingatkan bahwa KUPA PPAS dan APBD tahun 2025 merupakan kebijakan anggaran masa transisi kepemimpinan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Oleh sebab itu arah kebijakan, program dan kegiatan harus lebih fleksibel dalam rangka mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada masa transisi tersebut.

Gubernur Sumbang Mahyeldi mengatakan, APBD tahun 2024 dihadapkan kepada kondisi yang tidak mudah. Daerah membutuhkan belanja cukup besar untuk mendanai pelaksanaan program namun di sisi lain juga dihadapkan kepada keterbatasan fiskal.

Sementara dalam penyusunan RKUPA PPAS tahun

2025, lanjut Mahyeldi, pemerintah daerah mencermati kondisi perekonomian baik di tingkat daerah, regional, nasional maupun global. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat diprakirakan berada pada 4,4 sampai dengan 5,4 persen.

Dia menyebutkan, total pe-

rubahan PPAS tahun 2024 adalah sebesar Rp7,058 triliun dimana pendapatan daerah ditargetkan Rp6,87 triliun dan belanja daerah Rp7,03 triliun. Pembiayaan penerimaan adalah sebesar Rp180,44 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar.

Sementara tahun 2025 PPAS diperkirakan sebesar Rp6,759 triliun yang dijabarkan pada pendapatan daerah sebesar Rp5,658 miliar dan belanja daerah ditargetkan sebesar Rp5,727 miliar. Target penemuan pembiayaan sebesar Rp100,81 miliar dan peningkatan pembiayaan sebesar Rp31 miliar.

"Setelah kesepakatan KUPA PPAS 2024 dan KUPA PPAS 2025 ini maka pemerintah daerah segera mengajukan Rancangan perubahan APBD 2024 dan APBD tahun 2025 kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama," tukasnya. (adv)

KLIPING BERITA



AT paripurna DPRD Sumbar dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Rancangan
Rahman KUA-PPAS Tahun 2024



MENYANYIKAN lagu Indonesia Raya saat rapat paripurna



DL Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, Wakil Ketua Suwirpen
Sekretaris DPRD Sumbar, Rafis berfoto bersama dengan
amur Mahyeldi



ANGGOTA DPRD Sumbar saat menghadiri rapat paripurna



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Senin, 29 Juli 2024 (23 Muharram 1446 H)	8

DPRD Sumbar Tetapkan KUA PPAS Tahun 2025

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan kebijakan umum anggaran (KUA) piala penggunaan anggaran sementara (PPAS) Tahun 2025 dalam rapat paripurna, Sabtu (27/7) di gedung dewan setempat.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safer saat memimpin rapat paripurna tersebut memaparkan ada beberapa hal yang menjadi catatan DPRD terkait KUA PPAS tersebut.

Pertama, dalam beberapa tahun terakhir tren penerimaan daerah cenderung mengalami penurunan terutama dari sektor pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi indikator utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Kondisi ini berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita masyarakat yang terus meningkat," katanya.

Menurutnya, penerimaan daerah, lanjutnya, tentu akan berdampak terhadap pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Sumbar Tahun 2021-2026.

Irsyad memaparkan, pada tahun 2025, Sumbar sudah sepenuhnya melaksanakan perda pajak dan retribusi daerah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang pemungutan PKB dan HBNKB hanya dipungut yang menjadi hak dari Pemerintah Provinsi saja. Selain itu, terdapat penurunan tarif PKB dari 1,60 persen dari nilai jual objek pajak menjadi 1,05 persen.

"Ini tentu berdampak yang sangat besar terhadap penurunan pendapatan dari sektor PKB dan HBNKB yang selama ini menjadi andalan daerah," ujarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengantisipasi kontraksi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah,

DPRD menilai harus ada inovasi dan upaya yang lebih keras dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kembali penerimaan daerah, agar proses pembangunan daerah tidak mengalami hambatan.

Kemudian, proyeksi pendapatan daerah dan rencana alokasi belanja yang ditampung dalam KUA-PPAS Tahun 2025 masih bersifat tentatif dan perlu di dalam kembali nanti dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda APBD Tahun 2025.

"DPRD melihat masih terdapat potensi-potensi yang masih bisa ditingkatkan, baik dari pos PAD maupun pendapatan transfer untuk dapat mengakomodir kebutuhan anggaran yang semakin meningkat," tuturnya.

Irsyad mengatakan, APBD Tahun 2025 merupakan APBD transit dari peralihan kepemimpinan daerah masa jabatan Tahun 2021-2025 dengan hasil Pilkada Serentak Tahun 2024. Selain juga menjadi APBD transit untuk penyesuaian dengan RPJMD Kota dan Daerah hasil

Pilkada Tahun 2024 yang mengacu kepada RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

"Oleh sebab itu, arah kebijakan, program dan kegiatan harus lebih fleksibel dalam rangka mengakomodir perubahan-perubahan yang akan terjadi pada masa transit tersebut," ujarnya.

Dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah memaparkan bahwa untuk Tahun 2025 pertumbuhan ekonomi sesuai dengan rancangan awal RKP diperkirakan berada pada angka 4,4 sampai dengan 5,4 persen.

Hal ini didorong oleh tren positif harga CPO dan karet dunia yang akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan perkebunan serta perbelanjaan perniagaan kepala daerah di Tahun 2024.

Kondisi lain yang berpengaruh yakni pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru yang diharapkan mendorong investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumbar.

Ia mengatakan agar terwujudnya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prioritas tentu harus didukung pendanaannya melalui APBD provinsi, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Berdasarkan pembahasan rancangan KUA PPAS yang telah dilaksanakan dan disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD, anggaran KUA PPAS berjumlah Rp5,7 triliun dengan target pendapatan daerah Rp5,6 triliun dan penerimaan pembiayaan Rp100,81 miliar.

Adapun beberapa pos anggaran yakni pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan Rp2,5 triliun, pendapatan transfer Rp3,14 triliun, lain-lain pendapatan yang sah Rp17,5 miliar.

Kemudian, belanja daerah Rp5,7 triliun, diantaranya belanja operasi Rp4,10 triliun, belanja modal Rp569 miliar, belanja tidak terduga Rp20 miliar, belanja transfer Rp999,7 miliar.

Kemudian penerimaan pembiayaan diperkirakan Rp100,817 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp31 miliar.



KLIPING BERITA

HALAMAN





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG-1	Sabtu, 27 Juli 2024 (21 Muharram 1446 H)	5

FUNGSI PENGANGGARAN DPRD SUMBAR

Pembahasan KUPA PPAS Tahun 2024 Dioptimalkan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengoptimalkan pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) dalam perubahan penggunaan anggaran sementara (PPAS) Tahun 2024.

Salah satu tahapan yakni pembahasan di tingkat Komisi-Komisi. Agenda ini dilaksanakan selama beberapa hari sesuai jadwal yang ditetapkan badan musyawarah DPRD, yakni 16 hingga 18 Juli lalu.

Masing-masing komisi melaksanakan rapat kerja pembahasan KUPA PPAS Tahun 2024 bersama mitra kerja masing-masing sesuai dengan sektor yang dibidangi, yakni Komisi I bidang pemerintahan, komisi II bidang ekonomi, Komisi III bidang keuangan, Komisi IV bidang pembangunan dan Komisi V bidang kesejahteraan masyarakat.

KUPA PPAS tersebut direncanakan DPRD akan disepakati dan ditetapkan pada rapat paripurna hari ini, Sabtu (27/7) di gedung setempat.

Pada kesempatan sebelumnya, Ketua DPRD Sumbar, Supardi, mengatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, kedalam rancangan KUPA PPAS yang menjadi landasan pada Perubahan APBD. Rancangan tersebut disampaikan kepada DPRD, paling lambat Minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Gubernur Sumbar dengan surat Nomor: 901.1.1/668 a/ APBD/BPEAD-2024 tanggal 15 Juli 2024, telah menyampaikan kepada DPRD, Rancangan KU-

PA PPAS Tahun 2024, untuk dijadwalkan pembahasannya dan disepakati bersama dengan DPRD.

Ia mengatakan, melihat pada perkembangan makro ekonomi daerah, SILPA APBD Tahun 2023 serta realisasi anggaran pada semester pertama Tahun 2024, terlihat bahwa kondisi keuangan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024, tidaklah mengembirakan dan sulit untuk meningkatkan program, kegiatan dan alokasi anggaran dalam rangka percepatan pencapaian target kinerja RPJMD, apabila kita tidak mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah.

Hal ini disebabkan, cukup banyaknya beban anggaran yang harus diakomodir dalam Perubahan APBD Tahun 2024, diantaranya pembayaran sisa bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota, pembayaran kegiatan tahun 2023 yang penyelesaiannya baru dapat dilakukan pada Tahun 2024, serta tidak mencukupinya SILPA Tahun 2023 untuk menutup defisit awal pada APBD Tahun 2024.

Disamping itu, pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang, kita juga akan melaksanakan Pilkada Serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini, tentu akan

berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Namun demikian, kondisi tersebut tetap harus kita hadapi dengan sikap yang optimis dengan melakukan inovasi dan semakin meningkatkan kinerja dalam pengelolaan APBD, baik melalui peningkatan pendapatan daerah, penggunaan belanja yang lebih efektif, efisien serta tepat sasaran.

Supardi menambahkan, untuk KUPA-PPAS Tahun 2024 tersebut, salah satunya DPRD menyoroti realisasi anggaran semester pertama tahun 2024.

Menurutnya, realisasi pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah (PAD) baru sebesar 38,94 persen dan realisasi belanja daerah baru sebesar 30,31 persen. SILPA tahun 2023 yang direncanakan untuk menutup defisit APBD 2024 juga tidak tercapai.

Ia menegaskan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengeseran anggaran, dan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan serta sebab lainnya.

"Memperhatikan laporan realisasi anggaran serta keadaan tersebut maka perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan Kembali dengan perkembangan yang terjadi," katanya.

Ia menambahkan, melihat perkembangan makro ekonomi daerah, SILPA APBD tahun 2023 serta realisasi anggaran semester pertama tahun 2024 terlihat bahwa kondisi keuangan daerah pada perubahan APBD tahun 2024 tidak mengembirakan. Kondisi itu menyebabkan sulit untuk meningkatkan program, kegiatan dan alokasi anggaran dalam rangka percepatan pencapaian target kinerja RPJMD, jika tidak mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah.

"Hal ini disebabkan cukup banyak beban yang harus di-

KLIPING BERITA

komoditi dalam perubahan APBD 2024, seperti pembayaran sisa bagi hasil pajak ke kabupaten/kota, pembayaran kegiatan tahun 2023 yang penyelesaiannya baru dapat dilakukan di tahun 2024 serta tidak mencukupinya SILPA untuk menutup deficit awal APBD 2024," ujar Supardi.

Supardi juga mengingatkan, pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) dan Pilkada di kabupaten/kota yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang juga akan berdampak kepada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Namun demikian, kondisi tersebut tetap harus kita hadapi dengan sikap optimis, melakukan inovasi dan meningkatkan kinerja pengelolaan APBD, baik peningkatan pendapatan daerah, penggunaan belanja yang lebih efektif, efisien serta tepat sasaran," tegasnya.

Supardi memaparkan, hingga akhirnya masa jabatan anggota dewan periode 2019-2024 berakhir, ada sejumlah agenda strategis sesuai dengan kewenangan dan tugas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang harus diselesaikan.

Tidak hanya menyelesaikan Ranperda yang tersisa, namun juga memuntaskan penyusunan komposisi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2025 dan KUPA-PPAS tahun 2024.

"Pekerjaan-Pekerjaan itu hendaknya dituntaskan dengan semangat pengabdian, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas," kata Supardi.

Dia mengatakan ketika masa peralihan anggota DPRD Sumbar 2019-2024 ke 2024-2029 diadakan, maka akan melalui sejumlah proses seperti pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga menentukan pimpinan definitif. Jadi agenda strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat dan daerah harus diselesaikan.

Ditajutkannya, dalam penyusunan KUA-PPAS sebagai rujukan APBD juga memiliki mekanisme yang harus menjadi pertimbangan, salah satunya yang berhubungan dengan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Saat rapat paripurna sebelumnya, Wakil Gubernur Sumbar Andy Jolnaldy menyampaikan, pengajuan perubahan KUA-PPAS tahun 2024 didasari pada beberapa kondisi dan perkembangan yang terjadi serta perubahan asumsi perekonomian.

Menyikapi perkembangan tersebut, Pemerintah Provinsi telah Menyusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi dasar bagi dilakukannya perubahan terhadap KUA-PPAS.

Andy menjelaskan, disamping perubahan asumsi perekonomian, perubahan perencanaan dan penganggaran juga didasari oleh keadaan aktual yang telah terjadi sejak awal tahun sampai dengan akhir semester pertama tahun 2024. Keadaan aktual tersebut antara lain peristiwa bencana alam, sampai dengan terdapatnya hal yang bersifat pengaturan dari pemerintah pusat, dinamika administrasi dan hasil audit BPK atas LKPD tahun 2023.

"Perlu menyesuaikan kebijakan umum anggaran menyikapi hal-hal yang telah terjadi dalam semester pertama tahun 2024," kata Andy.

Kemudian, perubahan juga disebabkan oleh kekurangan Sisa Lebih Perhitungan Angga-

ran (SILPA) tahun 2023 yang dijadikan penertmaan pembiayaan tahun anggaran 2024. Dia menyebutkan, dari hasil pemeriksaan BPK SILPA tahun 2023 adalah sebesar Rp180,4 miliar, sedangkan dalam APBD tahun 2024 diharapkan sebesar Rp251,4 miliar sehingga terdapat kekurangan penerimaan pembiayaan sebanyak Rp70,9 miliar lebih.

Selanjutnya, terjadinya bencana alam juga menjadi penyebab dilakukannya perubahan KUA-PPAS. Beberapa bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2024 antara lain erupsi Gunung Merapi, longsor dan rusaknya tempat pembuangan sampah di Payakumbuh, banjir bandang di beberapa kabupaten dan kota serta banjir lahar dingin Gunung Merapi.

"Berikutnya juga karena adanya pengaturan dari pemerintah pusat yang memerlukan pergeseran dan perubahan anggaran, serta adanya pergeseran dan perubahan anggaran OPD dan kewajiban untuk menganggarkan Kembali DAK dan sebagainya, ini beberapa alasan dilakukannya perubahan KUA-PPAS tahun 2024," kata Andy.

Dalam rancangan perubahan KUA-PPAS tahun 2024, pendapatan daerah direncanakan bertambah minimal sebanyak Rp2,25 miliar lebih menjadi Rp6,58 triliun. Kemudian belanja daerah juga bertambah dari Rp6,81 triliun pada APBD awal menjadi sebesar Rp7,03 triliun. (*)



KLIPING BERITA





KLIPING BERITA

K

HALAMAN





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	SENIN, 29 JULI 2024	8

DPRD Sumbar Setujui Rancangan KUA-PPAS 2025 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyetujui konsep Keputusan DPRD terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD. Nota Persetujuan Bersama tersebut ditandatangani Gubernur dan Pimpinan DPRD.

Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 di ruang sidang utama gedung DPRD Sumbar, Sabtu, (27/7).

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwipen Suib dan Sekretaris DPRD Sumbar Rafli. Rapat paripurna dihadiri segenap anggota DPRD Sumbar, Gubernur Sumbar, Kepala OPD, unsur Forkopimda dan undangan lainnya.

Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor: Nomor: 13/SB/Tahun 2024 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan KUA Tahun 2025. Nomor: 14/SB/Tahun 2025 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan PPAS Tahun 2025. Nomor: 15/SB/Tahun 2025 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Perubahan KUA Tahun 2024. Nomor: 16 /

Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Perubahan PPAS Tahun 2024.

Dalam pidatonya Irsyad Syafar menyampaikan, dalam rangka penyusunan APBD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2024, pada Rapat Paripurna tanggal 10 Juli dan 15 Juli 2024 lalu, Gubernur Sumbar menyampaikan secara resmi Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024, untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama menjadi KUA-PPAS Tahun 2025 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024.

"KUA-PPAS Tahun 2025 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan Ranperda APBD Tahun 2025 dan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024. Kebijakan anggaran, program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS tersebut, tidak bisa lagi diganti dalam penyusunan Ranperda APBD Tahun 2025 dan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024," ucapnya.

Sesuai dengan tahapan dan jadwal pembahasan yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, lanjutnya, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan, mulai dari pembahasan pendahuluan oleh Komisi-Komisi bersama OPD mitra kerja dan dilanjutkan dengan pembahasan serta finalisasi oleh Badan Anggaran bersama TAPD.

Fokus pembahasan, diarahkan pada asumsi makro ekonomi daerah, kebijakan pendapatan,

daerah yang akan ditampung dan disepakati dalam KUA-PPAS Tahun 2025 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 yang sejalan dengan program prioritas RPJMD, potensi dan kemampuan keuangan daerah serta penyelarasannya dengan target baseline yang ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara umum antara lain; dalam beberapa tahun terakhir, trend penerimaan daerah cenderung mengalami penurunan terutama dari sektor PAD yang menjadi indikator utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB Perkapita masyarakat yang terus meningkat.

Menurunnya penerimaan daerah, tentu akan berdampak terhadap pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2025, kita sudah sepenuhnya melaksanakan Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dimana pemungutan PKB dan BBNKB hanya dipungut yang menjadi hak dari Pemerintah Provinsi saja dan disamping itu terdapat penurunan tarif PKB dari 1,60 % dari nilai jual objek pajak menjadi 1,05 %.

Ini tentu berdampak yang sangat besar terhadap

hadap penurunan pendapatan dari sektor PKB dan BBNKB yang selama ini menjadi andalan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengantisipasi kontrak yang cukup besar terhadap penerimaan daerah, harus ada inovasi dan upaya yang lebih keras dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kembali penerimaan daerah, agar proses pembangunan daerah tidak mengalami hambatan.

Proyeksi pendapatan daerah dan rencana alokasi belanja yang ditampung dalam KUA-PPAS Tahun 2025 serta Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 masih bersifat tentatif dan perlu didalami kembali dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda APBD Tahun 2025 dan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.

DPRD melihat masih terdapat potensi-potensi yang masih bisa ditingkatkan, baik dari pos PAD maupun pendapatan transfer untuk dapat mengkomodifikasi kebutuhan anggaran yang semakin meningkat.

APBD Tahun 2025 merupakan APBD transisi dari peralihan kepemimpinan daerah masa jabatan Tahun 2021-2025 dengan hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 dan APBD transisi untuk penyelarasan dengan RPJMD Kepala Daerah hasil Pilkada Tahun 2024 yang mengacu kepada RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045. Oleh sebab itu, arah kebijakan, program dan kegiatan harus lebih fleksibel dalam rangka mengakomodasi perubahan



KLIPING BERITA

an-perubahan yang akan terjadi pada masa transisi tersebut.

Sementara itu, Gubernur Sumbang dalam pidato pendapat akhirnya, menyampaikan

Alhamdulillah, karena kesepakatan bersama terhadap KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 serta KUPA-PPAS tahun anggaran 2024 telah ditetapkan.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat serta TAPD yang didukung seluruh OPD, yang mencurahkan perhatian dan pemikiran dalam proses pembahasan KUA-PPAS 2025 serta KUPA-PPAS 2024 yang telah kita lalui tersebut, ungkap Gubernur Sumbang.

Dari berbagai tahapan pembahasan yang telah dilalui, lanjutnya, postur perubahan PPAS Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2024 yang baru saja kita sepakati bersama, secara umum dapat digambarkan bahwa total perubahan PPAS tahun 2024 yang disepakati adalah sebesar Rp.7.057.899.193.719,19.

"Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp. 6,87 triliun lebih, terdiri dari: 1. Pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp.3,39 triliun lebih; 2. Pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp.3,45 triliun lebih; dan 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp.29,87 miliar lebih," jelas Mahyeldi.

Belanja daerah dialokasikan sebesar Rp.7,03 triliun lebih, yang terdiri dari: 1. Belanja operasi sebesar Rp.4,78 triliun lebih; 2. Belanja modal sebesar Rp.807 miliar lebih; 3. Belanja tidak terduga sebesar Rp.25,38 miliar lebih; dan 4. Belanja transfer sebesar Rp.1,41 triliun lebih. Kemudian, pada bagian pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah sebesar Rp.180,44 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.20 miliar.

Dalam penyusunan KUA-PPAS tahun 2025, pemerintah daerah mencermati kondisi perekonomian, baik di tingkat daerah, regional, nasional, dan global. Untuk tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sesuai dengan rancangan awal RKP 2025 diperkirakan berada pada angka 4,4 sampai dengan 5,4 persen. Hal ini didorong oleh tren positif harga CPO dan karet dunia yang akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan perkebunan serta perhelatan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di tahun 2024. Kondisi lain yang berpengaruh adalah pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru yang diharapkan mendorong investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumatera Barat.

"Guna terwujudnya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prioritas, tentu harus didukung pendanaannya melalui APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan," lanjutnya.

Berdasarkan pembahasan Rancangan KUA-PPAS 2025 yang telah dilaksanakan dan

Disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD, maka KUA-PPAS tahun anggaran 2025 adalah sebesar: Rp5.758.882.128.033,- yang dijabarkan pada target pendapatan daerah sebesar Rp5.658. triliun lebih dan target penerimaan pembiayaan sebesar Rp100,81. miliar lebih.

Belanja daerah, sesuai kesepakatan, direncanakan sebesar Rp 5.727 triliun lebih, dengan rincian sebagai berikut: 1. Belanja operasi direncanakan sebesar Rp.4.140 triliun, yang terdiri dari: 2. Belanja modal direncanakan dialokasikan sebesar Rp.569.833 miliar lebih; 3. Belanja tidak terduga de-

ngan pengalokasian sebesar Rp.20,00 miliar; 4. Belanja transfer dialokasikan sebesar Rp. 907,118 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut: A. Belanja bagi hasil pajak dengan pengalokasian sebesar Rp.952,118 triliun lebih; B. Belanja bantuan keuangan dengan pengalokasian sebesar Rp.45,00 miliar.

Sementara untuk pembiayaan, dalam kesepakatan KUA-PPAS tahun 2025, penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2023 dengan diperkirakan sebesar Rp.100,817 miliar. Sedangkan pada bagian pengeluaran pembiayaan untuk tahun anggaran 2025 disepakati untuk penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp.31,00 miliar berupa penyertaan modal pada Bank Nagari.

"Kami menyadari bahwa masih banyak kebutuhan pembangunan yang belum dapat kita alokasikan pendanaannya, dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, kita mengalokasikan anggaran berdasarkan skala prioritas pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sampai kepada urusan pemerintahan pilihan," kata Mahyeldi.

Terakhir, Gubernur menyampaikan, setelah disepakatinya KUA-PPAS 2025 serta KUPA-PPAS 2024, maka sesuai ketentuan peraturan pemerintahan nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah segera menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2025 serta perubahan APBD tahun anggaran 2024 untuk kita bahas dan sepakati bersama. (**)

N





KLIPING BERITA



MEMIMPIN RAPAT—Irsyad Syafar memimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua DPRD Suwirpen Sub. Hadir Gubernur Sumbar Mahyeldi.



MENANDATANGANI—Gubernur Sumbar Mahyeldi menandatangani Keputusan DPRD dan konsep Nota Kesepakatan Bersama.



MENANDATANGANI—Pimpinan Rapat Paripurna Irsyad Syafar menandatangani Keputusan DPRD dan konsep Nota Kesepakatan Bersama.



MEMBACAKAN—Sekretaris DPRD Sumbar Rafli membacakan konsep Keputusan DPRD dan konsep Nota Kesepakatan Bersama.



MEMIMPIN RAPAT—Irsyad Syafar memimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua DPRD Suwirpen Sub. Hadir Gubernur Sumbar Mahyeldi.



KLIPING BERITA



MENANDATANGANI—Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpet Subi menandatangani Keputusan DPRD dan konsep Nota Kesepakatan Bersama.



INDONESIA RAYA—Pimpinan Rapat paripurna bersama Gubernur Sumbar dan Wakil Ketua DPRD berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya.



POTO BERSAMA—Pimpinan Rapat Paripurna, Gubernur Sumbar dan wakil ketua DPRD, Sekretaris DPRD foto bersama.



SERIOUS—Anggota DPRD Sumbar serius mengikuti jalannya sidang paripurna.



PIDATO—Gubernur Sumbar Mahyeldi memberikan pidato pendapat akhir pada Rapat Paripurna DPRD Penetapan kesepakatan bersama terhadap KUA-PPAS tahun 2025 dan KUPA-PPAS Tahun 2024.

NEWS



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	SENIN, 29 JULI 2024	3

DPRD Sumbar Sepakati Rancangan KUA-PPAS 2025 dan Perubahan KUA PPAS 2024

Pertumbuhan Ekonomi Sumbar 2025 di Angka 4,4 - 5,4 Persen

PADANG, METRO

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan, Postur perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2024 sebesar Rp.7057.899.193.719,19.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar dalam Rapat paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024, di ruang sidang utama gedung DPRD Sumbar, Sabtu (27/7).

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Sub dan Sekretaris DPRD Sumbar Rafli. Rapat paripurna dihadiri segenap anggota DPRD Sumbar, Gubernur Sumbar, Kepala OPD, unsur Forkopimda dan undangan lainnya.

Disampaikan Mahyeldi, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp.6,87 triliun lebih, terdiri dari: 1. Pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp.3,39 triliun lebih; 2. Pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp.3,45 triliun lebih; dan 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp.29,87 miliar lebih.

Sementara belanja daerah dialokasikan sebesar Rp.7,03 triliun lebih, yang terdiri dari: 1. Belanja operasi sebesar Rp.4,78 triliun lebih; 2. Belanja modal sebesar Rp.807 miliar lebih; 3. Belanja tidak terduga sebesar Rp.25,38 miliar lebih; dan 4. Belanja transfer sebesar Rp.1,41 triliun lebih. Kemudian, pada bagian pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah sebesar Rp.180,44 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.20 miliar.

"Dalam penyusunan KUA-PPAS tahun 2025, pemerintah daerah mencermati kondisi perekonomian, baik di tingkat daerah, regional, nasional, dan global. Untuk tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sesuai dengan rancangan awal RKP 2025 diperkirakan berada pada angka 4,4 sampai dengan 5,4 persen," ungkap Mahyeldi.

Menurutnya, hal ini didorong oleh tren positif harga CPO dan karet dunia yang akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan perkebunan serta perhelatan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di tahun 2024. Kondisi lain yang berpengaruh adalah pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru yang diharapkan mendorong investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumatera Barat.

"Guna terwujudnya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prioritas, tentu harus didukung pendanaannya melalui APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan," lanjutnya.

Berdasarkan pembahasan Rancangan KUA-PPAS 2025 yang telah dilaksanakan dan

Disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD, maka KUA PPAS tahun anggaran 2025 adalah sebesar: Rp5.758.882.128.033,- yang dijabarkan pada target pendapatan daerah sebesar Rp5,658,- triliun lebih dan target penerimaan pembiayaan sebesar Rp100,81,- miliar lebih.

Belanja daerah, sesuai kesepakatan, direncanakan sebesar Rp.5,727 triliun lebih, dengan rincian sebagai berikut: 1. Belanja operasi direncanakan sebesar Rp.4,140 triliun, yang terdiri dari: 2. Belanja modal direncanakan dialokasikan sebesar Rp.569,833 miliar lebih; 3. Belanja tidak terduga dengan pengalokasian sebesar Rp.20,00 miliar; 4. Belanja transfer dialokasikan sebesar Rp. 997,118 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut: A. Belanja bagi hasil pajak dengan pengalokasian sebesar Rp.952,118 triliun lebih; B. Belanja bantuan keuangan dengan pengalokasian sebesar Rp.45,00 miliar.

Sementara untuk pembiayaan, dalam kesepakatan KUA PPAS tahun 2025, penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2023 dengan diperkirakan sebesar Rp.100,517 miliar. Sedangkan pada bagian pengeluaran pembiayaan untuk tahun anggaran 2025 disepakati untuk penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp.31,00 miliar berupa penyertaan modal pada Bank Negeri (tshb).



MEMIMPIN RAPAT-- Irsyad Syafar memimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua DPRD Suwirpen Sub. Hadir Gubernur Sumbar Mahyeldi.



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	SABTU, 27 JULI 2024	3



PENDIDIKAN POLITIK — Anggota Dprd Sumatera Barat H Arkadius Dt Intan Bano Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Tokoh Masyarakat Tanah Datar

Arkadius Berikan Pendidikan Politik bagi Tokoh Masyarakat

TANAH DATAR, METRO Anggota DPRD Sumbar Ir. H. Arkadius Dt Intan Bano, MM, MBA, memberikan pendidikan politik bagi tokoh masyarakat Tanah Datar. Kegiatan ini juga berkaitan dengan akan dilaksanakannya alek Pilkada serentak 2024.

Kegiatan yang dilaksanakan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), di Ballroom Emersia Hotel dan Resort Batusangkar, Kamis (25/7), dianggarkan melalui pokok-pokok pikiran Arkadius Dt Intan Bano sebagai anggota DPRD Sumbar.

Dalam kesempatan itu, Arkadius, memberikan materinya berjudul, Pilkada serentak menentukan masa depan bangsa dan negara. "Pemilu sebagai wahana pendidikan politik dan upaya kemenangan pertarungan politik pada

Pilkada 2024," ungkapnya.

"Banyak definisi dari arti politik itu, tergantung persepsi dan cara pandang. Politik itu juga diartikan strategi untuk mewujudkan kebaikan bersama, upaya untuk memperoleh kekuasaan, dan manipulasi kepentingan," tambah Arkadius.

Merututnya politik juga merupakan usaha yang ditempuh warga untuk mewujudkan kebaikan bersama, serta seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan baik secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Arkadius berharap, agar masyarakat mampu menilai calon pemimpin dalam pemilihan kepala daerah nanti.

Ketua pelaksana acara Fajar, Nurrahman dalam laporannya sampaikan, tujuan diadakan kegiatan ini, dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang

pengetahuan peserta, terhadap proses demokrasi di daerah, agar kehidupan demokrasi dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar, sesuai undang undang yang berlaku.

Kegiatan ini diikuti 90 orang peserta yang terdiri dari Wali Nagari se Tanah Datar dan Tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Datar, adapun materi yang akan dibahas yaitu, Pilkada serentak menentukan masa depan bangsa dan negara, Mewujudkan Pemilu Badunsanak dalam Pilkada Serentak 2024, Pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak, serta Budaya Politik dan Demokrasi.

Tamtu sebagai pemateri lainnya yakni, Kabid Poidagri, Komisioner KPU Sumbar, dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas Doni Hendrik (hsb).



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres • SABTU 27 JULI 2024		2

Atasi Kekerasan Anak, Semua Harus Terlibat

**Suwirpen: Bila
Diketahui,
Laporkan Segera**

MENCUATNYA kasus-kasus kekerasan kepada anak-anak akhir-akhir ini, patut mendapat perhatian serius. Bukan hanya bisa merusak mental anak, namun juga memupus harapan mereka dalam menggarangi kehidupan. Sejumlah langkah dan kebijakan diambil segera, termasuk di Sumbar.

"Seluruh pihak mesti terlibat aktif untuk mencegah semakin banyak kasus kekerasan terhadap anak terjadi di provinsi ini," ujar Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib saat membuka bimbingan teknis (Bimtek) upaya pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis masyarakat VII di Padang, baru-baru ini.

Politisi Partai Demokrat ini mengaku prihatin sekaligus khawatir atas mencuatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, belakangan ini. Bukan hanya kekerasan verbal maupun fisik yang

berdampak jangka panjang terhadap anak.

"Kita minta masyarakat jangan ragu untuk melaporkan pada pihak yang berwajib, jika melihat ada aksi kekerasan pada anak. Ingat, kekerasan pada anak bukan hanya fisik seperti memukul, menyiksa atau bahkan kekerasan seksual saja. Tapi, eksploitasi anak juga kekerasan," jelas dia.

Paling sederhana, kata dia, memaksa anak-anak meminta-minta yang di persimpangan lampu merah termasuk kekerasan pada anak. Lebih memprihatinkan, umumnya pelaku kekerasan adalah orang-orang terdekat.

"Di sinilah, peran aktif masyarakat ikut aktif menyelesaikan permasalahan ini. Kita mengajak

seluruh unsur perlu lebih optimal dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Bila ditemukan kasus kekerasan pada anak, laporkan segera kepada aparat terkait," kata dia.

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (Kemen PPPA)

menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Desember 2022 saja tercatat ada 617 orang korban kekerasan terhadap anak di Sumbar.

Nah, untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, perlu dilakukan kajian-kajian melibatkan seluruh unsur masyarakat. Sehingga, langkah-langkah yang diambil seluruh pemangku

kepentingan berjalan efektif.

"Undang-Undang Dasar 1945 mengamatkan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan hingga hak untuk hidup layak dari negara. Negara juga wajib melindungi anak dari kekerasan hingga diskriminasi. Makanya, masukan dari seluruh unsur masyarakat sangat bermanfaat," kata dia. (*)

WAKIL, Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib saat membuka bimbingan teknis (Bimtek) upaya pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis masyarakat VII di Padang, baru-baru ini.



TAMU dan undangan yang hadir dalam pembukaan Bimtek Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap anak VII di Padang, baru-baru ini.



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SENIN 29 JULI 2024	5

DPRD DAN PEMPROV SUMBAR SEPAKATI KUA PPAS 2025

DPRD Provinsi Sumbar bersama Pemerintah Provinsi Sumbar mengambil keputusan bersama mengenai KUA-PPAS tahun 2025 dan rancangan perubahan APBD tahun 2024, di ruang rapat utama DPRD Sumbar pada Sabtu (27/7).

Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar membuka rapat partisipatif didampingi Wakil Ketua Suwipen Suib dan Pemprov Sumbar dihadiri Gubernur Sumbar, anggota DPRD Sumbar, OPD, Sekwan Rafis.

Irsyad Syafar mengatakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 untuk konsisten perencanaan dan penganggaran, KUA-PPAS Tahun 2025 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024, akan menjadi acuan dalam penyusunan Ranperda APBD Tahun 2025 dan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.

"Kebijakan anggaran, program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS tersebut, tidak bisa lagi diganti dalam penyusunan Ranperda APBD Tahun 2025 dan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024," ujar Irsyad Syafar.

Menurut Irsyad Syafar, tahapan dan jadwal pembahasan yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan, mulai dari pembahasan pendahuluan komisi-komisi bersama OPD mitra kerja dan dilanjutkan dengan pembahasan serta finalisasi Badan Anggaran bersama TAPD.

"Materi muatan KUA-PPAS sebagaimana yang ditetapkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019, fokus pembahasannya, diarahkan pada asumsi makro ekonomi daerah, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah akan ditampung dan disepakati dalam KUA-PPAS Tahun 2025 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 sejalan dengan program prioritas RP-

JMD, potensi dan kemampuan keuangan daerah serta penyelarasannya dengan target base line yang ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045," ujar Irsyad Syafar.

Hasil pembahasan telah dilakukan DPRD dan Pemerintah Daerah Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024.

"Dalam beberapa tahun terakhir, tren penerimaan daerah cenderung mengalami penurunan terutama dari sektor PAD menjadi indikator utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita masyarakat yang terus meningkat," jelas Irsyad Syafar.

Menurutnya penerimaan daerah, tentu akan berdampak terhadap pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sum-

bar Tahun 2021-2026.

"Tahun 2025, kita sudah sepenuhnya melaksanakan Perda Pajak dan Restribusi Daerah yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, dimana pemungutan PKB dan BBNKB hanya dipungut menjadi hak dari pemerintah provinsi saja dan di samping itu terdapat penurunan tarif PKB dari 1,60 % dari nilai jual objek pajak menjadi 1,05 %. Ini tentu berdampak yang sangat besar terhadap penurunan pendapatan dari sektor PKB dan BBNKB yang selama ini menjadi andalan daerah," ujar Irsyad.

Ditambahkan Irsyad Syafar, untuk mengantisipasi kontraksi cukup besar terhadap penerimaan daerah, harus ada inovasi dan upaya lebih keras dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kembali penerimaan daerah, agar proses pembangunan daerah tidak mengalami hambatan.

"Proyeksi pendapatan daerah dan rencana alokasi

belanja ditampung dalam KUA-PPAS Tahun 2025 serta Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 masih bersifat tentatif dan perlu di dalam kembali nanti dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda APBD Tahun 2025 dan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024," ujar Irsyad.

Dijelaskan Irsyad, DPRD melihat masih terdapat potensi-potensi masih bisa ditingkatkan, baik dari pos PAD maupun pendapatan transfer untuk dapat mengakomodir kebutuhan anggaran yang semakin meningkat.

"APBD 2025 merupakan APBD transisi dari perubahan kepemimpinan daerah masa jabatan tahun 2021-2025 dengan hasil Pilkada serentak 2024 dan APBD transisi untuk penyesuaian dengan RPJMD kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang mengacu kepada RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045. Oleh sebab itu, arah kebijakan, program dan kegiatan harus lebih fleksibel mengako-

modir perubahan-perubahan akan terjadi pada masa transisi," bebernya.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, postur perubahan PPAS Provinsi Sumbar tahun anggaran 2024 baru saja disepakati.

"Kita sepakat bersama, secara umum digambarkan total perubahan PPAS tahun 2024 disepakati Rp 7.057.899.193.719,19, pendapatan daerah ditargetkan Rp 6,87 triliun lebih terdiri dari PAD





KLIPING BERITA

Rp 3,39 triliun lebih, pendapatan transfer ditargetkan Rp 1,45 triliun lebih dan pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp 29,87 miliar lebih, belanja daerah dialokasikan Rp 7,03 triliun lebih terdiri dari belanja operasi Rp 4,70 triliun lebih, belanja modal Rp 807 triliun lebih, belanja tidak terduga Rp 25,38 miliar lebih dan belanja transfer Rp 1,41 triliun lebih, bagian penerimaan pembiayaan Rp 180,44 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp

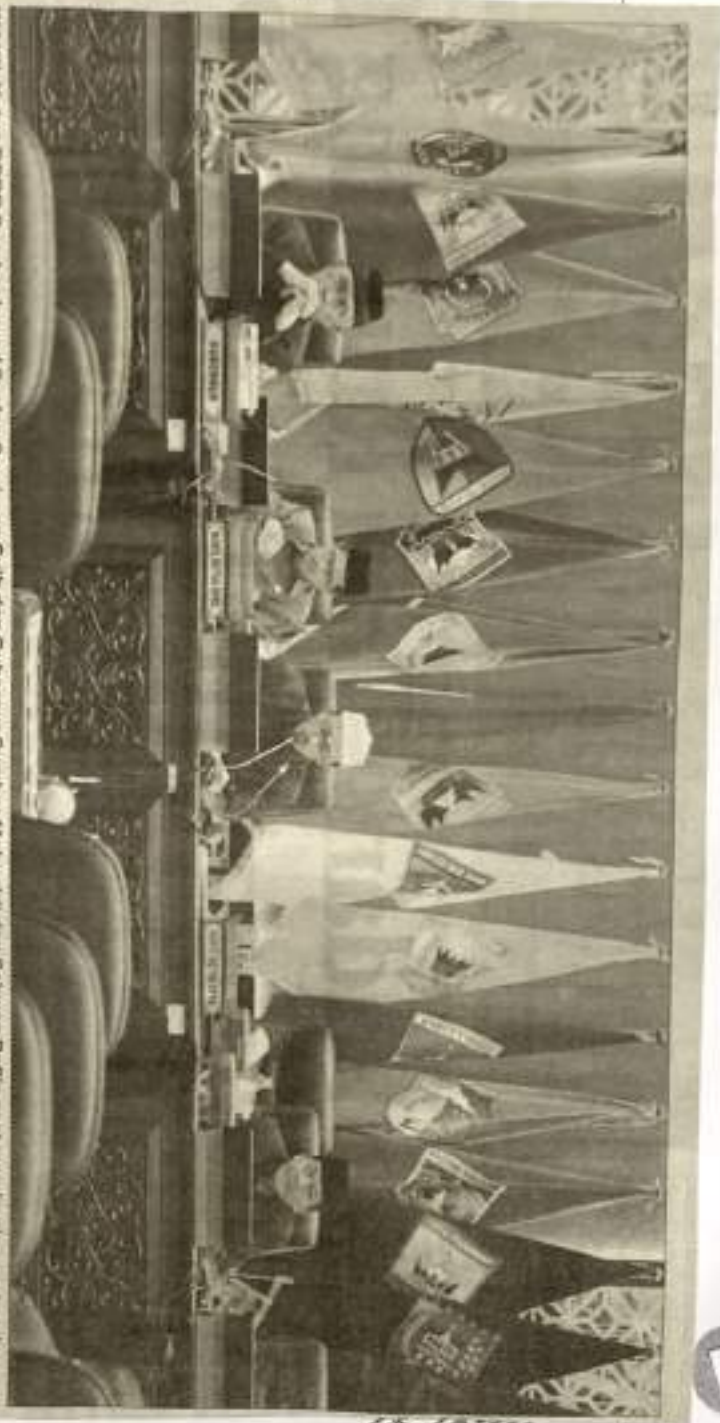
20 miliar," jelasnya.

Menurut Gubernur, berdasarkan pembahasan rancangan KUA PPAS 2025 disepakati, maka KUA PPAS 2025 sebesar Rp 5.758.882.128.033, dijabarkan target pendapatan daerah sebesar Rp 5.658 triliun lebih dan target penerimaan sebesar Rp 100,81 miliar lebih.

"Kita berupaya segala upaya dan kemampuan menyusun dan membahas KUA PPAS 2025 serta KUPA-PPAS 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan direncanakan sebelumnya, agar tercapai tujuan dan sasaran pembangunan," tuturnya.

Adapun keputusan DPRD diberi Nomor: 13/SB/Tahun 2024 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan KUA Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi KUA Tahun 2025, Nomor: 14/SB/Tahun 2025 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan PPAS Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi PPAS Tahun 2025, Nomor: 15/SB/Tahun 2025 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Perubahan KUA Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Perubahan KUA Tahun 2024 dan Nomor: 16/SB/Tahun 2025 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Perubahan PPAS Tahun 2024. (shy)

Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syarif, Suwirpen Sulib dan Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Sekwan Rafli saat memimpin rapat paripurna.



NEWS

NEWS!



KLIPING BERITA



GUBERNUR Sumbar Mahyeldi menyampaikan surat keputusan mengenai KUA PPAS yang akan disepakati.



GUBERNUR Sumbar Mahyeldi menandatangani SK.



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib saat menandatangani SK.





KLIPING BERITA



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar menandatangani surat keputusan bersama terhadap KUA PPAS.



GOVERNUR Sumbar, Mahyeldi bersama Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar, Suwirpen Suib, dan Sekwan Rafis foto bersama.



SALAH seorang anggota fraksi memberikan pendapatnya terhadap KUA PPAS yang akan disepakati.

0751 7057591

<https://dprd.sumbarprov.go.id/>

44



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	SENIN, 29 JULI 2024	9.

Ketua KI Sumbar Diduga Rangkap Jabatan

JPS: Langgar
UU KIP dan Perki

Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumbar, Musfi Yendra, diduga melanggar Undang-undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (Perki), karena diduga rangkap jabatan.

PADAHAL, saat mendaftar calon komisiner KI Sumbar, Musfi Yendra telah meneken pakta integritas, dan menyatakan mundur sebagai dosen serta bekerja penuh waktu pada badan publik KI Sumbar.

Berdasarkan website unspadang.ac.id, Musfi Yendra tercatat sebagai dosen tetap aktif di Universitas Eka Sakti (Unes), Padang, padahal itu dilarang dan telah termaktub di dalam Perki tersebut.

Sementara itu, pada unggahan di Facebook, tertanggal 8 Juni,

Musfi Yendra, mengupload foto dengan caption, Ujian komprehensif. Pengujian lengkap seorang mahasiswa dalam meraih tith sarjana. Semoga bermanfaat dan barokah ilmunya, mahasiswa/i kami. Aamin". #Sabtu-HariKampus, dengan latar spanduk berlogo Unes.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi, pasal 9 huruf f berbunyi "bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi Anggota Komisi Informasi".

Sementara pada pasal 9 huruf G berbunyi, "bersedia bekerja penuh waktu".

Diperkuat lagi temuan kelompok Kerja (Pokja) Pengawal Integritas Lembaga Publik lingkaran Pemred Sumbar (JPS) di berkas pendaftaran pun ditemukan pernyataan di atas menterai 10.000 tentang siap mundur dan kerja penuh waktu.

Kedua hal tersebut diduga telah dilanggar oleh Musfi Yendra, yakni tidak melepas pekerjaannya sebagai dosen, dan tidak bekerja penuh waktu, sebab ia mengajar di kampus tersebut sembari juga sebagai komisiner sekaligus Ketua KI Sumbar.

Pakar Keterbukaan Informasi Publik, yang juga Ketua JPS Sumbar Adrian Tuswandi, mengaku sangat terkejut terhadap temuan Pokja Pengawal Integritas Lembaga Publiknya, fakta tersebut, bahwa Musfi Yendra, sebagai komisiner KI Sumbar, tidak melepas jabatan sebagai dosen.

"Waduh, ini jelas melanggar dan melanggar aturan UU KIP dan Perki," kata Adrian Tuswandi, mantan komisiner KI Sumbar, dua periode 2014-2023,

Minggu (28/7) siang.

Ia menegaskan, Perki itu hukum positif, sebab telah melewati proses berita negara dan lembaga negara, keduanya menpersegas atas fiksi atas Undang-undang yaitu sifat hukum semua orang tahu.

Selain itu, Musfi Yendra berbuah fatal karena diduga melanggar DPRD dan Gubernur Sumbar dalam proses administrasi seleksi KI Sumbar periode ketiga. Dua lembaga (DPRD dan Gubernur Sumbar), ini adalah lembaga paling terhormat dan mulia di Sumbar ini. Saya terkejut atas temuan Pokja ini," sebut Toaik, sapaan Adrian Tuswandi.

Temuan itu jadi fakta rangkap jabatan itu, sama saja Musfi

Yendra melakukan pembodohan publik terhadap pernyataannya sendiri, saat mendaftar sebagai calon KI Sumbar kepada Tim Seleksi (Timsel).

"KI itu lembaga pengawal keterbukaan informasi publik, dibentuk oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), karena dibentuk UU ternyata lembaga ini punya marwah hebat yang harus diisi oleh komisiner yang berintegritas mestinya," sebut Toaik.

Selain itu kata Toaik, Musfi Yendra juga majelis komisiner yang memutuskan sebuah sengketa informasi publik.

"Bagaimana pula kalau orang melanggar Perki lembaganya sendiri memutuskan sengketa yang

akan berujung pada putusan adjudikasi non litigasi, jika putusan itu diajukan. Keberatan ke PTUN dia menjadi putusan adjudikasi," ulas Toaik.

Toaik justru menaruh hormat kepada Ahmad Lahni, calon komisiner KI Sumbar yang masuk 5 besar, saat mau ditetapkan DPRD disaat untuk memilih jabatan Wakil Rektor atau Komisiner KI.

"Ahmad Lahni memilih jadi Wakil Rektor, dia gentle man dan tahu soal marwah profesi, karena hidup dan karir adalah pilihan. Bahkan kasus rangkap jabatan juga banyak terjadi di KI lain di Indonesia, komisinernya mundur, memilih jadi akademisi. Itu dilakukan demi marwah lembaga

KI itu sendiri, beda dengan KI Sumbar ya," tutup Toaik saat diminta tanggapan oleh wartawan sambil geleng-geleng percaya Ketua KI mengotakotik dokumen.

Terkait itu, Penasehat Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Sumbar, Novrianto, berharap Musfi Yendra memberi penjelasan kepada publik untuk menjaga marwah lembaga ini.

"Saudara Musfi harus memberi penjelasan ke publik terkait temuan itu. Marwah lembaga KI harus tetap dijaga, kalau memang salah, ya konsekuensinya harus mundur," pungkas Novrianto, wartawan aliran keras yang telah mengantongi kartu UKW utama dari Dewan Perki. (byr/red)



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbang	SENIN, 29 JULI 2024	J.

DPRD Sumbang Tetapkan KUA-PPAS 2025 dan Perubahakan KUA-PPAS 2024

Padang, Rakyat Sumbang — DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbang) menetapkan Konsep Keputusan DPRD terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024, melalui Keputusan DPRD.

Keputusan DPRD tersebut diadit nomor: Nomor: 11/SB/ Tahun 2024 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan KUA Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi KUA Tahun 2025, Nomor: 14/SB/ Tahun 2025 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan PPAS Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi PPAS Tahun 2025, Nomor: 15/SB/ Tahun 2025.

terhadap Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Perubahan KUA Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Perubahan KUA Tahun 2024, Nomor: 16/SB/ Tahun 2025 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Perubahan PPAS Tahun 2024.

Wakil Ketua DPRD Sumbang, Isyad Syah, mengatakan, sesuai Pasal 91, PP Nomor 12 Tahun 2019, KUA-PPAS Tahun 2025 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024, menjadi pedoman OPD 2024, menjadi pedoman penyusunan RKA 2025 dan penyusunan RKA 2024, serta menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD 2025 dan Rancangan perubahan APBD 2025.

Isyad Syah

Isyad Syah, Wakil Ketua DPRD Sumbang, mengatakan, DPRD Sumbang telah menetapkan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024, di ruang sidang umum lembaga ini, Sabtu (27/7) siang.

Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi, mengatakan, setelah disetujui KUA-PPAS 2025, serta KUA-PPAS 2024, maka Pemerintah Daerah segera menyusun dan menyetujui Rancangan Perubahan APBD 2025, serta perubahan APBD 2024 untuk dibahas dan disetujui bersama, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

KUA

KUA, semua telah telah berupaya dengan segala daya dan kemampuan dalam menyusun dan menyetujui KUA-PPAS 2025 dan KUA-PPAS 2024 ini, untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah kita rencanakan sebelumnya, agar tercapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang kita cita-citakan, kesejahteraan masyarakat Sumbang Mahang, Unggah, dan Berkelanjutan, guna kienya. (Dyr)



KLIPING BERITA



XL Ketua DPRD Sumbar Insyad Syafar, Suwirpen Sub, Gubernur Sumbar, Mahyeldi, Sekretaris DPRD Sumbar Rafis, foto bersama saat rapat
uma, Sabtu, (27/7).



KIL Ketua DPRD Sumbar Insyad Syafar, menandatangani Nota Per-
etujuan Bersama, saat rapat paripurna, Sabtu, (27/7).



GUBERNUR Sumbar, Mahyeldi, menandatangani Nota Persetujuan
Bersama, saat rapat paripurna, Sabtu, (27/7).



KIL Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Sub, menandatangani Nota
Persetujuan Bersama, saat rapat paripurna, Sabtu, (27/7).



SEKRETARIS DPRD Sumbar Rafis, membacakan konsep Keputusan
DPRD dan Nota Persetujuan Bersama, saat rapat paripurna, Sabtu, (27/7).





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres • JUMAT • 26 JULI 2024		6

Tekan Kerawanan Sosial Butuh Kerja Sama

Supardi: Kepekaan Sosial jadi Faktor Kunci

MEJUBAKZA kasus kemiskinan sosial berupa, stunting, gagas raih... (anak), kemiskinan ekstrem, pengangguran, narkoba, judi dan lainnya, merupakan kepekaan sosial banyak kalangan. Tak terkecuali, Ketua DPRD Sumbar Supardi. Politisi Partai Gerindra ini menilai, kunci utama semua kasus ini tak terlepas dari semakin memudarnya kepekaan sosial di tengah masyarakat. "Jika kasus-kasus kerawanan sosial ini tak tertangani secara serius, hampir dipastikan menjadi persoalan besar ke depannya," ujar Supardi sewaktu pembukaan bimbingan teknis (bimtek) Pilar-pilar Sosial, baru-baru ini. Bimtek ini digelar lurah se-Kota Payakumbuh dan perwakilan mas-

Tidak satu pun ajaran yang membiarkan kita tidak peduli pada lingkungan. Intinya, bila kita menjalankan adat dan agama, maka tidak akan ada lagi persoalan sosial di sekitar kita

Supardi

yarakat. Dia menekankan bahwa Rantau Minang nagati berada berlandaskan Kitabullah.

"Tidak satu pun ajaran yang membiarkan kita tidak peduli pada lingkungan. Intinya, bila kita menjalankan adat dan agama, maka tidak akan ada lagi persoalan sosial di sekitar kita," ingat Supardi.

Menurut dia, banyak nilai-nilai kepedulian yang perlu dikembangkan dalam adat istiadat Minangkabau. Salah satunya, keberadaan rangkang di rumah gadang yang mencerminkan kepedulian masyarakat Minangkabau

pada lingkungan.

Rangkang ini difungsikan bukan hanya untuk menyimpan kebutuhan pangan sehari-hari. Namun, juga menjaga stok beras jika terjadi kelangkaan pangan. Tak kalah pentingnya, rangkang juga berperan untuk membantu lingkungan seperti, bencana, bantuan kepada yang membutuhkan dan lainnya.

Supardi mengingatkan bahwa kerawanan sosial di Payakumbuh perlu diantisipasi secara bersama. Terlebih, Payakumbuh berada di daerah perlintasan. Makanya, salah satu cara yang paling efektif lewat peningkatan kepedulian sosial masyarakat. "Di sinilah peran penting bapak/ibu lurah guna meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial. Dengan begitu, muncul gerakan bersama memberantas persoalan sosial," katanya.

Menurut dia, kasus narkoba di Payakumbuh perlu mendapat perhatian serius. Mengingat Payakumbuh termasuk salah satu jalur masuk narkoba ke Sumbar terutama

via Riau. Terutama, di samping Pasaman via Medan. "Hal ini ditambah angka pengangguran Payakumbuh terbilang tinggi. Hal ini juga menjadi pemicu tingginya penggunaan narkoba," ujar dia.

Selanjutnya, tambah Supardi, kecanggihan teknologi membuat informasi lebih banyak diterima. Kondisi ini bisa mempengaruhi Tekno-

logi juga tak mengajari masalah kepekaan sosial. "Kecanduan gadget salah satunya mengakibatkan gangguan psikologis. Sehingga, perlu pencerdasan di tengah masyarakat soal pentingnya filter dalam penggunaan gadget," ujarnya.

Kepada peserta, Supardi meminta untuk tetap semangat mengajak seluruh mas-

yarakat bersama-sama meningkatkan kepedulian, pengawasan di lingkungan masing-masing. Sehingga, persoalan sosial bisa dihindari. Kegiatan ini dilaksanakan Dinas Sosial Sumbar lewat dana pokok pikiran (pokir) Supardi sebagai Ketua DPRD Sumbar.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Sumbar, Arry Yis-

wandi menyebut, pilar adalah tonggak. Untuk menguatkan sosial masyarakat maka pilar-pilarnya harus diperkuat. "Untuk itulah kegiatan ini diinisiasi Ketua DPRD. Tujuannya, menguatkan pilar-pilar sosial di tengah masyarakat. Sehingga, persoalan persoalan sosial yang ada di masyarakat bisa diatasi," katanya. (*)

NEWS!



KLIPING BERITA



AMAN

Ketua DPRD Sumbar Supardi... (tengah) sewaktu menyanyikan lagu Indonesia Raya.



Ketua DPRD Sumbar Supardi bersama jajaran pimpinan Dinas Sosial Sumbar saat pembukaan Bimtek Pilar-pilar Sosial di Bukittinggi, baru-baru ini.



KETUA DPRD Sumbar Supardi bersama jajaran pimpinan Dinas Sosial Sumbar dan peserta saat pembukaan bimbingan teknis (Bimtek) Pilar-pilar Sosial, di Bukittinggi, baru-baru ini.



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	JUMAT, 26 JULI 2024	2

Pentingnya Sinergitas Pusat dan Daerah untuk Pengembangan Pertanian

PADANG, METRO

Kebijakan 10 persen APBD Sumbar untuk sektor pertanian butuh dukungan semua pihak. Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Arkadius Dt. Intan Bano. Menurutnya sinergitas untuk pengembangan keberhasilan sektor pertanian selama ini belum berjalan optimal.

Politisi Demokrat itu menuturkan, bicara pertanian, peningkatan sektor pertanian untuk provinsi ditentukan dari kinerja kabupaten/kota, sehingga harus ada sinergi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pertanian yang ada di daerah.

Meski keterkaitannya sangat erat, ia melihat sinergi yang dilakukan pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota untuk sektor pertanian ini belum berjalan optimal.

"Masih cukup banyaknya persoalan di sektor pertanian yang dihadapi petani di daerah, diantaranya terkait pupuk, kebutuhan bibit, infrastruktur pertanian dan yang lainnya," ungkapnya.

Menurutnya, persoalan ini juga perlu dikomunikasikan dengan 14 anggota DPR RI 4 anggota DPRD RI dari Sumatera Barat, dan orang Sumatera Barat yang berasal dari daerah pemilihan provinsi lain. Terus ini juga berkaitan bagaimana menggarai dana pusat, pihak-pihak swasta.

"Membuka komunikasi dengan semua pihak itu sangat penting, sehingga pengembangan sektor pertanian di Sumbar bisa berjalan lebih optimal lagi," tegasnya.

Dari sisi DPRD Sumbar, lanjut Arkadius, melalui Komisi II sebagai yang membidangi sektor pertanian bisa dikatakan sudah optimal mengawal prilaku gubernur pada sektor ini.

Selain menyetujui penganggaran, dan melakukan pengawasan terhadap program yang dijalankan, DPRD melalui Komisi II terus nyinyir mengingatkan pemerintah daerah agar bersinergi dan meningkatkan komunikasi dengan semua pihak terkait di pusat dan daerah. Namun pihaknya melihat pemerintah daerah sebagai eksekutor masih lemah menjalankan hal tersebut. (hab)



ARKADIUS DT. INTAN BANO

Anggota DPRD Sumbar





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	JUMAT, 26 JULI 2024	9.

Setop Kekerasan Terhadap Anak-anak

Padang, Rakyat Sumbar — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Suwirpen Sulih, mengatakan, perhatian terhadap kasus kekerasan yang menimpa anak-anak masih terjadi di daerahnya.

Salah satu kasus penganiayaan terhadap anak 13 bulan yang dilakukan oleh bapak tirai yang menyebabkan korban meninggal dunia di salah satu kabupaten.

"Seluruh unsur harus terlibat untuk melindungi agar tidak terus meningkat setiap tahun," kata Suwirpen Sulih, saat membuka Bimbingan Teknis Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Berbasis Masyarakat Angkatan VII di The ZHM Premiere Hotel.

Padang, Selasa, (16/7).

Ia meminta kepada masyarakat, jangan ragu untuk melapor kepada pihak berwenang ketika ada kasus kekerasan yang menimpa anak-anak.

"Banyaknya eksploitasi anak pada lampu merah yang dipaksa bekerja hingga belasan jam," ungkap Suwirpen.

Ia mengakhiri, Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan.

"Kasus kekerasan yang menimpa anak terdiri dari pelecehan seksual termasuk itu dilakukan orang-orang terdekat," pungkasnya. (byr)



WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Sulih, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Berbasis Masyarakat Angkatan VII di The ZHM Premiere Hotel Padang, Selasa, (16/7).



KLIPING BERITA

KORAN

KHAZ

HARI/TANGGAL

KAMIS, 25 JULI 2024
KAMIS, 19 MUHARRAM 1445 H

HALAMAN

2

KEPUTUSAN PRODUK EXPO SMK FINAL

Supardi: Kita Tak Ingin Tamatan SMK di Sumbang jadi Pekerja

Payakumbuh, Khazanah — Keputusan produk dari SMK se-Sumbang siap dipamerkan pada acara yang akan digelar 7-11 Agustus 2024 mendatang, setelah melalui tiga tahapan Tenaga Ahli saat pertemuan dengan Dinas Pendidikan Sumbang, Senin (22/7) produk untuk Expo SMK tersebut bisa diputuskan.

"Tahap I menjadi presentasi dari calon peserta. Kemudian, tenaga ahli memberikan bimbingan bagaimana sebuah produk itu bisa 'dipasarkan' dari beragam sisi. Baik dari kemasan hingga strategi pemasaran, baru di tahap terakhir, calon peserta kami minta lagi untuk presentasi sebagai penilaian akhir," ujar Ketua Tim Tenaga Ahli, Septis Yonaldi, SE, MM finalisasi tahapan.

Expo SMK ini sudah dirancang sejak dua tahun lalu sejak Bimtek Digitalisasi untuk guru SMK se-Payakumbuh diadakan. Nantinya adalah untuk mengatakan bahwa SMK Sumbang memiliki produk yang bersaing terutama dalam hal inovatif.

Seperti juga disampaikan Ketua DPRD Sumbang Supardi yang juga menjadi inisiator Expo SMK melalui dana pokok pokran selaku Ketua DPRD Sumbang, pi-

haknya tak ingin tamatan SMK nantinya hanya jatuh jadi pekerja, mesti ada yang memberitahu bahwa siswa SMK Sumbang dan sekolah mampu bersaing secara kompetitif.

"Expo ini akan mengeksplorasi bentuk pameran semaksimal mungkin dan akan memperlihatkan sisi festivalnya secara maksimal. Saya ragu, apakah pernah ada Expo seperti ini di Indonesia," ujar Supardi.

Kepala Bidang PSMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, DRL Ariawan, S.Ag, M.Pd melihat lulusan SMK yang kompeten akan berkontribusi positif meningkatkan daya saing produk nasional.

Ia berharap produk yang dihasilkan SMK menerapkan SNI, baik SNI terkait sistem manajemen, maupun produk. Selanjutnya produk-produk tersebut perlu juga terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), dan mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Ia juga mengajak agar seluruh partisipan baik terkait dengan dunia usaha untuk mendatangi program itu.

"Rugi jika tidak datang, karena Expo ini beda dengan yang lain," promosinya. (lil yuniat)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	KAMIS, 25 JULI 2024 19 Muharam 1446 H	46

ANTISIPASI PERMASALAHAN SOSIAL

Ketua DPRD Sumbar Ajak Lurah se-Payakumbuh Tingkatkan Kepekaan

BUKITTINGGI, HALUAN — Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengajak lurah se-Kota Payakumbuh untuk mengantisipasi berbagai permasalahan sosial yang berpotensi terjadi di masyarakat. Salah satunya dengan meningkatkan kepekaan sosial.

Menurut Supardi, masyarakat kepekaan sosial menyebabkan persoalan sosial seperti *stunting*, kemiskinan ekstrem, narkoba, judi online dan sebagainya marak terjadi. Jika ini dibiarkan maka dikhawatirkan akan menyebabkan jurang persoalan sosial makin dalam.

"Rantau Minang adalah nagari beradat bersendikan Kitabullah, tidak ada sarupon perintah untuk membiarkan kita tidak peduli dengan lingkungan. Kalau kita menjalankan adat dan agama tidak akan ada lagi persoalan sosial di sekitar kita," terang Supardi saat pertemuan Pilar-Pilar Sosial Kota Paya-

kumbuh Angkatan XI, Jumat (20/7).

Supardi mencontohkan fungsi rangkang di rumah gadang yang mencerminkan kepedulian masyarakat. Minangkabau dengan lingkungan

"Rangkang di rumah gadang itu ada tiga fungsi pertama untuk menyimpan kebutuhan pangan sehari-hari, kedua untuk stok jika terjadi kelangkaan pangan dan yang ketiga difungsikan untuk membantu

lingkungan seperti bencana, bantuan kepada yang membutuhkan dan sebagainya," ulas Supardi.

Pertemuan Pilar-Pilar Sosial tersebut diikuti oleh lurah se-Kota Payakumbuh dan perwa-

kilang masyarakat. Pertemuan pilar sosial ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang antisipasi berbagai masalah sosial.

Kerawanan sosial di Kota Payakumbuh perlu diantisipasi karena Payakumbuh berada di daerah perlintasan. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan meningkatkan kepedulian sosial masyarakat.

"Bapak ibu lurah memiliki peran penting meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial ini, sehingga ada gerakan bersama memberantas persoalan sosial," ucapnya.

Pertemuan Pilar-Pilar Sosial ini digelar oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui dana pokok Ketua DPRD Sumbar, Supardi. Pilar sosial yang diikuti oleh berbagai komponen masyarakat ini diharapkan menjadi lokomotif gerakan sosial mengantisipasi persoalan sosial di Kota Payakumbuh. (*)



SUPARDI



KLIPING BERITA



Pertemuan Pilar-Pilar Sosial Kota Payakumbuh Angkatan XI yang digelar baru-baru ini



Pertemuan Pilar-Pilar Sosial Kota Payakumbuh



Ketua DPRD Sumbar bedfoto bersama dengan peserta kegiatan



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	KAMIS, 25 JULI 2024 19 Muharram 1446 H	12

Masyarakat Selingkar Danau Singkarak Tolak Pembangunan PLTS

PADANG, HALUAN — Masyarakat selingkar Danau Singkarak menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) oleh PLN di Danau Singkarak.

Hal ini disampaikan perwakilan masyarakat selingkar Danau Singkarak saat menyampaikan aspirasi ke DPRD Sumbar, Rabu (24/7).

Penolakan terhadap pembangunan PLTS terjadi karena masyarakat menilai proyek tersebut berpotensi merusak kelestarian ekosistem dan keindahan danau.

Kedatangan masyarakat selingkar Danau Singkarak ke DPRD Sumbar diwakili oleh para wali nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan Pengembangan Kawasan Danau Singkarak (BPKDS), dan disambut Kepala Bagian (Kabag) Persidangan-Peraturan Perundang-Undangan Sekretaris DPRD Sumbar Zardi Syahrir, Rabu (24/7).

Ketua BPKDS Jasman mengatakan, dari musyawarah perangkat nagari di selingkar Danau Singkarak, disimpulkan pelaksanaan pengelolaan yang te-

lah berjalan hingga ke depan tidak berpihak kepada masyarakat.

Pemerintah dan PT PLN dinilai hanya mengambil manfaat untuk kepentingan mereka saja, sementara masyarakat yang meragukan ekonomi di Danau Singkarak terasampingkan.

"Pihak Pengelola Danau Singkarak akan membangun PLTS. Dengan adanya PLTS, nantinya akan mengganggu perkembangan wisata danau dan menyulitkan masyarakat nelayan untuk mencari ikan," katanya.

Dia mengungkapkan untuk selingkar masyarakat sudah susah

mencari ikan akibat adanya perubahan aturan, jika kondisi tersebut terus berlangsung akan menambah angka kemiskinan nantinya. Tidak hanya persoalan ekosistem, masalah sampah pun juga harus menjadi perhatian seluruh pihak.

"Jika ada PLTS, nanti sampah akan menumpuk pada bawah panel panel pembangkit listrik tersebut," katanya.

Disisi lain masyarakat selingkar Danau Maringgih juga mengeluhkan tentang persentase pembagian Pak Air Pemukiman (PAP) yang berkurang setelah

diberlakukannya Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang Pak Daerah.

Dengan berlakunya regulasi tersebut PAP yang diterima untuk nagari selingkar Danau Singkarak berkurang menjadi 25 persen. Sebelumnya 65 persen jika ditambah dengan Daerah Aliran Sungai (DAS). Persoalan lain yang diminta untuk bisa menjadi perhatian Pemprov adalah, CSR PLTA Singkarak untuk selingkar nagari hanya 1 kali per tiga tahun.

"Jumlah tersebut merupakan kontribusi yang tidak signifikan untuk daerah dan

masyarakat," katanya.

Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD Sumbar, Zardi Syahrir mengatakan, pertemuan dengan perangkat nagari selingkar Danau Singkarak akan ditindaklanjuti dengan komisi atau dewan yang bersangkutan.

Dia menyebutkan, aspirasi yang disampaikan akan diteruskan ke pimpinan untuk dibahas lebih lanjut. Jika aspirasi itu merupakan kewenangan pemerintahan daerah provinsi maka akan dibicarakan bersama pemprov (h/len)





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Kamis, 25 Juli 2024 (19 Muharram 1446 H)	19.

KETUA DPRD SUMBAR, SUPARDI :

Lurah Berperan Penting Atasi Per soalan Sosial

Ketua DPRD Sumbar, Supardi, mengajak lurah se Kota Payakumbuh untuk mengantisipasi berbagai persoalan sosial yang berpotensi terjadi. Salah satunya dengan meningkatkan kepekaan sosial.

Menurut Supardi, memudarnya kepekaan sosial menyebabkan munculnya persoalan sosial seperti stunting, kemiskinan ekstrem, narkoba, judi online dan sebagainya. Jika ini terus terjadi maka dikhawatirkan akan terjadi pembiaran yang menyebabkan jurang persoalan sosial makin dalam.

"Ranah Minang adalah negeri beradat bersandikan Kitabullah, tidak ada satupun perintah untuk membiarkan kita tidak peduli dengan lingkungan. Kalau kita menjalankan adat dan agama, maka tidak akan ada lagi persoalan sosial di sekitar kita," terang Supardi.

Supardi mencontohkan fungsi rangklang di rumah gadang yang mencerminkan kepedulian masyarakat Minangkabau dengan lingkungan.

"Rangklang di rumah gadang itu ada tiga fungsi. Pertama untuk menyimpan kebutuhan pangan sehari-hari. Kedua untuk stok jika terjadi kelangkaan pangan dan yang ketiga difungsikan untuk membantu lingkungan seperti bencana, bantuan kepada yang membutuhkan dan sebagainya," jelas Supardi.

Hal tersebut disampaikan Supardi dalam pembukaan Bimtek Pilar Sosial Jumat (20/7) lalu. Bimtek itu diikuti lurah se Kota Payakumbuh dan perwakilan masyarakat. Pertemuan pilar sosial ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang antisipasi berbagai masalah sosial.

Supardi menilai kerawanan sosial di Kota Payakumbuh perlu diantisipasi, karena Payakumbuh berada di daerah perlintasan. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan meningkatkan kepedulian sosial masyarakat.

"Bapak ibu lurah memiliki peran penting meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial ini, sehingga ada gerakan bersama memberantas persoalan sosial," ucap Supardi.

Ia mengatakan, di Payakumbuh banyak permasalahan sosial yang sangat butuh perhatian. Salah satunya masalah narkoba dan pengangguran.

Payakumbuh, kata dia, menjadi daerah pedesaan terbanyak pengguna narkoba. Ini menurut dia dikarenakan jalur masuk narkoba ke Sumbar ada dua yakni, Payakumbuh-Limapuluh Kota dari Riau dan Pasa-man dari Medan.

"Belum lagi ditambah tingkat pengangguran Payakumbuh yang tinggi, ini juga menjadi penyebab tingginya penggunaan narkoba," ujarnya.

Ia menilai persoalan sosial ini tak bisa diatasi oleh pemer-

intah saja, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tak akan sanggup.

Jika tidak diatasi, menurut Supardi, maka persoalan sosial ini akan menjadi semakin parah. Belum lagi, tambah Supardi kecanggihan teknologi membuat informasi lebih banyak diterima, ini ikut mempengaruhi. Teknologi juga tak mengajari masalah kepekaan sosial, hal ini menurutnya harus terus diajarkan.

"Kecanduan gadget, hp salah satunya mengakibatkan gangguan psikologis. Sehingga perlu pencerdasan di tengah masyarakat tentang pentingnya filter dalam penggunaan gadget," ujarnya.

Oleh karena itu, Supardi berharap alumni pertemuan PSM bisa ikut membantu berbagai persoalan sosial masyarakat.

"Jika nantinya 1.600 orang alumni pertemuan PSM ini menjalankan fungsinya dengan baik, maka kita yakin Payakumbuh akan menjadi daerah yang besar," tegas Supardi.

Pada para peserta kegiatan itu Supardi meminta untuk tetap semangat mengajak seluruh masyarakat lainnya bersa-





KLIPING BERITA

ma-sama meningkatkan kepedulian, pengawasan di lingkungan masing-masing. Sehingga persoalan sosial bisa dibendung.

Untuk diketahui, kegiatan pertemuan sosial masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan dana pokok pikiran (pokir) Supardi sebagai Ketua DPRD Sumbang. Kegiatan ini diikuti berbagai komponen masyarakat.

Pada kesempatan sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Sumbang, Arry Yuswandi mengatakan pilar adalah tonggak. Untuk

menguatkan sosial masyarakat maka pilar-pilarnya harus diperkuat.

"Untuk itulah kegiatan ini diinisiasi Ketua DPRD yakni menguatkan pilar-pilar sosial di tengah masyarakat. Sehingga persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat bisa diatasi," katanya.

Peserta kegiatan pilar-pilar sosial, terutama PSM diharapkan memiliki tingkat kepedulian yang tinggi pada persoalan sosial di tengah masyarakat.

Arry mengatakan elemen-elemen pilar-pilar sosial diharapkan bisa membantu masyarakat yang PPKS keluar dari permasalahan mereka.

"PPKS ini adalah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Yakni perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar," katanya.

Ia mengatakan, pemerintah tentu membantu PPKS ini. Namun dengan bantuan masyarakat, terutama elemen pilar-pilar sosial maka akan lebih cepat permasalahan teratasi.





KORAN

HARI/TANGGAL

HALAMAN

KORAN PADANG KAMIS, 25 JULI 2024

6

Ketua DPRD Sumbar Ajak Lurah se-Payakumbuh Tingkatkan Kepekaan Sosial

KETUA DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Supardi, mengajak seluruh lurah se-Kota Payakumbuh untuk mengantisipasi berbagai persoalan sosial yang berpotensi terjadi di masyarakat dengan meningkatkan kepekaan sosial.

Menurut Supardi, menurunnya kepekaan sosial menyebabkan berbagai masalah seperti stunting, kemiskinan ekstrem, narkoba, dan judi online. Jika dibiarkan, hal ini dikhawatirkan akan memperdalam jurang persoalan sosial.

"Ranah Minang adalah nagari beradat bersendikan Kitabullah, tidak ada satupun perintah untuk membiarkan kita tidak peduli dengan lingkungan. Kalau kita menjalankan adat dan agama, tidak akan ada lagi persoalan sosial di sekitar kita," terang Supardi.

Supardi mencontohkan fungsi rangkiang di rumah gadang yang mencerminkan kepedulian masyarakat Minangkabau terhadap lingkungan. "Rangkiang di rumah gadang memiliki tiga fungsi: pertama untuk menyimpan kebutuhan pangan sehari-hari, kedua untuk stok jika terjadi kelangkaan pangan, dan ketiga untuk membantu lingkungan seperti bencana atau memberikan bantuan kepada yang membutuhkan," jelas Supardi.

Bimtek Pilar-pilar Sosial yang digelar Jumat (20/7) lalu di Bukittinggi itu diikuti oleh lurah se-Kota Payakumbuh dan perwakilan masyarakat.

Pertemuan ini bertujuan memberikan pemahaman tentang antisipasi berbagai masalah sosial. Kerawanan sosial di Kota Payakumbuh perlu diantisipasi karena Payakumbuh berada di daerah pertintasan. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan meningkatkan kepedulian sosial masyarakat.

"Bapak dan Ibu Lurah memiliki peran penting dalam meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial ini, sehingga ada gerakan bersama untuk memberantas persoalan sosial," ucap Supardi.

Pertemuan Pilar Sosial ini digelar oleh Dinas Sosial Provinsi Sumbar melalui dana pokok Kesua DPRD Sumbar. Supardi, Pilar sosial yang diikuti oleh berbagai komponen masyarakat ini diharapkan menjadi lokomotif gerakan sosial untuk mengantisipasi persoalan sosial di Kota Payakumbuh. (*)



KETUA DPRD Sumbar, Supardi bersama pejabat terkait dalam pembukaan pertemuan pilar sosial.



KLIPING BERITA



SUASANA pertemuan pilar sosial yang dihadiri Ketua DPRD Sumbor, Supardi.



KETUA DPRD Sumbor, Supardi menyampaikan arahan kepada peserta pertemuan pilar sosial.



KETUA DPRD Sumbor, Supardi menyampaikan sambutan.





KLIPING BERITA

KORAN

HARI/TANGGAL

HALAMAN

KORAN PADANG KAMIS, 25 JULI 2024

6

Masyarakat Selingkar Danau Singkarak Datangi DPRD Sumbar, Sampaikan Sejumlah Aspirasi

PADANG, KP - Masyarakat Selingkar (Selingkar) Danau Singkarak mendatangi DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk menyampaikan sejumlah aspirasi yang diharapkan dapat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar.

Salah satu aspirasi utama adalah penolakan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dinilai berpotensi merusak kelestarian ekosistem dan keindahan danau.

Kedatangan masyarakat Selingkar Danau Singkarak diwakili para Wali Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan Badan Pengembangan Kawasan Danau Singkarak (BPKDS), dan disambut Kepala Bagian (Kabag) Persidangan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Sumbar, Zardi Syahrir, di gedung DPRD Sumbar, Rabu (24/7).

Ketua BPKDS, Jasman menyatakan bahwa dari musyawarah perangkat nagari di Selingkar Danau Singkarak, pelaksanaan pengelolaan yang telah berjalan hingga kini tidak berpihak kepada masyarakat.

Pemerintah dan PT PLN dinilai hanya mengambil manfaat untuk kepentingan mereka sendiri, sementara masyarakat yang menggantungkan ekonomi di Danau Singkarak terabaikan.

"Pihak pengelola Danau Singkarak akan membangun PLTS. Dengan adanya PLTS, nantinya

akan mengganggu perkembangan biota danau dan menyulitkan masyarakat nelayan untuk mencari ikan," katanya.

Jasman mengungkapkan bahwa saat ini masyarakat sudah kesulitan mencari ikan akibat adanya perubahan aturan. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, akan menambah angka kemiskinan. Tidak hanya persoalan ekosistem,

sampah pun juga harus menjadi perhatian seluruh pihak. "Jika ada PLTS, nanti sampah akan menumpuk di bawah panel-panel pembangkit listrik tersebut," katanya.

Di sisi lain, masyarakat Selingkar Danau Maninjau juga mengeluhkan tentang persentase pembagian Pajak Air Permukaan (PAP) yang berkurang setelah diberlakukannya Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Dengan berlakunya regulasi tersebut, PAP yang diterima untuk nagari Selingkar Danau Singkarak berkurang menjadi 25 persen, sebelumnya 65 persen. Jika ditambah dengan Daerah Aliran Sungai (DAS), persoalan lain yang harus menjadi perhatian Pemprov adalah, CSR PLTA Singkarak untuk nagari hanya satu kali setiap tiga tahun. "Jumlah tersebut merupakan kontribusi yang tidak signifikan untuk daerah dan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD Sumbar, Zardi Syahrir, mengatakan bahwa pertemuan dengan perangkat nagari Selingkar Danau Singkarak akan dilanjutkan dengan Komisi atau dewan yang bersangkutan.

Dia menyebutkan, aspirasi yang disampaikan akan diteruskan ke pimpinan untuk dibahas lebih lanjut. Jika aspirasi tersebut merupakan kewenangan pemerintahan daerah provinsi, maka akan dibicarakan bersama Pemprov Sumbar. (fai)

NEWS

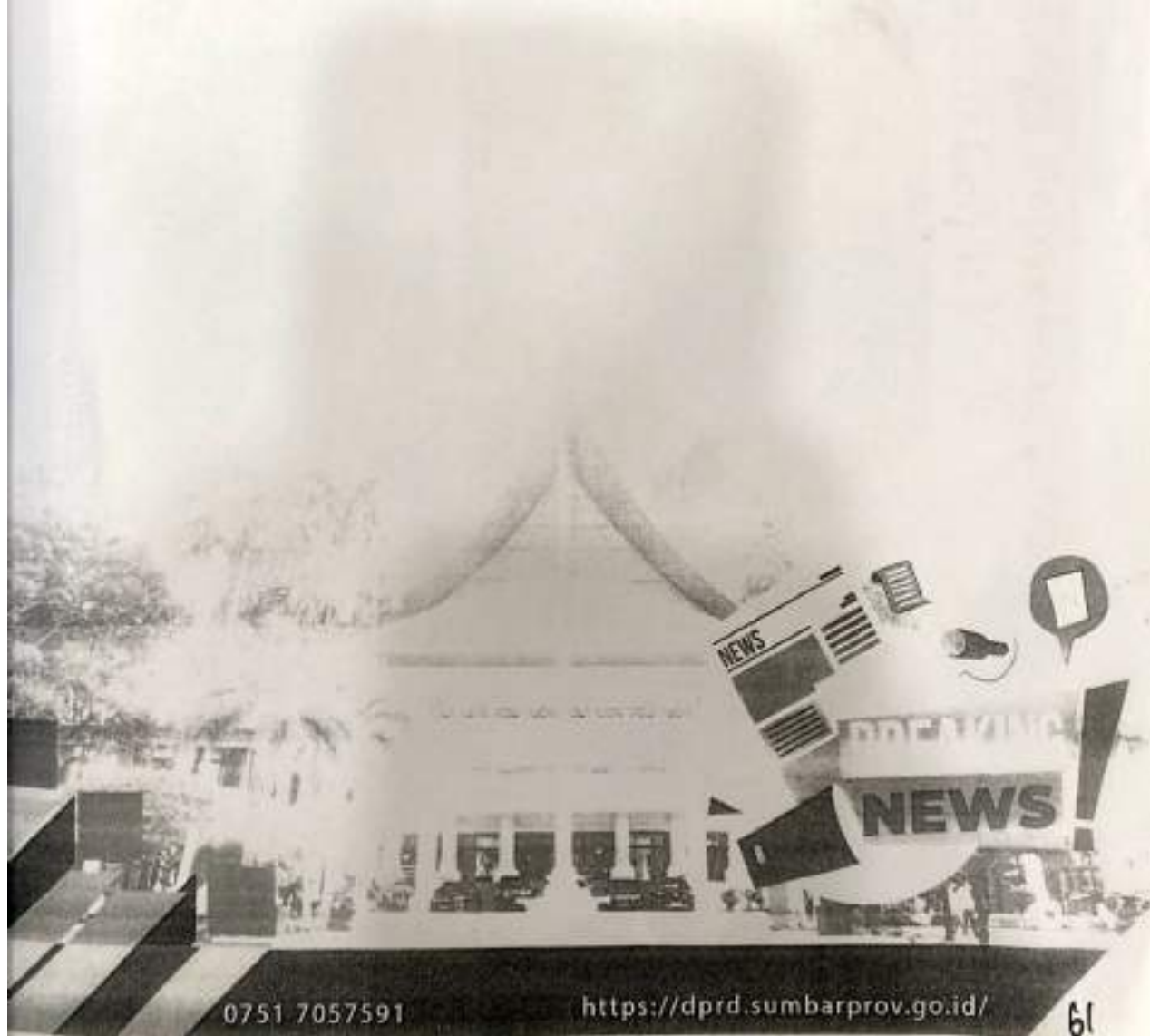
NEWS!



KLIPING BERITA



DPRD Sumbar menerima kedatangan masyarakat Salingka (Seelingkar) Danau Singkarak guna menyampaikan sejumlah aspirasi ke gedung wakil rakyat itu, Rabu (24/7).





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	SENIN, 15 JULI 2024	7

Suwirpen Suib: Semoga Penyelenggaraan Pemilu Menjadi Lebih Baik

Padang, Rakyat Sumbar — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Suwirpen Suib, mengingatkan, pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) harus lebih baik pada masa yang akan datang.

"Dalam pelaksanaan PSU calon DPRD RI, saya merasakan adanya permasalahan antara masyarakat umum memilih dan datang lagi ke TPS," kata Suwirpen Suib, setelah menghadiri acara gillanya pada peringatan Sastra (TTS) di Kantor KPU Kabupaten Padang Timur, Kota Padang, Sabtu (13/7).

Ia menambahkan, penentuan antrean masyarakat datang ke TPS saat PSU DPRD itu, harus dipatuhi peraturan dan bimbingan evaluasi untuk penyelenggaraan Pemilu agar lebih baik ke depan.

"Semoga dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 27 November mendatang, pihak penyelenggara harus bekerja lebih baik lagi," ucap Suwirpen.

Menurut Suwirpen, anggaran PSU yang dialokasikan negara sekitar Rp250 miliar. Namun, anggaran tersebut itu tidak seluruhnya dengan antrean memilih.

"Dengan kondisi sebarang pembangunan yang akan meningkat

pada PSU memiliki suara rendah, tidak semua seperti yang sebelumnya," ungkap Suwirpen.

Selain itu, PSU DPRD RI sebelumnya bisa mencapai 500 ribu, jika melihat sekarang kemungkinan pemungutan bisa mencapai 150 ribu suara. Jadi itu harus menjadi perhatian seluruh pihak," tambah Suwirpen.

Suwirpen mengungkapkan, pelaksanaan PSU di Kabupaten Padang berjalan lancar dan tertib.



harus antrean masyarakat saja yang menurun.

Diketahui, saat PSU DPRD RI sebelumnya tidak ada masalah lagi, sehingga nantinya para serantau yang menjadi perwakilan Sumbar dipusatkan bisa bekerja fokus dan maksimal untuk daerah.

Suwirpen datang ke TPS untuk menyerahkan hasil pada pihak KPU Kabupaten Padang. Saat pemungutan suara pada TPS itu berjalan lancar yang datang banyak informasi yang

ga waktu pemungutan suara selesai juga masih sedikit.

Pihaknya tetap berharap agar PSU bisa sukses dan tidak menyebarkan gosokan gosokan sosial.

PSU dilaksanakan di Sumbar berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan KPU melakukan PSU calon anggota DPRD RI Daerah Pemilihan Sumbar. MK menyetujui KPU mengizinkan KPU Timor, Kota Padang, Sabtu (13/7).

WAKIL KETUA
DPRD Sumbar
Suwirpen Suib,
mengatakan
hasil pemilu
PSU calon
DPRD RI, TPS
nomor 18
Manggalam
bawah Kieci-
matan Padang
Timur, Kota
Padang, Sabtu
(13/7)



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	SENIN, 15 JULI 2024	10

DPRD Toba Konsultasi ke DPRD Sumbar

Pedang, Rakyat Sumbar—Korisi Komisi C DPRD Kabupaten Toba, Provinsi Sumbar, Sabtu (12/7) kemarin, mengadakan kunjungan kerja ke DPRD Sumbar, sebagai tujuan konsultasi bersama perihal urusan administrasi keuangan, maupun pengembangannya untuk sangat baik.

“Ada pertanggungjawaban tersebut anggota Komisi C DPRD Kabupaten Toba melakukan kunjungan kerja ke DPRD Sumatera Barat sebagai konsultasi untuk pertukaran di DPRD Kabupaten Toba,” kata Sabaruddin, saat kunjungan kerja di ruang khusus 1 kantor DPRD Sumbar, Jumat (12/7).

Sementara itu, Sekretaris DPRD Sumbar, Rafis, menjelaskan, p-



SEKRETARIS DPRD Provinsi Sumbar, Rafis, Kabag Persidangan dan Pemin-
dang undangan, Zain Syah, saat menerima kunjungan Komisi C DPRD Kabupaten Toba, Sumatera Utara, di ruang khusus 1 DPRD Sumbar, Jumat (12/7).
Kunjungan tersebut dari tujuan-
tujuan untuk hasil kerja anggota-

in Komisi C DPRD Kabupaten Toba.
Pengiriman bersama anggota

DPRD Sumatera Barat sebut Rafis terbuka dan merasa senang di-
kunjungi oleh anggota dewan dari
berbagai daerah.

Selain bertukar informasi, kunjungan anggota dewan dari berbagai daerah di Indonesia memberikan kontribusi bagi daerah. Dengan kunjungan kunjungan kerja tersebut diharapkan pengem-
ban tatanan dan pengabdian. Kemu-
dian, pemuka rumah ibadah dan
pelaku UMKM yang ada di sume-
tera Barat,” ucap Rafis.

Komis C DPRD Kabupaten Toba kunjungan kerja ke DPRD Sumatera Barat dalam rangka konsultasi tentang keuangan yang menjadi tugas dan kewenangan
kunjungan. (by/ret)

NEWS



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres • SENIN • 22 JULI 2024		2

Pembahasan 2 Ranperda dan Peraturan Beracara segera Rampung

SUMBAR segera memiliki peraturan daerah (Perda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah dan Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Tata Beracara. Setelah, fraksi-fraksi DPRD Sumbang menyampaikan pendapat akhir.

"Ranperda tentang perusahaan perseroan daerah penjamin kredit daerah mengatur tentang perseroan tersebut tetap menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk menjamin kredit/pembiayaan UMKM dan Koperasi yang bergerak di bidang usaha produktif," ujar Wakil Ketua DPRD Sumbang, Suwirpen Sub saat memimpin rapat tersebut.

Menurut dia, hal ini sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan keringanan kepada pelaku UMKM dan Koperasi yang visible (layak secara analisa bank) dan tidak bankable atau tidak layak secara jaminan agunan.

"Keberadaan PT Jamkrida Sumbang (Persero) diyakini dapat menjamin ketidakklayakan agunan tersebut dengan ketentuan calon nasabah untuk melanjutkan penjaminan kredit/pembiayaan pada bank maupun koperasi hingga lembaga keuangan lainnya," ujar dia.

Ranperda ini, kata dia, diadukan pemerintah daerah bertujuan memberikan jasa penjaminan kredit kepada koperasi dan UMKM, memberdayakan koperasi dan UMKM. Termasuk, memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi daerah khususnya mengurangi kemiskinan pengangguran, menjaga stabilitas perekonomian, serta peningkatan penyaluran kredit produktif.

Sedangkan Ranperda tentang Pengelolaan Sampah adalah upaya mematuhi undang-undang. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28(1) ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa negara memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Undang-Undang Dasar memberikan konsekuensi bahwa pemerintah termasuk pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan publik, salah satunya dalam hal pengelolaan sampah. Pemda pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolannya dapat bernilai dengan badan usaha, organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan.

Guna menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat. Serta, tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, dipetik dari payung hukum dalam bentuk perda.

"Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa untuk urusan persampahan pemerintah provinsi berwenang dalam pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional dan penanganan sampah di TPS/TPST regional," kata dia.

Makanya, tambah dia, seiring tumbuh dan berkembangnya masyarakat di Sumbang volume dan jenis sampah yang merupakan limbah dari kegiatan produksi dan konsumsi masyarakat tersebut terus meningkat setiap tahunnya, seiring peningkatan jumlah penduduk dan konsumsi per kapita.

Menurut dia, pengelolaan sampah membutuhkan perubahan mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. "Kebiasaan selama ini bahwa pengelolaan sampah yang bertumpuk pada pendekatan

akhir, santinya ditinggalkan dan diganti dengan kebiasaan baru dalam pengelolaan sampah yakni memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara ekonomis dalam lingkungan," terang dia.

Makanya dalam menyeleng-

garakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang, pemerintahan daerah provinsi untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk perda. Perda yang lama tidak sesuai lagi

dengan kebutuhan sehingga perlu diubah.

Khusus peraturan tata peraturan beracara DPRD Sumbang, sebelumnya ketua panisus penyusunan peraturan tersebut Nurfitrianiwan yang menyebut, muatan aturan tata beracara memiliki beberapa penekanan, di antaranya

cara bersidang, penegakan kode etik dan kedisiplinan para dewan. Meski BK DPRD Sumbang telah memiliki pedoman tata tertib (Tatib) dan aturan tentang Tata Beracara tidak ada, namun BK tidak bisa menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan dewan dengan menyidangkannya. (*)





KLIPING BERITA



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib memimpin rapat penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap dua ranperda di DPRD Sumbar.



ANGGOTA Fraksi Partai Gerindra Syafuddin Putra Di Sunggono menyerahkan pandangan akhir.



ANGGOTA Fraksi PKS Sumbar Nurfirmawansyah menyerahkan pandangan akhir.



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres • SENIN • 22 JULI 2024		3

Hidayat, SS, MH: Kesenian Minang Berkualitas

PANGUNG Apresiasi seni 2024 yang digelar di Taman Budaya Sumatera Barat luar biasa. Ratusan penonton dari berbagai kalangan Terpuak. Berbagai kesenian gerak dan musik Minangkabau ditampilkan dengan sangat mempesona.

Kegiatan tersebut merupakan Program Pokok - Pokok Pikiran (Pikiran) Anggota DPRD Sumbat, Hidayat, SS, MH. Acara yang digelar pada Jumat, 19 Juli 2024 sore dan malam ini dibuka secara resmi oleh Hidayat, SS, MH yang juga calon Wakil Walikota Padang, bersama Hendri Septa.

Hadir juga dalam pembukaan Deputy Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Tubagus Andre, Kepala Dinas kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, seniman akademisi dan ratusan undangan serta pengunjung. Acara tersebut diisi oleh delapan kelompok seni dengan berbagai atraksi menarik.

Dalam sambutannya, kepala Taman Budaya Sumatera Barat, Supriyadi mengucapkan terimakasih atas peran Hidayat, SS, MH dari Fraksi Gerindra.

Hidayat, SS, MH yang juga anggota komisi V DPRD Sumbat mengucapkan terimakasih kepada UPD Taman Budaya, Dinas Kebudayaan dan seniman serta masyarakat yang menyaksikan, atas terselektornya kegiatan tersebut.

Karya pelaku dan komunitas ini sangat luar biasa. Ini membuktikan kualitas mumpuni dari seniman di Kota Padang dan Sumatera Barat," kata Hidayat, SS, MH yang pernah menjabat sebagai ketua UKM Kesenian Universitas Andalas ini.

Atraksi pertunjukan dimulai dengan penampilan sangar tari anak Cosmo. Pada penampilan

pembuka ini, sangar tari anak cosmo menampilkan aksi memukau, garapan tari yang berjudul Setangin. Pertunjukan ini di mainkan oleh penari berusia pelajar SD dan SLTP. Dengan gerakan atraktifegas dengan mengisahkan cerita kehidupan generasi muda mencari jati diri.

Lanjut dengan penampilan Gamad Pituah Minang, kelompok yang di gawangi oleh Eka Malay ini mampu membawa pengunjung ke suasana kota Padang tahun 60 dan 70. Musik gamal, yang khas dari kota Padang ini dibawakan gener-

si muda dengan apik tanpa mengunagi sentuhan identitas gamal.

Usai istirahat sholat Magrib. Pada pukul 20.00 wib, pertunjukan pangung apresiasi seni kembali menyuguhkan pertunjukan garapan tari dan musik oleh palio hati. Bertajuk sumarak galangang, karya musik tari garapan maulana anyidi dig asal Alai Putih Lamo, menghadirkan karya 20 penari berasal dari pelajar SD hingga SLTA.

Menghantikan materi silek pa-uh, tarbutai buai dangdang tam-bue tarbut sebagai pondasi dasar

karya ini memukau ribuan pengan-jung di pelataran parkir gedung baru dinas kebudayaan sumbar.

Dan yang tak kalah menarik lagi, penampilan kelompok satan-gak art dari mahasiswa unp se-makin menambah semarak pangung apresiasi seni 2024. Men-ampikan musik garapan yang ter-inspirasi dari musik rakyat dan den-dang sul serta masih makin mem-berikan warna even ini. Penonton seakan tidak sadar event tersebut ber-akhir hingga hampir tengah malam (*).



Hidayat, SS, MH membuka acara.





KLIPING BERITA



PEMBUKAAN acara Pangung Apresiasi seni 2024 yang digelar di Taman Budaya Sumatera Barat.



PENAMPILAN pembukaan dengan drummer, Wako Padang 2021-2024, Hendri Septa.



KEPALA Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Dr. Jeffrinal Artin,



ATRAKSI kesenian dalam Pangung Apresiasi Seni 2024.



PENONTON memadati lokasi.





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KHAZ	SELASA, 16 JULI 2024 SELASA, 10 MUHARRAM 1445 H	2

DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD SUMBAR

Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 Resmi Disampaikan

Padang, Khazanah — Sejalan dengan perkembangan ekonomi global dan nasional yang cenderung melambat serta tingginya inflasi dan kondisi ekonomi yang semakin tidak menentu, maka asumsi yang digunakan dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun 2024, tidak sesuai lagi dengan kondisi yang berkembang saat ini, baik terhadap asumsi makro ekonomi daerah maupun terhadap proyeksi pendapatan dan belanja daerah.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Sumbar Supardi di dampingi wakil ketua Irayad Syafril dan Suwirpen Sub saat memimpin Rapat Paripurna penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2024 dan penyampaian jawaban DPRD atas tanggapan gubernur terhadap Ranperda Tentang Penyelenggaraan Penyerahan di ruang sidang utama dewan, Senin (15/7).

Dihadiri Wakil Gubernur Audy Jomaldy lebih lanjut Supardi mengatakan, dari laporan realisasi anggaran pada semester 1 Tahun 2024, realisasi pendapatan daerah khususnya dari PAD baru sebesar 38,94 % dan realisasi belanja baru sebesar 30,31 %.

"Disamping itu, SILPA dari APBD Tahun 2023 yang direalisasikan untuk menutup defisit APBD Tahun 2024, juga tidak tercapai," katanya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tukainya, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.

Kondisi yang menyebabkan harus dilakukan pengeseran anggaran, keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan serta sebab lainnya," tuturnya.

Selubungan dengan kondisi tersebut serta memperhatikan laporan realisasi anggaran pada semester pertama Tahun 2024, tumbuh dua, maka APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan, untuk disesuaikan kembali dengan perkembangan yang terjadi.

Untuk itu, lanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, kedalam rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menjadi landasan pada Perubahan APBD dan disampaikan kepada DPRD, paling lambat Minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Menurutnya, dari Pengantar Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024 yang disampaikan oleh gubernur, dapat diketahui dan memahami perlu dilakukannya Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, untuk mewujudkan APBD yang kredibel, sehat dan dapat dilaksanakan.

Melihat pada perkembangan makro ekonomi daerah, SILPA APBD Tahun 2023 serta realisasi

anggaran pada semester pertama Tahun 2024, terlihat bahwa kondisi keuangan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024, tidaklah mengembirakan dan sulit untuk meningkatkan program, kegiatan dan alokasi anggaran dalam rangka percepatan pencapaian target kinerja RP-

JMD, apabila kita tidak mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah.

Hal ini disebabkan, cukup banyaknya beban anggaran yang harus diakomodir dalam Perubahan APBD Tahun 2024, diantaranya pembayaran sisa bagi hasil pajak ke Kabupaten/

Kota, pembayaran kegiatan tahun 2023 yang penyelesaiannya baru dapat dilakukan pada Tahun 2024, serta tidak mencukupinya SILPA Tahun 2023 untuk menutup defisit awal pada APBD Tahun 2024.

Namun demikian, tuturnya, kondisi tersebut tetap harus

dihadapi dengan sikap yang optimis dengan melakukan inovasi dan semakin meningkatkan kinerja dalam pengelolaan APBD, baik melalui peningkatan pendapatan daerah, penggunaan belanja yang lebih efektif, efisien serta tepat sasaran. (jer/)



KLIPING BERITA



KETUA DPRD Sumbang Supardi (dua dari kiri) didampingi Wakil Ketua Insyad Syafar dan Suwirpen Sub mengemukakan palu tanda rapat paripurna hari itu resmi dibuka





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KHAZ	BELASA, 16 JULI 2024 BELASA, 10 MUHARRAM 1445 H	4

DPRD: Festival Maek Kenalkan Sejarah Mega litikum kepada Generasi Muda

Padang, Khazanah- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi mengatakan Festival Maek yang berlangsung pada 17 hingga 20 Juli 2024 merupakan upaya mengenalkan peninggalan sejarah peradaban manusia pada zaman megalitikum kepada generasi muda.

Festival dan pameran tentang Maek ini bertujuan untuk mengenalkan Maek serta peradabannya kepada masyarakat luas," katanya di Padang, Senin.

Sebelum Festival Maek digelar, pemerintah setempat terlebih dahulu

melaksanakan pra-event, yakni pameran Maek. Pameran tersebut menyajikan sejarah dan peradaban tentang Nagari (desa) Maek di Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota yang terkenal dengan menhirnya.

Menurut Supardi, hingga kini peradaban Maek masih menyimpan teka-teki sejarah yang mesti dipecahkan ilmuwan. Sebab, meskipun Universitas Gadjah Mada (UGM) sudah meneliti sebuah tengkorak manusia pada 1985, namun belum berhasil mengungkap sejarah peradaban di Nagari Maek.

"Menhir sebagai jejak peradaban menyimpan banyak misteri. Pada pameran ini masyarakat bisa melihat hasil penelitian para ahli termasuk artefak kuno dari peradaban Maek," jelas Supardi.

Selain fosil manusia pameran tersebut juga memajang penjelasan tentang menhir, sketsa Maek, ukiran menhir dan proses penelitian yang sudah dilakukan para peneliti.

Sementara itu, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Triwujani mengatakan Festival Maek merupakan

bagian dari upaya daerah dalam menggali sejarah nenek moyang termasuk peninggalannya.

Secara khusus BRIN sengaja membawa fosil tengkorak manusia hasil ekskavasi pada tahun 1985 di Nagari Maek, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota.

"Fosil ini sebagai bentuk penghargaan atas kegiatan ini. BRIN berharap Festival Maek memberikan dampak positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan," harap Triwujani. (ant/sal)



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbang	JUMAT 19 JULI 2024	1

Festival Maek, Pintu Masuk Menggali Asal Usul Nenek Moyang Manusia

Rangkaian kegiatan Festival Maek 2024 yang dipusatkan di Lapangan Sepakbola Jorong Koto Godang, Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota, dibuka Rabu (17/7) malam. Festival Maek membuka tabir peradaban manusia yang diprediksikan telah ada sejak 4000 tahun sebelum masehi.

► SARDI NEFRI
Sardi Nefri

DR NAGARI MAER, *dekanal se-*
bagian inggris sebuah lembaga ternama
juni-juni sekolah perkebunan di du-
ra. Diantaranya Maer ditugaskan
dalam menjadi guru pengantar untuk
Maer mendunia dengan status yang
berisi ribuan member dari berbagai
kecamatan termasuk putra yang ba-
nyak ditugaskan di daerah tersebut.

Kesua DPOD Sumbar Supard
satu rombongan festival Maer me-
rupakan satu rombongan tahun lalu
di telah menjadi anggota festival



PENBUKAAN Festival Musik 2023 yang dipusatkan di Lapangan Sepakbola Jorong Rodo Gudang, Nagari Matak, Kecamatan Buak Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota, Rabu malam.

tersebut, vinilasi dari menggunakan UDCI, BRN, hingga Unesco. Ketika itu hasil penula masyarakat Maek dalam sebuah forum diskusi. Trijuntjaya selin mencipratkan imajinasi, Maek asal mula petardahan dunia.

tinggi, maka asal mula peternakan di China.

Pembukaan festival Maok dibantu kaum道教 (religius) yang berasal dari Jepang, Australia, Jerman dan Amerika.

sel itu ditandai pertumbuhan yang pesat dan disebarkan oleh sel-selnya.



KLIPING BERITA

Supardi mengatakan, bahwa ia mendukung penuh untuk menjadikan Maek sebagai destinasi wisata khusus. Sebab, ia meyakini peradaban yang ada di Nagari Maek Diprediksi sudah ada sejak 4000 tahun sebelum masehi (SM).

"Kita berupaya membuktikan bahwa peradaban tertua ada di Nagari Maek ini. Pembuktian itu tengah kita tunggu hasilnya. Sebenarnya, kemarin kita berharap hasil labornya keluar sebelum kegiatan festival ini, namun ternyata belum," ungkap Supardi.

Ketua DPRD Sumbang Supardi berharap suatu saat nanti Maek menjadi destinasi wisata khusus, tempat berkampunya arkeolog dan peneliti-peneliti dunia. Hingga akan mampu mendatangkan tamu-tamu dan wisatawan tidak hanya dari Indonesia, tetapi dari manca negara.

"Setelah 40 tahun lamanya, akhirnya riset dan penelitian tentang Maek dilanjutkan dengan Festival Maek. Saya meminta kepada peneliti UGM agar rangka hasil ekskavasi tahun 1965 diproses kembali," ucapnya.

Permintaan itu agar Maek jadi warisan budaya dunia bisa

dapat terwujud. Maek bakal jadi pariwisata khusus. Lewat Festival, para arkeolog dan peneliti dunia akan membuka penelitian untuk mengungkap tabir dan misteri peradaban manusia.

"Ketika nanti Maek ini menjadi pusat arkeolog dunia, saya pastikan Limapuluh Kota, Kota Payakumbuh dan khususnya Sumbang tingkat kunjungan pariwisatanya akan luar biasa. Jadi kita semua harus bangga dengan banyaknya potensi yang dimiliki Maek," ujarnya.

Supardi berpesan kepada masyarakat Maek agar memanfaatkan potensi yang ada di nagari itu untuk dinikmati oleh pengunjung. Masyarakat juga diminta untuk dapat membangun narasi kepada pengunjung agar tertarik datang serta tinggal lama di Nagari Maek yang punya sekitar 1200 Menhir tersebut.

"Artinya, kita masyarakat harus welcome terhadap tamu-tamu yang datang berkunjung. Yang paling penting sekali adalah kita jangan sampai kehilangan jati diri kita sebagai masyarakat yang berbudaya dan beradab. Sebab, itulah yang akan kita jual kepada mereka, tujuannya."

Mewakili Gubernur Sumbang Mahyeldi, Kepala Dinas Kebudayaan

Sumbang Jefri Arifin mengatakan tentang pentingnya warisan sejarah di Maek. Bagi orang Minangkabau, tambo yang menjadi sumber utama dalam adat. Namun, di Tambo tidak menjelaskan angka dan tahun yang pasti kapan sebenarnya nenek moyang Minangkabau datang dan menetap di pulau perca Sumatera ini.

"Menhir di Maek tak hanya membuat penasaran peneliti, tapi orang Minangkabau juga. Apakah ini bakal jadi lembaran baru dari kebenaran narasi sejarah orang Minangkabau," ujarnya.

Di Sumbang, menhir dan artefak kerangka manusia purba paling banyak ditemukan di Maek. Hingga saat ini kapan masa hidup dari kerangka-kerangka itu belum dapat dipastikan. Dari dugaan saat ini, diperkirakan jasad yang ditemukan di Maek itu berumur 4.000 tahun.

"Sampel-sampel itu sudah dibawa ke Australia untuk dilakukan carbon dating. Tapi hasilnya masih belum keluar. Kita berharap kebenaran itu bakal secepatnya terungkap," ucapnya.

Direktur Festival Maek Donny Eros mengatakan, perhelatan Festival Maek adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Dia bersama para kurator, Zul-

karnaini Diran, Aprimas, Eka Maryanti, Zuarri Abdullah, dan S. Metron Masdison, membutuhkan waktu bertahun-tahun menyiapkannya. Dimulai dari 10 tahun yang lalu hingga sekarang. Baginya Lembah Maek, ibarat permata tersembunyi yang menyimpan kisah-kisah agung dari peradaban kuno.

"Melalui riset yang penuh ketekunan dan semangat, kami berhasil menyingkap tabir misteri yang menyelubungi artefak-artefak, struktur-struktur megah, serta jejak-jejak kehidupan yang memberi kita gambaran akan kekayaan masa lampau," kata Donny Eros yang juga dosen Fakultas Ilmu Budaya Unand itu.

Sementara itu, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumbang dan Ketua DPRD Sumbang yang telah sukses melaksanakan Iven Festival Maek 2024 yang digelar Dinas Kebudayaan Sumbang.

"Festival Maek 2024 ini melampaui ekspektasi kami. Saya tidak menyangka bahwa festival maek 2024 akan semeriah ini. Luar biasa. Kami mengapresiasi Pemprov Sumbang dan Ketua DPRD Sumbang serta seluruh yang terlibat dalam kegiatan ini

termasuk seluruh masyarakat Maek," ujar Bupati Safaruddin.

Bupati Safaruddin menyebut Nagari Maek memiliki potensi pariwisata khusus yang harus terus dikembangkan. Bahkan katanya, kawasan situs bersejarah Menhir Maek telah diakui diringkat nasional dengan menjadi Juara III Anugerah Pesona Indonesia (API) Award 2023 kategori Situs Bersejarah.

"Insya Allah akan kita perjuangkan dan support agar Maek ini menjadi pusat arkeolog dunia. Salah satunya adalah berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Insya Allah kita akan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan menuju Maek dan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya," kata bupati.

Dikatakan Safaruddin, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota siap mendukung penuh digelar Iven-iven serupa di Nagari Maek di masa yang akan datang.

"Kita dukung nanti sesuai dengan anggaran yang ada. Kalau nanti sudah dianggarkan oleh pemprov, nah ini akan kita kolaborasi, Artinya, Pemda Limapuluh Kota mendukung penuh digelar festival ini setiap tahun," tukasnya.

Sementara itu Walinaga-





KLIPING BERITA

ri Maek Efrizal Hendri Dt. Puti-
ah memberikan apresiasi yang
tinggi atas terselenggaranya
ivent ini karena akan membe-
rikan efek positif kepada ma-
syarakat dan nagari maek. "Te-
rimakasih kepada semua pihak
yang terkait atas terselenggara-
nya Festival Maek ini dan kami
ucapkan selamat datang ke Na-
gari Maek untuk para tamu un-
dangan serta pengunjung sela-
ma diadakannya ivent ini," ujar
Efrizal.

Festival Maek 2024 akan
berlangsung selama empat
hari, Rabu 17 Juli hingga Sab-
tu 20 Juli 2024. Sebelumnya, te-
lah dilaksanakan pra festival
di Kota Payakumbuh. Festival
Maek turut menghadirkan ko-
laborasi akademisi, budaya-
wan, dan para seniman dari da-
lam dan luar negeri. Kehadiran
mereka bisa menjadi peluang
kerja sama untuk mempromos-
ikan adat istiadat budaya di
Sumatera Barat.

Pembukaan Festival Maek
terlihat juga hadir Ketua DPRD
Limapuluh Kota Deni Asra, Pj.
Wali Kota Payakumbuh Supra-
yitno, Forkopimda, Kepala Pe-
rangkat Daerah, Camat, Wali
Nagari se-Kecamatan Bukik Ba-
risan, Niniak Mamak, Alim Ula-
ma, Cadiak Pandai, Bundo Kan-
duang dan tamu undangan
lainnya. (sdn)

HARI/TANGGAL

HALAMAN





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KHAZ	KAMIS, 18 JULI 2024 KAMIS, 12 MUHARRAM 1445 H	5

Cerita Dibalik Digelarnya Maek Festival 2024 di Payakumbuh

Payakumbuh, Khazanah Maek yang mulai ramai dibicarakan banyak kalangan sejak beberapa waktu belakangan, ternyata menyimpan sebuah cerita dari Ketua DPRD Sumbar Supardi.

Menurut pengakuan Supardi yang digadang-gadang bakal jadi calon walikota Payakumbuh ini, Maek telah menjadi perhatian dirinya sejak tahun 2014 silam dengan memulai pemasangan pagar besi, dan perluasan, den-

gan memanfaatkan dana aspirasi sebagai anggota DPRD Sumbar untuk menjaga situs Bawah Parit beberapa tahun yang lalu.

Disela-sela persiapan kunjungan ke Maek untuk menghadiri pembukaan Maek Festival 2024, Rabu (17/7), Supardi lebih jauh menceritakan, 2 tahun lalu dirinya merasa beruntung diajak Dinas Pariwisata Kabupaten Limapuluh Kota, yang berencana meningkatkan aura Harau. "Namun saat itu se-

buah proposal tentang Maek menyelip masuk, dan saya tertarik," tukas Supardi.

Dari situlah, sambungnya, pertemuan demi pertemuan berlangsung, mulai dengan diskusi kecil hingga terhimpun, mulai dari selaan perbincangan sampai mendalami data-data.

Supardi juga memaparkan hal itu dengan Dinas Kebudayaan Sumbar berbagai program disusun, dimulai dari pengesa-

han tim ahli, penelitian Daerah Aliran Sungai, curhat masyarakat nasib kekayaan peradaban Maek, DNA, Carbon Dating hingga bermuara pada perhelatan Festival Maek ini.

"Banyak cerita, tumpukan kisah, butuh menguraikan lembar demi lembar secara hati-hati dan teliti. Dan butuh ancing-ancing untuk menelusuri narasi, berbagi warana, agar tersebar merata dan setara," ujarnya.

Supardi juga mengungkapkan kegembiraan disaat mulai menguat perbincangan tentang Nagari Maek Kabupaten Limapuluh Kota tumbuh atensi dari masyarakat maupun perantau.

"Antusiasme mulai terasa ada, kepercayaan bahwa kita lah (orang Maek) yang menerako peradaban nusantara," katanya.

Supardi menegaskan, diskusi internasional dan hasil penelitian, pengem-

banan serta kunjungan, diskusi dalam 18 bulan ini menjadi penting dalam tahapan perencanaan.

Dua kegiatan pra Festival akan menjadi alas bakal bagaimana melihat Maek nantinya, apakah peradaban ataupun perayaan sepuluh atau dua puluh tahun ke depan.

"Intinya, bagaimana potensi Maek dapat membimbing ke tingkat internasional menjadi perbincangan dunia," katanya. (Lili Yumarti)



SUPARDI





KHAZ

HARI/TANGGAL
KAMIS, 18 JULI 2024
KAMIS, 12 MUHARRAM 1445 H

HALAMAN

2

KETUA DPRD SUMBAR SUPARDI:

Festival Maek yang Masih Berkabut Misteri Mesti Segera Diungkap

Sarilamak, Khazanah —Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, Festival Maek yang masih berkabut misteri perlu kita ungkap jadi terang sekaligus untuk mengangkat potensi wisata peradaban dunia.

Untuk itu, ujar Supardi disela-sela kegiatannya jelang pembukaan Festival Maek 2024, Rabu (17/7), segala persiapan festival Maek telah dilakukan oleh tim kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2023.

"Kita juga mengundang beberapa utusan negara Mesir, Jepang dan Australia turut hadir memberikan kaitannya terdapat keberadaan budaya peradaban Maek, termasuk juga kita telah melaporkan ke Unesco dan BRIN di Jakarta," ungkap Supardi.

Supardi juga menyampaikan, Festival Maek merupakan wadah yang mampu membuka ruang besar bagi peneliti, arkeologi dunia dan wisatawan mancanegara datang ke nagari Maek.

"Kita berharap kegiatan festival Maek dapat menjadi kalender tahunan wisata Sumbar. Terutama ke depan semua potensi kebudayaan Maek dan daerah sekitar, seni tradisi, pertunjukan kebudayaan akan menambah kemegahan festival Maek dimasa-masa mendatang, guna meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan mancanegara," harapnya.

Diungkapkan, nantinya Festival Maek 2024 selain akan menyuguhkan berbagai atraksi kebudayaan juga akan menampilkan seni lokal hingga internasional.

Festival Maek digagas Ketua

DPRD Sumbar ini dipusatkan di Jorong Koto Tengah Nagari Maek Kabupaten Limapuluh Kota.

"Juga nantinya akan ada beberapa pertunjukan, diantaranya kolaborasi seni dari tiga negara hingga penampilan ribab Maek," tukiknya.

Terkait Maek Festival yang dibalut dengan pertunjukan seni kebudayaan ini, jelasnya, merupakan upaya untuk mengedukasi peninggalan sejarah peradaban manusia pada zaman megalitikum kepada generasi muda.

"Salah satu tujuan Festival Maek adalah, untuk mengedukasi situs tersebut kepada masyarakat luas," katanya.

Menurut Supardi, hingga kini peradaban Maek masih menyimpan teka-teki sejarah yang mesti dipecahkan dimasa. Sebab, meskipun Universitas Gadjah Mada (UGM) sudah meneliti sebuah tengkorak manusia pada 1985, namun belum berhasil mengungkap sejarah peradaban di Nagari Maek.

Menhir sebagai jejak peradaban menyimpan banyak misteri. Pada pameran ini masyarakat bisa melihat hasil penelitian para ahli termasuk artefak kuno dari peradaban Maek," jelas Supardi.

Dia mengatakan Maek Festival jika berhasil akan membuktikan pada dunia bahwa di Sumatera Barat terdapat situs arkeologi yang bakal mengubah narasi sejarah.

"Selama ini kita tak acuh pada cagar budaya dari peradaban kuno ini, baru setelah 40 tahun, untuk pertama kalinya Maek dipamerkan," ucap Supardi. (Lili Yunlati)





KLIPING BERITA



KETUA DPRD Sumbang Supardi disela-sela kegiatannya jelang pembukaan Festival Maek 2024





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbang		9
KAMIS, 18 JULI 2024		

Membuka Misteri Peradaban Dunia melalui Festival Maek

Padang, Rakyat Sumbang — Ketua DPRD Sumbang, Supardi, mengatakan, Festival Maek bertujuan untuk mengangkat potensi wisata peradaban dunia, karena masih menjadi misteri, sehingga perlu terungkap secara jelas.

"Festival Maek merupakan wadah yang mampu membuka ruang besar para peneliti, arkeolog dunia dan wisatawan mancanegara datang ke Nagari Maek," kata Supardi, di sela waktu kegiatannya, sebelum membuka Festival Maek, Limapuluh Kota, Rabu, (17/7).

Ia melanjutkan, Festival Maek supaya menjadi kalender tahunan wisata Sumbang Kebudayaan Maek dan daerah sekitar, seni tradisi, pertunjukan kebudayaan akan menambah meriahnya Festival Maek.

"Festival Maek dengan kemuda-

yaan yang beragam di daerah sekitar, akan meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan mancanegara," ucap Supardi.

Menurut Supardi, semua persiapan Festival Maek telah dilaksanakan oleh tim kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sejak 2023.

"Kita juga mengundang beberapa utusan negara Mesir, Jepang dan Australia turut hadir memberikan kaitannya terdapat keberadaan budaya peradaban Maek, termasuk juga kita telah melaporkan Unesco dan BRIN di Jakarta," ungkap Supardi.

KETUA DPRD Sumbang, Supardi, di sela waktu kegiatannya, sebelum membuka Festival Maek, di Limapuluh Kota, Rabu, (17/7)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar		4
KAMIS, 18 JULI 2024		

Supardi Dukung Pelaksanaan Festival Maek

Payakumbuh, Rakyat Sumbar — Maek telah menjadi perhatian dari Ketua DPRD Sumbar Supardi, sejak tahun 2014 dengan memulai pemasangan pagar besi, dari perluasan sebagai dana aspirasi diberikan untuk menjaga situs Bawah Parit beberapa tahun yang lalu.

Hal ini diungkapkan Supardi disela-sela persiapan kunjungan ke Maek untuk menghadiri pembukaan Festival Maek 2024 Rabu (17/7).

Ketua DPRD Sumbar menerangkan, 2 tahun lalu dia diajak bermitra oleh Dinas Pariwisata Ka-

bupaten Limapuluh Kota, untuk meningkatkan Awa Harau, namun sebuah proposal tentang Maek menyelinap masuk, dia tertarik.

"Dari sinilah, pertemuan demi pertemuan berlangsung, mulai dengan diskusi kecil hingga terhitung, mulai dari selain pertimbangan sampai mendalami data-data," memulai cerita Supardi.

Supardi juga paparkan dengan Dinas Kebudayaan Sumbar berbagai program disusun, dimulai dari pengesahan tinjauan ahli, penelitian Daerah Aliran Sungai, cegah masyarakat nasib kekayaan peradaban Maek, DNA, Carbon Dating hingga

bermua pada penelitian Festival Maek ini.

"Banyak cerita, tumpukan kisah, butuh menguralkan lembar demi lembar secara hati-hati dan teliti. Dan butuh aancang-aancang untuk menelusuri narasi, berbagi wacana agar tersebar merata dan setara," ujarnya.

Supardi mengungkapkan kegembiraan disaat mulai menguat pertimbangan tentang nagari Maek Kabupaten Limapuluhkota tumbuh atensi dari masyarakat maupun pemerintah.

"Antusiasme mulai terasa ada, kepercayaan bahwa kita lah (ora-

ng Maek) yang menenako peradaban nusantara," katanya.

Supardi tegaskan diskusi internasional dan hasil penelitian, pengembangan, kunjungan diskusi dalam 18 bulan ini menjadi penting dalam tahapan perencanaan.

"Dua kegiatan pra Festival akan menjadi alas bakal bagaimana melihat Maek: Apakah peradaban ataupun perayaan sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. Bagaimana potensi Maek dapat membimbing ke tingkat internasional menjadi pertimbangan dunia," serunya. (bye)



KETUA DPRD Sumbar Supardi saat persiapan pelaksanaan Festival Maek 2024





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
PADANG	KAMIS, 18 JULI 2024	6

PERUBAHAN KUA-PPAS APBD 2024 DISAMPAIKAN

DPRD Sumbar Dorong Pemprov Berinovasi

PEMERINTAH Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyampaikan nota pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024 kepada DPRD Sumbar.

Dokumen Perubahan KUA-PPAS 2024 diserahkan oleh Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy kepada Ketua DPRD Sumbar, Supardi, dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada Senin, 15 Juli 2024, di gedung DPRD Sumbar.

Dalam komposisi Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) 2024 nanti, terdapat banyak pembiayaan daerah yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah pembayaran sisa bagi hasil pajak ke kabupaten/kota dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Supardi, saat memimpin jalannya rapat paripurna tersebut.

Ia menyampaikan bahwa melihat pada perkembangan makro ekonomi daerah serta realisasi anggaran semester pertama tahun 2024, kondisi keuangan daerah pada Perubahan APBD 2024 tidak mengesankan. Oleh karena itu, sulit untuk meningkatkan program dalam pencapaian target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar. Pemerintah daerah harus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Peningkatan PAD harus diupayakan, mengingat cukup banyak beban anggaran yang harus diakomodir, di antaranya pembayaran sisa bagi hasil pajak ke kabupaten/kota, pembayaran kegiatan tahun 2023 yang penyelesaiannya baru dilakukan pada tahun 2024, serta tidak mencukupinya Sisa Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun lalu untuk menutup defisit awal APBD 2024," kata Supardi.

Selain itu, pada 27 November 2024, Sumbar akan melaksanakan pilkada serentak untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Melihat kondisi ini, tentu akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Kondisi ini harus dihadapi dengan sikap optimis

serta melakukan inovasi, meningkatkan kinerja dalam pengelolaan APBD, baik melalui peningkatan pendapatan daerah, penggunaan belanja, serta mengedepankan efektivitas dan efisiensi," tambah Supardi.

Dari laporan realisasi anggaran pada semester satu 2024, realisasi pendapatan daerah dari PAD baru mencapai 38,94 persen dan realisasi belanja baru sebesar 30,31 persen. Sementara SILPA dari APBD 2023 yang direncanakan untuk menutup defisit APBD 2024 juga tidak tercapai.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, mengatakan bahwa memenuhi amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemprov Sumbar menyusun rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

"Kami menyadari bahwa KUA-PPAS Tahun 2024 yang disusun belumlah sepenuhnya menjawab seluruh

usulan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Namun, dengan memperhatikan perubahan RKPD 2024 dan kapasitas keuangan daerah, penyusunan

KUA-PPAS 2024 diupayakan maksimal dan diharapkan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat," tukas Audy Joinaldy. (adv)

KETUA DPRD Sumbar, Supardi menerima nota pengantar Rancangan Perubahan KUA dan PPAS tahun 2024 dari Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy.



NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN

HALAMAN

WAKIL Sumbang, Audy Jendaly mengam
pokan nota pengantar Kencangan Pe-
nambahan RJA dan PMS tahun 2024.



KETUA DPRD Sumbang Supandi memimpin rapat paripurna.



PIMPINAN DPRD Sumbang foto bersama dengan Wakil Gubernur
Sumbang, Audy Jendaly.





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
PADANG	KAMIS, 18 JULI 2024	4

Ketua DPRD Sumbar Dorong Pemda Akomodir Seniman



KETUA DPRD Sumbar Supardi (kiri) berdiskusi dengan Ketua DPD PAPPRI Sumbar, Husin Daruhan (kanan).

PAYAKUMBUH, KP – Ketua DPRD Sumbar Supardi, berdiskusi dengan unsur seniman Kota Payakumbuh di Hotel Pusako, Kota Bukittinggi, Rabu (17/7). Diskusi ini melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) Sumbar, Husin Daruhan.

Dalam diskusi itu, Supardi yang merupakan putra asli Payakumbuh berkomitmen untuk lebih memajukan sektor kesenian dan kebudayaan guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Menurutnya, meskipun karya-karya seniman selalu dinikmati oleh masyarakat luas, nasib mereka sering terabaikan. Tidak semua seniman memiliki kehidupan yang layak dan hal itu harus mendapatkan perhatian dari semua pihak.

"Kita selalu menikmati karya seniman, namun nasib mereka seringkali diabaikan. Tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama," ujar Supardi.

Ia meminta para seniman tetap berkreasi dan menghasilkan karya berkualitas. Terlebih,

keberadaan para seniman memberikan kontribusi positif bagi daerah.

Supardi menekankan, seniman turut bertanggung jawab dalam melestarikan dan memperkenalkan budaya Minangkabau ke pasar yang lebih luas, sehingga berdampak positif pada sektor pariwisata. Para seniman juga termasuk dalam unsur ekonomi kreatif (ekraf).

"Dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, seniman tidak boleh terabaikan dan harus diakomodasi melalui program-program yang terukur," ulasnya.

Sementara, Ketua DPD PAPPRI Sumbar Husin Daruhan Dt. Mangkuto memberikan pandangan positif terhadap peran Supardi dalam

upaya menghidupkan kembali nilai-nilai luhur kebudayaan Payakumbuh. Ia menilai, Supardi telah melakukan banyak upaya untuk mengangkat kebudayaan yang hampir punah selaku Ketua DPRD Sumbar.

Sebagai putra asli daerah Payakumbuh, lanjutnya, Supardi telah menghidupkan kembali beberapa budaya, seperti pelaksanaan Festival Maek.

Husin juga mengapresiasi kegiatan kebudayaan lainnya di Payakumbuh, seperti Sampel long Serombak, yang memberikan pengajaran dan pengetahuan kepada generasi muda, terutama anak-anak sekolah, tentang seni tradisional.

"Mereka diajarkan cara bernyanyi, berendang, dan memainkan alat musik tradisional seperti kecapi dan sampel long yang selama ini hampir terlupakan. Semoga upaya ini terus berlanjut untuk melestarikan dan memperkaya warisan budaya daerah," tuturnya. (fal)



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
PADANG	SENIN, 22 JULI 2024	7

Legislator Desak Pemprov Sumbar Proses DOB Agama

PADANG, KP - Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Rafdinal mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar khususnya Biro Pemerintahan untuk terus menjaga asa terhadap permintaan masyarakat terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Agam.

Dorongan itu diungkapkan Rafdinal saat menerima kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Agam, di ruang bawah Masjid Asy-Syura DPRD Provinsi Sumbar, baru-baru ini.

"Kita mesti menindaklanjuti proses DOB

yang telah berjalan. Karena itu adalah aspirasi masyarakat," ujar Rafdinal politisi asal Fraksi PKS ini.

Menurut Rafdinal, pihaknya sering berdiskusi dengan Gubernur terkait asa DOB, pada prinsipnya sangat mendukung.

"Kita terus melakukan gerakan moral untuk terlaksana DOB, karena memang peran kita di Provinsi sangat menentukan DOB dan kita juga telah desak Biro Pemerintahan melakukan Administrasi sesuai kewenangan Provinsi," ujar Rafdinal (fal)



SEKRETARIS Komisi I DPRD Provinsi Sumbar, Rafdinal saat menerima kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Agam, di ruang bawah Masjid Asy-Syura DPRD Provinsi Sumbar, baru-baru ini.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
PADANG	SENIN, 22 JULI 2024	6

Sekretaris DPRD Sumatera Barat Terima Kunjungan Kerja DPRD Kalimantan Tengah



SEKRETARIS Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Rafli, menerima kunjungan kerja dari Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (19/7).

PADANG, KP - Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Rafli, menerima kunjungan kerja dari Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (19/7). Kunjungan ini bertujuan untuk membahas peran DPRD dalam mendorong sektor pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kunjungan wisata.

Rafli menyampaikan bahwa DPRD Sumbar telah mensahkan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal sebagai dasar pengembangan wisata halal di Ranah Minang.

"Kita berupaya membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk pengembangan wisata halal, karena pemerintah pusat juga memiliki perhatian serius terhadap wisata halal," ujar Rafli.

Dia menambahkan, destinasi wisata halal di Sumbar sangatlah luar biasa dan memerlukan penggalian serta pengembangan sistematis untuk kesejahteraan masyarakat.

Rafli juga menyebutkan Masjid Raya Sumbar Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai salah satu objek wisata terbaru yang luar biasa.

Dalam hal peningkatan sumber daya manusia, Rafli menyebutkan bahwa pihaknya selalu

melakukan kajian dan mencari masukan dari berbagai pihak untuk masa depan. "Aturan telah ada, oleh karena itu semua dapat dilaksanakan dengan baik dan benar," tambahnya.

Sementara itu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Amur, mengungkapkan kelinginannya untuk meminta kepada Gubernur Sumbar agar Sekwan DPRD Provinsi Sumbar, Rafli, dibawa ke Kalimantan Tengah untuk membenahi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

"Saya akan minta kepada Gubernur Sumbar untuk membawa Sekwan DPRD Sumbar Rafli untuk diterapkan serta membenahi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah," ujar Amur, disambut tepuk tangan hadirin.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar dan Sekwan Rafli juga telah menerima berbagai penghargaan, termasuk Penghargaan Tokoh Peduli Penyiaran Sumbar, Penghargaan Achievement Motivation Person, serta mewakili Provinsi Sumbar untuk Anugerah Tinarbuka Peringatan HAKIN. Rafli juga menjadi narasumber di Kemendagri RI.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Komisi III Siti Nafisah, Wakil Ketua Komisi III Siswandi, serta anggota komisi dan staf sekretariat dari Kalimantan Tengah dan Sumbar. (fal)



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
PADANG	SELASA, 16 JULI 2024	7

KUA-PPAS PERUBAHAN APBD 2024

Pembiayaan Daerah Membengkak. DPRD Sumbang Minta Pemprov Berinovasi

PADANG, KP - Dalam komposisi Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2024, terdapat banyak pembiayaan daerah yang harus dipenuhi, termasuk pembayaran sisa bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Sumbang, Supardi, dalam rapat paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2024, Senin (15/7).

Supardi menyampaikan bahwa perkembangan makro ekonomi daerah berdasarkan realisasi anggaran semester pertama tahun 2024 menggambarkan kondisi keuangan daerah pada Perubahan APBD 2024 yang tidak menggembirakan. Akibatnya, sulit untuk meningkatkan program dalam pencapaian target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbang. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Peningkatan PAD harus diupayakan, mengingat banyaknya beban anggaran yang harus diakomodir, termasuk pembayaran sisa bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota, pembayaran kegiatan tahun 2023 yang penyelesaiannya baru dilakukan pada tahun 2024, serta tidak mencukupinya Sisa Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun lalu

"Kondisi ini harus dihadapi dengan sikap optimis serta melakukan inovasi untuk semakin meningkatkan kinerja dalam pengelolaan APBD, baik melalui peningkatan pendapatan daerah, penggunaan belanja, serta mengedepankan efektivitas dan efisiensi," tambah Supardi.

Dari laporan realisasi anggaran pada semester satu 2024, realisasi pendapatan daerah dari PAD baru mencapai 38,94 persen dan realisasi belanja baru sebesar 30,31 persen. Sementara itu, SILPA dari APBD 2023 yang direncanakan untuk menutup defisit APBD 2024 juga tidak tercapai. (fai)

Sebelum itu, pada 27 November 2024, Sumbang akan melaksanakan Pilkada serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Kondisi ini tentu akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.





KLIPING BERITA



KETUA DPRD Sumbar, Supardi menerima Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2024 Provinsi Sumbar dari Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy dalam rapat paripurna, Senin (15/7).





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
PADANG	SELASA, 16 JULI 2024	2

Nagari Maek Berpotensi Jadi Ikon Pariwisata Peradaban



KETUA DPRD Sumbar Supardi dan Peneliti dari Balai Riset Inovasi Nasional (BRIN) Triwujani, saat melihat pameran fosil hasil ekskavasi kuburan di bawah menhir dalam rangkaian Festival Maek.

PAYAKUMBUH, KP - Nagari Seribu Menhir Maek di Kabupaten Limapuluh Kota memiliki potensi besar untuk menjadi ikon pariwisata peradaban masa lalu. Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Sumbar Supardi, saat membuka Diskusi Internasional Hasil Riset dan FGD, di Aula Ngalau Indah Balaikota Payakumbuh. Diskusi ini melibatkan pembicara dari Mesir, Jepang, dan Indonesia.

Supardi menyampaikan, inspirasi peradaban Maek telah didiskusikan sejak tahun 2022 dengan para tokoh dan dosen.

"Para pakar peneliti dunia dan UGM telah memulai berbagai ekskavasi terhadap tengkorak yang ditemukan, namun belum menemui titik terang baik dalam DNA maupun masa usia keberadaan peradaban Maek," ujarnya.

Supardi menyebut, Festival Maek mendapat dukungan dari banyak pihak untuk mengungkap keberadaan peradaban tersebut.

"Jika ini terungkap, tentu akan membuka mata dunia internasional dan memberikan dampak positif bagi Luak Limapuluh Kota dan Sumbar," ucapnya.

Sementara, Sekda Payakumbuh Rida Anan

da mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Payakumbuh yang dikenal sebagai 'Kota Randang'.

"Payakumbuh siap menyambut kedatangan para tamu Festival Maek," ujarnya.

PAMERAN FOSIL TENGKORAK MEGALITHIKUM

Mengawali Festival Maek, diadakan pameran fosil hasil ekskavasi kuburan di bawah menhir. Pameran ini digelar di Gedung Gambir Kota Payakumbuh dan dibuka Ketua DPRD Sumbar Supardi, didampingi Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar Jefri Arifin, Wakil Ketua DPRD Payakumbuh Wulan Denura, dan tokoh lainnya.

Supardi menjelaskan, pameran ini bertujuan untuk memperkenalkan Maek dan peradabannya kepada masyarakat luas.

"Menhir sebagai jejak peradaban menyimpan banyak misteri. Pada pameran ini, masyarakat bisa melihat hasil penelitian para ahli termasuk artefak kuno yang menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban Maek," jelasnya.

Peneliti dari Balai Riset Inovasi Nasional (BRIN) Triwujani, menyambut baik Festival Maek ini sebagai bentuk pengenalan sejarah nenek moyang.

"Kami dari BRIN sengaja membawa fosil tengkorak manusia hasil ekskavasi tahun 1985 sebagai bentuk penghargaan atas kegiatan ini," ungkapnya.

Pameran Hasil Riset Maek ini merupakan rangkaian kegiatan Festival Maek yang digelar melalui dana pikir Ketua DPRD Sumbar Supardi. Puncak festival akan dilaksanakan di Nagari Maek pada 17-20 Juli mendatang dengan berbagai atraksi dan kesenian dari dalam dan luar negeri. (fal)



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
PADANG	SABTU, 20 JULI 2024	6

Fraksi DPRD Sumbar Sampaikan Pandangan Akhir Dua Ranperda dan Peraturan Tata Beracara

FRAKSI-FRAKSI DPRD Provinsi Sumbar menyampaikan pendapat akhir tentang dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan peraturan tata beracara di gedung dewan setempat, baru-baru ini.

Kedua ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah dan Ranperda tentang Pengelolaan Sampah.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib, yang memimpin rapat tersebut, mengatakan bahwa penyampaian pandangan akhir merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan Ranperda. Pandangan akhir tersebut berupa catatan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Ranperda.

Suwirpen menjelaskan bahwa Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah mengatur agar perseroan tetap menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk menjamin kredit/pembiayaan UMKM dan koperasi yang bergerak di bidang usaha produktif.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan keringanan kepada pelaku UMKM dan koperasi yang layak secara analisis bank namun tidak layak secara jaminan agunan.

"Maka dengan keberadaan PT Jamkrida Sumbar (Persero), diyakini dapat menjamin ketidakefektifan agunan tersebut dengan ketentuan calon nasabah untuk melanjutkan penjaminan kredit/pembiayaan pada bank maupun koperasi hingga lembaga keuangan lainnya," katanya.

Ia menambahkan bahwa ranperda ini diajukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan memberikan jasa penjaminan kredit kepada koperasi dan UMKM, memberdayakan koperasi dan UMKM, memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi daerah, khususnya mengurangi kemiskinan dan pengangguran, menjaga stabilitas perekonomian, serta meningkatkan penyaluran kredit produktif.

Kemudian, terkait dengan Ranperda tentang Pengelolaan Sampah adalah upaya mematuhi undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD tersebut, negara memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Amanat UUD Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah, wajib memberikan pelayanan publik, salah satunya dalam hal pengelolaan sampah.

Kewajiban ini memberikan konsekuensi hukum bahwa Pemerintah Daerah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah, meskipun secara operasional pengelolannya dapat bernuansa dengan badan usaha, organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan.

Ia menambahkan bahwa dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk perda.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi berwenang dalam pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional serta penanganan sampah di TPA/TPST regional. "Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat di Sumbar, volume dan jenis sampah yang merupakan limbah dari kegiatan produksi dan konsumsi masyarakat terus meningkat

setiap tahunnya seiring peningkatan jumlah penduduk dan konsumsi per kapita," ujarnya.

Dengan demikian, tambah dia, beban pengelolaan sampah juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ia menilai bahwa pengelolaan sampah membutuhkan perubahan mendasar dalam pendekatannya.

"Keblasan selama ini bahwa pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir saatnya ditinggalkan dan diganti dengan pendekatan baru yang memandang sampah sebagai sumber daya dengan nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis dalam lingkungan, seperti untuk energi, kompos, pupuk, atau bahan baku industri," ujarnya lagi.

Selain itu, pengelolaan sampah harus dilakukan dari hulu sampai hilir, dimulai dari fase produk hingga menjadi sampah, dan kemudian dikembalikan ke lingkungan secara aman. Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, serta memenuhi hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah daerah provinsi untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk perda. "Perda yang lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu diubah," katanya.

Sementara itu, tentang peraturan tata beracara DPRD Sumbar, Ketua Panitia Penyusunan Peraturan





KLIPING BERITA

tersebut, Nurfitriawansyah, mengatakan bahwa muatan aturan tata beracara memiliki beberapa penekanan, di antaranya cara bersidang, penegakan kode etik, dan kedisiplinan para anggota dewan.

Meski BK DPRD Sumbar telah memiliki pedoman tata tertib (Tatib), aturan tentang tata beracara tidak ada, sehingga BK tidak dapat menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan anggota dewan dengan menyidangnya. "Tidak hanya bersidang, BK juga tidak bisa memberikan rekomendasi atas pemeriksaan persoalan yang dilakukan anggota dewan bersangkutan kepada pimpinan DPRD," katanya.

Dalam muatan aturan tata beracara yang disusun Parous, lanjutnya, apabila anggota dewan melakukan pelanggaran berat, maka BK bisa menyidangkan serta mengeluarkan putusan sesuai peraturan Tatib DPRD sebagai rujukan. "Namun, putusan tersebut akan disampaikan pada forum paripurna. Risiko apapun yang diterima anggota dewan akan dikembalikan pada fraksi masing-masing, apakah diberhentikan atau mendapatkan konsekuensi lainnya," ungkapnya. BK sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) bertugas untuk menjaga marwah lembaga, namun tidak memberikan konsekuensi langsung pada anggota dewan yang bermasalah, melainkan mengembalikannya pada fraksi masing-masing. (*)

Ah





KLIPING BERITA



KETERANGAN FOTO GLOBAL : DPRD Sumbang menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi tentang dua rancangan peraturan daerah dan peraturan tata beracara di gedung dewan setempat, baru-baru ini.

0751 7057591

<https://dprd.sumbarprov.go.id/>



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
PADANG	SABTU, 20 JULI 2024	8

Optimalkan Tupoksi, BK DPRD Sultra Belajar ke DPRD Sumbar

PADANG, KP - Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan kunjungan ke BK DPRD Sumbar, Kamis (18/7).

Wakil Ketua BK DPRD Sultra, Muhammad Nur

Sinapoy, mengatakan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk belajar dan berbagi informasi mengenai pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan yang dijalankan Badan Kehormatan DPRD Sumbar.

Melalui sharing informasi ini, ia berharap BK DPRD Sultra bisa lebih maksimal dalam menjalankan tupoksi. "Menjalankan tugas BK ini tidaklah mudah karena perannya adalah menjaga marwah DPRD. Maka dari itu, kami butuh banyak belajar dan mencari masukan, salah satunya dengan mengunjungi DPRD Sumbar hari ini," ujar Muhammad Nur Sinapoy.

Dia menjelaskan, BK DPRD Sumbar dijadikan sebagai tujuan belajar dan berbagi informasi karena pihaknya melihat pelaksanaan tugas BK DPRD Sumbar sudah lebih maju. Sumbar, sebagai salah satu provinsi tertua di Indonesia, telah memiliki DPRD dan BK DPRD Sumbar yang sudah lama terbentuk.

"Salah satu yang ingin kami pelajari adalah bagaimana kiat-kiat BK DPRD Sumbar dalam melakukan pendekatan persuasif untuk membina anggota dewan. Kami tidak ingin BK kami melakukan kesewenangan terhadap anggota dewan," ujarnya.

Muhammad Nur menambahkan bahwa BK DPRD Sultra telah memproses anggota yang me-

langgar, menyidangkan kode etik, dan mengingatkan untuk tidak mengulangi kesalahan. "Mem-bimbing anggota memang tidak semudah yang dibayangkan. Meskipun kami memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, kami tetap harus banyak belajar," ucapnya.

Kunjungan BK DPRD Sultra diterima oleh Ketua BK DPRD Sumbar, Muzli M. Nur. Dia menyebutkan, keberhasilan kinerja BK terlihat dari tidak adanya persoalan internal maupun eksternal yang terjadi di lembaga. Hingga jelang akhir masa jabatan DPRD periode 2019-2024, tidak ada anggota yang di-PAW akibat ketidaksiplinan.

"Keberhasilan BK terlihat dari tidak adanya temuan masalah pada seluruh anggota dewan. Sejak awal, komitmen BK DPRD Sumbar untuk keahggotaan DPRD periode 2019-2024 adalah, 65 orang kita mulai, dan 65 orang juga kita akhiri," ujarnya.

Muzli menambahkan bahwa BK DPRD Sumbar lebih bersikap lembut dalam mengingatkan anggota, mengingat regulasi masih dalam pembahasan.

"Saat ini, kami hampir rampung membahas peraturan tata beracara, yang direncanakan akan ditetapkan akhir Agustus 2024. Setelah ditetapkan, regulasi ini akan diterapkan oleh anggota DPRD periode 2024-2029," ucapnya. (fal)

KUNJUNGAN BK DPRD Sultra diterima Ketua BK DPRD Sumbar, Muzli M. Nur di gedung DPRD Sumbar, Kamis (18/7).



0751 7057591

<https://dprd.sumbarprov.go.id/>

go



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Jumat, 19 Juli 2024 (13 Muharram 1446 H)	10

Perlindungan Anak Dari Kekerasan Merupakan Tanggung Jawab Bersama

Melindungi anak-anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab semua pihak. Hal ini mesti menjadi perhatian karena telah terjadi cukup banyak kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat (Sumbar).

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Sabtu saat membuka kegiatan pembinaan teknis (Bimtek) upaya pencegahan

kekerasan terhadap anak berinisiatif masyarakat L-VII Solusi (16/7) di ZHM Premier Hotel Padang.

Suwirpen mengaku amat khawatir melihat kondisi kasus kekerasan pada anak di Sumbar. Apalagi baru-baru ini ada terjadi kasus kekerasan pada anak berusia 13 bulan yang dilakukan oleh ayah tirinya di Pasaman Barat. Anak tersebut bahkan sampai meninggal dunia.

Seluruh pihak mesti terlibat aktif untuk mencegah semakin banyak kasus kekerasan terhadap anak terjadi di provinsi ini," pinta Suwirpen.

Ia meminta masyarakat jangan ragu untuk melaporkan pada pihak yang berwajib jika melihat ada aksi kekerasan pada anak.

Ia mengatakan kekerasan pada anak bukan hanya kekerasan fisik seperti memukul, menyiksa atau bahkan kekerasan seksual saja.

Kelecewaan anak juga merupakan kekerasan, contohnya anak-anak dipaksa memintaminta uang di persimpangan lampu merah. Ini juga merupakan kekerasan pada anak," paparnya.

Hal yang lebih miris lagi, tambah dia, seringkali pelaku kekerasan merupakan orang-orang terdekat. Ini banyak terjadi pada kasus kekerasan fisik bahkan kekerasan seksual.

Oleh karena itulah Suwirpen

mengajak masyarakat untuk ikut aktif menyelesaikan permasalahan ini. Ia mengajak seluruh unsur untuk lebih optimal dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

Hal ini dikarenakan menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPOL-PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kem PPPA) sepanjang Januari hingga Desember 2022 saja tercatat ada 617 orang korban kekerasan terhadap anak di Sumbar.

"Kekerasan terhadap anak di Sumbar semakin memprihatinkan, semua unsur harus bekerja optimal agar hal tersebut bisa dicegah dan ditangani sesuai prosedur," katanya.

Dia mengatakan, untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak perlu dilakukan

kajian-kajian yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, se-

hingga langkah-langkah yang diambil oleh seluruh pemangku kepentingan berjalan efektif.

Dalam amanat Undang-Undang 1945, anak berhak mendapatkan perlindungan hingga hak untuk hidup layak dari negara. Tidak hanya itu, negara juga wajib melindungi anak dari kekerasan hingga diskriminasi. Untuk itu masukan dari seluruh unsur masyarakat akan sangat bermanfaat untuk lebih mengoptimalkan penerapan amanat Undang-Undang tersebut," katanya.

Ia mengatakan kekerasan terhadap anak telah memberikan dampak negatif dan luas tidak hanya terhadap korban, tetapi juga berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak dalam kehidupan satu keluarga. ■





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



0751 7057591

<https://dprd.sumbarprov.go.id/>

92



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Jumat, 19 Juli 2024 (13 Muharram 1446 H)	/

Festival Maek 2024 Resmi Bergulir

PAYAKUMBUH - Festival Maek 2024 resmi dimulai. Ribuan masyarakat memadati lapangan bola kaki Jorong Koto Gadang, Nagari Maek, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 30 Kota, Festival arkeologi terbesar di Sumatera Barat itu dibuka oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbang Supardi, Rabu (17/7).

Setelah 40 tahun lamanya, akhirnya riset dan penelitian tentang Maek bakal dilanjutkan. Festival Maek sendiri bakal dilakukan selama tiga hari, dari Rabu hingga Sabtu, 17-20 Juli 2024.

Supardi mengatakan, satu setengah tahun ia telah memulai rencana Festival ini. Ketika hadir pemuka masyarakat Maek dalam ruang forum diskusi. Tujuannya satu wujudkan mimpi, Maek asal mula peradaban ini.

Ia itu buat menepis rasa pesimis yang telah ada pada masyarakat Maek. Sebab setiap orang yang datang ke sana, selalu bicara menhir. Ia tak memberi penjelasan apa-apa. Supardi yang punya satu nafas dengan masyarakat Maek hanya ingin satu hal, mimpi dapat terwujud dan Nagari Seribu Menhir jadi dirilik kembali.

Saat ini, semua harapan masyarakat Maek bakal terkumpul 1,5 tahun yang lalu bakal kita ini dan wujudkan," ucapnya, Minggu (17/7). Perjalanan panjang ini dimulai Supardi saat Dinas Kebudayaan Sumbang sejak dari agungjungi UGM, BRIN, hingga Unesco. "Saya minta kepada peneliti UGM agar rangka hasil karasi tahun 1985 diproses kembali," pnya

tu semua agar Maek jadi warisan budaya ia, bisa dapat terwujud. "Maek bakal jadi wisata khusus. Lewat Festival, para arkeolog, peneliti dunia akan membuka penelitian. Ik mengungkap tabir dan misteri peradaban ini," ujar Supardi. Kepala Dinas Kebudayaan Sumbang, Jefri Nal, mewakili gubernur memberikan butan soal betapa pentingnya warisan rah di Maek.

Ia mengatakan, tambo yang menjadi sumber utama dalam adat kita sebagai orang Minang, tidak memberikan angka dan tahun yang pasti. Kapan sebenarnya nenek moyang kita datang dan menetap di pulau perca Sumatera ini.

"Menhir di Maek tak hanya membuat penasaran peneliti tapi kita juga orang Minangkabau, apakah ini bakal jadi tembaran baru dari kebenaran narasi sejarah kita orang Minangkabau," ujarnya. Rabu (17/7).

Di Sumbang sendiri, menhir dan artefak kerangka manusia purba paling banyak ditemukan di maek. Lanjut Jefri Nal, hingga saat ini kapan masa hidup dari kerangka-kerangka itu belum dapat dipastikan.

"Sampel-sampel itu sudah dibawa ke Austria untuk dilakukan carbon dating. Tapi hasilnya masih belum keluar. Kita harapkan kebenaran itu bakal secepatnya terungkap," ucap mantan Kepala Keshangpol Pemprov Sumbang itu.

Namun dari dugaan saat ini, diperkirakan jasad yang ditemukan di Maek itu berumur 4000 tahun. Berdekatan dengan kapal nabi nabi kira-kira 5000 tahun lalu. Artinya sudah sangat lama ada manusia yang hidup di tanah Minang.

Helat ini turut menghadirkan kolaborasi akademisi, budayawan, dan para seniman dari dalam dan luar negeri. Hal ini menjadi peluang kerja sama untuk mempromosikan adat istiadat budaya di Sumatera Barat.

"Harapan Kita event ini bisa dimanfaatkan oleh anak nagari maek untuk mempertahankan budaya itu semua. Sebab selama ini orang datang bukan hanya saja karena ada peninggalan purbakala di nagari maek. Tapi juga karena ke khasan adat istiadat Maek," ucapnya.

Peninggalan sejarah di maek termasuk cagar budaya yang dilindungi Undang-undang di Indonesia. Pemprov Sumbang papar Jefri Nal, berkomitmen untuk melestarikan seluruh cagar budaya yang ada, khususnya nagari Maek.

Secepatnya ia akan menetapkan Maek sebagai cagar budaya provinsi dan nasional, dan

jadi warisan budaya dunia.

"Semoga dengan diselenggarakannya event ini jadi pengingat dan motivasi untuk kita semua mengupayakan impian itu terwujud. Sebab warisan dunia merupakan jalan panjang penelitian berbagai disiplin ilmu dan kerumitan birokrasi. Moga moga menhir menyusul WTBOS jadi warisan dunia," ujarnya.

Bupati 50 Kota Safaruddin yang turut hadir dalam pembukaan juga berjanji bakal





KLIPING BERITA

melanjutkan festival ini kedepannya.

Fitrialdi Hendei Wali Nagari Maek sembari berseloroh dalam sambutannya turut mengamini visi itu. "Kami masyarakat maek siap mengurugi minuman manis. Tapi akan menebar senyuman manis. Nagari Maek siap jadi destinasi wisata arkeologi dunia," tuturnya.

Direktur Festival Donny Eros, dalam sambutannya menyampaikan bahwa perhelatan ini adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah.

Ia bersama para kurator, Zulkarnaini Duran, Aprimas, Eka Maryanti, Zuari Abdullah, dan S. Metron Masdison, butuh waktu bertahun-tahun menyiapkannya. Dimulai dari 10 tahun yang lalu hingga sekarang.

Baginya Lembah Maek, ibarat permata tersembunyi yang menyimpan kisah-kisah agung dari peradaban kuno.

Melalui riset yang penuh ketekunan dan semangat, kami berhasil menyibak tabir misteri yang menyelimuti artefak-artefak, struktur-struktur megah, serta jejak-jejak kehidupan yang memberi kita gambaran akan kekayaan masa lampau," kata dosen Fakultas Ilmu Budaya Unand itu, Rabu (17/7).

Ia juga berterima kasih pada masyarakat Maek, yang dengan kehangatannya dengan senang hati bekerja sama.

Festival ini turut menghasilkan dua buku dari empat orang seniman. Mereka adalah Iyut Fitra dan Yudifan Habib yang menulis "Maek Memantul Dalam Puisi dan Prosa" serta Widi Adrianto dan Satria Putra dalam karya, "Maek Cerita Dibalik Sketsa."

Para seniman yang sudah berkontemplasi selama berbulan-bulan dengan alam Maek ini akan mempresentasikan karya-karya mereka dalam sesi diskusi dihari kedua.

Mereka bakal membahas berbagai hal terkait karya yang dihasilkan mulai dari proses hingga siasat dan strategi mereka ketika hendak merespon Maek secara kreatif.

"Kami berharap, buku ini bukan sekadar panduan, namun juga menjadi jendela yang membuka cakrawala pengetahuan dan inspirasi bagi Anda semua," ucap Donny.

Ia juga berharap seluruh rangkaian Festival Maek turut mendukung agenda pemajuan kebudayaan, utamanya di Maek.

Festival dibuka oleh seni pertunjukan "Mimetik Sulbi (Hikayat Batu Tegak)", karya duet dramaturg S. Metron Masdison dan Zuari Abdullah dengan Andre Junaldi sebagai pengisi musik.

Pementasan ini ingin mereplikasi peristiwa paling sublim dalam sejarah Maek, Batu Tegak.

Pertunjukan ini diawakan oleh sekelompok pemuda yang membopong batu besar serupa menhir. Diiringi seorang "Janang" (narator) yang membawakan prolog berbahasa Minang.

Para pemuda itu kemudian memaek (memukul) batu tersebut. Dalam pertunjukan ini koreografer Jefriandi Laman (Indonesia), Bianca Sere Pulungan (Jerman), dan Janette Hoe (Australia), berkolaborasi dengan 20 anak nagari Maek.

Selama tiga hari festival bakal membedah beragam topik diskusi terkait Maek. (*)

JGAL

HALAMAN





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres • JUMAT • 19 JULI 2024		14

Festival Maek, Sumbar Bisa jadi Destinasi Tujuan

Payukumbuh, Padak—Festival Maek siap menjadi destinasi wisata arkeolog global, dan masyarakat Maek siap menyambut para arkeolog dunia.

"Terima kasih kepada Bapak Supardi yang telah mengangkat acara ini, dan juga kepada seluruh pihak yang menjadikan Maek mendunia," sebut Wali Nagari Maek Ehtal, dalam sambutannya pada acara pembukaan Festival Budaya Maek di lapangan sepak bola Maek, Rabu malam (17/7).

Ia menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, karena tidak semua aspirasi dapat diakomodir. "Semoga kegiatan Festival Budaya Maek ini akan terus berlangsung setiap tahunnya dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Nagari Maek," ungkapnya.

Festival Maek merupakan salah satu strategi untuk mengangkat potensi besar Nagari Maek, yang dikenal dengan Menhir.

Direktur Festival, Dni Eros, berharap Maek bisa membuka tabir tentang per-



SEMARAK: Ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi, Kadis Kebudayaan Sumbar Jefri Arifin saat membuka Festival Maek, Kamis (18/7).

adaban ini.

"Menhir bukan hanya sekadar batu, tetapi ada misteri peradaban yang mengundang dunia untuk melihat Maek. Ada dari Jerman, Mesir, Singapura, dan sejumlah arkeolog yang hadir pada malam ini," kata Dni Eros.

Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin, sangat mengapresiasi kegiatan Festival Maek ini. Pemkab Limapuluh Kota berkomitmen untuk terus mengembangkan Men-

hir sebagai potensi besar yang harus dikenal dunia.

"Insya Allah, Festival Maek akan menjadi agenda tahunan Limapuluh Kota, sehingga Maek mendunia," kata Safaruddin.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, yang diwakili oleh Kadis Kebudayaan, Jefri Arifin, mengungkapkan Festival Maek sebagai pintu masuk untuk menggali asal usul nenek moyang manusia. Peradaban di

Maek diperkirakan sudah ada sejak 4000 tahun SM.

"Maek bukan hanya sekadar festival, namun menjadi ajang untuk memperkenalkan Maek di pentas peradaban dunia. Terima kasih Pak Supardi atas prakarsanya mengangkat acara ini," kata Kadis Kebudayaan yang mewakili Gubernur Sumbar.

Festival Maek resmi dimulai Rabu (17/7) malam. Acara diawali dengan penampilan tari tentang menhir yang dibawakan oleh Anak Nagari Maek, beserta koreografer dari Indonesia, Jerman, dan Australia.

Tarian itu menggambarkan situs asal muasal menhir yang menjadi sejarah peradaban dunia dan masih menjadi misteri. Puncak Festival Maek digelar di Nagari Maek, Kabupaten Limapuluh Kota, dari 17 sampai 20 Juli 2024.

Berbagai diskusi dan atraksi seni dari berbagai provinsi ditampilkan selama 4 hari tersebut. Pembukaan Festival Maek dihadiri oleh ribuan masyarakat Limapuluh Kota dan Payakumbuh. Masyarakat antusias mengikuti seluruh rangkaian acara. (s)





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	JUMAT 19 JULI 2024	5

Ketua DPRD Soroti Realisasi Anggaran

KUPA-PPAS Tahun 2024 Mulai Dibahas

KEBIJAKAN Umum Perubahan Anggaran-Pisafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun 2024 mulai dibahas. Menyusul, sudah diserahkannya nota pengantar rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perubahan KUPA-PPAS Tahun 2024 dalam rapat Paripurna DPRD Sumbang, Senin (15/7) lalu.

Ketua DPRD Sumbang Supardi saat memimpin rapat paripurna tersebut menyoroti realisasi anggaran semester pertama tahun 2024. Di mana, realisasi pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah (PAD) baru sebesar 38,94 persen dan realisasi belanja daerah baru sebesar 30,31 persen.

Bahkan, ada lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun 2023 yang direncanakan untuk menutupi APBD 2024 juga tidak tercapai. Dia menekan bahwa lewat APBD perubahan dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

pergeseran anggaran.

"Silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan serta sebab lainnya. Nah, memperhatikan laporan realisasi anggaran dan keadaan tersebut, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan kembali dengan perkembangan yang terjadi," jelas dia.

Melihat perkembangan makro ekonomi daerah, Silpa APBD tahun 2023 dan realisasi anggaran semester pertama tahun 2024 terlihat bahwa kondisi keuangan daerah pada APBD perubahan tahun 2024 tidak mengesankan.

"Hal ini menyebabkan sulit untuk meningkatkan program, kegiatan dan alokasi anggaran guna percepatan pencapaian target kinerja rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPMD), jika tidak mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah," terang Supardi.

Menurut dia, kondisi ini dipicu cukup banyak beban yang harus diakomodir dalam APBD perubahan 2024, seperti pembayaran sisa bagi hasil pajak ke kabupaten/kota. Lalu, pembayaran kegiatan tahun 2023 yang penyelesaiannya baru dapat dilakukan di tahun 2024 dan tidak mengesampingkan Silpa untuk menutupi defisit awal APBD 2024.

"Pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) dan pilkada di kabupaten/kota pada 27 November 2024 mendatang, diyakini juga berdampak kepada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah," ujar Supardi.

Itu begitu, tambah dia, hal ini tetap harus dihadapi lewat sikap optimis, melakukan inovasi dan meningkatkan kinerja pengelolaan APBD. Apakah itu, peningkatan pendapatan daerah, penggunaan belanja yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.

Rancangan perubahan KUA PPAS tahun 2024 memuat, pendapatan daerah direncanakan bertambah minimal Rp 2,25 miliar lebih menjadi Rp 6,58 triliun. Lalu, belanja daerah bertambah dari Rp 6,81 triliun pada APBD awal menjadi Rp 7,03 triliun.

Wakil Gubernur Sumbang, Andy Jolinda mewakili gubernur menyampaikan bahwa pengajuan perubahan KUA PPAS tahun 2024 didasari pada beberapa kondisi. Termasuk, perkembangan yang terjadi dan perubahan asumsi perekonomian. Hal ini adalah yang mendasari Pemprov Sumbang menyusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dasar bagi dilakukannya perubahan KUA PPAS.

"Di samping itu, perubahan perencanaan dan penganggaran juga didasari oleh keadaan aktual yang telah terjadi sejak awal tahun sampai akhir semester

pertama tahun 2024. Hal ini dipicu bencana alam sampai terdapat hal yang bersifat pengaturan dari pemerintah pusat, dimana administrasi dan hasil audit BPK atas LKPD tahun 2023," ujar dia.

Intinya, perlu menyesuaikan kebijakan umum anggaran menyikapi hal-hal yang telah terjadi selama semester pertama 2024. Hal ini juga disebabkan terjadinya perubahan kekurangan Silpa tahun 2023 yang dijadikan penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2024.

Hasil pemeriksaan BPK Silpa tahun 2023 sebesar Rp 180,4 miliar sedangkan dalam APBD tahun 2024 diharapkan sebesar Rp 251,4 miliar. Artinya, terdapat kekurangan penerimaan pembiayaan Rp 70,9 miliar lebih. Terjadinya bencana alam juga memicu dilakukan perubahan KUA PPAS. Antara lain, erupsi Gunung Marapi, galodo di beberapa kabupaten dan kota, dan lainnya," jelas dia.

Di samping itu, juga pengaturan pemerintah pusat yang memerlukan pergeseran dan perubahan anggaran, serta pergeseran dan perubahan anggaran OPD, dan kewajiban untuk menganggarkan kembali DAK dan lainnya. (*)





KLIPING BERITA



WAGUB Sumbar Audy Joinaldy menyerahkan nota pengantar rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perubahan KUPA-PPAS Tahun 2024 kepada Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi wakil ketua dan sekwan dalam rapat Paripurna DPRD Sumbar, di Gedung DPRD Sumbar, Senin (15/7) lalu.

KETUA DPRD Sumbar Supardi memimpin rapat paripurna nota pengantar rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perubahan KUPA-PPAS Tahun 2024 dalam rapat Paripurna DPRD Sumbar, Senin (15/7) lalu.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	KAMIS, 18 JULI 2024 12 Muharam 1446 H	16

CEGAH KEKERASAN ANAK

Wakil Ketua DPRD Sumbar Dorong Semua Pihak Berperan

PADANG, HALUAN — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Suwirpen Suib prihatin terhadap beberapa kasus kekerasan yang menimpa anak-anak yang terjadi di Sumbar.

Salah satunya kasus penganiayaan terhadap anak 13 bulan yang dilakukan oleh bapak tirinya yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar).

Keprihatinan tersebut diungkapkan Suwirpen saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Berbasis Masyarakat Angkatan VII di salah satu hotel di Kota Padang, Selasa (16/7).

"Kasus kekerasan terhadap anak 13 bulan yang meninggal dunia dianiaya oleh bapak tirinya, tengah menjadi sorotan masyarakat Sumbar. Ke depan kasus serupa jangan sampai terulang, seluruh pihak harus mengawasi untuk mencegah kekerasan terhadap anak," katanya.

Suwirpen yang juga polisi

Demokrat ini mengimbau masyarakat jangan ragu untuk melapor kepada pihak berwenang ketika ada kasus kekerasan yang menimpa anak-anak, salah satunya DP3AP2KB. Jika tidak ada yang melaporkan siapa yang mengetahui. Apakah harus menunggu korban kekerasan meninggal dunia dahulu.

"Kekerasan terhadap anak

banyak terjadi di Sumbar, namun banyak yang memilih untuk tidak mengungkapkan. Mungkin salah satu faktornya adalah tempat kejadian pada lingkungan keluarga, sehingga banyak masyarakat acuh. Padahal itu harus dilaporkan untuk menyelamatkan perkembangan anak," katanya.

Salah satu fenomena yang tergolong kekerasan terhadap anak lainnya adalah, banyaknya eksploitasi anak pada lampu merah yang dipaksa bekerja

hingga belasan jam. Tidak hanya kekerasan yang menyebabkan keprihatinan, eksploitasi anak yang menyebabkan rasa teraniaya juga harus menjadi sorotan.

"Banyak anak-anak dibawa untuk meminta sedekah di persimpangan jalan hingga lampu merah, mereka berhujan

dan berpanas setiap hari. Bahkan ada yang sampai sakit dan meninggal dunia," katanya.

Dia mengartakan perlindungan anak dari kekerasan

merupakan tanggung jawab bersama, seluruh unsur harus terlibat untuk melindungi agar angkanya tidak terus meningkat setiap tahun. (h/len)





KLIPING BERITA



WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Suwirpan, Suib saat membuka Bimbingan Teknis Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Berbasis Masyarakat



BIMBINGAN Teknis Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Berbasis Masyarakat



BERFOTO bersama





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluán	KAMIS, 18 JULI 2024 12 Muharram 1445 H	15

MAEK FESTIVAL 2024 DITABUH

Gambarkan Peradaban Masa Lalu Melalui Atraksi Budaya

PYAKUMBUH, HALUAN- Maek Festival 2024 ditabuh pada Rabu (17/7). Acara ini menyuguhkan berbagai atraksi kebudayaan yang menggambarkan peradaban masa lalu dari seniman lokal hingga internasional.

Maek Festival yang digagas oleh Ketua DPRD Sumbang, Supardi dimulai pada pukul 19.50, dan erpusat di Jorong Koto Tengah Nagari Maek Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ketua DPRD Sumbang Supardi mengatakan, dalam rangkaian Festival Maek 2024 ada beberapa pertunjukan yang ditampilkan, diantaranya kolaborasi seni dari tiga negara hingga penampilan rabab Maek.

Terkait Maek Festival yang dibakar dengan pertunjukan seni kebudayaan, hal ini merupakan upaya untuk mengenalkan peninggalan sejarah peradaban manusia pada zaman megalitikum kepada generasi muda.

"Salah satu tujuan Festival Maek adalah untuk mengenalkan situs tersebut kepada masyarakat luas, nandinya para arkeolog dari Mesir, Jepang, Australia, Jerman, dan India

akan hadir untuk melakukan berbagai hal dalam mengungkap misteri maek," katanya.

Menurut Supardi, hingga kini peradaban Maek masih menyimpan teka-teki sejarah yang mesti dipecahkan keilmuan. Sebab, meskipun Universitas Gadjah Mada (UGM) sudah meneliti sebuah tengkorak manusia pada 1985, namun belum berhasil mengungkap sejarah peradaban di Nagari Maek.

"Menhir sebagai jejak peradaban menyimpan banyak misteri. Pada pameran ini masyarakat bisa melihat hasil penelitian para ahli termasuk artefak kuno dari peradaban Maek,"

jelanya.

Ia menambahkan, Maek Festival jika berhasil akan membuktikan pada dunia bahwa di Sumatera Barat terdapat situs arkeologi yang bakal mengubah narasi sejarah.

"Selama ini kita tak acuh pada cagar budaya dan peradaban kuno ini, baru setelah 40 tahun, untuk pertama kalinya Maek dipamerkan," ucap Supardi.

Dalam menyukseskan Maek Festival, masyarakat hingga seluruh unsur yang terlibat telah melakukan berbagai persiapan, termasuk bergeser lokasi yang merupakan pusat acara yang terdapat berbagai Menhir. (h/len)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SELASA, 16 JULI 2024 9 Muharram 1446 H	16

PSU MINIM PARTISIPASI PEMILIH

Wakil Ketua DPRD Sumbar : Jadikan Evalua si untuk Pemilu yang Lebih Baik

PADANG, HALUAN - Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib berharap penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) di Sumbar bisa lebih baik lagi ke depan. Dengan pelaksanaan pemilu yang baik, akan memberikan banyak dampak positif. Diantaranya efektifitas penggunaan anggaran hingga peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak suara.

Hal tersebut diungkapkan Suwirpen saat menyakrakan hak pilihnya pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) calon De-

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen usai menyalurkan hak pilihnya dalam PSU calon DPD RI, Sabtu lalu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nomor 18 Marapalam Indah Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.

wan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sabtu (13/7) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nomor 18 Marapalam Indah Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.

"Dalam pelaksanaan PSU calon DPD RI, saya merasakan penurunan animo masyarakat untuk memilih dan datang ke TPS, semoga dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemukada) 27 November, pihak penyelenggara bendaknya bisa bekerja lebih baik lagi, dan partisipasi masyarakat sesuai yang diharapkan," kata Suwirpen.

Dia menyayangkan adanya penurunan animo masyarakat datang ke TPS. Menurut dia, ini harus dijadikan pelajaran dan bahan evaluasi untuk pemilu yang lebih baik ke depan.

Anggaran PSU Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbar dialokasikan oleh negara kurang lebih sebesar Rp250 miliar. Dengan kondisi sekarang kemungkinan yang akan menang pada PSU memiliki jumlah suara rendah, tidak satu seperti yang sebelumnya.

"Sebelum PSU DPD RI, pemenang bisa meraih kurang lebih 390 ribu suara, jika melihat sekarang kemungkinan pemenang bisa meraih 150 ribu suara. Jadi itu harus menjadi

perhatian seluruh pihak," ungkapnya.

Suwirpen mengungkapkan, pelaksanaan PSU di Marapalam Indah berjalan lancar dan tertib, hanya animo masyarakat saja yang menurun. Diharapkan usai PSU DPD RI sekarang tidak ada masalah lagi, sehingga nantinya para senator yang menjadi perwakilan Sumbar di

pusat bisa bekerja fokus dan maksimal untuk daerah.

Suwirpen sendiri, datang ke TPS untuk menyakrakan hak pilih pada pukul 8.24 WIB. Saat pemungutan suara pada TPS itu belum banyak yang datang, bahkan informasi nya hingga waktu pemungutan suara selesai juga masih sedikit. Menurut data terakhir dari 299 DPT hanya 67

orang yang datang ke TPS tersebut untuk mengikuti PSU.

"Pihaknya tetap berharap agar PSU bisa sukses dan tidak menyebabkan gesekan gesekan sosial," ungkapnya.

Suwirpen Suib menambahkan, apapun hasil yang didapatkan dari PSU harus diterima dengan lapang dada, meskipun itu tidak sesuai dengan keingi-

nan. Teruslah jaga kekompakan pada lingkungan walaupun berbeda pandangan dalam memilih calon. Jangan sampai terpecah belah dalam kehidupan sosial karena akan membuat masyarakat Sumbar lemah.

"Apuan hasilnya itu adalah kehendak yang maha kuasa," katanya.



KLIPING BERITA

Dia mengartikan sebagai masyarakat yang baik marilah bersabar menunggu hasil PSU resmi dari KPU, jangan menyebarkan berita yang tidak benar dan merugikan orang lain. Ada domba hingga menyebabkan perpecahan sangat mudah terjadi pada kondisi seperti sekarang.

Sebelumnya, pelaksanaan PSU yang dilaksanakan di Sumbar berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan KPU untuk melakukan PSU calon anggota DPRD RI Daerah Pemilihan Sumbar. Dalam keputusan MK juga memerintahkan KPU mengikutsertakan Irman Gusman sebagai peserta. (adv)



Saat rapat dengan mitra kerja



Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Sub saat memimpin rapat kerja di DPRD Sumbar



Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Sub bersama dengan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Insyad Syafar dalam rapat yang digelar oleh DPRD



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SELASA, 16 JULI 2024 10 Muharam 1446 H	5

PAMERAN DI FESTIVAL MAEK

Perkenalkan Peradaban Maek ke Masyarakat Luas

PAYAKUMBUH, HALUAN-Pameran Maek sebagai bagian dari Festival Maek resmi dibuka, Minggu (14/7). Pada pameran ini ditampilkan berbagai jejak sejarah peradaban Maek. Termasuk salah satunya fosil hasil ekskavasi kuburan yang berada di bawah menhir.

Pameran yang digelar di Gedung Gambir Kota Payakumbuh ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Sumbar, Supardi didampingi oleh Kepala Dinas Kebudayaan Sum-

bar Jefri Alifin, Wakil Ketua DPRD Payakumbuh, Wulan Denura dan sejumlah tokoh masyarakat daerah setempat.

Supardi dalam sambutannya mengemukakan, pameran yang

dibuka untuk umum ini bertujuan untuk memperkenalkan Maek dan peradabannya kepada masyarakat luas.

"Pameran ini membentangkan sejarah dan peradaban Maek. Menhir sebagai jejak peradaban menyimpan banyak misteri. Pada pameran ini masyarakat bisa melihat hasil penelitian para ahli termasuk artefak kuno yang bagian tak terpisahkan dari peradaban Maek," jelas Supardi.

Selain fosil manusia, pada pameran tersebut juga dipajang penjelasan tentang menhir, sketsa maek, ukiran menhir, dan proses pendirian yang sudah dilakukan.

"Pameran ini bisa dikunjungi hingga 16 Juli, pengunjung dipastikan akan memahami tentang Maek yang seharusnya menjadi kebanggaan kita," ucap Supardi.

Peneliti dari Balai Riset Inovasi Nasional (BRIN) Triwulan, menyambut baik Festi-

val Maek ini sebagai bentuk

pengetahuan," harap Timi. Pameran Hasil Riset ini merupakan rangkaian dari Festival Maek yang melalui Dinas Pokir DPRD Sumbar, Supardi akan festival dilaksanakan Maek pada tanggal 17-20 Juli mendatang di Maek. Berbagai atraksi kesenian dalam dan luar akan ditampilkan secara menarik dalam kegiatan ini (14/7).

val Maek ini sebagai bentuk mengenali sejarah nenek moyang. Arkeolog ini menyebut sangat jarang tokoh yang membekalkan perhatian serius terhadap budaya dan benda purbakala.

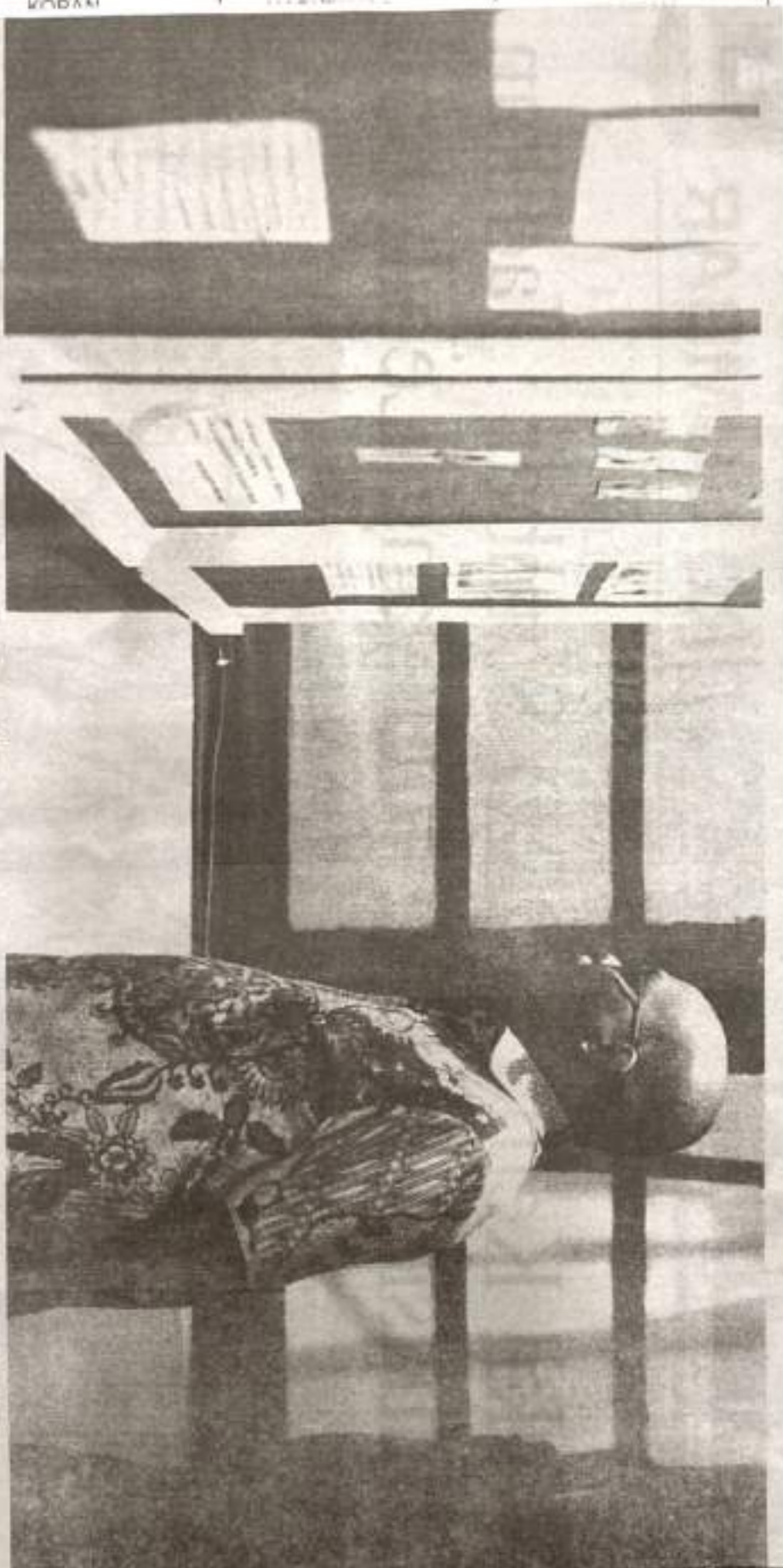
"Kami tim dari BRIN sengaja membawa fosil tengkorak manusia hasil ekskavasi Tahun 1985, sebagai bentuk penghargaan atas kegiatan ini, semoga dengan festival ini bisa memberikan dampak positif terhadap perkembangan pe-





KLIPING BERITA

Lihat Pameran—Ketua DPRD Sumbang, Supardi saat melihat eksemplar dalam Pameran Maek yang merupakan bagian dari Festival Maek yang resmi dibuka, Minggu (14/7) ISI





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbang	SELASA 16 JULI 2024	7.

Wujudkan APBD yang Kredibel

DPRD Sumbang Gelar Rapat Paripurna KUA-PPAS 2024

Padang, RakyatSumbang — Ketua DPRD Provinsi Sumbang, Supardi, mengatakan, berdasarkan nota pengantar rancangan perubahan KUA dan PPAS perlu dilakukan perubahan APBD Provinsi Sumbang 2024, untuk mewujudkan APBD yang kredibel, sehat dan dapat dilaksanakan.

"Melalui pada perkembangan makro ekonomi daerah, SELPA APBD 2023, serta realisasi anggaran semester pertama 2024, perlu kondisi keuangan daerah pada perubahan APBD 2024, tidak mengabaikan dan tidak mengabaikan progres untuk meningkatkan program, kata Supardi, saat Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar

ter Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2024, di ruang sidang utama gedung DPRD, Senin, (15/7).

Di hadapan, sebagai dengan perkembangan ekonomi global dan nasional yang cenderung melambat, serta tingginya inflasi dan ketidakpastian yang semakin tak menentu, maka asumsi yang digunakan dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun 2024, tidak sesuai lagi dengan kondisi yang berkembang saat ini.

"Sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, ke dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS yang menjadi landasan pada Perubahan APBD," ucapnya.

Menurut Supardi, cukup banyak beban anggaran yang harus di akomodir dalam Perubahan

APBD 2024, di antaranya peningkatan sisi biaya pajak, kekegiatan/kota, pembayaran kegiatan 2023 yang penyelesaian baru dapat dilakukan pada 2024, serta tidak mencukupinya SELPA 2023 untuk menutup defisit awal pada APBD 2024.

"Selain itu, pada 27 November 2024 yang akan datang, kita juga akan melaksanakan Pilkada Serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini, tentu akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah," ungkap Supardi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbang Andy Jondady, mengatakan, penyusunan perubahan KUA-PPAS 2024, secara teknis tetap mengacu terhadap ketentuan yang berlaku, serta mempertimbangkan regulasi terkait penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

"Dalam perubahan kebijakan umum APBD ini, terdapat kebijakan yang perlu diperhatikan antara DPRD dan kepala daerah, yaitu asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD 2024. Kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Selanjutnya, sambutan Andy Jondady dengan proses pembahasan guna meningkatkan kepatuhan bersama dan menjadi KUA-PPAS tahun anggaran 2024.

"Kernya, akan dilanjutkan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024," pungkas Andy. (Dyr)



KLIPING BERITA



KETUA DPRD Sumbang, Supardi, menerima rancangan perubahan KUA-PPAS 2024 dari wakil gubernur, Audy Joinaldy, saat Rapat Paripurna, di ruang sidang utama lembaga itu, Senin, (15/7).



KETUA DPRD Sumbang, Supardi, wakil ketua Iryad Syafar, dan Suwirpen Suib, serta wakil gubernur, Audy Joinaldy, saat Rapat Paripurna Penyampaian Perubahan KUA-PPAS 2024, di ruang sidang utama lembaga itu, Senin, (15/7).



KETUA DPRD Sumbang, Supardi, menyampaikan keterangan kepada wartawan setelah Rapat Paripurna Penyampaian Perubahan KUA-PPAS 2024, di ruang sidang utama lembaga itu, Senin, (15/7).



KETUA DPRD Sumbang, Supardi, wakil ketua Iryad Syafar, dan Suwirpen Suib, Sekretaris Rafis, wakil gubernur, Audy Joinaldy, dan pejabat lainnya foto bersama saat Rapat Paripurna Penyampaian Perubahan KUA-PPAS 2024, di ruang sidang utama lembaga itu, Senin, (15/7).



WAKIL Gubernur Sumbang, Audy Joinaldy, menyampaikan nota pengantar Perubahan KUA-PPAS 2024, di ruang sidang utama lembaga itu, Senin, (15/7).





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbang	SELASA, 16 JULI 2024	10

Jawaban DPRD Akomodir Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran



Padang, Rakyat Sumbang- Pihak DPRD Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan rapat paripurna Penyiaran Jember DPRD atas tanggapan Gubernur terhadap Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

"Apabila jawaban DPRD atas pendapat dan tanggapan Gubernur terhadap Ranperda tersebut sudah diterima, maka dapat kita simpulkan, bahwa proses pembahasan bersama kami, kata Ketua DPRD Sumbar, Supardi, saat rapat paripurna di ruang sidang umum lembaga ini, Senin, (15/7).

KETUA DPRD Sumbang Supardi, menyerahkan Penyusunan Jawaban DPRD atas tanggapan Gubernur terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran, kepada wakil Gubernur Audy Jodahy, saat rapat paripurna lembaga yang sama, di ruang sidang umum lembaga setempat, Senin, (15/7).

di antaranya, ia menambahkan, Gubernur juga meminta DPRD memberikan juga pembahasan regulasi terkait penyiaran yang juga banyak menimbulkan kebingungan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penyiaran.

"Oleh karena itu, perlu kajian yang mendalam terhadap kewenangan dan materi muatan Ranperda ini, agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkapnya.

ia menambahkan, telah diinstruksikan kepada seluruh, ada beberapa poin yang disampaikan Gubernur sebagai masukan untuk dalam pendapa/tanggapannya terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

"Di antaranya, penyusunan konsideran, perubahan judul Ranperda, penyusunan dan dasar hukum mengikat, penyempurnaan ruang lingkup, penyempurnaan terdapat beberapa materi, serta penyempurnaan legal drafting Ranperda," ulasnya.

Menzit Supardi, ca-
tatan dan masukan masuk
an yang diberikan Gubernur
terhadap Ranperda ini me-
rupakan wujud dukungan
dalam kemitraan saling mung-
tu, dan saling melengkapi
muatan Ranperda.

"Secara umum jawaban
DPRD dari Juru Bicara Ko-
misi I terhadap pendapat
dan tanggapan Gubernur,
kita harapkan telah menga-
komodir pertanyaan, pan-
daan dan pendapat yang
dikemukakan oleh gubernu-
r," pungkasnya. (Dy)



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbang	SELASA, 16 JULI 2024	10

Pameran Maek Sarana Membentangkan Sejarah Tampilkan Fosil Tengkorak Megalithikum

Padang, Rakyat Sumbang— Ketua DPRD Sumbar, Supardi, membuka Pameran Maek di Gedung Gembira Kota Payakumbuh. Berbagai fosil sejarah peradaban Maek, diantaranya juga pameran isi, termasuk fosil tulang ekstremitas manusia di lantai pameran.

Pameran ini memamerkan fosil manusia dan peradaban Maek. Men-
berikan informasi kepada masyarakat tentang
peradaban Maek, kata Supardi, saat
membuka pameran, Minggu, (14/7).



menurut ketua juga dihadiri juri-
bisa melihat fosil, seperti tulang, gigi,
tulang manusia dan proses penelitian
yang sudah dilakukan, ucapnya.

Ketua DPRD
Sumbar, Su-
parda, saat
membuka Pa-
meran Maek,
di Gedung
Gembira, Kota
Payakum-
buh, Minggu,
(14/7).

berupa fosil tengkorak megalithikum
sebagai bentuk mengenali sejarah ma-
nusia moyang.

Kami ini dari jajan sepa-
ja membawa fosil tengkorak manu-
sia hasil ekskavasi tahun 1985 sebagai
penghargaan atas kegiatan ini.

Adesday ini mendapat sambutan ja-
rang sudah yang memberikan perta-
han serta tindak lanjutnya dan ber-
da publikasi.

Sebagai dengan fosil ini bisa
memberikan dampak positif terhadap
perkembangan pengetahuan, tutur
Timorjani.

Pameran fosil Maek ini me-
rupakan rangkaian kegiatan Festival
Maek yang digelar melalui Dana Pade-
kerta DPRD Sumbar, Supardi.

Pameran fosil dilaksanakan di
Maek pada tanggal 17 hingga 20 Juli di
Negeri Maek. Berbagai artefak dan ke-
sajian dalam dan luar negeri akan di-
tampilkan secara spektakuler. (DPRD)



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbang	JUMAT, 19 JULI 2024	5

Festival Maek Datangkan Peneliti Mancanegara

Perkenalkan Peninggalan Arkeologi
Lauk Limapualuh ke Dunia

Harian Rakyat Sumbang
Pj. Walikota Payakumbuh
hadiri Festival Maek 2024
yang diselenggarakan di
lapangan sepakbola Jorong
Koto Godang, Nagari Maek,
Kecamatan Bukik Barisan,
Kabupaten Limapuluh Kota,
Rabu (17/7) malam.

KEMERIAHAN acara ini, turut
diaksikan tamu dari Jepang, Aus-
tralia, Jerman dan Mesir. Pemuku-
lan talenpong oleh Gubernur
Sumbang, Ketua DPRD Sumbang, Pj.
Wali Kota Payakumbuh dan Bu-
pati Limapuluh Kota menandai
dibukanya Festival Maek 2024.

Pj. Walikota Payakumbuh Su-
prayitno mengatakan, Festival
Maek ini tentu bukan sekadar
perayaan biasa, tetapi juga me-
rupakan wadah penting untuk
menggalang dan memperkenalkan
kekayaan arkeologi serta sejarah
peradaban di Lauk Limapuluh.

"Acara ini menjadi kesempatan
emas bagi kita semua untuk men-
dalami dan menghargai warisan
budaya yang telah ada sejak zaman
megalitikum," kata Suprayitno.

Dia meyakini, melalui pam-
eran dan diskusi arkeologi yang
di selenggarakan dalam Pro-Festi-
val Maek beberapa hari yang lalu,
sejarah peradaban Maek yang
kaya akan nilai-nilai luhur bisa
sepenuhnya tergalang.

Ekspos tentang peninggalan
arkeologi yang tersebar di bebera-
pa nagari di Lauk Limapuluh, ter-
utama di Nagari Maek, merupakan
potensi besar yang dapat menarik
minat wisatawan dan memperke-
nalkan Kabupaten Limapuluh Kota
serta Kota Payakumbuh ke kancah
internasional.

"Kita paham, Kabupaten Li-
mapuluh Kota juga memiliki posisi
strategis sebagai gerbang timur ak-
ses ke Provinsi Sumatera Barat dari
arah Riau. Potensi ini sangat pen-
ting untuk kita kembangkan bersa-
ma, guna meningkatkan daya tarik

wisata dan menggerakkan roda
perekonomian daerah. Dan kita
(Kota Payakumbuh - red) siap ber-
kolaborasi dan mendukung penuh
segala upaya pengembangan po-
tensi wisata dan budaya di wilayah
ini," tukiknya.

Ia berharap, melalui Festival
Maek ini, dapat memberikan in-
spirasi dan manfaat besar bagi
masyarakat, serta memperkuat
identitas budaya Lauk Limapu-
lah.

"Jangan biarkan akar ini ter-
geras oleh waktu, tapi mari kita
rawat, jaga, dan terus wariskan
kepada generasi penerus. Dengan
semangat kebersamaan dan cinta
akan budaya, kita bisa membawa
Limapuluh Kota dan Payakum-
buh menuju masa depan perad-
aban yang lebih baik," tutupnya.

Sementara itu, Ketua DPRD
Sumbang Supardi berharap suatu
saat nanti Maek menjadi destinasi
wisata khusus, tempat berkam-
panya arkeolog dan peneliti-pe-
neliti dunia. Hingga akan mampu
mendatangkan tamu-tamu dan
wisatawan tidak hanya dari Indo-
nesia, tetapi dari manca negara.

"Ketika nanti Maek ini menjadi
pusat arkeolog dunia, saya pastikan
Limapuluh Kota, Kota Payakum-
buh dan khususnya Sumbang tingkat
kunjungan pariwisata akan
luar biasa. Jadi kita semua harus
bangga dengan banyaknya potensi
yang dimiliki Maek," katanya.

Dikesempatan itu, Bupati Li-
mapuluh Kota Safaruddin Dr.
Bandaro Rajo mengapresiasi dan
mengucapkan terima kasih kepa-
da Pemerintah Provinsi Sumbang
dan Ketua DPRD Sumbang yang
telah sukses melaksanakan even
Festival Maek 2024 yang digelar
Dinas Kebudayaan Sumbang.

"Festival Maek 2024 ini me-
lampau ekspektasi kami. Saya
tidak menyangka bahwa Festival
Maek 2024 akan semeriah ini.
Luar biasa. Kami mengapresia-
si Pemprov Sumbang dan Ketua
DPRD Sumbang serta seluruh yang
terlibat dalam kegiatan ini terma-
suk seluruh masyarakat Maek,"
pungkasnya. (med)

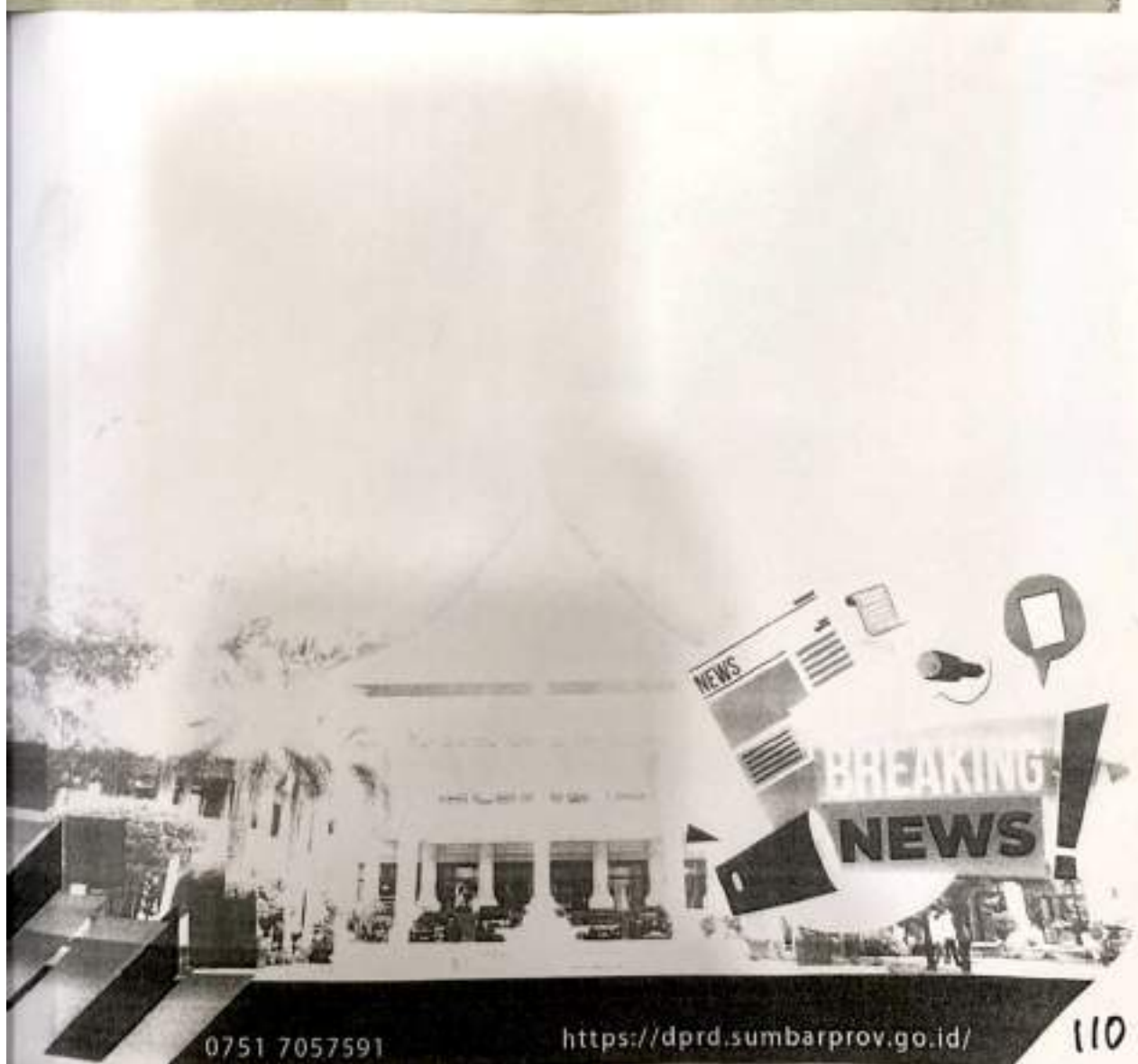




KLIPING BERITA



Pj WALIKOTA Payakumbuh bersama Ketua DPRD Sumbar saat pembukaan Festival Maek 2024



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbang	JUMAT, 19 JULI 2024	60

Maek harus Terkenal sebagai Negeri Seribu Menhir

[illegible]

*Marek mosti dharohi
 each orang berakir, dharohi
 perubahan tertitik di jado-
 nesia, semua orang terajut
 akan hal tersebut, karna So-
 pardi, saat menabuhka Pes-
 terad Marek 2014, di buwang
 an bola baki, korong, Kor-
 tangah, Nagari Marek, Ku-
 daput, Limaputukhara,
 Babuk, (17/7) malam.

Isi mediantarakan, di sisi lain, merupakan sebuah upaya untuk mempromosikan pariwisata daerah, tidak ada tawar apapun, sebab semua harus mengetahui bahwa budaya keberagaman itu benar-benar ada. Menurut tersebut, selanjutnya Mark menjelaskan bahwa "Perilaku panjang telah diadopsi, untuk melindungi, untuk warisan dunia, untuk dari Pokus Group Diskusi (FGID), hingga memelihara yang diturunkan pada di daerah, Mark di Australia".



KETUA
DPRD
Sumbar,
Siparut,
sari mam-
buka Fas-
tut Makh,
di Jorong
Koto Tang-
ah, Nagari
Mak 2024
Kedapuan
Limapuluh-
kota, Pabu-
(177) me-
lari.

uncomplicated in

13 talagi, untuk memenuhkan usia fosil yang diteliti, namun untuk Maok telah beranda pada talagi akhir, hampir dipastikan fosil itu berumur 4000 tahun sebelum masehi.

Motokola persembahan fossil di Australia yaitu carbonada. Motokola Maek Festival hasil carbon dating telah keluar, tetapi harus ditunggu beberapa lama," ungkap Soeardi, pengorganisasi Festival

Muehlebach, Karl.

ia menyimpulkan, 4000 tahun sebelum masehi, manusia ada NOKIA dan Ramanah Melanang, Naurum Mook telah memiliki peradaban yang maju, sehingga status seorang yang sangat tinggi bergelombang Sialidat.

tidak banyak mineral, Negeri Muet juga terdapat becas kawati murtapi antri yang meletus jauh sebelum terbelakanya Damar Tobo. Itu diumumkan saat Dinas Kebudayaan Sumbur saat mengadakan penelitian de-

ingun UINP pada 2005 lalu,
secukupnya.

la mencambuhkan, dan
sini juga ditemukan bekal
pembuatan akil. Oleh se-
bab itu Nenek harus menja-
di tempat parkirnya. Knu-
su dengan para-pa pasia
yang berbeda.

Kepada masyarakat
Masek agar memanfaatkan
potensi yang ada di muga-
ri itu untuk dibinau oleh
pengusaha," ujarnya.

pengumpulnya agar terkumpul dalam satu tanggal lama di Nagari Masek yang memiliki sekira 1200 penduduk.

"Masyarakat harus paham bahwa pembangunan yang sedang berlangsung ini adalah cara jangka panjang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang paling penting, sekali saja kita dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka akan banyak manfaat yang diperoleh dan banyak yang akan datang," kata Kepala Desa, "se-
lainnya."

Semeritara (ta. Pagan)
Lingshih Koa, Siam-
du De Bandaro Kajo, me-
ngakan, Festival Mook
2024 melampai akibat
tial, dan terbelenggu se-
tara subse-

"Terima kasih kepada Ketua DPRD Sumbar (Sipondri) yang telah bersedia melaksanakan MoU Festival 2014 yang digelar oleh Dinas Kebudayaan Sumbar. Saya tidak menyang-

ka bawahan pemerintahan ini. Kita
mengapresiasi. Peningkat
Sumber dan Ketua DPRD
Sumber serta seluruh yang
tersebut dalam kegiatan ini
termasuk seluruh masyarakat
Maele, penghasil Saka-
madin. [bnt]



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	JUMAT, 19 JULI 2024	9

BK Sulawesi Tenggara Kunker ke DPRD Sumbar

Padang, Rakyat Sumbar — Wakil ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulawesi Tenggara, Muhammad Nur Sinapoy, mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Sumbar.

"Kami Kunker ke BK DPRD Sumbar dalam rangka berbagi informasi terkait tugas pokok dan kewenangan yang dimiliki BK," kata Muhammad Nur Sinapoy, saat diistisnai dengan Ketua BK DPRD Sumbar, Muzli M. Nur, di ruang BK DPRD Sumbar, Kamis (18/7).

Sinapoy menambahkan, sehingga BK lebih maksimal dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya. "Kewenangan yang

dimiliki BK DPRD tidak dipergunakan untuk kesewenang-wenangan dalam melaksanakan kewenangannya," ucap Sinapoy.

Ketua BK DPRD Provinsi Sumbar, Muzli M. Nur, mengatakan, hingga periode anggota DPRD Sumatra barat 2019-2024, BK DPRD Provinsi Sumatra Barat lebih soft, menggrat regulasi masih dalam pembahasan.

"Ditargetkan, Rancangan tata beracara DPRD yang tengah dibahas saat ini ditetapkan akhir Agustus 2024. Pasca ditetapkan, regulasi tata beracara DPRD ditetapkan periode anggota DPRD 2024-2029," sebut Muzli M. Nur. (lhr)



KETUA BK DPRD Sumbar, Muzli M. Nur, saat menerima BK DPRD Sulawesi Tenggara di ruang BK DPRD Sumbar, Kamis (18/7).





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KHAZ	RABU, 24 JULI 2024 RABU, 16 MUHARRAM 1445 H	2

AJAK LURAH SE KOTA PAYAKUMBUH Supardi: Tingkatkan Kepekaan Sosial Antisipasi Kerawanan

Bukittinggi, Khazanah — Ketua DPRD Sumbang, Supardi mengajak lurah se Kota Payakumbuh untuk mengantisipasi berbagai persoalan sosial yang berpotensi terjadi, salah satunya dengan meningkatkan kepekaan sosial.

Menurut Supardi, mudahnya kepekaan sosial menyebabkan persoalan sosial seperti anjing, kemiskinan ekstrem, narkoba, judi online dan sebagainya. Jika ini terus terjadi maka dikhawatirkan akan terjadi pembunuhan yang menyebabkan jurang persoalan sosial makin dalam.

Harah Ninang adalah nagari beradat bersendikan Kitabullah, tidak ada satupun perintah untuk membiarkan kita tidak peduli dengan lingkungan. Kalau kita menjalankan adat dan agama tidak akan ada lagi persoalan sosial di sekitar kita," terang Supardi dalam pembukaan Himtek Pilar Pilar Sosial diikuti oleh lurah se Kota Payakumbuh dan perwakilan masyarakat di Bukittinggi, Jumat (20/7).

Pertemuan pilar sosial ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang antisipasi berbagai masalah sosial.

Supardi mencontohkan fungsi rangklang di rumah gadang yang mencerminkan kepedulian masyarakat Minangkabau dengan lingkungan.

"Rangklang di rumah gadang itu ada tiga fungsi pertama untuk menyimpan kebutuhan pangan sehari-hari, kedua untuk steak jika terjadi kelangkaan pangan dan yang ketiga difungsikan untuk membantu lingkungan seperti bencana, bantuan kepada yang membutuhkan dan sebagainya," jelas Supardi.

Kerawanan sosial di Kota Payakumbuh perlu diantisipasi, karena Payakumbuh berada di daerah perlintasan. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan meningkatkan kepedulian sosial masyarakat.

Bapak ibu lurah memiliki peran penting meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial ini, sehingga ada gerakan bersama memberantas persoalan sosial," ucap Supardi.

Pertemuan Pilar Pilar Sosial digelar oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui dana pokok Ketua DPRD Sumbang, Supardi. Pilar sosial yang diikuti oleh berbagai komponen masyarakat ini diharapkan menjadi lokomotif gerakan sosial mengantisipasi persoalan sosial di Kota Payakumbuh. III yuniati





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	RABU = 24 JULI 2024	5

TINGKATKAN KUALITAS DAN TUPOKSI BK DPRD

Sejumlah Daerah Belajar ke BK DPRD Sumbang

BERBERAPA Badan Kebormat-tan (BK) DPRD sejumlah daerah mengunjungi Provinsi Sumatera Barat (Sumbang) guna memantapkan eksistensi sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Untuk diketahui, BK DPRD Sumbang sudah menerima sebanyak 3 kali kunjungan dari daerah lain. Dimana BK DPRD Sumbang yang diketuai Muzli M Nur dari Fraksi PAN tersebut menyatakan kunjungan ke BK DPRD sejumlah daerah tersebut dalam rangka peningkatan kapasitas kinerja.

"BK DPRD terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam menjaga marwah lembaga, salah satunya dengan unsur media. Dengan upaya tersebut BK DPRD Sumbang terus menjadi pilihan kunker BK DPRD dari berbagai daerah," ujar Muzli.

Dia mengungkapkan dalam beberapa waktu terakhir BK DPRD Sumbang menerima kunker DPRD DKI Jakarta, setelah itu BK DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan harmonisasi yang terbangun dengan unsur media, maka banyak BK DPRD daerah lain mengetahui kinerja BK DPRD Sumbang.

Terbaru BK DPRD Sumbang menyambut kunjungan kerja BK DPRD Sulawesi Tenggara untuk optimalisasi pelaksanaan tupoksi, Kamis (18/7).

Wakil Ketua BK DPRD Sulawesi Tenggara, Muhammad Nur Snaipoy mengatakan, kunjungan kerja BK DPRD Sulawesi Tenggara ke DPRD Sumbang dilakukan untuk belajar dan shari-

ng informasi mengenai pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan yang dijalankan Badan Kehormatan DPRD Sumbang.

Melalui sharing informasi ini ia berharap ke depan BK DPRD Sulawesi Tenggara bisa lebih maksimal dalam menjalankan tupoksi.

"Menjalankan tugas BK ini tidaklah mudah, karena perannya adalah menjaga marwah DPRD. Maka dari itu kita butuh banyak belajar dan mencari masukan, salah satunya dengan mengunjungi DPRD Sumbang hari ini," ujar Muhammad Nur Snaipoy.

Dikatakan, BK DPRD Sumbang dijadikan sebagai tujuan untuk belajar dan sharing informasi karena pibaknya melihat dalam pelaksanaan tugas, BK DPRD Sumbang telah lebih maju. Dimana Sumbang merupakan salah satu provinsi tertua di Indonesia, DPRD nya telah lama ada, dan BK DPRD Sumbang juga telah lama terbentuk.

"Salah satu yang ingin kita pelajari adalah bagaimana klat-klat BK DPRD Sumbang melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dalam membina te-

man-teman anggota dewan. Sebab kita tidak ingin mentang-mentang BK kita melakukan kesewenangan-wenangan pada teman-teman anggota," ujarnya.

Muhammad Nur menambalikan, dalam pelaksanaan kewenangan, BK DPRD Sulawesi Tenggara telah ada memproses anggota yang melanggar, disidangkan kode etik, dan diingatkan untuk tidak kembali mengulang kesalahan yang dilakukan.

"Jadi membimbing teman-teman anggota ini memang tidak semudah yang kita bayangkan, meski kita telah memiliki sarana prasarana yang lengkap, kita tetap harus banyak belajar," ucapnya.

Kunjungan BK DPRD Sulawesi Tenggara ke DPRD Sumbang diterima oleh Ketua BK DPRD Sumbang Muzli M. Nur. Pada kesempatan itu Muzli menyampaikan rasa bangganya dikunjungi BK Sulawesi Tenggara.

Dia menyebut keberhasilan kinerja BK ditunjukkan dengan tidak adanya persoalan-persoalan yang terjadi secara internal maupun eksternal lembaga.

Untuk DPRD Sumbang, hingga jelang akhir masa jabatan dewan periode 2019-2024, tidak ada anggota yang di PAW disebabkan ketidakdisiplinan.

"Keberhasilan BK itu ditunjukkan saat tidak ada persoalan temuan pada seluruh anggota dewan yang ada, dan sejak awal ko-

mitmen BK untuk keanggotaan DPRD Sumbang periode 2019-2024 yaitu 65 orang kita berawal, 65 orang kita berakhir," ujarnya.

Ia mengatakan, hingga periode anggota DPRD Sumbang 2019-2024, BK DPRD Sumbang lebih soft dalam mengingatkan anggota,

mengingat regulasi masih dalam pembahasan.

"Saat ini kita hampir rampung membahas peraturan tata ber-

cara, direncanakan penetapannya akhir Agustus 2024. Pasca-dite-tapkan, regulasi ini akan diterapkan nantinya," ujarnya. (a)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



KETUA BK DPRD Sumbar Muzli M. Nur menyerahkan cenderamata kepada BK DPRD Sulawesi Tenggara.





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KUNJUNGAN kerja BK DPRD Sulawesi Tenggara ke BK DPRD Sumbar.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbang	RABU, 24 JULI 2024	60

Tingkatkan Kepekaan Sosial untuk Antisipasi Kerawanan

Padang, Rakyat Sumbang—Ketua DPRD Provinsi Sumbang, Supardi, mengatakan, lurah harus meningkatkan kepekaan sosial, untuk mengantisipasi berbagai persoalan sosial.

"Memudarnya kepekaan sosial menyebabkan persoalan sosial seperti muntah, kemiskinan ekstrem, narkoba, judi online dan sebagainya," kata Supardi, saat membuka Bimtek Pilar Sosial, diikuti lurah se Kota Payakumbuh dan perwakilan masyarakat, di Bukittinggi, Jumat, (19/7).

Ia melanjutkan, apabila hal ini terus terjadi, di khawatirkan akan terjadi pembauran yang menyebabkan jurang persoalan sosial makin dalam.

"Ranah Minang adalah nagari beradat bersendikan Kitabullah, tidak ada sapaun perintah untuk membiarkan kita tidak peduli dengan lingkungan. Kalau kita menjalankan adat dan agama tidak akan ada lagi persoalan sosial di sekitar kita," ucap Supardi.

Supardi mencontohkan fungsi rangkang di rumah

gadang yang mencerminkan kepedulian masyarakat Minangkabau dengan lingkungan.

"Rangkang di rumah gadang itu ada tiga fungsi pertama untuk menyimpan kebutuhan pangan sehari-hari, kedua untuk stok jika terjadi kelangkaan pangan dan yang ketiga difungsikan untuk membantu lingkungan seperti bencana, bantuan kepada yang membutuhkan dan sebagainya," jelas Supardi.

Pertemuan pilar sosial ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang antisipasi berbagai masalah sosial. Kerawanan sosial di Kota Payakumbuh perlu diantisipasi, karena Payakumbuh berada di daerah perlintasan.

Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan meningkatkan kepedulian sosial masyarakat.

"Bapak Ibu lurah memiliki peran penting meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial ini, sehingga ada gerakan bersama memberantas persoalan sosial," beber Supardi. (hjt)



KETUA DPRD Sumbang, Supardi, saat membuka Bimtek Pilar Sosial, diikuti lurah se Kota Payakumbuh dan perwakilan masyarakat, di Bukittinggi, Jumat, (19/7).





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SELASA, 23 JULI 2024	6

BK DPRD Sumbar Jadi Tujuan Kunjungan Kerja dari Daerah Lain

BADAN Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus memperkuat eksistensinya sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang sering menjadi tujuan kunjungan kerja (Kunker) dari BK DPRD daerah lain.

Dalam beberapa waktu terakhir, BK DPRD Sumbar yang dipimpin oleh Muzli M Nur dan Fraksi PAN telah menerima tiga kunjungan BK DPRD dari daerah lain untuk meningkatkan kapasitas kinerja.

Muzli M Nur mengungkapkan bahwa BK DPRD Sumbar terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk unsur media, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) mereka untuk menjaga marwah lembaga. Upaya tersebut telah menjadikan BK DPRD Sumbar sebagai pilihan utama bagi BK DPRD dari berbagai daerah untuk melakukan kunjungan kerja.

Beberapa kunjungan terbaru termasuk BK DPRD DKI Jakarta dan BK DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Terbaru, BK DPRD Sulawesi Tenggara juga mengunjungi DPRD Sumbar pada Kamis (18/7) untuk optimalisasi pelaksanaan Tupoksi.

Wakil Ketua BK DPRD Sulawesi Tenggara, Muhammad Nur Sinapoy, mengatakan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk belajar dan berbagi informasi mengenai pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan BK DPRD Sumbar. Muhammad Nur berharap bahwa sharing informasi ini akan membantu BK DPRD Sulawesi Tenggara untuk lebih maksimal dalam menjalankan Tupoksi mereka.

Muhammad Nur mengapresiasi BK DPRD Sumbar yang dianggap lebih maju dalam pelaksanaan tugasnya. Ia menyebutkan bahwa Sumbar, sebagai salah satu provinsi tertua di Indonesia, memiliki DPRD yang telah lama ada, dan BK DPRD Sumbar juga telah lama terbentuk.

"Kami ingin mempelajari kiat-kiat BK DPRD Sumbar dalam melakukan pendekatan persuasif kepada anggota dewan. Kami tidak ingin melakukan kesew-

nangan terhadap anggota dewan," ungkapnya.

Muhammad Nur juga menambahkan bahwa BK DPRD Sulawesi Tenggara telah memproses anggota yang melanggar kode etik dan mengingatkan mereka untuk tidak mengulangi kesalahan. Meskipun memiliki sarana prasarana yang lengkap, pihaknya tetap merasa perlu banyak belajar.

Ketua BK DPRD Sumbar Muzli M Nur, menyampaikan rasa bangganya atas kunjungan BK Sulawesi Tenggara. Muzli menilai keberhasilan kinerja BK ditunjukkan dengan tidak adanya persoalan internal maupun eksternal di lembaga. Hingga akhir masa jabatan DPRD Sumbar periode 2019-2024, tidak ada anggota yang di-PAW karena ketidaksiplinan.

"Keberhasilan BK terlihat dari tidak adanya persoalan yang terjadi pada seluruh anggota dewan, dan sejak awal masa jabatan DPRD Sumbar periode 2019-2024, jumlah anggota tetap 65 orang hingga akhir

masa jabatan," ujar Muzli.

Ia menambahkan, BK DPRD Provinsi Sumbar mengingatkan anggota dewan bahwa regulasi atau peraturan tata beracara masih dalam pembahasan.

"Saat ini hampir rampang membahas peraturan tata beracara, direncanakan penetapannya akhir Agustus 2024. Pasca ditetapkan, regulasi ini akan diterapkan oleh anggota DPRD periode 2024-2029," ucapnya. (*)





KLIPING BERITA



KETUA BK DPRD Sumbang, Muzli M Nur menyerahkan cinderemata dalam kunjungan BK DPRD Sulawesi Tenggara.



KETUA BK DPRD Sumbang, Muzli M Nur menerima cinderemata dari BK DPRD Sulawesi Tenggara.



Sumbang, Muzli M Nur menerima kunjungan BK DPRD Sulawesi Tenggara.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SELASA, 23 JULI 2024 17 Muharram 1446 H	16

UNTUK PENGUATAN TUPOKSI

BK DPRD Sejumlah Daerah Belajar ke BK DPRD Sumbar

Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus memantapkan eksistensi sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang sering mendapatkan kunjungan kerja (Kunker) dari BK DPRD daerah lain.

Untuk diketahui dalam beberapa waktu terakhir, BK DPRD Sumbar yang diketuai Muzli M Nur dari Fraksi PAN telah menerima tiga kunjungan BK DPRD dari daerah lain. Hal ini dilaksanakan BK DPRD sejumlah daerah tersebut dalam rangka peningkatan kapasitas kinerja.

"BK DPRD terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam menjaga marwah lembaga, salah satunya dengan unsur media. Dengan upaya tersebut BK DPRD Sumbar terus menjadi pilihan Kunker BK DPRD dari berbagai daerah," ujar Muzli.

Dia mengungkapkan dalam beberapa waktu terakhir BK DPRD Sumbar menerima Kunker DPRD DKI Jakarta setelah itu BK DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan harmonisasi yang terbangun dengan unsur media, maka banyak BK DPRD daerah lain mengetahui kinerja BK DPRD Sumbar.

Terbaru BK DPRD Sumbar menerima kunjungan kerja BK DPRD Sulawesi Tenggara untuk optimisasi pelaksanaan Tupoksi, Kamis (18/7).

Wakil Ketua BK DPRD

Sulawesi Tenggara, Muhammad Nur Sinapoy mengatakan, kunjungan kerja BK DPRD Sulawesi Tenggara ke DPRD Sumbar dilakukan untuk belajar dan *sharing* informasi mengenai pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan yang dijalankan Badan Kehormatan DPRD Sumbar.

Melalui *sharing* informasi ini ia berharap ke depan BK DPRD Sulawesi Tenggara bisa lebih maksimal dalam menjalankan Tupoksi.

"Menjalankan tugas BK ini tidaklah mudah, karena perannya adalah menjaga marwah DPRD. Maka dari itu kita butuh banyak belajar dan mencari masukan, salah satunya dengan mengunjungi DPRD Sumbar hari ini," ujar Muhammad Nur Sinapoy.

Dikatakannya, BK DPRD Sumbar dijadikan sebagai tujuan untuk belajar dan *sharing* informasi karena pihaknya melihat dalam pelaksanaan tugas, BK DPRD Sumbar telah lebih maju. Dimana Sumbar merupakan salah satu provinsi terbaik di Indonesia, DPRD nya telah lama ada, dan BK DPRD Sumbar juga telah lama terbentuk.

"Salah satu yang ingin kita pelajari adalah bagaimana kinerja BK DPRD Sumbar melaku-

kukan pendelatan-pendelatan persuasif dalam membina teman-teman anggota dewan. Sebab kita tidak ingin, mentoring BK kita melakukan kesewenangan-wenangan pada teman-teman anggota," ujarnya.

Dikatakan Muhammad Nur, dalam pelaksanaan kewenangan, BK DPRD Sulawesi Tenggara telah ada proses anggota yang melanggar, disidangkan kode etik, dan diingatkan untuk tidak kembali mengulangi kesalahan yang dilakukan.

"Jadi membimbing teman-teman anggota ini memang tidak semudah yang kita bayangkan, meski kita telah memiliki sarana prasarana yang lengkap, kita tetap harus banyak belajar," ucapnya.

Kunjungan BK DPRD Sulawesi Tenggara ke DPRD Sumbar diterima oleh Ketua BK DPRD Sumbar Muzli M. Nur. Pada kesempatan itu Muzli menyampaikan rasa bangganya dikunjungi BK Sulawesi Tenggara.

Dia meyoebot keberhasilan



KLIPING BERITA

kinerja BK ditunjukkan dengan tidak adanya persoalan-persoalan yang terjadi secara internal maupun eksternal lembaga.

Untuk DPRD Sumbar, hingga jelang akhir masa jabatan dewan periode 2019-2024, tidak ada anggota yang di PAW disebabkan ketidak disiplin.

"Keberhasilan BK itu ditunjukkan saat tidak ada persoalan temuan pada seluruh anggota dewan yang ada, dan sejak awal komitmen BK untuk keanggotaan DPRD Sumbar periode 2019-2024 yaitu, 65

orang kita berawal, 65 orang kita berakhir," ujarnya.

Ia mengatakan, hingga periode anggota DPRD Sumatra barat 2019-2024, BK DPRD Provinsi Sumatra Barat lebih soft dalam mengingatkan anggota, mengingat regulasi masih dalam pembahasan. "Saat ini kita hampir rampung membahas peraturan tata beracara, direncanakan penetapannya akhir Agustus 2024. Pasca ditetapkan, regulasi ini akan diterapkan oleh anggota DPRD periode 2024-2029," ucapnya. (adv)

Memberikan cinderamata





KLIPING BERITA

Kelua Ek DPRD Sumbar, Muzli M Nur saat menerima kunjungan Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Tenggara



122



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Selasa, 23 Juli 2024 (17 Muharram 1446 H)	5

KETUA BK, MUZLI M. NUR

Keberhasilan BK Dilihat Dari tak Adanya Per soalan

Tugas Badan Kehormatan (BK) salah satunya adalah menjaga Marwah kelembagaan DPRD. Keberhasilan kinerja BK dilihat dari tidak adanya persoalan-persoalan yang terjadi secara internal maupun eksternal lembaga.

Hal tersebut disampaikan Ketua BK DPRD Sumbang, Muzli M. Nur saat menerima kunjungan BK Sulawesi Selatan, bari-baru ini.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BK sebagai salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) di lembaga legislatif.

Muzli mengatakan, untuk DPRD Sumbang, hingga jelang akhir masa jabatan dewan periode 2019-2024, tidak ada anggota yang mengalami penggantian antar waktu (PAW) disebabkan ketidakdisiplinan.

"Keberhasilan BK itu ditunjukkan saat tidak ada persoalan temuan pada seluruh anggota dewan yang ada, dan sejak awal komitmen BK untuk keanggotaan DPRD Sumbang periode 2019-2024 yaitu, 65 orang kita berawal, 65 orang kita berakhir," ujarnya.

Ia mengatakan, hingga periode anggota DPRD Sumatera Barat 2019-2024, BK DPRD Provinsi Sumatera Barat lebih soft dalam mengingatkan anggota, mengingat regulasi masih dalam pembahasan.

"Saat ini kita hampir rampung membahas peraturan tata beracara, direncanakan penerapannya akhir Agustus 2024. Pasca ditetapkan, regulasi ini akan diterapkan oleh anggota

DPRD periode 2024-2029," ucapnya.

Ia mengatakan muatan aturan tata beracara memiliki beberapa penekanan, diantaranya cara bersidang, penegakan kode etik dan kedisiplinan para dewan.

Meski BK DPRD Sumbang telah memiliki pedoman tata tertib (Tatib) dan aturan tentang Tata Beracara tidak ada, BK tidak bisa menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan dewan dengan menyidangkannya.

"Tidak hanya bersidang, BK juga tidak bisa memberikan rekomendasi atas pemeriksaan persualan yang dilakukan dewan bersangkutan kepada pimpinan DPRD," katanya.

Dalam muatan aturan Tata Beracara yang disusun Pansus, lanjutnya, ketika dewan memiliki pelanggaran berat maka BK bisa menyidangkan serta mengeluarkan putusan sesuai peraturan Tatib DPRD sebagai rujukan.

Sementara itu, Wakil Ketua BK DPRD Sulawesi Tenggara, Muhammad Nur Sinapoy mengatakan, kunjungan kerja BK DPRD Sulawesi Tenggara ke DPRD Sumbang dilakukan untuk belajar dan sharing informasi mengenai pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan yang dijalankan Badan Kehormatan DPRD Sumbang.

Melalui sharing informasi ini ia berharap ke depan BK DPRD Sulawesi Tenggara bisa lebih maksimal dalam menjalankan Tupoksi. "Menjalankan tugas BK ini tidaklah mudah, karena perannya adalah menjaga mar-

wah DPRD. Maka dari itu kita butuh banyak belajar dan mencari masukan, salah satunya dengan mengunjungi DPRD Sumbang hari ini," ujar Muhammad Nur Sinapoy.

Dikatakannya, BK DPRD Sumbang dijadikan sebagai tujuan untuk belajar dan sharing informasi karena pihaknya melihat dalam pelaksanaan tu-

gas, BK DPRD Sumbang telah lebih maju. Dimana Sumbang merupakan salah satu provinsi terjuwa di Indonesia, DPRD nya telah lama ada, dan BK

DPRD Sumbang juga telah lama terbentuk.

"Salah satu yang ingin kita pelajari adalah bagaimana kiat-kiat BK DPRD Sumbang melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dalam membina teman-teman anggota dewan. Sebab kita tidak ingin, menantang-menantang BK kita melakukan kesewenangan-wenangan pada teman-teman anggota," ujarnya.

Dikatakan Muhammad Nur, dalam pelaksanaan kewenangan BK DPRD Sulawesi Tenggara telah ada memproses anggota yang melanggar, disidangkan kode etik, dan mengingatkan untuk tidak kembali mengulangi kesalahan yang dilakukan. "Jadi membimbing teman-teman anggota ini memang tidak semudah yang kita bayangkan, meski kita telah memiliki sarana prasarana yang lengkap, kita tetap harus banyak belajar," ucapnya. (*)



KLIPING BERITA



0751 7057591

<https://dprd.sumbarprov.go.id/>

124



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Selasa, 16 Juli 2024 (10 Muharram 1446 H)	5

PARTISIPASI PSU DPRD RENDAH

Jangan Berimbas Saat Pilkada

PADANG - Kekhawatiran masyarakat dalam memilih calon DPRD RI tahun 2024, terutama bagi masyarakat di daerah pedesaan, membuat KPU Sumbar menggelar sosialisasi di berbagai lokasi. KPU Sumbar berharap hal tersebut menjadi perhatian masyarakat bagi penyelenggaraan pemilu.

Taklakan pelaksanaan PSU calon DPRD RI tahun 2024, KPU Sumbar menggelar sosialisasi di berbagai lokasi. KPU Sumbar berharap hal tersebut menjadi perhatian masyarakat bagi penyelenggaraan pemilu.

TPS. Seperti dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019, KPU Sumbar menggelar sosialisasi di berbagai lokasi.

Sebelumnya, KPU Sumbar menggelar sosialisasi di berbagai lokasi. KPU Sumbar berharap hal tersebut menjadi perhatian masyarakat bagi penyelenggaraan pemilu.

Pada 18 Agustus 2024, KPU Sumbar menggelar sosialisasi di berbagai lokasi. KPU Sumbar berharap hal tersebut menjadi perhatian masyarakat bagi penyelenggaraan pemilu.



KPU Sumbar menggelar sosialisasi di berbagai lokasi. KPU Sumbar berharap hal tersebut menjadi perhatian masyarakat bagi penyelenggaraan pemilu.

Suara yang menentukan KPU Sumbar menggelar sosialisasi di berbagai lokasi. KPU Sumbar berharap hal tersebut menjadi perhatian masyarakat bagi penyelenggaraan pemilu.

Sebelumnya, KPU Sumbar menggelar sosialisasi di berbagai lokasi. KPU Sumbar berharap hal tersebut menjadi perhatian masyarakat bagi penyelenggaraan pemilu.

Pada 18 Agustus 2024, KPU Sumbar menggelar sosialisasi di berbagai lokasi. KPU Sumbar berharap hal tersebut menjadi perhatian masyarakat bagi penyelenggaraan pemilu.



KPU Sumbar menggelar sosialisasi di berbagai lokasi. KPU Sumbar berharap hal tersebut menjadi perhatian masyarakat bagi penyelenggaraan pemilu.

Suara yang menentukan KPU Sumbar menggelar sosialisasi di berbagai lokasi. KPU Sumbar berharap hal tersebut menjadi perhatian masyarakat bagi penyelenggaraan pemilu.

Sebelumnya, KPU Sumbar menggelar sosialisasi di berbagai lokasi. KPU Sumbar berharap hal tersebut menjadi perhatian masyarakat bagi penyelenggaraan pemilu.

Pada 18 Agustus 2024, KPU Sumbar menggelar sosialisasi di berbagai lokasi. KPU Sumbar berharap hal tersebut menjadi perhatian masyarakat bagi penyelenggaraan pemilu.

pendang dalam memilih calon. Jangan sampai terpecah belah dalam kehidupan sosial karena akan membuat masyarakat Sumbar terbelah.

Sekali lagi, KPU Sumbar berharap hal tersebut menjadi perhatian masyarakat bagi penyelenggaraan pemilu.

Dia mengatakan, sebagai masyarakat yang baik, marilah bersabar menunggu hasil PSU resmi dari KPU. Jangan menyebarkan berita yang tidak benar dan merugikan orang lain. Ada desas-desus bahwa KPU Sumbar akan mengadakan pertemuan dengan KPU Sumbar.

Untuk diketahui, KPU Sumbar menggelar sosialisasi di berbagai lokasi. KPU Sumbar berharap hal tersebut menjadi perhatian masyarakat bagi penyelenggaraan pemilu.

Sebelumnya, KPU Sumbar menggelar sosialisasi di berbagai lokasi. KPU Sumbar berharap hal tersebut menjadi perhatian masyarakat bagi penyelenggaraan pemilu.

Pada 18 Agustus 2024, KPU Sumbar menggelar sosialisasi di berbagai lokasi. KPU Sumbar berharap hal tersebut menjadi perhatian masyarakat bagi penyelenggaraan pemilu.



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres • KAMIS 18 JULI 2024		/

Festival Maek 2024 Resmi Bergulir Membuka Peradaban Tertua, Menuju Warisan Dunia



Limapuluh Kota, Padang — Festival Maek 2024 resmi dimulai. Ribuan masyarakat memadati lapangan bola kaki Torong Kotogadang, Nagari Maek, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota. Festival arkeologi terbesar di Sumatera Barat ini dibuka Ketua DPRD Sumbar Supardi, Rabu (17/7). Festival Maek sendiri bakal dilakukakan hingga Sabtu (20/7) mendatang.

Supardi mengatakan, satu setengah tahun lalu ia telah memulai rencana festival ini.

» Baca *Membuka...Hal 7*

Supardi

Ketua DPRD Sumbar

Ketika itu hadir pemuka masyarakat Maek dalam sebuah forum diskusi. Tujuannya satu, mewujudkan mimpi. Maek asal mula peradaban dunia. Hal itu buat menepis rasa pesimis yang telah lama ada pada masyarakat Maek. Sebab setiap orang yang datang ke sana, selalu bicara menhir tapi tak memberi penjelasan apa-apa.

Supardi yang punya satu nafas dengan masyarakat Maek hanya ingin satu hal, mimpi itu dapat terwujud dan Nagari Seribu Menhir bakal dilirik kembali. "Saat ini, semua harapan masyarakat Maek yang telah terkumpul 1,5 tahun yang lalu bakal kita mulai dan wujudkan," ucapnya.

Perjalanan panjang ini dimulai Supardi bersama Dinas Kebudayaan Sumbar sejak dari mengunjungi UGM, BRIN, hingga Uueico. "Saya meminta kepada peneliti UGM agar rangka hasil ekskavasi tahun 1985 diproses kembali," terangnya.

Itu semua agar Maek jadi warisan budaya dunia, bisa dapat terwujud. "Maek bakal jadi pariwisata khusus. Lewat festival, para arkeolog dan peneliti dunia akan membuka penelitian untuk mengungkap tabir dan misteri peradaban tertua," ujar Supardi.

Mewakili gubernur Sumbar, Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar Jefri Arifin memberikan sambutan soal betapa pentingnya warisan sejarah di Maek. Ia mengatakan, *tambo* yang menjadi sumber utama dalam adat orang Minang, tidak memberikan angka dan tahun yang pasti. Kapan sebenarnya nenek moyang orang Minang datang dan menetap di Pulau Perca Sumatera ini.

"Menhir di Maek tak hanya membuat penasaran peneliti tapi kita juga orang Minangkabau. Apakah ini bakal jadi lembaran baru dari kebenaran narasi sejarah kita orang Minangkabau?" ujarnya.

Di Sumbar sendiri, menhir dan artefak kerangka manusia purba paling banyak ditemukan di Maek. Lanjut Jefri Arifin, hingga saat ini kapan masa hidup dari kerangka kerangka itu belum dapat dipastikan.

"Sampel-sampel itu sudah dibawa ke Australia untuk dilakukan *carbon dating*."

Tapi hasilnya masih belum keluar. Kita harapkan kebenaran itu bakal secepatnya terungkap," ucapnya. Namun dari dugaan saat ini, diperkirakan jasad yang ditemukan di Maek itu berumur 4000 tahun. Berdekatan dengan kapal nabi nuh kira-kira 5000 tahun lalu. Artinya sudah sangat lama ada manusia yang hidup di tanah Minang.

Hal ini turut menghadirkan kolaborasi akademisi, budayawan, dan para seniman dari dalam dan luar negeri. Hal ini menjadi peluang kerja sama untuk mempromosikan adat istiadat budaya di Sumatera Barat.

"Harapan kita event ini bisa dimanfaatkan oleh anak Nagari Maek untuk mempromosikan budaya itu semua. Sebab selama ini orang datang bukan hanya saja karena ada peninggalan purbakala di Nagari Maek. Tapi juga karena ke khasanah adat istiadat Maek," tuturnya.

Peninggalan sejarah di Maek termasuk cagar budaya yang dilindungi Undang-undang di Indonesia. Pemprov Sumbar papar Jefri Arifin, berkomitmen untuk melestarikan seluruh cagar budaya yang ada, khususnya Nagari Maek. Secepatnya ia akan menetapkan Maek sebagai cagar budaya provinsi dan nasional, dan jadi warisan budaya dunia.

"Semoga dengan diselenggarakannya event ini jadi pengingat dan motivasi untuk kita semua mengupayakan impian itu terwujud. Sebab warisan dunia merupakan jalan panjang penelitian berbagai disiplin ilmu dan kerumitan birokrasi. Moga-moga menhir menyusul WTBOS jadi Warisan Dunia," ujarnya.

Bupati 50 Kota Safarudin yang turut hadir dalam pembukaan juga berjanji bakal melanjutkan festival ini ke depannya. Efrizal Hendri, wali nagari Maek sembari berseloroh dalam sambutannya turut mengumini atensi itu.

"Kami masyarakat Maek siap mengarangi minuman manis. Tapi akan menebar senyuman manis. Nagari Maek siap jadi destinasi wisata arkeologi dunia," tuturnya.

Butuh 10 Tahun

Butuh 10 Tahun



KLIPING BERITA

Direktur Festival Doony Eros menyimpulkan, pebelatan ini adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Ia bersama para kurator Zulkarnaini Diran, Aprimas, Eka Maryanti, Zuari Abdullah, dan 5 Metron Masdison, butuh waktu bertahun-tahun menyiapkannya. Dimulai dari 10 tahun yang lalu hingga sekarang.

Baginya Lembah Maek, ibarat permata tersembunyi yang menyimpan kisah-kisah agung dari peradaban kuno. "Melalui riset yang penuh ketekunan dan semangat, kami berhasil menyibak tabir misteri yang menyelimuti artefak-artefak, struktur-struktur megalit, serta jejak-jejak kehidupan yang memberi kita gambaran akan kekayaan masa lampau," kata dosen Fakultas Ilmu Budaya Unand itu.

Festival ini turut menghasilkan dua buku dari empat orang seniman. Mereka adalah Iyut Fitra dan Yudifan Habib yang menulis *Maek*

Memantui Dalam Puit dan Prosa. Serta Widi Adrianto dan Satria Putra dalam karya *Maek Cerita di Balik Sketsa*. Para seniman yang sudah berkorelasi selama berbulan-bulan dengan alam Maek ini akan mempresentasikan karya-karya mereka dalam sesi diskusi di hari kedua.

Mereka bakal membahas berbagai hal terkait karya yang dihasilkan. Mulai dari proses hingga siasat dan strategi mereka ketika hendak merespons Maek secara kreatif. "Kami berharap, buku ini bukan sekadar panduan, namun juga menjadi jendela yang membuka cakrawala pengetahuan dan inspirasi bagi Anda semua," ucap Donny.

Festival dibuka seni pertunjukan *Mimetik Sulbi* (*Hikayat Batu Tegok*) karya duet dramaturg 5 Metron Masdison dan Zuari Abdullah dengan Andre Junaidi sebagai pengisi musik. Pementasan ini ingin mereplikasi peristiwa paling sublim dalam sejarah Maek, Batu Tegok.

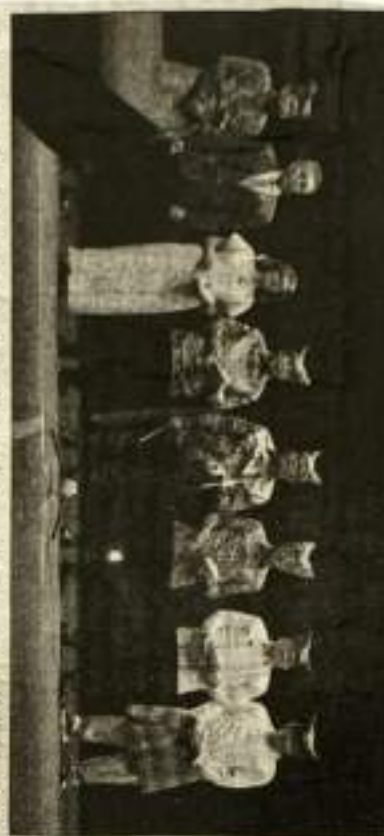
Pementasan ini dibawa oleh sekelompok pemuda yang membopong batu besar serupa menhir. Diringi sece-

ang jenang (naratasi) yang membawakan prolog berbahasa Minang. Para pemuda ini kemudian mameak (memahat) batu tersebut. Dalam pertunjukan ini koreografer Irfandi Usman (Indonesia), Bianca Sere Pulungan (Jerman), dan Janette Hoe (Australia), berkolaborasi dengan 20 anak Nagari Maek.

Selain itu, selama tiga hari, festival bakal membahas beragam topik diskusi terkait Maek. (adv)

HALAMAN

MUJUKAN MIMPI: Ketua DPRD Sumbar Supardi (empat dari kanan), Kadis Kebudayaan Sumbar Jefriani Arifin (empat dari kiri), Bupati Limpuh Kola Sarafuddin (tiga dari kanan) dan Direktur Festival Maek 2024 Doony Eros membuka Festival Maek 2024 kemarin.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG		3
KAMIS, 18 JULI 2024		

Prihatin Penganiayaan Balita di Pasbar

Suwirpen: Perlindungan Anak Tanggungjawab Bersama, Jangan Ragu Melapor

anak-anak tidak terduga men-
jadi korban kekerasan. Anak-anak
adalah aset bangsa. Perlindungan
anak adalah tanggung jawab
bersama. Seluruh masyarakat harus
turut serta dalam melindungi
anak-anak dari berbagai bentuk
kekerasan. Jangan ragu melapor
ke aparat penegak hukum jika
menemukan kasus kekerasan
terhadap anak. Perlindungan
anak adalah tanggung jawab
bersama. Jangan ragu melapor
ke aparat penegak hukum jika
menemukan kasus kekerasan
terhadap anak.

anak-anak adalah aset bangsa. Perlindungan
anak adalah tanggung jawab
bersama. Seluruh masyarakat harus
turut serta dalam melindungi
anak-anak dari berbagai bentuk
kekerasan. Jangan ragu melapor
ke aparat penegak hukum jika
menemukan kasus kekerasan
terhadap anak. Perlindungan
anak adalah tanggung jawab
bersama. Jangan ragu melapor
ke aparat penegak hukum jika
menemukan kasus kekerasan
terhadap anak.

anak-anak adalah aset bangsa. Perlindungan
anak adalah tanggung jawab
bersama. Seluruh masyarakat harus
turut serta dalam melindungi
anak-anak dari berbagai bentuk
kekerasan. Jangan ragu melapor
ke aparat penegak hukum jika
menemukan kasus kekerasan
terhadap anak. Perlindungan
anak adalah tanggung jawab
bersama. Jangan ragu melapor
ke aparat penegak hukum jika
menemukan kasus kekerasan
terhadap anak.

anak-anak adalah aset bangsa. Perlindungan
anak adalah tanggung jawab
bersama. Seluruh masyarakat harus
turut serta dalam melindungi
anak-anak dari berbagai bentuk
kekerasan. Jangan ragu melapor
ke aparat penegak hukum jika
menemukan kasus kekerasan
terhadap anak. Perlindungan
anak adalah tanggung jawab
bersama. Jangan ragu melapor
ke aparat penegak hukum jika
menemukan kasus kekerasan
terhadap anak.

anak-anak adalah aset bangsa. Perlindungan
anak adalah tanggung jawab
bersama. Seluruh masyarakat harus
turut serta dalam melindungi
anak-anak dari berbagai bentuk
kekerasan. Jangan ragu melapor
ke aparat penegak hukum jika
menemukan kasus kekerasan
terhadap anak. Perlindungan
anak adalah tanggung jawab
bersama. Jangan ragu melapor
ke aparat penegak hukum jika
menemukan kasus kekerasan
terhadap anak.





KLIPING BERITA



BIMTEK—Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Berbasis Masyarakat Angkatan VII di sebuah hotel di Kota Padang, Selasa (15/7).





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG		3
KAMIS, 18 JULI 2024		

Supardi Bangga Nagari Maek Mulai jadi Perhatian Masyarakat

PADANG, METRO

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengungkapkan kegembiraan disaat perbincangan tentang nagari Maek Kabupaten Limapuluh Kabupaten mulai menguat dan atensi masyarakat maupun pemerintah mulai tumbuh.

"Kita sangat gembira sebab antusias masyarakat mulai terasa ada terhadap Maek sebagai Nagari seribu menhir ini," kata Supardi disela-sela persiapan kunjungan ke Maek untuk menghadiri pembukaan Festival Maek 2024, Rabu (17/7).

Situs peradaban masa lalu Maek yang terletak di Kabupaten Limapuluh Kota telah menjadi perhatian sejak tahun 2014. Dengan memulai penataan pagar besi dan perluasan sebagai dana aspirasi di-

berikan untuk menjaga situs Bawah Parit beberapa tahun yang lalu.

Supardi menceritakan, dua tahun lalu ia diujak oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Limapuluh Kota, rencana meningkatkan Auri Harau, namun sebuah proposal tentang Maek menyelinap masuk dan ia tertarik.

"Dari situ lah, pertemuan demi pertemuan berlangsung, mulai dengan diskusi kecil hingga terdapat, mulai dari selanjutnya perbincangan sampai menjadi dalam data-data," papar Supardi.

Supardi juga paparkan dengan Dinas Kebudayaan Sumbar berbagai program disusur, dimulai dari pengesahan tim ahli, penelitian Daerah Aliran Sungai, curhat masyarakat nasib kekayaan peradaban

Maek, DNA, Carbon Dating hingga bermuara pada perhelatan Festival Maek ini.

"Banyak cerita, tumpukan kisah, butuh mengikis karu lima demi lembar secara hati-hati dan teliti. Dan butuh ancing-ancing untuk menelusuri narsis, berbagi wacana agar tersebar merata dan setara," ujarnya.

Supardi tegaskan diskusi internasional dan hasil penelitian, pengembangan, kunjungan diskusi dalam 18 bulan ini menjadi penting dalam tahapan perencanaan.

"Dua kegiatan pra Festival akan menjadi alas bakal, bagaimana Maek nantinya menjadi perbincangan baik tingkat nasional maupun internasional," ucapnya. (bbs)



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG 1	Kamis, 18 Juli 2024 Muharram 1446 H)	10

Festival Maek 2024 Dimulai

14-16



Supardi

manusia pada zaman megali-
tikum kepada peradaban modern.
"Salah satu tujuan Festival
Maek adalah untuk mengenali-
kan situs tersebut kepada
masyarakat luas. Selain itu
nantinya para arkeolog dari
Mesir, Jepang, Australia, Jer-
man, dan Italia akan hadir un-
tuk melakukan berbagai hal
dalam mengungkap misteri
maek," katanya.

Menurut Supardi, hingga
kini peradaban Maek masih
menyimpan teka-teki sejarah
yang mesti dipecahkan dimen-
ta. "Sebagaimana UGM, sudah
Gadjah Mada (UGM) sudah
meneliti sebuah tengkorak
manusia pada 1985, namun
belum berhasil mengungkap
sejarah peradaban di Nagari
Maek."

"Menurut sebagai jejak perad-
aban menyimpan banyak mis-
teri. Pada pameran ini ma-
syarakat bisa melihat hasil
penelitian para ahli termasuk
artefak kuno dari peradaban
Maek," jelas Supardi.

Dia mengatakan, jika Festi-
val Maek ini berhasil, maka
akan membuktikan pada dun-
ia bahwa di Sumbar terdapat

PAJAN BERAGALATUKAS KEBUDAYAAN
Festival Maek 2024 dimulai
di Singgalang (17/7). Acara
ini akan berlangsung
tiga minggu kebudayaan
yang menggiatkan
peradaban mata lalu yang
diambilkan seni lisan lokal
berupa memangguk

Festival Maek yang diorgan-
kan DPRD Sumbar Supardi
bertujuan untuk memperkenalkan
19.00 WIB dari terpapar di
Jorong Kota Tandang Nagari
Maek, Kabupaten Limapuluh
Kota.

Supardi mengatakan, dalam
rangkaian Festival Maek 2024,
masyarakat akan dapat ber-
partisipasi dalam berbagai ke-
giatan seni dari tiga warga
berbagai pemerintahan adat
Maek.
Portugalia seni budaya-
sana yang ditampilkan pada
festival tersebut merupakan
upaya untuk mengungkap pe-
ngalaman sejarah peradaban

diri memberikan kaitannya ter-
dapat keberadaan budaya pe-
radaban Maek. Termasuk juga
kita telah melaporkan UNESCO
dan BREN di Jakarta," ungkap
Supardi.

Supardi juga sampaikan, fes-
tival Maek merupakan wadah
yang mampu membuka ruang
besar para peneliti, arkeologi,
dunia dan wisatawan man-
catagora datang ke nagari
Maek.

"Kita berharap kegiatan fes-
tival Maek dapat menjadi kal-
ender tahunan wisata Sumbar
Timur. kedepan semua po-
tensi kebudayaan Maek dan
daerah sekitar, seni tradisi, per-
tunjukan kebudayaan akan
menambah kemasakan fes-
tival Maek dimasa-masa menda-
ng. Kita memingatkan daya
tarik kunjungan wisatawan
maksudnya, harapnya."

Festival Maek 2024 ini diho-
lka secara resmi oleh Gubernur
Sumatera Barat Mahyeldi An-
sharuddin pada 20.00 WIB dan
dihadiri oleh Bupati Limapuh-
luh Kota, Walikota Payakum-
buh, Kepala OPD terkait dan
juga elemen masyarakat Maek.
(001)



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	JUMAT, 19 JULI 2024	3

Destinasi Wisata Sejarah Bangkitkan Ekonomi Masyarakat

Ketua DPRD Sumbar Buka Festival Maek 2024

UMMAH KOTA MEDIO

Festival Maek 2024

akan menjadi pintu untuk memperkenalkan Maek dan membuka ke potensi dan Maek memiliki potensi menjadi destinasi wisata minat khusus. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Supardi, dalam sambutannya saat membuka Festival Maek 2024 di Nagari Maek, Rabu (17/7).

Supardi berkeyakinan Peradaban Maek akan menarik banyak peneliti untuk datang ke Negeri Seribu Mendir ini. "Saat ini sudah hadir para pakar dari Jepang, Korea, Australia dan Jerman, ini membuktikan Maek menjadi magnet peneliti dunia, karena banyak misteri peradaban yang harus dibuka, dan itu hanya bisa dilakukan oleh pe-

nelit," terang Supardi.

Menurutnya, wisata minat khusus ini akan lebih mampu untuk membangkitkan ekonomi masyarakat, karena rata-rata peneliti akan berada di Maek dalam waktu yang lama.

"Peneliti akan datang ke Maek, dan Yogyakarta selanjutnya, bertujuan untuk menggali budaya berminat minat, sebagai budaya berminat minat, sebagai aset money akan mampu menghasilkan modal perekonomian masyarakat, mulai dari kuliner, transportasi, penginapan dan lain sebagainya," jelas Supardi.

Festival Maek ini adalah tradisi yang terwujud sejak 10 tahun yang lalu, meliputi wilayah Maek sangat besar, karena Maek berada tentang peradaban yang lebih tua dari Indonesia dan Minangkabau.



FESTIVAL MAEK 2024-Ketua DPRD Sumbar, Supardi, saat pembukaan Festival Maek 2024 di Nagari Maek, Rabu (17/7).

"Hasil caribondang, se-merta, yang baru ditulis di Australia merupakan, ting- korak yang ditulis tersebut diwariskan pada Tahun 400 Sebelum Masehi, jauh sebelum manusia ada, bisa kita bayangkan saat itu Maek sudah menjadi kota besar, sayangnya hingga saat ini

belum ada peneliti yang ber- hasil membuka misteri dinor- na kota itu secara resmi be- da," jelas Supardi.

"Yang ada saat ini ad- alah kompleks pemukiman yang ditumbuhi dengan mon- tir, dan itu jumlahnya ti- baus. Kemudian peradaban itu hilang, dan mata pe-

adaban itu berasal, bagai- mana kehidupan pada saat itu, apakah ada hubungan dengan peradaban lain. Pertanyaan itu masih men- jadi misteri dan tahu itu bisa dibuka dengan peneli- tian," tambah Supardi.

Dia berharap Festival Maek ini adalah sebagai pintu masuk untuk meng- kaji tersebut. Sehingga, menarik minat peneliti du- na hadir di Maek.

Festival Maek yang di- gelar hingga tanggal 20 Juli mendatang, akan mema- nfaatkan berbagai lokasi tu- rang, peradaban Maek, do- dalam, dan luar negeri. Se- lain itu juga akan dipertah- kan berbagai atraksi seni tradisi masyarakat dari se- mualah provinsi di Indo- nesia. (Abe)

NEWS!



KHAZ

JUMAT, 19 JULI 2024
JUMAT, 13 MUHARRAM 1446 H

HALAMAN

2

SEBAGAI NEGERI SERIBU MENHIR

Supardi: Maek harus Dikenal Sebagai Daerah Peradaban Tertua di Indonesia

Sorilamak, Khazanah — Pembukaan Maek Festival 2024 yang di lapangan bola kaki Jorong Koto Tangah Nagari Maek, Kabupaten Limapuluh Kota, Rabu malam (17/7) berlangsung meriah. Ribuan masyarakat datang berbondong-bondong untuk menyaksikan berbagai atraksi kesenian yang dipentaskan dalam festival tersebut.

Festival arkeologi terbesar di Provinsi Sumatera Barat tersebut, dibuka langsung oleh Ketua DPRD Sumbur Supardi sebagai penanggung jawab acara.

Supardi saat membuka Maek Festival 2024 itu mengatakan, Maek sebagai negeri seribu menhir harus dikenal luas sebagai daerah peradaban tertua di Indonesia, dan semua orang setuju akan hal tersebut.

"Digagasnya Maek Festival 2024 merupakan upaya terus untuk memajukan potensi daerah, tidak ada unsur apapun," tukas Supardi.

Diungkapkan, untuk mendapatkan pengakuan Maek sebagai warisan dunia, perjalanan panjang telah dilalui, mulai dari Focus Discussion Grup (FGD) hingga meneliti fosil yang ditemukan pada daerah Maek di Australia.

"Kita semua harus mengetahui tahun berapa pastinya keberadaan Maek tersebut, sehingga upaya panjang telah dilalui," katanya.

Dia menyebut Metode penelitian fosil yang dilakukan di Australia yaitu carbon dating, ada 13 tahap untuk menentukan usia fosil yang diteliti, namun untuk Maek telah berada pada tahap akhir, hampir dipa-

rikan fosil itu berusia 4000 tahun sebelum masehi.

"Harusnya pada pembukaan Maek Festival hasil Carbon Dating telah keluar namun harus ditunggu bersama-sama," katanya.

Menurutnya, 4000 tahun sebelum masehi, belum ada NKRI dan Ranah Minang, namun Maek telah memiliki peradaban yang maju. Sungguh situs sejarah yang sangat membanggakan Sumbur.

Tidak hanya menhir, takuknya, di Nagari Maek juga terdapat bekas kawah merapi aktif yang meletus jauh sebelum terbentuknya Danau Toba. Itu ditemukan saat Dinas Kebudayaan Sumbur mengadakan penelitian dengan UNP pada 2005 lalu.

"Disini juga ditemukan bekas pelabuhan aktif, oleh sebab itu Maek harus menjadi tempat pariwisata khusus dengan pangsa pasar yang berbeda (Arkeolog-red)," tambahnya.

Untuk itu, Supardi berpesan kepada masyarakat Maek agar memanfaatkan potensi yang ada di nagari itu untuk dinikmati oleh pengunjung. Masyarakat juga diminta untuk dapat membangun nama kepada pengunjung agar tertarik datang serta tinggal lama di Nagari Maek yang punya sekitar 1.200 Menhir tersebut.

"Artinya, kita masyarakat harus ramah terhadap tamu-tamu yang datang berkunjung. Yang paling penting sekali adalah kita jangan sampai kehilangan jati diri kita sebagai masyarakat yang berbudaya dan beradab. Sebab, itulah yang akan kita jual kepada mereka," tuturnya.

Sementara itu, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Ban-

daru Rajo mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Sumbur Supardi yang telah melaksanakan Maek Festival 2024 yang digelar Dinas Kebudayaan Sumbur.

"Festival Maek 2024 melampaui ekspektasi. Saya tidak menyangka bahwa seeneriah ini. Kita mengapresiasi Pemprov Sumbur dan Ketua DPRD Sumbur serta seluruh yang terlibat dalam kegiatan ini termasuk seluruh masyarakat Maek," ujar Bupati.

Safaruddin.

Turut hadir pada kesempatan itu, Gubernur Sumbur dan Wakil Kepala Dinas Kebudayaan Jeftrinal Arifin, Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra, Pj. Wali Kota Payakumbuh Supray-

itno, Forkopimda, Wali Nagari se-Kecamatan Bukit Barisan, Nimaik Mamak, Alim Ulama, Cadik Pandai, Bundo Kandung dan tamu undangan lainnya. Acara Maek Festival digelar 17 hingga 20 Juli 2024. (lily yunianti)





KLIPING BERITA

SALAH satu atraksi kesenian yang ikut memeriahkan Pembukaan Maek Festival 2024





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KHAZANAH	KAMIS, 18 JULI 2024 KAMIS, 12 MUHARRAM 1445 H	1

MAEK FESTIVAL 2024 DIBUKA

Wali Nagari: Terima Kasih Pak Supardi

Sardilamak, Khazanah — Maek siap menjadi destinasi wisata arkeolog global dan masyarakat Maek siap menyambut para arkeolog dunia pada Maek Festival 2024 ini. "Terimakasih kepada Bapak Supardi yang sudah mengangkat acara ini, dan terimakasih juga kepada seluruh pihak yang menjadikan Maek mendunia," ujar Wali Nagari Maek Efrizal dalam sambutannya pada acara pembukaan Festival Budaya Maek di lapangan bolakaki Maek, Rabu malam (17/7).

Efrizal juga menyampaikan, jika ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan, karena tidak semua aspirasi yang dapat diakomodir.

Semoga kegiatan festival budaya Maek ini akan terus bergulir setiap tahunnya dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Nagari Maek," ungkapnya.



KETUA DPRD Sumbang Supardi disambut dengan sirih dalam carano oleh anak nagari Maek

Festival Maek ini merupakan salah satu strategi dalam mengangkat potensi besar nagari Maek bernama Menhir. Direktur Festival Doni Eros berharap Maek bisa membuka tabir tentang peradaban ini.

"Menhir bukan hanya batu saja, tetapi ada misteri peradaban yang ternyata mengundang dunia untuk melihat Maek. Ada dari Jerman, Mesir, Singapura dan sejumlah arkeolog yang hadir pada malam ini," kata Direktur Festival Doni Eros.

Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin sangat mengapresiasi kegiatan Festival Maek ini. Pemkab Limapuluh Kota komit untuk terus mengembangkan Menhir sebagai potensi besar yang harus dikenal dunia.

"Insya Allah Maek Festival akan menjadi agenda tahunan Limapuluh Kota, sehingga Maek mendunia," kata Safaruddin.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat diwakili Kadis Kebudayaan, Jefri Alifin mengungkapkan Festival Maek sebagai pintu masuk

menggalai asal usul nenek moyang manusia.

Peradaban di Maek diperkirakan sudah ada sejak 4000 tahun SM. Maek bukan hanya sekedar festival namun menjadi ajang untuk memperkenalkan Maek di pentas peradaban dunia, terimakasih pak Supardi atas pekarasanya mengangkat acara ini," kata gubernur.

Maek Festival 2024 resmi dibuka, Rabu (17/7) malam, diawali dengan penampilan tari tentang menhir yang dibawakan oleh Anak Nagari Maek, beserta koreografer dari Indonesia, Jerman dan Australia. Tari itu menggambarkan tentang situs asal muasal situs menhir yang menjadi sejarah peradaban dunia yang kini masih menjadi misteri.

Puncak Festival Maek ini digelar di Nagari Maek, Kabupaten Limapuluh Kota 17 sampai dengan 20 Juli 2024. Berbagai diskusi dan atraksi seni berbagai provinsi ditampilkan selama 4 hari tersebut.

Dalam pembukaan Maek Festival 2024 ini, dihadiri oleh ribuan masyarakat Limapuluh Kota dan Payakumbuh. Masyarakat antusias untuk mengikuti seluruh rangkaian acara. (lil yunati)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KHAZANAH	JUMAT, 19 JULI 2024 JUMAT, 13 MUHARRAM	4

DPRD Yakini Menhir Maek Potensial jadi Destinasi Wisata Internasional

Padang, Khazanah- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbare) Supardi menyakini Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota yang memiliki situs menhir berpotensi menjadi destinasi wisata minat khusus internasional.

"Festival Maek 2024 bisa menjadi pintu untuk mengenalkan Nagari Maek dan menhir ke pentas dunia. Maek memiliki potensi menjadi destinasi wisata minat khusus," kata Ketua DPRD Provinsi Sumbare Supardi di Padang, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumbare di sela-sela rangkaian kegiatan Festival Maek 2024 yang diselenggarakan di Nagari Maek, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumbare.

Supardi menyakini Nagari Maek menyimpan sejarah zaman batu yang menarik untuk diteliti lebih jauh. Bahkan, peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) sudah melakukan penelitian di daerah itu. Sayangnya, hingga kini belum berhasil mengungkap peradaban yang pernah terjadi di Nagari Maek.

Saat ini, sambung dia, para peneliti dari Jepang, Mesir, Australia dan Jerman sudah tiba di Nagari Maek untuk melihat langsung gugusan batu-batu menhir yang diperkirakan sudah ada sejak zaman megalitikum.

Menurut dia, kehadiran pakar atau peneliti dari banyak negara membuktikan situs menhir di Nagari Maek menjadi magnet bagi peneliti dunia. Para peneliti diyakini ingin meneliti lebih jauh tentang peradaban yang pernah ada.

"Banyak misteri peradaban yang harus dibuka, dan itu hanya bisa dilakukan oleh peneliti," katanya.

Teranyar, berdasarkan hasil carbon dating sementara tengkorak asal Nagari Maek yang sedang diteliti di Australia diperkirakan dikubur pada 4.000 sebelum masehi.

"Bisa kita bayangkan saat itu Maek sudah menjadi kota besar, sayangnya hingga saat ini belum ada peneliti yang berhasil menyingkap misteri dimana kota itu sebenarnya berada," kata Supardi. (ant/sal)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KHAZADONYO	JUMAT, 19 JULI 2024 JUMAT, 13 MUHARRIRAM 1445 H	10

SHARING TUGAS POKOK BK DPRD Sulawesi Tenggara Berkunjung ke BK DPRD Sumbaw

Padang, Khazanah - Badan Kelembagaan (BK) DPRD Provinsi Sumatera Barat, menerima kunjungan BK DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka sharing terkait tugas pokok dan kewenangan yang dimiliki BK DPRD di ruang BK DPRD Sumbaw, Kamis (18/7).

Kita ingin ke depan BK DPRD bisa lebih maksimal dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Agar Wakil Ketua BK DPRD Sulawesi Tenggara, Muhammad Nur Sniapoy, bisa lebih maksimal dalam menjalankan kewenangannya.

Sniapoy juga mengungkapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk berdiskusi dan berbagi ilmu dan belajar pertemuan ini dapat menambah wawasan terkait tugas dan fungsi BK untuk diterapkan di DPRD Sulawesi Tenggara. Sniapoy, Sekretaris Ketua BK DPRD



WAKIL Ketua BK DPRD Sulawesi Tenggara, Muhammad Nur Sniapoy menerima kedatangan dari Ketua BK DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muzli M Nur.

Provinsi Sumatera Barat Muzli M Nur menyampaikan, tugas pokok dan fungsi BK DPRD Sumatera Barat 2019-2024, BK DPRD Provinsi Sumatera Barat telah aktif, meningkatkan regulasi

Thiagarajan, anggota tata beracara DPRD yang tengah dibahas saat ini diterapkan akhir Agustus 2024. Pasca diterapkan, regulasi tata beracara DPRD diterapkan periode anggota DPRD 2024-2029.

Kata Muzli M Nur mengungkapkan terima kasih atas kunjungan BK DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, terlihat kunjungan tersebut merupakan suatu kebanggaan bagi DPRD. jrt/

BREAKING NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	JUMAT, 19 JULI 2024 13 Juli 1445 H	13

Supardi Dorong Maek Jadi Destinasi Wisata

Minat Khusus

LIMA PULUH KOTA, HALUAN — Festival Maek 2024 sebagai pintu untuk memperkenalkan Maek dan menarik yang ada di Nagari Maek ke pentas dunia. Maek memiliki potensi menjadi destinasi wisata minat khusus.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumbang, Supardi dalam sambutannya saat membuka Festival Maek 2024 di nagari Maek, Rabu (17/7).

Supardi berkeyakinan peradaban Maek akan menarik banyak peneliti untuk datang ke Negeri Seribu Menhir ini.

"Saat ini sudah hadir para pakar dari Jepang, Mesir, Australia dan Jerman, ini membuktikan Maek menjadi magnet peneliti dunia, karena banyak misteri peradaban yang harus

dibuka, dan itu hanya bisa dilakukan oleh peneliti," terang Supardi.

Menurutnya, wisata minat khusus ini akan lebih mampu untuk membangkitkan ekonomi masyarakat, karena rata-rata peneliti akan berada di Maek dalam waktu yang lama.

"Peneliti akan datang ke Maek dan Payakumbuh selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, harapannya ini akan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, mulai dari kuliner, transportasi, penginapan dan lain sebagainya," jelas Supardi.

Dikatakannya, Festival Maek adalah mumpunya sejak lama yang kini terwujud. Sejak 10 tahun yang lalu, mumpunya

terentang Maek sangat besar, karena Maek bicara tentang peradaban yang lebih tua dari Indonesia dan Minangkabau.

"Hasil carbon dating sementara, yang kini diteliti di Australia memprediksi, tengkorak yang terdapat di Maek dan diteliti dikuburkan pada Tahun 4000. Sebelum Maek, jauh sebelum masantara ada, bisa kita bayangkan saat itu Maek sudah menjadi kota besar, sarangnya hingga saat ini belum ada peneliti yang berhasil menyalak misteri dimana kota itu sebenarnya berada," tegas Supardi.

"Yang ada saat ini adalah kompleks pemakaman yang diundi dengan menhir, dan itu jumlahnya ribuan. Kemana peradaban itu hilang, dari mana

peradaban itu berasal, bagaimana kehidupan pada saat itu, apakah ada hubungan dengan peradaban lain. Peranyaan itu masih menjadi misteri dan tabir ini bisa dibuka dengan penelitian," tambah Supardi.

Dia berharap Festival Maek ini adalah sebagai pintu masuk menyingkap tabir tersebut. Sehingga menarik minat peneliti dunia untuk hadir di Maek.

Festival Maek yang digelar hingga 20 Juli mendatang, akan menampilkan berbagai diskusi tentang peradaban Maek, dengan narasumber peneliti dalam dan luar negeri. Selain itu juga akan dipentaskan berbagai atraksi seni tradisi mancanegara dan sejumlah provinsi di Indonesia. (h/len)



KETUA DPRD Sumbang, Supardi IST





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	JUMAT, 19 JULI 2024 13 Muharram 1446 H	13

Supardi Dorong Maek Jadi Destinasi Wisata Minat Khusus

IMA PULUH KOTA, HALUAN — Festival Maek 2024 sebagai pintu untuk memperkenalkan Maek dan menarik minat ada di Nagari Maek ke pentas dunia. Maek memiliki potensi menjadi destinasi wisata minat khusus.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Supardi dalam sambutannya saat membuka Festival Maek 2024 di Nagari Maek, Rabu (17/7).

Supardi berkeyakinan peradaban Maek akan menarik banyak peneliti untuk datang ke Negeri Seribu Menhir ini.

"Saat ini sudah hadir para pakar dari Jepang, Meksik, Australia dan Jerman, ini membuktikan Maek menjadi magnet peneliti dunia, karena banyak misteri peradaban yang harus

dibuka, dan itu hanya bisa dilakukan oleh peneliti," terang Supardi.

Menurutnya, wisata minat khusus ini akan lebih mampu untuk membangkitkan ekonomi masyarakat, karena rata-rata peneliti akan berada di Maek dalam waktu yang lama.

"Peneliti akan datang ke Maek, dan Payalambuh selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, harapannya ini akan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, mulai dari kuliner, transportasi, penginapan dan lain sebagainya," jelas Supardi.

Dikatakannya, Festival Maek adalah mimpinya sejak lama yang kini terwujud. Sejak 10 tahun yang lalu, mimpinya

tentang Maek sangat besar, karena Maek bicara tentang peradaban yang lebih tua dari Indonesia dan Minangkabau.

"Hasil carbon dating sementara, yang kini diteliti di Australia memprediksi, tengkorak yang terdapat di Maek dan diteliti dikuburkan pada Tahun 4000 Sebelum Masehi, jauh sebelum nusantara ada, bisa kita bayangkan saat itu Maek sudah menjadi kota besar, sarangnya hingga saat ini belum ada peneliti yang berhasil menyibak misteri dimana kota itu sebenarnya berada," tegas Supardi.

"Yang ada saat ini adalah kompleks pemakaman yang ditandai dengan menhir, dan itu jumlahnya ribuan. Dimana peradaban itu hilang, dari mana

peradaban itu berasal, bagaimana kehidupan pada saat itu, apakah ada hubungan dengan peradaban lain. Pertanyaan itu masih menjadi misteri dan tabir itu bisa dibuka dengan penelitian," tambah Supardi.

Dia berharap Festival Maek ini adalah sebagai pintu masuk menyingkap tabir tersebut. Sehingga menarik minat peneliti dunia untuk hadir di Maek.

Festival Maek yang digelar hingga 20 Juli mendatang, akan menampilkan berbagai diskusi tentang peradaban Maek, dengan narasumber peneliti dalam dan luar negeri. Selain itu juga akan dipentaskan berbagai atraksi seni tradisi minangkabau dan sejumlah provinsi di Indonesia. (h/len)



KETUA DPRD Sumbar, Supardi. IST





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	JUMAT, 19 JULI 2024 13 Muharram 1446 H	/

FESTIVAL MAEK 2024 RESMI BERGULIR

Membuka Peradaban Tertua, Menuju Warisan Dunia

LIMPULUH KOTA, HALUAN

— Festival Maek 2024 resmi dimulai. Ribuan masyarakat memadati lapangan sepak bola Joning Koto Gadang, Nagari Maek, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota. Festival arkeologi terbesar di Sumatera Barat ini dibuka oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Supardi, Rabu (17/7).

Setelah 40 tahun lamanya, akhirnya riset dan penelitian tentang Maek bakal dilanjutkan. Festival Maek sendiri bakal dilakukan selama tiga hari, dari Rabu-Sabtu (17-20/7).

Supardi mengatakan, satu setengah tahun lalu ia telah memulai rencana festival ini. Ketika itu hadir pemuka masyarakat Maek dalam se-

buah forum diskusi. Tujuannya satu, mewujudkan mimpi, Maek asal mula peradaban dunia. Hal itu untuk menepis rasa pesimis yang telah lama ada pada masyarakat Maek. Sebab, setiap orang yang datang ke sana selalu bicara menhur tapi tak memberi penjelasan apa-apa.

Supardi yang punya satu nafas dengan masyarakat Maek hanya ingin satu hal, mimpi itu dapat terwujud dan Nagari Seribu Menhir bakal berdiri kembali. "Saat ini, semua harapan masyarakat Maek yang telah terkumpul 1,5 tahun yang lalu bakal kita mulai dan wujudkan," ucapnya, Rabu (17/7).

Perjalanan panjang ini dimulai Supardi bersama Dinas Kebudayaan Sumbar sejak dari mengunjungi UGM, BRIN, hingga UNESCO. "Saya meminta kepada peneliti UGM agar rangka hasil ekskavasi tahun 1985 diproses kembali," ucapnya.

Itu semua agar Maek jadi warisan budaya dunia, bisa dapat terwujud. "Maek bakal menjadi pariwisata khusus. Lewat Festival Maek, para arkeolog dan peneliti dunia akan membuka penelitian untuk mengungkap tabir dan misteri peradaban tertua," ujar Supardi.

Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Jefri Arifin yang mewakili Gubernur memberikan sambutan soal betapa pentingnya warisan sejarah di Maek. Ia mengatakan, tambo yang menjadi sumber utama dalam adat orang Minang, tidak memberikan angka dan tahun yang pasti. Kapan sebenarnya nenek moyang kita datang dan menetap di pulau perca Sumatera ini.

"Menurut di Maek tak hanya membuat penemuan penemuan, tapi kita juga orang Minangkabau. Apakah ini bakal jadi lembaran baru dari kebenaran nani-

sejarah kita orang Minangkabau," ujarnya.

Di Sumbar sendiri, menhir dan artefak kerangka manusia purba paling banyak ditemukan di Maek. Jeftinal melanjutkan, hingga saat ini kapan masa hidup dari kerangka-kerangka itu belum dapat dipastikan.

"Sampel-sampel itu sudah dibawa ke Australia untuk dilakukan *carbon dating*. Tapi hasilnya masih belum keluar. Kami harapkan kebenaran itu bakal secepatnya terungkap," ucap mantan Kepala Kesbangpol Sumbar itu.

Namun dari dugaan saat ini, diperkirakan jasad yang ditemukan di Maek itu berumur 4.000 tahun. Berdekatan dengan kapal Nabi Nuh kira-kira 5.000 tahun lalu. Artinya, sudah sangat lama ada manusia yang hidup di tanah Minang.

Helat ini turut menghadirkan kolaborasi akademisi, budayawan, dan para seniman dari dalam dan luar negeri. Hal ini menjadi peluang kerja sama untuk mempromosikan adat istiadat budaya di Sumbar.

"Harapan kami iven ini bisa dimanfaatkan oleh anak nagari Maek untuk mempertahankan budia itu semua. Sebab, selama ini orang datang bukan hanya saja karena ada peninggalan purbakala di Nagari Maek. Tapi juga karena kekhasan adat istiadat Maek," ucapnya.

Peninggalan sejarah di Maek termasuk cagar budaya yang dilindungi undang-undang di Indonesia. Pemprov Sumbar berkomitmen untuk melestarikan seluruh cagar budaya yang ada, khususnya Nagari Maek. Secepatnya ia akan menetapkan Maek sebagai cagar budaya provinsi dan nasional, dan menjadi warisan budaya dunia.

"Semoga dengan diselenggarakannya iven ini

jadi pengingat dan motivasi untuk kita semua mengupayakan impian itu terwujud. Sebab, warisan dunia merupakan jalan panjang penelitian berbagai disiplin ilmu dan kerumitan birokrasi. Moga-moga menhir menyusul WTOS jadi warisan dunia," ujarnya.

Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin yang turut hadir dalam pembukaan juga berjanji bakal melanjutkan festival ini ke depannya.

Sementara Wali Nagari Maek, Efrizal Hendri sembari berseloroh dalam sambutannya turut mengantasi atensi itu. "Kami masyarakat Maek siap mengurangi minuman manis. Tapi akan menebus senyuman manis Nagari Maek siap jadi destinasi wisata arkeologi dunia," tuturnya.

Direktur Festival Maek, Donny Eros dalam sambutannya menyampaikan bahwa penelitian ini adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Ia bernama para karnor, yakni Zulkarnain Dinar, Aprians, Eka Mariani, Zaini Abdullah, dan S. Miron Masdison butuh waktu bertahun-tahun menyajikannya. Dimulai dari 10 tahun yang lalu hingga sekarang.

Baginya, Lambah Maek ibarat permata





KLIPING BERITA

tersebut yang menyimpan kisah-kisah agung dari peradaban kuno. "Melalui riset yang penuh ketekunan dan semangat, kami berhasil menyingkap tabir misteri yang menyelimuti artefak-artefak, struktur-struktur megah, serta jejak-jejak kehidupan yang memberi kita gambaran akan kejayaan masa lampau," kata dosen Fakultas Ilmu Budaya Unand itu, Rabu (17/7).

Ia juga berterima kasih pada masyarakat Maek yang dengan kehangatannya dengan senang hati bekerja sama. Festival ini turut menghasilkan dua buku dari empat orang seriman. Mereka

adalah Iyut Fitra dan Yudifan Habibi yang menulis *Maek Mementul Dalam Pusi dan Prusi*. Serta Widi Adrianto dan Satria Putra dalam karyanya *Maek Cerita Dibalik Sketsa*.

Para seriman yang sudah berkeliling selama bertahun-tahun dengan alam Maek ini akan mempresentasikan karya-karya mereka dalam sesi diskusi di hari kedua. Mereka bakal membahas berbagai hal terkait karya yang dihasilkan, mulai dari proses hingga suat dan strategi mereka ketika benda tersebut di Maek secara kreatif.

"Kami berharap buku ini bukan sekadar panduan, namun juga menjadi jendela yang membuka cakrawala pengetahuan dan inspirasi bagi kita semua," ucap Donny.

Ia juga berharap seluruh rangkaian Festival Maek turut mendukung agenda pemajuan kebudayaan, utamanya di Maek.

Festival dibuka oleh seni pertunjukan "Mimik Sulbi (Hikayat Batu Tegak)", karya duet dramaturgi S. Metron Masdison dan Zuari Abdullah dengan Andre Junaldi sebagai pengisi musik. Pementasan ini ingin mereplikasi peristiwa paling *awesome* dalam sejarah Maek, Batu Tegak.

Pertunjukan ini diawakan oleh sekelompok pemuda yang membopong batu besar serupa menhir. Diiringi seorang *amang* (narrator) yang membawakan prolog berbahasa Minang.

Para pemuda itu kemudian *menaruh* (memahat) batu tersebut. Dalam pertunjukan ini koreografer Jefriandi Usman (Indonesia), Bianca Sere Pulungan (Jerman), dan Jarrett Hoe (Australia) berkolaborasi dengan 20 anak nagari Maek. Selama tiga hari, festival ini bakal membedah beragam topik diskusi terkait Maek. (h/adv)

TANGGAL

HALAMAN

KETUA DPRD Sumbar, Supardi saat membuka Festival Maek di Nagari Maek, Kabupaten Limapuluh Kota, Rabu (17/7), IST.





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG		1
JUMAT, 19 JULI 2024		

MAEK FESTIVAL 2024: DARI MENHIR HINGGA FOSIL Menguak Kejayaan Peradaban 4.000 SM



KETUA DPRD Sumbar Supardi, saat membuka Maek Festival 2024, di Jorong Koto Tangah, Nagari Maek, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota, Rabu malam (17/7).

LIMPULUH KOTA, KP - Maek Festival 2024 berlangsung meriah. Ribuan masyarakat datang berbondong-bondong menyaksikan berbagai atraksi kesenian yang disuguhkan pengisi acara.

Festival arkeologi terbesar di Sumbar itu dibuka langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi sebagai penggalang acara, di lapangan bola kaki Jorong Koto Tangah Nagari Maek, Kabupaten Limapuluh Kota, Rabu (17/7). Festival ini digelar hingga 20 Juli 2024.

Supardi mengatakan, Maek se-

bagai 'negeri seribu menhir' harus dikenal luas sebagai daerah peradaban tertua di Indonesia. Ia yakin semua orang setuju akan hal tersebut.

"Maek Festival 2024 merupakan upaya tulus untuk memajukan potensi daerah, tidak ada unsur apapun," kata Supardi.

Menurutnya, untuk mendapatkan pengakuan Maek sebagai warisan dunia telah melalui perjalanan yang cukup panjang, mulai dari Focus Group Discussion (FGD) hingga

BERSAMBUNG KE HAL. 11

Maek Festival

meneliti fosil yang ditemukan di Maek.

"Kita semua harus mengetahui tahun berapa pastinya keberadaan peradaban Maek tersebut," kata Supardi.

Dia menjelaskan, metode penelitian fosil yang dilakukan di Australia yaitu carbon dating. Ada 13 tahap untuk menentukan usia fosil yang diteliti, namun untuk Maek telah berada pada tahap akhir. Hampir dipastikan fosil itu berumur 4.000 tahun sebelum masehi.

"Harusnya pada pembukaan Festival Maek ini, hasil carbon dating telah keluar, namun harus ditunggu bersama-sama. Bayangkan, 4.000 tahun sebelum masehi, belum ada NKRI dan Ranah Minang. Namun Maek telah memiliki peradaban yang maju. Sungguh situs sejarah yang sangat membanggakan Sumbar," katanya.

Tidak hanya menhir, di Nagari Maek juga terdapat bekas kawah gunung api yang meletus jauh sebelum terbentuknya Danau Toba. Hal itu ditemukan saat Dinas Kebudayaan Sumbar mengadakan penelitian bersama UNP pada 2005 silam.

Di sini juga ditemukan bekas pelabuhan. Oleh sebab itu, kata Supardi, Maek harus menjadi tempat pariwisata khusus dengan pangsa pasar yang berbeda (Arkeolog-red).

Ia berpesan kepada masyarakat Maek agar memanfaatkan potensi yang ada di nagari itu untuk dinikmati oleh pengunjung.

Masyarakat juga diminta membangun narasi kepada pengunjung agar tertarik datang serta tinggal lama di Nagari Maek yang punya sekitar 1.200 menhir tersebut.

"Artinya, kita harus ramah terhadap tamu-



tamu yang datang berkunjung. Paling penting sekali, kita jangan sampai kehilangan jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya dan beradab. Sebab, itulah yang akan kita 'jual' kepada mereka," tuturnya.

Turut hadir pada kesempatan itu, Gubernur Sumbar diwakili Kepala Dinas Kebudayaan Jeffrinal Arifin, Ketua

DPRD Limapuluh Kota Deni Asra, Pj. Wali Kota Payakumbuh Suprayitno, unsur forkopimda, wali nagari se-Kecamatan Bukit Barisan, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan tamu undangan lainnya.

Sementara, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Ketua DPRD Sumbar yang telah menginisiasi Maek Festival 2024 bersama Dinas Kebudayaan Sumbar.

"Festival Maek 2024 melampaui ekspektasi. Saya tidak menyangka akan semeriah ini. Kita mengapresiasi Pemprov Sumbar dan Ketua DPRD Sumbar serta seluruh yang terlibat dalam kegiatan ini termasuk seluruh masyarakat Maek," ujar Bupati Safaruddin.

Bupati menyebut, Nagari Maek memiliki potensi pariwisata khusus yang harus terus dikembangkan. Bahkan, kawasan situs bersejarah menhir Maek telah diakui di tingkat nasional dengan menjadi juara III Anugerah Pesona Indonesia (API) Award 2023 kategori Situs Bersejarah.

"Kita sama-sama perjuangkan Maek menjadi pusat arkeolog dunia. Salah satunya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Kita akan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan menuju Maek dan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya," kata Bupati Safaruddin. (adv)



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	SELASA, 16 JULI 2024	3

Wakil Gubernur Sampaikan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024

Ekonomi Sumbar Triwulan I 2024 Tumbuh 4,37 persen

PADANG, METRO

Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joatjedy menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD Sumbar melalui rapat paripurna dewan, Senin, (15/7).

Dalam kesempatan itu, Audy menyampaikan, merujuk kepada data dan informasi yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, perekonomian Sumatera Barat Triwulan I tahun 2024 yang dihitung berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.60,65 triliun atau atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp.48,70 triliun.

"Ekonomi Sumbar triwulan I tahun 2024 terhadap periode yang sama di tahun sebelumnya tumbuh sebesar 4,37 persen (YON-Y) dari sisi produksi, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,88 persen," ungkap Audy.

Sementara dari sisi pengeluaran, lanjutnya, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) sebesar 20,56 persen. Ekonomi Sumatera Barat Triwulan I 2024 terhadap triwulan sebelum-

nya mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 0,63 persen (Q-TO-Q).

Dari sisi produksi, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,49 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi terdalam sebesar 37,46 persen.

Pada mei 2024 terjadi inflasi year on year (YON-Y) sebesar 4,17 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 107,77. Inflasi tertinggi terjadi di kabupaten Pasaman Barat sebesar 5,93 persen dengan IHK sebesar 108,98 dan terendah terjadi di Kota Padang sebesar 3,64 persen dengan IHK sebesar 107,35.

Nilai tukar petani (NTP)

Sumatera Barat Mei 2024 sebesar 123,72 atau naik 1,87 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Peningkatan NTP dikarenakan peningkatan indeks harga yang diterima petani (IT) naik sebesar 2,15 persen dan indeks harga yang dibayar petani (IB) sebesar 0,27 persen. Nilai tukar usaha rumah tangga pertanian (NTUP) Sumatera Barat April 2024 126,99 atau naik 2,27 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya. Pada mei 2024 NTP masing-masing subsektor tercatat sebesar 103,96 untuk subsektor tanaman pangan (NTPP), 133,90 untuk subsektor hortikultura (NTPH), 149,34 untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTPR), 110,53 untuk subsektor peternakan (NTPt), dan 92,01 untuk subsektor perikanan (NTPN).

Subsektor perikanan

terbagi menjadi dua, yaitu subsektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya dengan NTP masing-masing sebesar 93,73 dan 90,70. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat pada April 2024 melalui pintu masuk Bandara Internasional Minangkabau sebanyak 7.166 kunjungan, mengalami peningkatan sebesar 140,79 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Sumatera Barat April 2024 sebesar 41,38 persen, mengalami peningkatan sebesar 7,54 poin dibandingkan TPK bulan sebelumnya. TPK hotel non bintang di Sumatera Barat pada April 2024 adalah sebesar 23,63 persen, meningkat 8,74 poin dibandingkan TPK bulan sebelumnya. Rata-rata lama menginap tamu di



<https://dprd.sumbarprov.go.id/>



KLIPING BERITA

hotel berbintang pada april 2024 tercatat sebesar 1,18 hari, turun 0,10 hari dibandingkan bulan sebelumnya.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sumatera Barat bulan Februari 2024 sebesar 5,79 persen, mengalami penurunan sebesar 0,11 persen poin dibandingkan Februari 2023. Bulan Februari 2024, jumlah angkatan kerja di Sumatera Barat sebanyak 3,09 juta orang, meningkat 86,78 ribu orang dibanding Februari 2023, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan 0,48 persen poin. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) februari 2024 sebesar 5,79 persen, turun sebesar 0,11 persen poin dibandingkan dengan Februari 2023.

Penduduk yang bekerja di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2,91 juta orang, naik 84,91 ribu orang dibandingkan februari 2023 (2,82 juta orang). Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar penyerapan tenaga kerja adalah sektor perdagangan besar dan eceran (2,97 persen poin), diikuti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (0,91 persen poin). Sebanyak 1,85 juta orang (63,76 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 3,92 persen poin dibanding Februari 2023. Persentase setengah penganggur di Provinsi Sumatera Barat naik sebesar 2,40 persen poin. Sementara Persentase pekerja paruh waktu mengalami penurunan sebesar 1,87 persen poin dibandingkan Februari 2023. (hab)

HARI/TANGGAL

HALAMAN

RAPAT PARIPURNA - DPRD Sumbang menggelar rapat paripurna Penyempulakan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Protes Piliat Anggasa Sementara Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres • SABTU • 23 JULI 2024		2

Dorong Maek Destinasi Wisata Minat Khusus

Supardi: Bisa jadi Magnet Peneliti Dunia

KETUA DPRD Supardi menekankan bahwa Festival Maek 2024 pintu untuk memperkenalkan Maek dan Minat ke pentas dunia. Maek memiliki potensi menjadi destinasi wisata minat khusus. Dia berkeyakinan peradaban Maek bisa menarik banyak peneliti untuk datang ke Negeri Sembu Minat ini.

"Saat ini sudah hadir para pakar dari Jepang, Mesir, Australia dan Jerman. Hal ini membuktikan bahwa Maek menjadi magnet peneliti dunia, karena banyak misteri peradaban yang harus dibuka, dan itu hanya bisa dilakukan oleh peneliti," ujar Supardi dalam sambutannya, saat membuka Festival Maek 2024 di Nagari Maek, Rabu (17/7) lalu.

Menurutnya, wisata minat khusus ini akan lebih mampu untuk membangkitkan ekonomi masyarakat, karena rata-rata peneliti akan berada di Maek dalam waktu lama. "Peneliti datang ke Maek dan Payakumbuh selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Harapannya, apot money mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, mulai dari kuliner, transportasi, penginapan dan lainnya," jelas Supardi.

Festival Maek ini adalah mimpi yang terwujud. Sejak 10 tahun lalu, mimpiya tentang Maek sangat besar karena Maek bicara tentang peradaban yang lebih tua dari Indonesia dan Minangkabau. "Hasil carbonating sementara yang diketahui di Austria memprediksi, tengkorak yang diteliti tersebut dikuburkan tahun 4000 Sebelum Masehi, jauh sebelum musantam ada, bisa kita bayangkan saat itu Maek sudah menjadi kota besar. Sayangnya, hingga saat ini belum ada peneliti yang berhasil membuka misteri di mana kota itu sebenarnya berada," tegas Supardi.

"Yang ada saat ini adalah kompleks pemakaman yang ditandai dengan menhir, dan itu jumlahnya ribuan. Ke mana peradaban itu hilang, dari mana peradaban itu berasal, bagaimana kehidupan pada saat itu, apakah ada hubungan dengan peradaban lain. Pertanyaan itu masih menjadi misteri

dan tabir ini bisa dibuka dengan penelitian," tambah Supardi.

Dia berharap Festival Maek ini pintu masuk menyingskap tabir tersebut. Sehingga, menarik minat peneliti dunia hadir di Maek. Festival Maek yang digelar hingga 20 Juli mendatang, menampilkan berbagai diskusi tentang peradaban Maek, dengan

narasumber peneliti dalam dan luar negeri. Selain itu, juga akan dipentaskan berbagai atraksi seni tradisi mancanegara dan sejumlah provinsi di Indonesia. (*)

KETUA DPRD
Sumbar Supardi
terlihat bersemangat
menyaksikan
pembukaan Festival
Maek 2024 di Nagari
Maek, Rabu (17/7).





KLIPING BERITA



KETUA DPRD Sumbar Supardi disambut sirih jo carano dalam pembukaan Festival Maek 2024 di Nagari Maek, Rabu (17/7).



KETUA DPRD Sumbar Supardi dalam sambutannya pada pembukaan Festival Maek 2024 di Nagari Maek, Rabu (17/7).





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG		3
SABTU, 20 JULI 2024		

Terkait Kode Etik dan Tata Beracara, BK DPRD Sultra Kunjungi DPRD Sumbang

PADANG, METRO

Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan kunjungan ke DPRD Sumbang. Kunjungan ini ingin berbagi ilmu dan pengalaman dengan BK DPRD Sumbang terkait pokok serta kewenangan yang dimiliki BK Kuma (16/7).

Wakil Ketua BK DPRD Sulawesi Tenggara, Muhammad Nur Sinapoy, menyampaikan kunjungan kerja ini merupakan upaya meningkatkan efektivitas BK dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

"Kewenangan yang dimiliki BK DPRD jangan dipergunakan untuk kewenangan-wenangan dalam

melaksanakan tugasnya," ujar Sinapoy.

Sinapoy juga menyampaikan terima kasihnya atas sambutan yang diberikan dan berharap pertemuan ini dapat memperkaya wawasan terkait tugas dan fungsi BK yang nantinya akan diterapkan di Sulawesi Tenggara.

"Terima kasih banyak kepada BK DPRD Sumbang, semoga apa yang kami dapat disini berguna nantinya untuk diterapkan di DPRD Sulawesi Tenggara," harap Sinapoy.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua BK DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muzli M Nur, menjelaskan bahwa saat ini regulasi

tata beracara masih dalam tahap pembahasan. "Ditargetkan, Raperda tata beracara DPRD ditetapkan akhir Agustus 2024," kata Muzli.

Muzli M Nur juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan BK DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurutnya, kunjungan ini merupakan suatu kebanggaan bagi DPRD Sumatera Barat.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan sinergi antar BK DPRD di berbagai provinsi dapat semakin kuat, sehingga fungsi pengawasan dan etika di lingkungan DPRD dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. (Qab)



KUNJUNGAN-Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan kunjungan ke DPRD Sumbang.

BREAKING NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
	Rakyat Sumbang SENIN 22 JULI 2024	9

DPRD Sumbar Terima Kunker Komisi I Agama

Padang, Rakyat Sumbang — Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar Raddinal menerima kunjungan kerja (Kunker) Komisi I DPRD Kabupaten Agam, di ruang bawah Masjid Ayy-Syura DPRD Provinsi Sumbar, Jumat, (19/7).

"Kunker ini dalam rangka koordinasi dan sharing terhadap Pergeseran DPRD dengan Perkembangan dan tindak lanjut proses DOB dari Komisi I DPRD Kabupaten Agam," kata Raddinal.

Raddinal menyampaikan, pihaknya sering berdiskusi dengan Gubernur. Secara prinsip Gubernur sangat mendukung DOB. "Kita terus melakukan gerakan

monal untuk terlaksana DOB," ungkap Raddinal.

Ia menyampaikan, peran sangat menentukan DOB dan men desak Biro Pemerintahan melakukan Administrasi sesuai kewenangan provinsi.

"Kita berkewajiban kami untuk mensahkan DOB, karena aspirasi masyarakat sangat besar," beber Raddinal politisi Fraksi PKS.

Tampak acara dihadiri rombongan DPRD Kabupaten Agam 16 orang melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumbar, Kasubag Humas dan Protokol Idris dan staf sekretariat DPRD Provinsi Sumbar. (tyr/ret)



SUASANA saat Kunker Komisi I DPRD Kabupaten Agam, di ruang bawah Masjid Ayy-Syura DPRD Provinsi Sumbar, Jumat, (19/7).





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	SENIN 22 JULI 2024	9

Kalteng Dalam Sektor Pariwisata ke DPRD Sumbar

Padang, Rakyat Sumbar — Sekretaris DPRD Sumbar Rafis mengatakan, lembaganya telah mengesahkan Perda nomor 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan wisata halal, sebagai dasar pengendalian wisata halal di Ranah Minang.

"Kita berupaya membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk pengembangan wisata halal, karena pemerintah pusat juga memiliki perhatian serius untuk wisata halal," kata Rafis, saat menerima Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, di ruang khusus DPRD Sumbar, Jumat, (19/7).

Rafis menyampaikan, pihaknya melihat destinasi wisata halal di Ranah Minang sangat luar biasa. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggalan dan pengembangan secara sistematis untuk kesejahteraan masyarakat Sumbar.

"Kita memiliki objek wisata salah satunya terbaru Masjid Raya Sumbar Al Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabaw Sumatera Barat yang sangat luar biasa," ucap Rafis.

Rafis menambahkan, untuk peningkatan sumber daya manusia, pihaknya selalu melakukan kajian dari berbagai pihak, pihaknya menginginkan masukan dari luar dari apa yang tidak terlihat untuk masa depan.

"Aturan telah ada, oleh karena itu semua dapat dilaksanakan dengan baik dan benar," ujar Rafis.

Kunjungan kerja (Kunker) Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk mendalami peran DPRD dalam mendorong sektor pariwisata dan sumber daya manusia mendorong kunjungan wisata.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Amur, mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Gubernur Sumatera Barat membawa Rafis ke daerahnya memenuhi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

"Saya akan minta kepada Gubernur Sumbar untuk membawa Sekwan DPRD Sumbar Rafis untuk ditempon serta memenuhi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah," ujar Amur. (ref)



SEKRETARIS DPRD Sumbar Rafis, saat menerima Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, di ruang khusus DPRD Sumbar, Jumat, (19/7)





KORAN

HARI/TANGGAL

HALAMAN

KHAZ

SENIN, 22 JULI 2024
SENIN, 16 MUHARRAM 1445 H

2

INGIN KEMBANGKAN PARIWISATA

Komisi III DPRD Provinsi Kalteng "Bertanya" ke DPRD Sumbar

Padang, Khatunah — Sekretaris DPRD Sumbar Rafis mengungkap, pihaknya telah mensyahkan Perda nomor 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan wisata halal sebagai dasar pengembangan wisata halal di Ranah Minang.

Kita berupaya membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk pengembangan wisata halal, karena pemerintah pusat juga memiliki perhatian serius untuk wisata halal ini," ujar Rafis saat menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di ruang khusus I, Jumat (19/7).

Kedatangan rombongan Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah itu bertujuan bagaimana agar peran DPRD dalam mendorong sektor pariwisata dan sumber daya manusia mendorong kemajuan wisata.

Menurut Rafis, pihaknya melihat destinasi wisata halal di Ranah Minang sangatlah luar biasa, oleh karena itu, perlu dilakukan penggalan dan pengembangan secara sistematis untuk kesejahteraan masyarakat Sumbar.

"Kita memiliki objek wisata salah satunya terbaru Masjid Raya Sumbar yakni Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang sangat luar biasa," ujar Rafis.

Lanjut Rafis, untuk peningkatan sumber daya manusia, pihaknya selalu melakukan kajian dari berbagai pihak, pihaknya mengidentifikasi masalah dari



KETUA Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Hj. Siti Nafisah bersama Sekretaris DPRD Provinsi Sumbar Rafis (kanan) saat memberikan papernya

luar dari apa yang tidak terlihat untuk masa depan.

Aturan telah ada, oleh karena itu semua dapat dilaksanakan dengan baik dan benar," ujar Rafis.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Amur mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Gubernur Sumatera Barat untuk membawa Sekretaris DPRD Provinsi Sumbar Rafis ke Kalimantan Tengah untuk memberikan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

"Saya akan minta kepada Gubernur Sumbar untuk men-

bawa Sekretaris DPRD Sumbar Rafis untuk menerapkan serta membenahi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah," ujar Amur disambut tepuk tangan para hadirin.

Adapun Penghargaan diraih Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar dan Sekretaris DPRD Provinsi Sumbar telah memiliki Pujok Baca dan Perpustakaan, Penghargaan Tokoh Peduli Pergerakan Sumbar, Penghargaan Achievement Motivation Person, Mewakili Provinsi Sumbar untuk Anugerah Tinjau Peringatan HAKN, dan Sekretaris DPRD Sumbar Rafis jadi Nara

sumber di Kemendagri RI.

Rombongan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah itu terdiri dari Ketua Komisi III Siti Nafisah, Wakil Ketua Komisi III Siswandi, anggota Niken S Bahat, Duwel Riwing, Suhardi, Sri Neni Trianawati, Andayani, Ahmad Amur dan staf sekretariat Kalimantan Tengah.

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris DPRD Sumbar Rafis juga didampingi Kabag Persidangan dan Penindangan Zaidi Syahrir, Kasubag Humas dan Protokol Dahri Idris dan staf sekretariat DPRD Provinsi Sumbar. (jer/)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KHAZ	SENIN, 23 JULI 2024 SENIN, 16 MUHARRAM 1445 H	10

KOORDINASI DAN SHARING SOAL DOB

Komisi I DPRD Kabupaten Agam Kembali Kunjungi DPRD Sumbar

Padang, Khazanah - Keinginan rakyat Kabupaten Agam untuk memekarkan daerahnya dengan membentuk Daerah Otonom Baru (DOB) sudah tak terbendung lagi.

Sekitar 16 orang rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Agam kembali melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumbar melakukan koordinasi dan sharing terkait DOB tersebut, Jumat (19/7).

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Sumbar Rafdinal didampingi Kasubag Humas dan Protokol Dahriul Idris menerima kunjungan kerja rom-

bongan Komisi I DPRD Kabupaten Agam tersebut sambil menunggu masuknya waktu melaksanakan salat Jumat.

Kepada pers-Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Sumbar Rafdinal mengatakan, pihaknya menerima koordinasi dan sharing terhadap pengawasan DPRD dengan perkembangan dan tindak lanjut proses DOB tersebut dari Komisi I DPRD Kabupaten Agam.

"Kita berkewajiban untuk mendorong DOB, karena aspirasi masyarakat sangat besar," ujar Rafdinal.

Menurut Rafdinal, pihaknya

sering berdiskusi dengan Gubernur Sumatera Barat, dan pada prinsipnya Gubernur sangat mendukung DOB itu.

"Kita terus melakukan gerakan moral untuk terbentuk DOB, karena memang peran kita di Provinsi sangat menentukan DOB dan kita juga telah mendesak Biro Pemerintahan melakukan Administrasi sesuai kewenangan Provinsi," ujar Rafdinal.

Selain itu, katanya, pertemuan ini menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi dan berbagi informasi demi kemajuan bangsa. n Jer



SEKRETARIS Komisi I DPRD Provinsi Sumbar Rafdinal saat menerima rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Agam.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Harian	SABTU, 20 JULI 2024 14 Muharram 1446 H	8.

TERKAIT DUA RANPERDA

Fraksi-Fraksi DPRD Sumbar Sampaikan Pendapat Akhir

FRAKSI-FRAKSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan pendapat akhir tentang dua rancangan peraturan daerah (Ranperda), dan peraturan tata beracara di gedung dewan setempat baru-baru ini.

Kedua ranperda tersebut yakni Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah dan Ranperda tentang Pengelolaan Sampah.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Subi mengatakan, penyampaian pendapat akhir merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan ranperda.

Pandangan akhir tersebut berupa catatan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD yang akan menjadi catatan bawaan ranperda.

Suwirpen menjelaskan Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah mengatur tentang perseroan tersebut tetap menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk menjamin kredit/pembiayaan UMKM dan Koperasi yang bergerak di bidang usaha produktif.

Hal ini sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan keringanan kepada pelaku UMKM dan Koperasi yang Visible (layak secara analisis Bank) dan tidak bankable atau tidak layak secara jaminan agunan.

"Maka dengan keberadaan PT Jamenda Sumbar (Persero) diyakini dapat menjamin ketidakterlaksanaan agunan tersebut

dengan ketentuan calon nasabah untuk melanjutkan penjaminan kredit/pembiayaan pada bank maupun koperasi hingga lembaga keuangan lainnya," katanya.

Ia menambahkan ranperda ini diujikan oleh pemerintah daerah bertujuan memberikan jasa penjaminan kredit kepada koperasi dan UMKM, memberdayakan koperasi dan UMKM, memberikan sumbangat bagi perkembangan ekonomi daerah khususnya mengurangi

kemiskinan, pengangguran, menjaga stabilitas perekonomian serta peningkatan penyaluran kredit produktif.

Kemudian ranperda tentang pengelolaan sampah adalah upaya mematuhi undang-undang yakni Undang-Undang.

Ia mengatakan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diwajibkan bahwa negara memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah termasuk pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan publik salah satunya dalam hal pengelolaan sampah.

Kewajiban ini memberikan konsekuensi hukum bahwa pemerintah daerah merupakan pihak yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha, organisasi

persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan.

Ia menambahkan, dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk perda.

Lalu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa untuk urusan persampahan pemerintah provinsi berwenang dalam pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional dan penanganan sampah di TPA/TPST regional.

Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat di Sumbar volume dan jenis sampah yang merupakan limbah dan kotoran produksi dan konsumsi

ps://dprd.sumbarprov.go.id/



KLIPING BERITA

masyarakat tersebut terus meningkat setiap tahunnya seiring peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi per kapita," ujarnya.

Dengan demikian, tambah dia, beban pengelolaan sampah juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ia menilai, pengelolaan sampah membutuhkan penibahan yang mendasar dalam pengelolaan

sampah yang selama ini diabaikan.

"Kebiasaan selama ini bahwa pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir saatnya ditinggalkan dan diganti dengan kebiasaan baru dalam pengelolaan sampah, yakni memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara ekonomis dalam lingkungan, seperti untuk energi, kompos, pupuk maupun bahan baku industri," ujarnya lagi.

Selain itu, pengelolaan sampah dilakukan dari hulu sampai ke hilir yang dimulai dari fase produk sampai menjadi sampah, dan selanjutnya dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Oleh karena itu, dalam rangka menyukseskan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintahan daerah provinsi untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk perda.

"Perda yang lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu diubah," katanya.

Ia tentang peraturan tata

peraturan beracara DPRD Sumbar, sebelumnya Ketua pansus penyusunan peraturan tersebut Nurfitrianyah mengatakan muatan aturan tata beracara memiliki beberapa penekanan, diantaranya cara bersidang, penegakan kode etik dan kedisiplinan para dewan.

Meski BK DPRD Sumbar telah memiliki pedoman tata tertib (Tatib) dan aturan tentang Tata Beracara tidak ada, BK tidak bisa menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan dewan dengan menyidangkannya.

"Tidak hanya bersidang, BK juga tidak bisa memberikan rekomendasi atas pemerksaan persoalan yang dilakukan dewan bersangkutan kepada pimpinan DPRD," katanya.

Dalam muatan aturan Tata Beracara yang disusun Pansus, lanjutnya, ketika dewan memiliki pelanggaran berat maka BK bisa menyidangkan serta mengeluarkan putusan sesuai peraturan Tatib DPRD sebagai rujukan.

"Nantinya akan dilemparkan pada forum paripurna, risiko apapun yang diterima pada dewan bersangkutan akan dikembalikan pada fraksi masing-masing, apakah diberhentikan atau konsekuensi lainnya," ungkapnya. (adv)

Maka Ketua DPRD Sumbar, Sutopo Sud saat memimpin jalannya rapat





KLIPING BERITA



Anggota DPRD Sumbar saat menghadiri rapat kerja dengan agenda penyampaian pendapat akhir atas dua ranperda oleh fraksi-fraksi DPRD Sumbar





KLIPING BERITA



Rapat Kerja DPRD Sumbar dengan media pers yang diadakan pada tanggal 14 Agustus 2018 bertempat di gedung DPRD Sumbar





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SABTU, 20 JULI 2024 14 Muharram 1446 H	2.

OPTIMALKAN TUPOKSI BK DPRD Sulawesi Tenggara Belajar ke DPRD Sumbar

PADANG, HALUAN — Untuk optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulawesi Tenggara lakukan kunjungan ke BK DPRD Sumbar, Kamis (18/7).

Wakil Ketua BK DPRD Sulawesi Tenggara, Muhammad Nur Sinapoy mengatakan, kunjungan kerja BK DPRD Sulawesi Tenggara ke DPRD Sumbar dilakukan untuk belajar dan *sharing* informasi mengenai pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan yang dijalankan Badan Kehormatan DPRD Sumbar.

Melalui *sharing* informasi ini ia berharap ke depan BK DPRD Sulawesi Tenggara bisa lebih maksimal dalam menjalankan Tupoksi.

"Menjalankan tugas BK ini tidaklah mudah, karena perannya adalah menjaga marwah D. AD. Maka dari itu kita butuh banyak belajar dan mencari masukan, salah satunya dengan mengunjungi DPRD Sumbar hari ini," ujar Muhammad Nur Sinapoy.

Dikatakannya, BK DPRD Sumbar dijadikan sebagai tujuan untuk belajar dan *sharing* informasi karena pihaknya melihat dalam pelaksanaan tugas, BK

DPRD Sumbar telah lebih maju. Di mana Sumbar merupakan salah satu provinsi tertua di Indonesia, DPRD nya telah lama ada, dan BK DPRD Sumbar juga telah lama terbentuk.

"Salah satu yang ingin kita pelajari adalah bagaimana kiat-kiat BK DPRD Sumbar melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dalam membina teman-teman anggota dewan. Sebab kita tidak ingin, mentang-mentang BK kita melakukan kesewenangan-wenangan pada teman-teman anggota," ujarnya.

Dikatakan Muhammad Nur, dalam pelaksanaan kewenangan, BK DPRD Sulawesi Tenggara telah ada memproses anggota yang melanggar, disidangkan kode etik, dan diingatkan untuk tidak kembali mengulangi kesalahan yang dilakukan.

"Jadi membimbing teman-teman anggota ini memang tidak semudah yang kita bayangkan, meski kita telah memiliki sarana prasarana yang lengkap, kita tetap harus banyak belajar," ucapnya.

Kunjungan BK DPRD Sulawesi Tenggara ke DPRD Sumbar diterima oleh Ketua BK DPRD Sumbar Muzli

M. Nur. Pada kesempatan itu Muzli menyampaikan rasa bangganya dikunjungi BK Sulawesi Tenggara.

Dia menyebut keberhasilan kinerja BK ditunjukkan dengan tidak adanya persoalan-persoalan yang terjadi secara internal maupun eksternal lembaga.

Untuk DPRD Sumbar, hingga jelang akhir masa jabatan dewan periode 2019-2024, tidak ada anggota yang di PAW disebabkan kendak disiplin.

"Keberhasilan BK itu ditunjukkan saat tidak ada persoalan temuan pada seluruh anggota dewan yang ada, dan sejak awal komitmen BK untuk keanggotaan DPRD Sumbar periode 2019-2024 yaitu, 65 orang kita betawal, 65 orang kita berakhir," ujarnya.

Ia mengatakan, hingga periode anggota DPRD Sumatra Barat 2019-2024, BK DPRD Provinsi Sumatra Barat lebih *soft* dalam mengingatkan anggota, mengingat regulasi masih dalam pembahasan.

"Saat ini kita hampir rampung membahas peraturan tata beracara, direncanakan penetapannya akhir Agustus 2024. Pasca ditetapkan, regulasi ini akan diterapkan oleh anggota DPRD periode 2024-2029," ucapnya. (ti/len)





KLIPING BERITA



FOTO BERSAMA — Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulawesi Tenggara melakukan kunjungan ke BK DPRD Sumbang, Kemas (16/7) 21



0751 7057591

<https://dprd.sumbarprov.go.id/>

156



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Sabtu, 20 Juli 2024 (14 Muharram 1446 H)	5

TERKAIT DUA RANPERDA DAN PERATURAN TATA BERACARA

Fraksi-Fraksi Sampaikan Pendapat Akhir

Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan pendapat akhir tentang dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan peraturan tata beracara di gedung dewan setempat.

Kedua ranperda tersebut yakni Ranperda tentang perusahaan perseroan daerah penjamin kredit daerah dan Ranperda tentang pengelolaan sampah.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Sulb yang memimpin rapat tersebut mengatakan penyampaian pandangan akhir merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan Ranperda.

Pandangan akhir tersebut berupa catatan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD yang akan menjadi catatan bawaan Ranperda.

Suwirpen menjelaskan Ranperda tentang perusahaan perseroan daerah penjamin kredit daerah mengatur tentang perseroan tersebut tetap menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk menjamin kredit/pembiayaan UMKM dan Koperasi yang bergerak di bidang usaha

produktif.

Hal ini sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan keringanan kepada pelaku UMKM dan Koperasi yang Visible (layak secara analisa Bank) dan tidak bankable atau tidak layak secara Jaminan Agunan.

"Maka dengan keberadaan PT Jamkrindo Sumbar (Persero) diyakini dapat menjamin kelayakan agunan terse-

but dengan kesetiaan calon nasabah untuk melanjutkan penjaminan kredit/pembiayaan pada bank maupun Koperasi hingga Lembaga Keuangan lainnya," katanya.

Ia menambahkan ranperda ini diajukan oleh pemerintah daerah bertujuan memberikan jasa penjaminan kredit kepada koperasi dan UMKM, member-

dayakan koperasi dan UMKM, memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi daerah khususnya mengurangi kemiskinan pengangguran, menjaga stabilitas perekonomian serta peningkatan penyaluran kredit produktif.

Kemudian ranperda tentang pengelolaan sampah adalah upaya mematuhi undang-undang yakni Undang-Undang.

Ia mengatakan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa negara memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah termasuk Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan publik salah satunya dalam hal pengelolaan sampah.

Kewajiban ini memberikan konsekuensi hukum bahwa Pemerintah Daerah merupakan pihak yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolannya dapat bermitra dengan badan usaha, organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan.

Ia menambahkan, dalam

rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk perda.

Lalu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa untuk urusan persampahan pemerintah provinsi berwenang dalam pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional dan penanganan sampah di TPA/TPST regional.

"Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat di Sumbar volume dan jenis sampah yang merupakan limbah dari kegiatan produksi dan konsumsi masyarakat tersebut terus meningkat setiap tahunnya seiring peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi per kapita," ujarnya.

Dengan demikian, tambah dia, beban pengelolaan sampah juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Ia menilai, pengelolaan sampah membutuhkan perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan.

"Kebiasaan selama ini bahwa pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir saatnya ditinggalkan dan diganti dengan kebiasaan baru



KLIPING BERITA

dalam pengelolaan sampah, yakni memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara ekonomis dalam lingkungan, seperti untuk energi, kompos, pupuk maupun bahan baku industri," ujarnya lagi.

Selain itu, pengelolaan sampah dilakukan dari hulu sampai ke hilir yang dimulai dari fase produk sampah menjadi sampah, dan selanjutnya dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Oleh karena itu, dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintahan daerah provinsi untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk

perda.

"Perda yang lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu diubah," katanya.

Lalu tentang peraturan tata peraturan beracara DPRD Sumbar, sebelumnya Ketua pansus penyusunan peraturan tersebut Nurfitriawanasyah mengatakan muatan aturan tata beracara memiliki beberapa penekanan, diantaranya cara bersidang, penegakan kode etik dan kedisiplinan para dewan.

Meekj BK DPRD Sumbar telah memiliki pedoman tata tertib (Tatib) dan aturan tentang Tata Beracara tidak ada, BK tidak bisa memindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan dewan dengan menyidangnya.

"Tidak hanya bersidang, BK juga tidak bisa memberikan rekomendasi atas pemeriksaan persoalan yang dilakukan dewan bersangkutan kepada pimpinan DPRD," katanya.

Dalam muatan aturan Tata Beracara yang disusun Pansus, lanjutnya, ketika dewan memiliki pelanggaran berat maka BK bisa menyidangkan serta mengeluarkan putusan sesuai peraturan Tatib DPRD sebagai rujukan.

"Nantinya akan dilemparkan pada forum persipurna, risiko apapun yang diterima pada dewan bersangkutan akan dikembalikan pada fraksi masing-masing, apakah diberhentikan atau konsekuensi lainnya," ungkapnya. BK sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang bertugas untuk menjaga marwah lembaga, tidak sampai pada tahap memberikan konsekuensi pada dewan yang bermasalah, melainkan di kembalikan pada fraksi masing-masing (*).

HALAMAN





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



0751 7057591

<https://dprd.sumbarprov.go.id/>

159



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN

MAN



075 7031331

arprov.go.id/

160



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KHAZANAH	RABU, 3 JULI 2024 RABU, 28 DZULHIJAH 1445 H	5

ORANG TUA JANGAN IKUT PULA KECANDUAN

Ketua DPRD Sumbar Supa rdi Risau dengan Merebak nya Judi Online

Jakarta, Khazanah — Matahari Department Store (LPF) akan melakukan penutupan di beberapa tokonya di wilayah Tangerang, Banten. Informasi soal penutupan gerai Matahari mulai ramai setelah beredar di media sosial. Salah satunya dari akun Instagram @abouting, disebut ada dua gerai Matahari yang mau tutup yaitu di WTC Serpong dan Mal Balekosta Tangerang. Akun itu juga menyebutkan ada diskon besar-besaran di Matahari. Desebut penutupan toko dilakukan pada tanggal 30 Juni 2024.

Hingga akhir Maret 2024 LPF hanya mengelola 155 gerai pusat perbelanjaan Matahari. Angka tersebut berkurang dari semula 169 gerai pada akhir 2019.

Sejalan dengan pengurangan jumlah gerai, karyawan perusahaan juga ikut terpengkas signifikan atau nyaris berkurang 5.000 dalam 4 tahun terakhir. Tercatat Maret 2024 jumlah karyawan hanya 9.165 atau berkurang 4.893 orang dari semula mencapai 14.058 pekerja pada akhir Maret 2020.

Penurunan jumlah gerai dan karyawan LPF sendiri juga sejalan dengan maraknya digitalisasi di industri ritel dengan gencarnya dari kanal online perlahan ikut bertambah. Selain itu, digitalisasi tersebut juga ikut dipercepat oleh pandemi.

Imbas pandemi, LPF terpaksa membukakan lagi lama

kuartal beruntun sejak Q1 2020 (Maret) hingga Q1 2021. Pada kuartal kedua 2021 perusahaan akhirnya kembali mampu mencatatkan laba ditopang oleh belanja selama libur Idul Adha. Lalu pada kuartal selanjutnya (Q3 2021) perusahaan kembali mencatatkan rugi.

Mengutip data Refinitiv, kinerja perusahaan setelah itu mulai mengalami perbaikan signifikan, di mana LPF nyaris selalu mencatat laba tiap kuartal sejak Q4 2021, kecuali pada Q3 2023.

LPF memang diketahui memiliki kinerja siklus, dimana kinerjanya kuartalan terbaik dibukukan selama musim liburan dan libur natal tahun baru. Dalam beberapa tahun terakhir, Q1 dan Q3 menjadi kuartal dengan kinerja terlemah bagi emiten peritel pakaian tersebut.

Secara tahunan kinerja penjualan perusahaan tercatat naik setiap tahun sejak anjlok 53% pada tahun pandemi 2020. Namun pendapatan tersebut masih belum pulih total, dengan pendapatan tahun 2023 senilai Rp 6,54 triliun atau masih 36% lebih rendah dari capaian tahun 2019 senilai Rp 10,28 triliun yang merupakan catatan terbaik perusahaan sejak didirikan.

Ketua Asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Budihardjo mengelaskan gerai yang tutup saat ini juga melakukan restrukturisasi.

MATAHARI department store sudah banyak yang gulung tikar dan mengurugi kinerjanya. Banyak yang tersisa, banyak yang ditutup dan banyak yang diskon. Menurut mantan kepala toko ini, bisa disebut sebagai

lunyah oleh gulung tikar stok. Banyak yang tersisa, banyak yang ditutup dan banyak yang diskon. Menurut mantan kepala toko ini, bisa disebut sebagai

lunyah oleh gulung tikar stok. Banyak yang tersisa, banyak yang ditutup dan banyak yang diskon. Menurut mantan kepala toko ini, bisa disebut sebagai

lunyah oleh gulung tikar stok. Banyak yang tersisa, banyak yang ditutup dan banyak yang diskon. Menurut mantan kepala toko ini, bisa disebut sebagai

lunyah oleh gulung tikar stok. Banyak yang tersisa, banyak yang ditutup dan banyak yang diskon. Menurut mantan kepala toko ini, bisa disebut sebagai

lunyah oleh gulung tikar stok. Banyak yang tersisa, banyak yang ditutup dan banyak yang diskon. Menurut mantan kepala toko ini, bisa disebut sebagai





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KHAZ	RABU, 3 JULI 2024 RABU, 26 DZULHIJAH 1445 H	2

GALI BERBAGAI INFORMASI

Pansus II Ranperda RPJPD Kabupaten Agam 2025-2045 ke DPRD Sumbar



KETUA Pansus RPJPD Sumbar 2025-2045 H. M. Nurnas foto bersama Pansus II Pembahasan Ranperda tentang RPJPD Kabupaten Agam 2025-2045

Padang, Khasanah — Pansus II Pembahasan Ranperda tentang RPJPD Kabupaten Agam 2025-2045 melakukan studi banding ke DPRD Provinsi Sumbar, untuk menggali berbagai informasi yang dibutuhkan dalam pembahasan ranperda dimaksud, Selasa (2/7).

Kedatangan rombongan Pansus II Pembahasan Ranperda tentang RPJPD Kabupaten Agam 2025-2045 itu diterima Ketua Pansus RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045 H. M. Nurnas di ruang khusus 1

gedung putih tersebut.

Dalam kesempatan itu, H. M. Nurnas mengatakan, pusat memiliki ketentuan imperatif dari 45 indikator berpusat ke pusat, dan sisanya ada karsifan lokal. RPJPD Provinsi Sumbar telah ada kesepakatan dengan Kabupaten dan Kota dan berdasarkan surat edaran gubernur Sumbar yang mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Dari mulai persiapan RPJMD pertama sampai ke empat ini sudah disusun, tinggal mam-

pu tidak kawan-kawan mengawal dan menyelaraskan RPJPD itu, karena itu adalah arah kebijakan," ujar H. M. Nurnas.

Menurut H. M. Nurnas, pihaknya mengingatkan BAB III itu adalah permasalahan dan isu, harus berkaitan erat dengan arah kebijakan dan sasaran pokok.

Kalau alpa disitu, gagallah dalam menjadikan Agam yang baik, maju dan berkelanjutan kedepan," ujar H. M. Nurnas.

Lanjut H. M. Nurnas politisi yang Vokal ini, Kabupaten

Agam memiliki daerah luas, memiliki potensi cukup unik, terutama soal lingkungan.

"Guntung Singgalang, Tanjung Raya banyak hal-hal lain itu adalah rawan-rawan bencana, nah kuncinya di RPJPD," ujar H. M. Nurnas.

Untuk diketahui, arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 dengan visi Sumatera Barat Madani, Maju dan berkelanjutan berlandaskan agama dan budaya dan misi mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saling.

Arah kebijakan I salah satunya pemenuhan pelayanan dasar, pendidikan dan perlindungan sosial, arah kebijakan II salah satunya percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif, arah kebijakan III salah satunya penguatan daya saling SDM dan keberlanjutan kesejahteraan dan arah kebijakan IV salah satunya perwujudan masyarakat Sumbar yang unggul.

"Arah kebijakan selama 20 tahun akan datang menjadi kunci untuk menyelesaikan sasaran pokoknya," sambungnya.

Pertemuan ini juga dihadiri Kabag Persadangan dan Perundangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar Zardi Syahrir, Kasubag Humas dan Protokol Dahrul Idris dan Staf Sekretariat DPRD Sumbar. (jer/)





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbang	RABU, 3 JULI 2024	9

Fraksi DPRD Sumbar Bahas 2 Ranperda

Padang, Rakyat Sumbang — Pihak DPRD Provinsi Sumbar membahas dua Ranperda, yakni Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah, Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum, serta Ranperda Perubahan Ketiga Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur perangkat daerah.

Pembahasan dua Rancangan Pemerintah Daerah (Ranperda) tersebut disampaikan melalui pandangan umum fraksi saat rapat di gedung DPRD, Selasa (2/7) siang.

"Pembahasan Ranperda tersebut merupakan salah satu tahapan sebelum pengesahannya menjadi peraturan daerah (Perda)," kata Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar.

Ia mengatakan kedua Ranperda tersebut akan segera dijadwalkan pengesahannya menjadi perda dalam rapat paripurna oleh badan musyawarah DPRD. "Ranperda ini menjadi usul prakarsa DPRD dan diharapkan menjadi salah satu solusi," ucapnya.

Irsyad mengatakan ranperda tentang perubahan ketiga perda nomor 8 Tahun 2016 tentang struktur perangkat daerah mengatur tentang perubahan struktur OPD di lingkup pemerintahan provinsi.

Perubahan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini dilakukan untuk menciptakan perangkat daerah yang



WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar, saat rapat pembahasan dua Ranperda, Selasa (2/7).

tepat fungsi dan tepat ukuran.

Ini sesuai pula dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Perangkat Daerah.

Ia menyampaikan, hal yang dipertimbangkan yakni beban kerja, kompleksitas pekerjaan, ketersediaan sumber daya, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Sementara itu, untuk ranperda pemajuan kebudayaan daerah,

cagar budaya dan pengelolaan museum menurut Irsyad juga sudah akan disahkan.

"Sebelumnya memang ada kita menerima permintaan untuk menunda pengesahan perda ini. Namun kita telah melakukan pertemuan beberapa kali dan sudah mengakomodir masukan dan saran yang di harapkan stakeholder untuk dihindarkan," ujar Irsyad.

Ia mengatakan, Ranperda pemajuan kebudayaan daerah, cagar budaya dan pengelolaan

museum merupakan ranperda usul prakarsa DPRD yang diajukan Komisi V.

Ketua Pembahasan Ranperda, Hidayat mengatakan Ranperda ini juga diharapkan dapat merawat nilai-nilai adat budaya agar tidak tergerus dalam kehidupan keseharian masyarakat, terutama generasi muda.

"Saat ini kita lihat banyak nilai-nilai adat budaya ini sudah tergerus. Contohnya saja dalam sikap dan norma keseharian masyarakat," pungkasnya (bye/red).





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	RABU, 3 JULI 2024 Hal. 1 dan 2 dari 1445 H.	16

Ranperda RPJPD Sumbar 2025-2045 Bakal Segera Diparipurnakan

PADANG, HALUAN- Ranangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera

Barat (Sumbar) 2025-2045 segera rampung. Jika tidak ada aral melintang, Jumat (5/7) mendatang ranperda ini akan diparipurnakan untuk disepa

kati bersama pemerintah daerah.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Panitia Khusus (Pansus) pembahasan RPJPD Sumbar 2025-2045, MH Nurnas di Padang, Senin (2/7). Nurnas mengatakan, esensi dari RPJPD Sumbar 2025-2045 yang dibahas, harus menunjang optimalisasi komunikasi pemerintah pusat ke daerah.

Jika pemerintah daerah tidak bisa menyesuaikan penyusunan RPJPD dengan pemerintah pusat (RPJMN-red), maka akan berdampak buruk terhadap pembangunan dan keuangan daerah.

"RPJPD adalah media komunikasi pemerintahan pusat untuk rujukan pembangunan daerah yang harus terstruktur dari berbagai tingkatan," katanya.

Dia menjelaskan dalam pembahasan RPJPD juga dipatok waktu yang cukup singkat, dimana pada minggu pertama bulan Juli harus rampung dan disepakati dengan pemerintah daerah, setelah itu dilakukan evaluasi ke kementerian dalam negeri (Kemendagri).

Selama pembahasan RPJPD Sumbar 2025-2045, muncul perhatian khusus terhadap komposisi keuangan Sumbar yang rendah. Hal itu meliputi PAD dan dana transfer pusat, salah faktornya adalah susahnya pembebasan lahan untuk pelaksanaan proyek strategis nasional. Hal tersebut harus menjadi perhatian dalam penyusunan RPJPD yang juga dibahas oleh kabupaten/kota.

"Tidak hanya komposisi keuangan daerah, alokasi proyek strategis nasional di Sumbar

acuan dalam penyusunan Ranperda RPJPD.

Secara umum, dalam Ranwal RPJPD tersebut telah disepakati visi misi dan kebijakan sasaran pokok yang akan ditampung dalam RPJPD Provinsi Sumbar 2025-2045. Namun perlu kita pahami bersama bahwa kebijakan dan sasaran pokok yang terdapat dalam ranwal masih perlu didalami kembali karena muiatannya sebagian besar ditentukan langsung oleh pemerintah.

"Berhubung pembahasan Ranperda RPJPD dilakukan bersamaan dengan pembahasan Ranperda RTRW, maka kami menyarankan untuk dilakukan kajian dari pembahasan yang mendalam terkait dengan penyamaan periodisasi antara RPJPD dengan RTRW Sumbar," katanya. (h/adv)

juga minat, itu juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk menunjang ekonomi tentu membutuhkan infrastruktur yang representatif, jika tidak akan berdampak buruk terhadap daerah," katanya.

Terkait infrastruktur untuk acuan penyusunan RPJPD, panjang jalan Sumbar itu 1.625 KM dan 429 KM diantaranya rusak berat. Oleh sebab itu infrastruktur harus diperbaharui agar berdampak positif terhadap perekonomian.

Terkait RPJPD Sumbar 2025-2045, sebelumnya Wakil Ketua DPRD Sumbar Irwadi Syafat mengingatkan tahapan penyusunan dan pembahasan, DPRD bersama pemerintah daerah telah menyepakati Ranangan Awal (Ranwal) RPJPD 2025-2045 yang akan menjadi





14.12. Numan asal memimpin rapat kerja Pansus RPJPD 2025-2045 bersama mitra kerja

0751 705/591

id/

165



Anggota Pansus pembahasan RPJPD Sumbar 2025-2045 saat rapat dengan mitra kerja



Mitra kerja saat menghadiri rapat dengan Pansus RPJPD



Ketua Panitia Khusus (Pansus) pembahasan RPJPD Sumbar Nurnas



sumbarprov.go.id/



KLIPING BERITA



Rapat paripurna DPRD Sumbang dalam rangka penetapan keanggotaan Pansus pembahasan Raperda tentang RPJPD yang digelar pada beberapa waktu lalu



Anggota DPRD Sumbang saat menghadiri rapat paripurna di DPRD Sumbang baru-baru ini





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Harian	RABU, 3 JULI 2024 20 Dzulhijah 1445 H	2

DARI POKIR KETUA DPRD SUMBAR

Masyarakat Terima Bantuan Benih dan Pakan Ikan Lele

PAYAKUMBUH, HALUAN — Kelurahan Koto Panjang, Payakumbuh Timur bisa mendapatkan label sebagai kawasan industri ikan. Hal ini mengingat potensi produksi ikan di daerah itu sangat besar, sehingga mesti dioptimalkan pembudidayannya.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat acara penyerahan bantuan benih dan pakan ikan lele kepada tiga kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) 18 Juni lalu di Koto Panjang, Payakumbuh Timur.

Pendistribusian bantuan benih dan pakan ikan lele itu dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar menggunakan dana pokok pikiran (pokir) Ketua DPRD Sumbar, Supardi.

Supardi mengatakan, ia berharap bantuan benih dan ikan tersebut dapat memacu masyarakat untuk memaksimalkan produksi dan pembudidayaan ikan.

"Saya juga berharap kegiatan produksi ikan bisa menjadi salah satu ujung tombak perekonomian keluarga," katanya.

Ia mengatakan, potensi ikan di Koto Panjang ini sangat besar. Bahkan kualitas ikannya tak kalah dari daerah yang sudah ternama sebagai sentra produksi ikan.

"Potensi ini tak boleh ditingalkan. Koto Panjang bisa saja menerima label sebagai kelurahan industri ikan," ujar Supardi.

Bukan hanya untuk Koto Panjang, Supardi mengatakan untuk mengoptimalkan produksi dan budidaya perikanan di Sumbar maka harus ada blueprint perencanaan dan pelaksanaannya.

"Hal ini dilaksanakan produksi dan budidaya tersebut tak cukup hanya dilaksanakan dalam satu periode pemerintahan," paparnya.

Selain itu, perlu ada koordinasi antar organisasi perangkat Daerah (OPD) dalam upaya pengoptimalannya. Sehingga proses bisa terlaksana dari hulu ke hilir. Dengan begitu hasilnya akan maksimal.

"Penyerahan bantuan benih dan

pakan ini merupakan hulu, nah hilirnya juga harus diperhatikan pemerintah," katanya.

Namun Supardi juga berharap Pokdakan dan masyarakat bisa lebih aktif dan mandiri dalam mengoptimalkan produksi dan budidaya ini dari hulu dan hilir. Jangan selalu berharap bantuan pemerintah, sehingga dengan begitu Pokdakan ikan bisa maju dan berkembang.

Sekretaris DKP Sumbar, Rendi Suandi mengatakan ada tiga Pokdakan yang menerima bantuan benih dan pakan tersebut, ketiga berada di kawasan Koto Panjang, Payakumbuh Timur, yakni Pokdakan Lubak Basamq, Pokdakan Bakapian Jaya dan Pokdakan Harapan sejahtera.

Total ada lebih dari 100 ribu ekor benih lele yang diserahkan. Masing-masing Pokdakan mendapatkan sekitar 33.600 ekor benih lele.

Kemudian ada diserahkan sekitar 400 kilogram pakan benih ya, diterima Pokdakan masing-masing 131 kilogram.

"Diserahkan juga sebanyak 4.546 kilogram pakan biasa. Masing-masing Pokdakan menerima berkisar 1.500 kilogram lebih," ujarnya.

Rendi Suandi mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, khususnya budidaya ikan lele.

Agar program kegiatan ini bisa mencapai tujuan yang diharapkan, ia mengatakan penerima bantuan benih dan pakan lele tersebut dipastikan merupakan yang layak dibantu. Ada sejumlah persyaratan teknis yang mesti dipenuhi Pokdakan.

"Terutama pula tiga Pokdakan ini bukan merupakan Pokdakan dadakan, namun memang sudah ada dan berproduksi sejak lama," ujarnya.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi berharap pemberian bantuan benih dan pakan ikan lele ini bisa memacu semangat Pokdakan dan anggota dalam meningkatkan produksi ikan lele.

"Terutama sekali semoga bantuan ini bisa membantu peningkatan ekonomi anggota Pokdakan," ujar Supardi (h/ien).





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbang		6
RABU, 3 JULI 2024		

Fraksi DPRD Sumbar Bahas 2 Ranperda

Sadang, Rakyat Sumbang — Plak DPRD Provinsi Sumbar membahas dua ranperda, yakni ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah, Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum, serta Ranperda Perubahan Ketiga Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur perangkat daerah.

Pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut disampaikan melalui pandangan umum fraksi saat rapat di gedung DPRD, Selasa (2/7) siang.

"Pembahasan Ranperda tersebut merupakan salah satu tahapan sebelum pengesahannya menjadi peraturan daerah (Perda)," kata Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Salar.

Ia mengatakan kedua Ranperda tersebut akan segera dijadwalkan pengesahannya menjadi perda dalam rapat paripurna oleh badan musyawarah DPRD. "Ranperda ini menjadi usul prakarsa DPRD dan diharapkan menjadi salah satu solusi," ucapnya.

Irsyad mengatakan ranperda tentang perubahan ketiga perda nomor 8 Tahun 2016 tentang struktur perangkat daerah mengatur tentang perubahan struktur OPD di lingkup pemerintahan provinsi.

Perubahan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini dilakukan untuk menciptakan perangkat daerah yang



WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Salar, saat rapat pembahasan dua Ranperda, Selasa, (2/7).

tepat fungsi dan tepat ukuran.

Ini sesuai pula dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

Ia menyampaikan, hal yang dipertimbangkan yakni beban kerja, kompleksitas pekerjaan, ketersediaan sumber daya, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Sementara itu, untuk ranperda pemajuan kebudayaan daerah,

cagar budaya dan pengelolaan museum memang Irsyad juga sudah akan disahkan.

"Sebelumnya memang ada kita menerima permintaan untuk menunda pengesahan perda ini. Namun kita telah melakukan pertemuan beberapa kali dan sudah mengakomodir masukan dan saran yang di harapkan stakeholder untuk ditindaklanjuti," ujar Irsyad.

Ia mengatakan, Ranperda pemajuan kebudayaan daerah, cagar budaya dan pengelolaan

museum merupakan ranperda usul prakarsa DPRD yang diajukan Komisi V.

Ketua Pembahasan Ranperda, Hidayat mengatakan Ranperda ini juga diharapkan dapat merawat nilai-nilai adat budaya agar tidak tergerus dalam kehidupan keseharian masyarakat, terutama generasi muda.

"Saat ini kita lihat banyak nilai-nilai adat budaya ini sudah tergerus. Contohnya saja dalam sikap dan norma keseharian masyarakat," pungkasnya. (byr/rel)



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
PADANG	RABU, 3 JULI 2024	6

**Ranperda RPJPD
Sumbar 2025-2045
Segera Rampung**

RANCANGAN peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) 2025-2045 segera rampung. Jika tidak ada aral melintang, Jumat (5/7) dipaparkan.

Hal tersebut mengundang kecurigaan Panitia Khusus (Parasus) RPJPD Sumbar. M. Nurmas dis-
alah satu agenda DPPD Sumbar Selasa (2/7).
Nurmas mengatakan, esensi dari RPJPD Sum-
bar 2025-2045 yang dibahas, harus memajukan
optimisasi komunikasi pemerintah pusat ke
daerah.

Jika pemerintahan daerah tidak bisa menyusu-
atkan penyusunan RPJPD dengan pemerintah pu-
sat (RPJMN-RPD), maka akan berdampak buruk ter-
hadap pembangunan dan keuangan daerah. "RP-
JPD adalah media komunikasi pemerintahan pu-
sat untuk rujukan pembangunan daerah yang ha-
rus terstruktur dari berbagai tingkatan," katanya.
Dia menambahkan, dalam pembahasan RPJPD
juga diperhitungkan waktu yang cukup singkat, dimana
pada minggu pertama Juli harus rampung dan
diserap dengan pemerintahan daerah, setelah
itu dilakukan evaluasi ke Kementerian dalam
negeri (Kemendagri).

Selama pembahasan RPJPD Sumbar 2025-
2045, muncul perhatian khusus terhadap kom-
posisi keuangan Sumbar yang rendah. Hal itu
mempertanyakan Sumbar yang harus membi-
ayai pembangunan lahan untuk pelaksanaan pro-
gram strategis nasional. Hal tersebut harus men-
jadi perhatian dalam penyusunan RPJPD yang
juga di bahas oleh kadaster/keuangan.

Tidak hanya komposisi keuangan daerah,
alokasi proyek strategis nasional di Sumbar juga
minim, itu juga mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi daerah. Untuk menunjang ekonomi tentu membutuhkan infrastruktur yang representatif, jika tidak akan berdampak buruk terhadap daerah," katanya.

Terkait infrastruktur untuk acuan penyusunan RPJPD, panjang jalan Sumbang itu 1625 KM dan 429 KM diantaranya rusak berat. Oleh sebab itu infrastruktur harus diperhatikan agar berdampak positif terhadap perekonomian.

Terkait RPIPD sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sumbang Irsyad Syafar mengatakan, tahapan penyusunan dan pembahasan, DPRD bersama pemerintah daerah telah menyepakati Rancangan Awal (Ranwal) RPIPD 2025-2045 yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Ranperda RPIPD.

Secara umum, dalam Rancangan RPJPD tersebut telah disepakati visi misi dan kebijakan sasaran pokok yang akan ditampung dalam RPJPD Provinsi Sumsel 2023-2045. Namun sebenarnya, yang perlu dipahami bersama bahwa kebijakan dan sasaran pokok yang terdapat dalam Rancangan masih perlu didalamai kembali karena mutasinya sebagian besar ditentukan langsung oleh pemerintah

"Berhubung pembahasan Ranperda RPIPD dilakukan bersamaan dengan pembahasan Ranperda RTRW, maka kami menyarankan untuk dilakukan kajian dan pembahasan yang mendalam terkait dengan penyamaan periodisasi antara RPIPD dengan RTRW Sumbar," katanya. ⁽⁴⁾

KLIPING BERITA



Anggota Pansus RP/DPD DPRD Sumbar, Mochklasim dan Arkadius saat rapat pembahasan dengan DPD Pemprov Sumbar.



Anggota Pansus RP/DPD DPRD Sumbar, M. Nurnas bersama anggota Pansus RP/DPD Mochklasim saat rapat bersama DPD Pemprov Sumbar.



KETUA Pansus RP/DPD DPRD Sumbar M. Nurnas.



Anggota Pansus RP/DPD DPRD Sumbar M. Nurnas saat memimpin rapat bersama DPD Pemprov Sumbar.



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	KAMIS 11 JULI 2024	10

Penyelenggaraan Penyi- aran harus sesuai Aturan

Padang, Rakyat Sumbar—Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib, mengatakan, pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran di daerah harus terus dipantau sesuai ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.

"Seperti yang dimandatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada dan trans-

misinya," kata Suwirpen Suib saat rapat paripurna penyampaian tanggapan Gubernur terhadap Raperda Penyelenggaraan Penyiaran, di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Rabu, (10/7) siang.

Ia menambahkan, area ini memiliki peluang komunikasi dan informasi yang menawarkan berbagai isi pesan berupa gerakan audio visual dan memiliki kemampuan mengembangkan multimedia dan lingkungan sosialnya.

"Singkatnya era globalisasi memberikan implikasi kepada

sarana komunikasi yang semakin modern. Namun disini lain hal ini mesti diimbangi dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efektivitas pemangku-an pada tingkat nasional dan daerah serta memiliki dampak nyata pada kesejahteraan untuk masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, sambung Suwirpen, setiap wilayah memiliki potensi dan kondisi masing-masing yang harus dikembangkan.

"Potensi wilayah termasuk lokal dan asal usul kebudayaan se-

ta beraneka ragam kreasi-kreasi wilayah di daerah Sumatera Barat amat penting sebagai aset pembangunan," ungkapnya.

Hal ini sambung Suwirpen, menjadi tugas bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk berupaya terus mengupayakan dan mengembangkan keunggulan, ketahanan dan modernitas kearifan lokal yang menjadi dasar kebijakan dan pelaksanaan program serta kegiatan penyiaran.

Ia menambahkan, cukup banyak catatan, masukan dan per-

nyataan dan meminta penjelasan terhadap raperda prakarsa ini yang perlu menjadi perhatian dari DPRD.

"Catatan dan masukan yang disampaikan Saudara Gubernur tersebut pada dasarnya usulan perbaikan dan penyempurnaan, agar Raperda prakarsa ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan tata cara pembentukan produk hukum sebagaimana yang dimandatkan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011," sebutnya.

Ia menyampaikan, sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2018 terhadap tanggapan yang disampaikan oleh Saudara Gubernur akan diberikan pula penaho-

tan. "Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengingatkan kepada komisi I sebagai komisi terkait dan sekaligus sebagai pengagaz, untuk dapat menyampaikan pula jawaban dari pertanyaan, pandangan, masukan dan saran yang disampaikan oleh gubernur, pengastinya. (bri)



KORAN

WAKIL Ketua DPRD Sumbat, Suwelan Sudi, saat rapat paripurna, Rabu, (10/7).

0751 7057591

<https://dprd.sumbarprov.go.id/>

173



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG		8

KAMIS, 11 JULI 2024

Wakil Gubernur Sampaikan Rancangan KUA-PPAS Sumbar 2025

Suwirpen Ingatkan Proyeksi Pendapatan harus Mencermati Target yang Ditetapkan

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pabb Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025 dan Penyampaian Tanggapan Gubernur Terhadap Rancangan Penyelenggaraan Penyusunan, Rabu (10/7).

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Sub selaku pimpinan rapat paripurna, didampingi Wakil Ketua Izat Syarif, Wakil Ketua Indra Dikut Rajo Lelo, menyampaikan, sesuai Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA-PPAS berdasarkan RKPD dan disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk selanjutnya dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD. Dalam paripurna tersebut hadir Wakil Gubernur Sumbar Auly Jinaldy, seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Sekwan DPRD Provinsi Sumbar Rafia.

Suwirpen Sub juga menyampaikan, KUA-PPAS Tahun 2025 memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyusunan APBD Tahun 2025, karena akan menjadi kebijakan anggaran transisi dari peralihan kepemimpinan daerah hasil Pilkada Tahun 2024 dengan Kepala Daerah yang menjabat saat ini.

Kebijakan anggaran Tahun 2025 ini juga akan menjadi transisi dan perubahan perodesasi RPJMD Tahun 2021-2025 yang

diaksanakan oleh Gubernur yang menjabat saat ini dengan RPJMD Gubernur hasil Pilkada Tahun 2024 yaitu RPJMD Tahun 2025-2030 yang sejalan dengan periodisasi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045," terangnya.

Penyusunan KUA-PPAS Tahun 2025 menjadi semakin kompleks, oleh karena target kinerja pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025. "Harus kita sesuaikan dan selaraskan juga dengan target kinerja dari 45 indikator utama pembangunan daerah yang menjadi base line dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 yang akan menjadi pedoman nanti dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030," jelasnya.

Ia juga mengingatkan, Pemerintah Daerah harus berhati-hati baik dalam penetapan kebijakan anggaran maupun dalam penetapan proyeksi pendapatan dan belanja daerah dengan memperhatikan pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat

dalam beberapa tahun terakhir. "Dalam dua tahun terakhir, proyeksi pendapatan daerah yang ditetapkan pada APBD awal, dikurangi kembali pada Pembahasan APBD dan di akhir tahunnya target yang ditetapkan tersebut juga tidak tercapai," bebarnya.

Kondisi ini tentu berdampak terhadap belanja yang sudah direncanakan dengan memperkirakan penerimaan daerah, banyak yang tidak bisa dilaksanakan.

Beberapa persoalan yang terjadi dalam penyusunan APBD Provinsi Sumatera Bar

at dalam beberapa tahun terakhir, baik disebabkan oleh data pendukung yang tidak valid dan akurat, kebijakan yang kurang tepat serta kinerja OPD yang rendah. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun 2025, agar permasalahan yang sama tidak terjadi lagi dalam pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Ia juga mengingatkan, terkait penetapan proyeksi pendapatan daerah, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan dan mencermati target yang akan ditetapkan, sebab Tahun 2025 sudah menggunakan pola baru dalam penghitungan pajak daerah khususnya pada pos PKB, BBNKB dan MBLB yang sudah menggunakan pola opsen sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Substansi pokok yang akan kita bahas dalam pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 nanti, adalah terkait dengan kondisi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah yang diusulkan pada tahun 2025 sejalan dengan target kinerja pembangunan daerah.

Dari aspek pendapatan daerah, proyeksi penerimaan yang diusulkan dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025, lebih rendah dari target tahun 2024, demikian juga dengan alokasi belanja yang diusulkan.

"Ini tentu menjadi sebuah

tantangan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah untuk merumuskan kebijakan anggaran yang akomodatif, proporsional dan dapat mengakomodir semua kondisi dan permasalahan pembangunan daerah," ungkapnya.

Ia bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Oleh sebab itu, dalam pembahasan nanti baik DPRD maupun Pemerintah Daerah perlu mencermati semua kondisi dan fungsi

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Auly Jinaldy menyampaikan KUA-PPAS merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman, arah dan prioritas alokasi anggaran untuk mewujudkan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2025 akan difokuskan pada pencapaian tema pembangunan yang telah dimasukkan dalam RKPD. Hal itu dengan memperhatikan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara bertahap yang diikuti dengan pemerataan pembangunan.

Selain itu juga untuk mendukung penyelenggaraan peralihan kepemimpinan dan pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah serta pencapaian target kinerja kepala daerah ("



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KUA-PPAS Tahun 2025 yang sangat strategis dalam penyusunan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Bagi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan Tahun 2019-2024 yang akan berakhir masa tugasnya dalam waktu dekat, pembahasan KUA-PPAS Tahun 2025, merupakan tugas yang terakhir dalam membahas dan menetapkan KUA-PPAS.

"Kami berharap dari pembahasan Rancangan KUA-PPAS tahun 2025 ini, akan dapat melahirkan kebijakan anggaran yang terbaik yang dapat mengatasi permasalahan dan mengakomodir semua kepentingan dalam pembangunan daerah," pungkasnya.



WAKIL GUBERNUR SUMBAR Audy Jonsidy serahkan Pengantar Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 kepada pimpinan rapat paripurna.



WAKIL GUBERNUR SUMBAR Audy Jonsidy menyampaikan Pengantar terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025.



WAKIL KETUA DPRD Sumbar, Suwirpeni Sulo memimpin rapat paripurna, didampingi Wakil Ketua Inyid Syafar, Wakil Ketua Indra Dotuk Rajo Lelo.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POS METRO PADANG	KAMIS, 11 JULI 2024	2

KUA-PPAS 2025 Semakin Kompleks; Penyusunan Harus Berhati-hati

PADANG, METRO

KUA-PPAS 2025 menjadi hal yang sangat strategis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena akan menjadi kebutuhan transisi pemerintah ke-10. Penyusunan APBD 2024 dengan ke-10 daerah yang membuat

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Suwandi Sulis saat memimpin rapat paripurna Panitia

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-PPAS) Tahun 2025, Rabu (10/7).

Katanya, kebijakan anggaran tahun 2025 akan menjadi transisi dari pertumbuhan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMMD) 2021-2026 yang dilaksanakan pemerintah yang

"Dengan RPMMD tahun 2025-2030 akan sejalan dengan periodisasi RPJPD Sumbar tahun 2025-2045," katanya.

Dia mengatakan, target yang harus diakomodir dalam KUA-PPAS 2025, baik kebijakan untuk pemenuhan target kinerja pemerintah maupun kebijakan untuk

antipasi perubahan ke-10. Penyusunan APBD 2024

Dia menyebutkan, penyusunan KUA-PPAS 2025 semakin kompleks, karena target kinerja pembangunan daerah yang ditargetkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025 harus disesuaikan dengan 45 indikator utama yang menjadi base line dalam RPJPD 2025-2045 yang akan menjadi pedoman RPJMD.

Dia mengatakan, di-

lain proses penyusunan KUA-PPAS harus berhati-hati dalam kebijakan anggaran, yaitu penyiapan proyek-proyek pendapatan dan belanja daerah dalam pelaksanaan APBD.

Dalam dua tahun terakhir, proyek-proyek pendapatan daerah pada APBD awal, dikurangi kembali pada perubahan APBD.

Di akhir tahun target yang ditetapkan juga tidak tercapai. Kondisi tersebut tentu berdampak terhadap belanja yang sudah dire-

sanakan dengan melampaui kemampuan penerimaan daerah, yang tidak terlaksana.

Dia menyebut beberapa persoalan yang terjadi dalam penyusunan APBD Sumbar dalam beberapa tahun terakhir, yaitu data pendukung yang tidak valid, kebijakan yang kurang tepat serta kinerja OPD yang rendah. Kondisi tersebut, perlu menjadi perhatian dalam penyusunan KUA-PPAS 2025.

"Agar permasalahan yang sama tidak terjadi

RANCANGAN KUA-PPAS-RAPAT

panitia penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-PPAS) Tahun 2025, Rabu (10/7).





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	KAMIS 11 JULI 2024	5

AKSIMALKAN PENDAPATAN DAERAH. PEMPROV SUMBAR TERAPKAN POLA BARU DI 2025

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menilai capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah. Oleh karena itu, Pemprov Sumatera Barat akan menerapkan pola baru.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Iryad Syafar usai melaksanakan rapat paripurna, dalam rangka penyampaian nota pengantar KUA PPAS 2025 dan penyampaian tanggapan gubernur terhadap ranperda penyaliran, Rabu (10/7).

Menurutnya, ada beberapa catatan penting yang menjadi penyebab rendahnya capaian PAD di daerah, mulai dari data yang tidak valid, kebijakan yang kurang tepat hingga kinerja OPD yang rendah.

Sehingga untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah mesti mencermati target yang ditetapkan, sehingga pada 2025 ke depan akan dilaksanakan pola baru sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019. Dimana KUA memuat kondisi ekonomi mikro daerah, penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Sementara PPAS memuat prioritas perubahan dan masing-masing sesuai dengan skala prioritas daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 310 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa kepala daerah menyusun rancangan KUA PPAS berdasarkan RKPD dan disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli, untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama oleh kepala daerah dan DPRD, ujarnya.

Menurutnya, KUA PPAS tahun 2025 memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyusunan APBD tahun 2025. Oleh karena

itu akan menjadi kebijakan anggaran transisi dari peralihan kepemimpinan daerah hasil Pilkada 2024 dengan kepala daerah yang menjabat saat ini.

Di samping itu, kebijakan anggaran tahun 2025 juga akan menjadi transisi dari perubahan perodesasi RPJMD tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh gubernur yang menjabat saat ini dengan RPJMD gubernur hasil Pilkada 2024 yaitu RPJMD tahun 2025-2030 yang sejalan dengan perodesasi RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045.

Penyusunan KUA PPAS tahun 2025 menjadi semakin kompleks, oleh karena target kinerja

ke pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2025 ini harus disesuaikan dan selaras dengan target kinerja dari 45 indikator utama pembangunan daerah yang menjadi base line dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2030.

"Oleh karena itu, banyak kebijakan anggaran yang harus dilakukan dalam KUA PPAS tahun 2025, baik kebijakan untuk memenuhi target kinerja gubernur dan wakil gubernur saat ini, maupun kebijakan anggaran untuk mengantisipasi adanya peralihan

kepemimpinan daerah hasil Pilkada 2024," ungkapnya.

Oleh karena KUA PPAS tahun 2025 memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyusunan APBD tahun 2025, maka dalam penyusunannya, pemerintah daerah harus berhati-hati baik dalam penerapan kebijakan anggaran maupun dalam penetapan proyeksi pendapatan dan belanja daerah dengan memperhatikan pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam 2 tahun terakhir, proyeksi pendapatan daerah yang ditetapkan pada APBD awal, dikurangi kembali pada Perubahan

APBD dan di akhir tahunnya target yang ditetapkan tersebut juga tidak tercapai. Kondisi ini tentu berdampak terhadap belanja yang sudah direncanakan dengan memperkirakan penerimaan daerah, banyak yang tidak bisa dilaksanakan.

Mengacu kepada amanat KUA dan PPAS tersebut, maka substansi pokok yang akan dibahas dalam pembahasan rancangan KUA PPAS tahun 2025 nanti, adalah terkait dengan kondisi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah yang diundikan pada tahun 2025 sejalan dengan target kinerja pembangunan daerah. (s)



Wakil Ketua DPRD Sumbang Insyad Syafar, Suwirpen Sult, Indra Di Rajo Lelo dan Wagub Sumbang Audy Jolnaldy saat rapat paripurna, Rabu (10/7).



SEKRETARIAT

KORAN



RAPAT PARIPURNA

Rapat Paripurna Dalam Rangka
Pengambilan Keputusan
Majelis Rakyat Kabupaten Sumbang
Tahun 2023
Tentang
Pemberian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumbang Tahun 2023

RAPAT PARIPURNA

Rapat Paripurna Dalam Rangka
Pengambilan Keputusan
Majelis Rakyat Kabupaten Sumbang
Tahun 2023
Tentang
Pemberian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumbang Tahun 2023

WAKIL Ketua DPRD Sumbang Insyad Syafar, Suwirpen Sult, Indra Di Rajo Lelo dan Wagub Sumbang Audy Jolnaldy saat rapat paripurna, Rabu (10/7).

0751 7057591

<https://dprd.sumbangprov.go.id/>

178



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KI IDING REDITA



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar, Suwirpen Sulb dan Indra Dt Rajo Lelo bersama Wagub Sumbar Audy Joinaldy diampingi Sekprov Sumbar Hansastri.



WAKIL Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat menyampaikan tanggapan.



0751 7057591

<https://dprd.sumbarprov.go.id/>

179



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KHAZ	KAMIS, 11 JULI 2024 KAMIS, 5 MUHARRAM 1445 H	2

WAKIL KETUA DPRD SUMBAR SUWIRPEN SUIB:

KUA PPAS Akomodir Pemenuhan Target Kinerja Pembangunan Daerah

Padang, Khasanah — Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen SuiB menegaskan, dalam arak Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025 akan mengakomodir pemenuhan target kinerja pembangunan daerah dan antisipasi pemulihan kepemimpinan hasil Pilkada tahun 2024, karena perencanaan yang matang akan dapat dilaksanakan tepat sasaran.

Sebab, katanya, KUA-PPAS 2025 memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyusunan APBD karena akan menjadi kebijakan transitisi peralihan kepemimpinan daerah hasil Pilkada 2024 dengan kepala daerah yang menjabat sekarang.

Jadi dengan RPJMD 2021-2026, gubernur Pilkada 2024 yang menjabat tahun 2025-2030 akan sejalan dengan perodesasi RPJPD Sumbar tahun 2025-2045," kata Suwirpen SuiB didampingi Irsyad Syarif dan Indri D. Rajo Lelo saat memimpin rapat paripurna penyampaian nota pengantar KUA-PPAS 2025 dan penyampaian tanggapan gubernur terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran di ruang sidang utama dewan, Rabu (10/7).

Untuk itu, lanjut Suwirpen, pihaknya mendorong anggaran KUA-PPAS 2025 ini dapat saling berkolaborasi dengan nasional, karena bagaimana pun anggaran yang terbatas tidak membuat kita tertinggal untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah ini, karena dimasa akan datang sangat penting dalam pencapaian target PAD demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

"Kita sengaja mendorong anggaran kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan, karena anggaran yang diterima dan berkelanjutan dapat dirasakan," ujar Suwirpen.

namun pola baru dalam pemungutan pajak daerah khususnya pada pos PBB, BBNKB dan MBBB yang sudah menggunakan pola open hegaimana yang di martakan dalam undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

"Substansi pokok dalam pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 terkait kondisi makro daerah, kebijakan pendapatan belanja serta pembiayaan yang diusulkan pada tahun 2025 sejalan dengan target kinerja pembangunan daerah," katanya.

Sementara tentang Raperda Penyelenggaraan Penyiaran, Suwirpen mengungkapkan, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat yang semakin besar tuntutan akan hak untuk mengetahui dan hak mendapatkan informasi yang telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran.

Namun dalam konteks penyiaran yang dilakukan dalam tataran daerah masih memiliki permasalahan berkaitan dengan kekosongan norma di tingkat daerah," tukai.

Lebih lanjut diungkapkan Suwirpen, aktualisasi penyelenggaraan penyiaran di Sumatera Barat yang berbasis nilai nilai keberman dan segala kewenangannya, harus segera diwujudkan.

Suwirpen juga menjelaskan, pihaknya telah mendengar masukan dari keinginan dari pemerintah provinsi dibacakan Wakil Gubernur Sumbar Audy Jomaldy terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang diinisiasi DPRD.

"Kita akan menerima masukan dan keinginan dari tanggapan Gubernur Sumbar," ujar Suwirpen SuiB.

Selain itu Wakil gubernur, rapat paripurna ini juga dihadiri pimpinan OPD, Bekerjasama dan para undangan lainnya.





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



KIL KETUA DPRD Sumbar Suwirpen Subi didampingi Irayad Syafar dan Indra Dt. Rajo Lelo menerima nota pengantar KUA-PPAS dari Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinald



0751 7057591

<https://dprd.sumbarprov.go.id/>

(81



KODAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KHAZADNYO	RABU, 3 JULI 2024 RABU, 28 DZULHIJAH 1445 H	10

FRAKSI SAMPAIKAN PANDANGAN AKHIR

DPRD Sumbar Siap Sahkan Dua Ranperda

Padang, Khazanah - Fraksi-fraksi DPRD Sumbar menyampaikan pandangan akhir tentang dua rancangan peraturan daerah (ranperda) dalam rapat kerja pembahasan akhir di gedung DPRD Sumbar Jalan Khatib Salaman Padang, Selasa (2/7).

Dua ranperda tersebut yakni Ranperda Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum serta Ranperda Tentang Perubahan Ketiga Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Struktur Perangkat Daerah.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar mengatakan, penyampaian pandangan akhir fraksi tentang ranperda yang sedang dibahas tersebut merupakan salah satu tahapan sebelum pengesahannya menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Ia mengatakan kedua ranperda tersebut akan segera dijadwalkan pengesahannya menjadi perda dalam rapat paripurna oleh Badan Musyawarah DPRD.

Irsyad mengatakan ranperda tentang perubahan ketiga perda nomor 8 Tahun 2016 tentang struktur perangkat daerah mengatur tentang perubahan struktur OPD di lingkup pemerintahan provinsi.

Perubahan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini dilakukan untuk menciptakan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

Ini sesuai pula dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan

perla. pemajuan kebudayaan daerah, cagar budaya dan pengelolaan museum menurut Irsyad juga sudah akan disahkan.

"Sebelumnya memang ada kita menerima permintaan untuk menunda pengesahan perda ini. Namun kita telah melakukan pertemuan beberapa kali

dan sudah mengakomodir masukan dan saran yang diharapkan stakeholder untuk ditindaklanjuti," ujar Irsyad.

Ia mengatakan, ranperda pemajuan kebudayaan daerah, cagar budaya dan pengelolaan museum merupakan ranperda usul prakarsa DPRD yang dia-

jakan Komisi V.

Ketua pembahasan ranperda tersebut, Hidayat mengatakan Ranperda ini juga diharapkan dapat merawat nilai-nilai adat budaya agar tidak tergerus dalam kehidupan keseharian masyarakat, terutama generasi muda.

Dikatakan, saat ini banyak dilihat nilai-nilai adat budaya ini sudah tergerus, seperti dalam sikap dan norma keseharian masyarakat.

"Untuk itulah ranperda ini menjadi usul prakarsa DPRD dan diharapkan menjadi salah satu solusi," ujarnya. (jer/)

Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

Hal yang dipertimbangkan yakni beban kerja, kompleksitas pekerjaan, ketersediaan sumber daya serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Sementara itu, untuk ran-





KLIPING BERITA



@humasdpdsumbar
KETUA pemberitaan, Hidayat menyerahkan hasil belasan kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar, Ihsyad Sefar didampingi Sekwan Patis.

LEAKING
NEWS!



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	KAMIS, 11 JULI 2024 14 Muharram 1446 H	9

RAPAT PARIPURNA DPRD SUMBAR

Rancangan KUA- PPAS 2025 Akomodir Target Pembangunan Daerah

PADANG, HALUAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menggelar rapat paripurna penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 oleh pemerintah daerah di Ruang Sidang Utama gedung DPRD setempat, Rabu (10/7).

Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib, didampingi Wakil Ketua Irsyad Syafar, Wakil Ketua Indra D. Rajo Lelo, serta dihadiri seluruh anggota DPRD Sumbar, dan Sekretaris DPRD Sumbar Rafli. Sementara dari pihak Pemprov Sumbar dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar, Andy Joinaldi.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib saat memimpin jalannya rapat paripurna tersebut mengatakan, arah muatan KUA-PPAS 2025 akan mengakomodir perubahan target kinerja pembangunan daerah dan antipasi peralihan kepemimpinan hasil Pilkada 2024.

Suwirpen mengungkapkan KUA-PPAS 2025 memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) 2025, karena akan menjadi kebijakan transisi peralihan kepemimpinan daerah hasil Pilkada 2024 dengan kepala daerah yang menjabat sekarang.

"Kebijakan anggaran tahun 2025 akan menjadi transisi dan perubahan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang dilaksanakan

untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Rancangan KUA-PPAS 2025 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan APBD 2025 dan akan menjadi pedoman RPJMD 2021-2026 yang dilaksanakan

daerah hasil pilkada 2024. Penyusunan KUA-PPAS 2025 semakin kompleks, karena target kinerja pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025 harus dijabarkan dengan 45 indikator utama yang menjadi acuan dalam RPJMD 2021-2026 yang akan menjadi pedoman RPJMD.

Berangkat dari hal ini ia mengingatkan, dalam proses penyusunan KUA-PPAS harus berhati-hati baik dalam menetapkan kebijakan anggaran maupun dalam penetapan proyeksi pendapatan dan belanja daerah dengan memperhatikan pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat dalam tahun terakhir.

Dalam dua tahun terakhir, proyeksi pendapatan daerah pada APBD awal, dikurangi kembali pada perubahan APBD. Di akhir tahun target yang ditetapkan juga tidak tercapai. Kondisi tersebut tentu berdampak terhadap belanja yang sudah direncanakan dengan memperhatikan penerimaan daerah, banyak tidak terlaksana.

Ia mengatakan, beberapa persoalan yang terjadi dalam penyusunan APBD Sumbar dalam beberapa tahun terakhir, yaitu data pendukung yang tidak valid, kebijakan yang kurang tepat serta kinerja OPD yang rendah. Kondisi tersebut, perlu menjadi perhatian dalam penyusunan KUA-PPAS 2025.

"Agar permasalahan yang

sama tidak terjadi lagi dalam pelaksanaan APBD 2025. Maka diharapkan penetapan proyeksi pendapatan daerah perlu memperhatikan dan mencermati target yang ditetapkan," katanya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, pada tahun 2025, sudah digunakan pola baru dalam pemungutan pajak daerah khususnya pada pos PKB, BBNKB dan MBLB yang sudah menggunakan pola opsi sebagaimana yang diamanatkan dalam



KLIPING BERITA

undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022.

"Substansi pokok dalam pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 terkait kondisi makro daerah, kebijakan pendapatan belanja serta pembiayaan yang diusulkan pada tahun 2025 sejalan dengan target kinerja pembangunan daerah," katanya.

Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy menyampaikan KUA-PPAS merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman, arah dan prioritas alokasi anggaran untuk mewujudkan pemerataan layanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2025 akan difokuskan pada pencapaian tema pembangunan yang telah dirumuskan dalam RKPD Hal ini dengan memperhatikan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara bertahap yang diikuti dengan pemerataan

HAR



PEMBERIAN dokumen Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 oleh Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy kepada DPRD Sumbar



0751 7057591

<https://dprd.sumbarprov.go.id/>

185

KLIPING BERITA



RAPAT paripurna DPRD Sumbang dengan agenda penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbang kepada DPRD Sumbang

dukung penyelenggaraan per- pencapaian indikator kinerja daerah serta pencapaian target alihan kepemimpinan dan utama dan indikator kinerja kinerja kepala daerah: (h/adv)



MENYANYIKAN lagu Indonesia Raya saat rapat paripurna



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	KAMIS, 11 JULI 2024	6

WAKIL KETUA DPRD SUMBAR SUWIRPEN SUIB PIMPIN RAPAT PARIPURNA

KUA-PPAS 2025 Akomodir Kebijakan Peralihan Kepemimpinan Hasil Pilkada 2024

WAKIL Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Suwirpen Suib memimpin rapat paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025, Rabu (10/7).

Dalam arah muatan KUA-PPAS 2025 akan mengakomodir pemenuhan target kinerja pembangunan daerah dan antisipasi peralihan kepemimpinan hasil Pilkada tahun 2024.

Suwirpen mengungkapkan, KUA-PPAS 2025 memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), karena akan menjadi kebijakan transisi peralihan kepemimpinan daerah hasil Pilkada 2024 dengan kepala daerah yang menjabat sekarang.

"Kebijakan anggaran tahun 2025 akan menjadi transisi dari perubahan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang dilaksanakan gubernur yang menjabat sekarang. Jadi dengan RPJMD gubernur Pilkada 2024, pada tahun 2025-2030 akan sejalan dengan periodisasi RPJPD Sumbar tahun 2025-2045," katanya.

Dia mengatakan, banyak kebijakan anggaran yang harus diakomodir dalam KUA-PPAS 2025, baik kebijakan untuk pemenuhan target kinerja gubernur sekarang maupun kebijakan anggaran untuk antisipasi peralihan kepemimpinan daerah hasil pilkada 2024.

Dia menyebut, penyusunan KUA-PPAS 2025 semakin kompleks, karena target kinerja pemba-

ngunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025 harus diselaraskan dengan 45 indikator utama yang menjadi base line dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 yang akan menjadi pedoman RPJMD.

Dia mengingatkan, dalam proses penyusunan KUA-PPAS harus berhati-hati dalam kebijakan anggaran yaitu penetapan proyeksi pendapatan dan belanja daerah dalam pelaksanaan APBD. Dalam dua tahun terakhir, proyeksi pendapatan daerah pada APBD awal, dikurangi kembali pada perubahan APBD.

Diakhir tahun, target yang ditetapkan juga tidak tercapai. Kondisi tersebut tentu berdampak terhadap belanja yang sudah direncanakan dengan memperkirakan penerimaan daerah, banyak tidak terlaksana.

Dia menyebut beberapa persoalan yang terjadi dalam penyusunan APBD Sumbar dalam beberapa tahun terakhir, yaitu data pendukung yang tidak valid, kebijakan yang kurang tepat serta kinerja OPD yang rendah. Kondisi tersebut, perlu menjadi perhatian dalam penyusunan KUA-PPAS 2025.

"Agar permasalahan yang sama tidak terjadi lagi dalam pelaksanaan APBD 2025. Maka diharapkan penetapan proyeksi pendapatan daerah perlu memperhatikan dan mencermati target yang ditetapkan," katanya.

Dia menyebut, pada 2025 mendatang, kita sudah menggunakan pola baru dalam pemungutan pajak daerah khususnya pada pos. PKB, BBNKB dan MBLB yang sudah menggunakan pola opsen sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.





KLIPING BERITA

"Substansi pokok dalam pembahasan Rancangan RJA-PPAS Tahun 2025 terkait kondisi makro daerah, kebijakan pendapatan belanja serta pembiayaan yang diusulkan pada tahun 2025 sejalan dengan target kinerja pembangunan daerah," katanya.

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy dalam kesempatan itu juga menyampaikan, RJA-PPAS merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman, arah dan prioritas alokasi anggaran untuk mewujudkan pemenuhan layanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada 2025 akan difokuskan pada pencapaian tema pembangunan yang telah dirumuskan dalam RKPD. Hal itu dengan memperhatikan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara bertahap yang diikuti dengan pemerataan pembangunan.

Selain itu juga untuk mendukung penyelenggaraan peralihan kepemimpinan dan pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah serta pencapaian target kinerja kepala daerah. (*)



Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy menyampaikan...



Anggota DPRD Sumbar dan Sekwan foto bersama dengan Wagub Sumbar, Audy Joinaldy didampingi Sekda prov Sumbar, Hansastri dalam rapat peripurna.





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG		7
KAMIS, 11 JULI 2024		

Alokasikan Pokir, Rafdinal: Penyandang CP di Sumbar Harus Dapat Perhatian

PADANG, KP - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), bekerjasama dengan Yayasan Rumah Gadang Cerebral Palsy, menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi terapis, keluarga, dan pendamping anak penyandang disabilitas selama dua hari (9-10/8) di salah satu hotel di Kota Padang.

Bimtek ini dilaksanakan berkat alokasi anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, Rafdinal, dan dihadiri oleh Anggota DPD RI Muslim M Yatim. Rafdinal, yang juga politisi PKS, mengungkapkan bahwa persoalan disabilitas, khususnya penyandang Cerebral Palsy (CP) atau lumpuh otak, harus mendapatkan perhatian dari semua pihak.

"Orang tua, sebagai figur yang dekat dan memiliki banyak waktu bersama anak berkebutuhan khusus, perlu dilengkapi dengan pengetahuan untuk merawat sang buah hati. Bagi anak CP, perawatan terapi sangat penting karena keterbatasan SDM di rumah sakit," ujarnya.

Rafdinal juga menyebutkan bahwa meskipun jumlah penyandang CP di Sumbar cukup signifikan, tidak semua mendapatkan perawatan intensif yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas orangtua sebagai pengasuh di dalam keluarga menjadi sangat penting. "Dengan terapi yang tepat, anak-anak ini bisa lebih mandiri dan tidak hanya bergantung pada orang

lain," tambahnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI Muslim M Yatim menegaskan bahwa penyandang kebutuhan khusus harus mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah, termasuk hak-hak terhadap fasilitas publik, perawatan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja.

"Dalam posisinya sebagai anggota DPD RI, saya akan terus mendukung program-program pro disabilitas dengan berkoordinasi erat dengan kementerian terkait," katanya.

Sekretaris Dinas DP3AP2KB Sumbar, Sufharita Yusuf, mewakili Kepala Dinas, menambahkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak penyandang disabilitas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

"Walaupun sudah ada jaminan dari negara, masih banyak anak disabilitas yang mengalami



MELALUI Pokir Anggota DPRD Sumbar Rafdinal, DP3AP2KB Sumbar gelar bimtek terapis Keluarga Pendamping Anak Berkebutuhan khusus.

stigma, diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Pemerintah harus bekerja lebih keras untuk

memastikan hak-hak mereka terlindungi secara optimal," tutupnya. (fai)



ov.go.id/

190



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	JUMAT, 12 JULI 2024 C. Mubaram 1446 H	1

CEMARI EKOSISTEM DAN BIOTA LAUT

Setiap Hari 540 Ton Sampah di Sumbar Berakhir di Laut

PADANG, HALUAN—Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang mencari, sekitar 540 ton atau sekitar 30 persen total sampah yang diproduksi Sumatera Barat (Sumbar) setiap harinya, berakhir di laut lepas dan mencemari ekosistem laut.

Kepala BPSPL Padang, Fajar Kurniawan menyebutkan, 19 kabupaten/kota di Sumbar memproduksi total sekitar 1.800 ton sampah setiap hari. Kota Padang menjadi daerah dengan produksi sampah terbanyak, yakni sekitar 400 hingga 600 ton per hari. "Sebesar 30 persen dari total sampah yang diproduksi tersebut bermuara ke laut. Nah, ini jika tidak dicegah maka ke depannya kita akan selalu membersihkan laut yang selalu kotor," ujar di sela-sela menghadiri Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut 2024 di kawasan Pantai Air Manis, Kota Padang, Kamis (11/7).

Oleh sebab itu, BPSPL menekankan pentingnya pengelolaan sampah dari hulu hingga ke hilir agar keberadaan sampah tidak menjadi polusi baik di darat maupun di laut. Bagaimanapun, sampah-sampah yang bermuara ke laut lepas tidak hanya mencemari lingkungan. Namun juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan ekosistem bawah laut. Bahkan, beberapa biota laut yang terdampar dan ditemukan BPSPL diketahui mengonsumsi sampah. Hal ini diketahui setelah dilakukan pembedahan

disalurkan. Ketika minat bakar mereka itu tidak tersalurkan di sekolah dan tidak tersalurkan juga di rumah pasti mereka akan melampiaskannya ke jalanan," katanya.

Supardi juga menilai, ketika anak-anak mulai remaja tersebut tidak merasa nyaman di rumah bahkan terbebani di sekolah maka secara naluriah mereka (remaja) pasti mencari tempat yang menurut mereka menyenangkan seperti cafe, hiburan malam, dan jalanan.

Evaluasi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi keberadaan siswa itu di sekolah dan lingkungan keluarganya. "Kita harus menyediakan lingkungan yang nyaman bagi mereka dari itu harus ada konselingnya," tuanya.

Hal senada sebelumnya juga disampaikan Sosiolog Universitas Negeri Padang (UNP), Eriarjoni menilai semakin maraknya tawuran yang terjadi dikarenakan minimnya sarana untuk menyalurkan energi positif di kalangan remaja. Saat energi positif tersebut tidak bisa disalurkan, tidak mendapat pengakuan atau bahkan tidak dihargai, energi yang tadinya positif berubah menjadi energi negatif dan dilampiaskan melalui tawuran antar remaja.

"Khususnya di Kota Padang, saya melihat kurangnya kegiatan yang menjadi peluang untuk para remaja mengekspresikan dirinya. Masa remaja adalah masa di mana anak-anak harusnya mencari jati diri, menyalurkan bakat, berkreasi, menunjukkan identitas, butuh pengakuan dan seluruhnya. Hal tersebut merupakan hal yang positif," katanya kepada Haluan, Selasa (9/7).

Ia menyebut, keterbatasan ruang publik menjadi pemicu meningkatnya aksi tawuran. Ruang publik yang harusnya bisa digunakan untuk menyalurkan energi positif dibatasi, sehingga para remaja memilih untuk melampiaskannya melalui tawuran.

"Ruang publik itu ada, tapi terbatas. Katakanlah para remaja itu memiliki ruang menyalurkan bakat olahraga seperti futsal, tapi harus bayar lapangan. Begitu juga dengan olahraga yang lain, harus bayar dulu," ujarnya.

Keterbatasan ruang publik inilah yang

menurutnya menjadi salah satu pemicu penimbunan emosi dalam diri remaja yang sering terlibat tawuran. Emosi yang menumpuk akan membuat seseorang ingin melampiaskannya sekalipun dengan cara yang negatif.

Selain keterbatasan ruang publik, ia juga melihat tawuran sebagai tempat pelarian saat mereka tidak dipedulikan dan tidak diakui di lingkungan keluarga. Remaja dengan emosi yang labil juga membutuhkan pengakuan akan keberadaannya, baik di luar maupun di dalam rumah.

"Saat orang tua tidak peduli dengan anaknya, kemudian si anak merasa tidak berguna dan jenuh, mereka kemudian dipertemukan dengan kelompok dengan permasalahan yang cenderung sama. Mereka akan mudah dikompromi dan diajak untuk menyalurkan energi tersebut dalam tawuran," ucapnya.

Tindak Puluhan Remaja

Diberitakan sebelumnya, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiyawan mengungkapkan bahwa aksi tawuran antar geng petarung di Kota Padang sudah sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan pemetaan polisi, di Kota Padang ada lebih dari 20 geng remaja petarung yang kerap kali terlibat aksi saling serang.

"Mereka menggunakan nama geng bermacam-macam, beranggotakan antara 10 hingga 30 orang. Dan ada satu dua geng yang bahkan punya anggota sampai 70 hingga 80 orang. Semuanya tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kota Padang," katanya, kemarin.

Geng remaja petarung ini aktif bersaing satu sama lain. Mereka saling berkompetisi untuk dianggap sebagai yang paling hebat. Bahkan mereka menjadikan aksi tawuran dan pameran senjata tajam sebagai konten di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook.

Ia menyebut, sepanjang tahun 2023 sampai 2024, Satreskrim Polresta Padang telah menindak dan membina puluhan orang dewasa dan anak-anak yang terlibat aksi tawuran. Beberapa di antaranya dikenal sanksi hukum karena kepemilikan membawa senjata tajam. (h/len)



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Bakycat Sumbur JUMAT 12 JULI 2024		10

KUA-PPAS Memiliki Fungsi Strategis Penyusunan APBD

Padang, Rakyat Sumbur—Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbur, Suwirpen Sub, mengatakan, KUA-PPAS Tahun 2025 memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyusunan APBD tahun tersebut.

"KUA-PPAS akan menjadi kebijakan anggaran transisi dari peralihan kepemimpinan daerah hasil Pilkada Tahun 2024 dengan Kepala Daerah yang menjabat saat ini," kata Suwirpen, saat rapat persiapan Penyusunan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025, di ruang sidang utama DPRD Sumbur, Rabu, (10/7).

Ia menambahkan, kebijakan anggaran tahun 2025 akan menjadi transisi perubahan periode RPJMD 2021-2026 yang dilaksanakan gubernur yang menjabat saat ini dengan RPJMD Gubernur hasil Pilkada Tahun 2024.

"Yaitu RPJMD Tahun 2025-2030 yang sejalan dengan perodesasi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045," ucap Suwirpen Sub.

Ia menambahkan, penyusunan KUA-PPAS Tahun 2025 menjadi semakin kompleks, karena target kinerja pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 tentu harus disesuaikan dan disesuaikan dengan target kinerja dari 45 indikator utama.

"Indikator utama pembangunan



Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbur, Suwirpen Sub, saat rapat persiapan Penyusunan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025, di ruang sidang utama DPRD Sumbur, Rabu, (10/7).

di daerah yang menjadi base line dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 yang akan menjadi pedoman nanti dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030," ucapnya.

Oleh sebab itu, sambung Suwirpen, banyak kebijakan anggaran yang harus diakomodir dalam KUA-PPAS Tahun 2025, baik kebijakan untuk pemenuhan target kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjadi saat ini, maupun kebijakan anggaran untuk mengantisipasi adanya peralihan kepemimpinan daerah hasil Pilkada Tahun 2024.

lain tersebut juga tidak tercapai. "Kendati ini tentu berdampak terhadap belanja yang sudah direncanakan dengan memperhatikan pemerintahan daerah, banyak yang tidak bisa dilaksanakan," pungkasnya.

Ia menyampaikan, beberapa persoalan yang terjadi dalam penyusunan APBD Provinsi Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir, baik disebabkan oleh data pendukung yang tidak valid dan akurat, kebijakan yang kurang tepat serta kinerja OPD yang rendah.

"Kondisi tersebut, perlu menjadi perhatian dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun 2025, agar permasalahan yang sama tidak terjadi lagi dalam pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025," tuturnya.

Ia mengakhiri, terkait dengan penetapan proyek investasi daerah, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan dan memonitor target yang akan ditetapkan.

"Pada tahun 2025, kita sudah mengonfirmasi pada hari dalam pemungutan pajak daerah khususnya pada pros PKB, PBB dan MBL yang sudah menggunakan pola opor sebagaimana yang dilaksanakan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2022," pungkasnya. (byr)



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Jumat, 12 Juli 2024 (6 Muharram 1446 H)	10

KUA-PPAS Tahun 2025 Mulai Dibahas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memulai pembahasan rancangan peraturan daerah (perpda) kebijakan Umum Anggaran P plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

Pembahasan dimulai pada Selasa (12/7/2024) pukul 09.00 WIB di Gedung DPRD Sumbar. Dalam rapat, narasumber, Kepala (K) DPRD Sumbar, menyampaikan bahwa (K) DPRD Sumbar telah memulai pembahasan KUA-PPAS Tahun 2025.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Sub saat memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan KUA-PPAS Tahun 2025 memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyusunan APBD Tahun 2025 karena akan menjadi kebijakan anggaran transisi dari peralihan kepemimpinan daerah hasil Pilkada Tahun 2024 dengan kepala daerah yang menjabat saat ini.

Disamping itu, kebijakan anggaran Tahun 2025 juga akan menjadi transisi dari perubahan periodisasi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan Gubernur yang menjabat saat ini dengan RPJMD Gubernur hasil Pilkada Tahun 2024 yaitu RPJMD Tahun 2025-2030 yang

sejalan dengan periodisasi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Selain itu, penyusunan KUA-PPAS Tahun 2025 menjadi semakin kompleks karena target kinerja pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 harus disesuaikan dan diselaraskan juga dengan target kinerja dari 45 indikator utama pembangunan daerah

yang menjadi base line dalam RPJPD Provinsi Sumbar Tahun 2025-2045. RPJPD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2030.

Mengingat semua hal tersebut, lanjut Suwirpen, maka terlihat banyak kebijakan anggaran yang harus diakomodir dalam KUA-PPAS Tahun 2025. Termasuk pula kebijakan untuk pemenuhan target kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjadi saat ini, maupun kebijakan anggaran untuk mengantisipasi adanya peralihan kepemimpinan daerah hasil Pilkada Tahun 2024.

Suwirpen menambahkan, dikarenakan KUA-PPAS Tahun 2025 memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyusunan APBD Tahun 2025, maka dalam penyusunannya Pemerintah Daerah harus berhati-hati baik dalam penetapan kebijakan anggaran maupun dalam penetapan proyeksi pendapatan dan belanja daerah dengan memperhatikan pelaksanaan APBD dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam dua tahun terakhir tersebut, proyeksi pendapatan daerah yang ditetapkan pada APBD awal dikurangi kembali pada Perubahan APBD dan di-

akhir tahunnya target yang ditetapkan tersebut juga tidak tercapai," katanya.

Kondisi ini menurut Suwirpen, tentu mengakibatkan banyak belanja yang sudah direncanakan menjadi tidak terlaksanakan karena memperlakukan pemerintahan daerah.

DPRD melihat ada beberapa persoalan yang terjadi dalam penyusunan APBD Sumbar dalam beberapa tahun terakhir.

Di antaranya, data pendukung yang tidak valid dan akurat, kebijakan yang kurang tepat serta kinerja organisasi perangkat Daerah (OPD) yang rendah.

"Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun 2025, agar permasalahan yang sama tidak terjadi lagi dalam pelaksanaan

APBD Tahun 2025," tegasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan proyeksi target pendapatan daerah karena untuk Tahun 2025 telah digunakan pola baru dalam pemungutan pajak daerah khususnya pada pos PKB, BBNKB dan MBLB. Pola yang digunakan yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yakni pola opsen.

Dalam KUA-PPAS juga akan memuat kondisi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah yang diusulkan pada tahun 2025 sejalan dengan target kinerja pembangunan daerah.

Ia memaparkan dari aspek pendapatan daerah, proyeksi penerimaan yang diusulkan dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 lebih rendah dari target tahun 2024, demikian juga dengan alokasi belanja yang disediakan.

"Ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan anggaran yang akomodatif, proporsional dan dapat mengakomodir semua kondisi dan permasalahan pembangunan daerah," ujarnya.



KLIPING BERITA

Orbit sehabis itu, dalam per-
timbangan hasil DPRD dan pe-
nerbitan surat perintah pemecatan
dari semua kandidat dan fungsi
KUA-PKAS Tahun 2025 yang
mengait strategi dalam peng-
gunaan APBD Sumbar Tahun
2025.
DPRD berharap rancangan
KUA-PKAS tahun 2025 ini akan
dapat diberikan kebijakan
keputusan yang terbaik, yakni
dapat menjadi pertimbangan
dan mengkontribusi semua ke-
pentingan dalam pembinaan
gubernur daerah (1)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Jumat, 12 Juli 2024 (6 Muharram 1446 H)	13

Hidayat: Perbaiki Toilet Sekolah Penting

PADANG- Anggota DPRD Sum-
Hidayat telah dibeklari-
berpasangan dengan Hen-
Septa. Keduanya juga telah
dukung oleh Partai PAN dan
Gerindra.
Hidayat berharap berpasan-
bernama Hendri Septa
an membuat kemajuan dan
siswa kebermanfaatan.
Salah satu titik fokusnya ad-
bidang pendidikan, la-
ngatakan pendidikan yang
adalah kunci dari kem-
sebuah daerah.
"Pendidikan mesti jadi pri-
tas," ujarnya. Menurut Hi-
yat, ada tiga komponen un-
pemerintahan pendidikan.
Pertama, ketersediaan sarana



Hidayat

dan prasarana. Kedua, tenaga
kependidikan yang mumpuni.

dan ketiga, kurikulum yang
aplikatif.

Tujuan akhirnya dari pen-
didikan adalah siswa memiliki
keahlian dan berkarakter. Soal
skill, sebut Hidayat, didapatkan
dari program-program penga-
jaran.

Lalu, siswa juga mesti me-
iliki karakter, yang mestinya
juga bisa dibentuk.

Saat ini, sebutnya, soal kar-
akter ini masih jadi pekerjaan
rumah yang besar. Misalnya,
masih mudah ditemukan sis-
wa-siswa yang buang sampah
sembarangan, tawuran, yang
menandakan ada persoalan di
karakter.

Hal sederhana saja, coba

kita lihat toilet-toilet di sekolah-
sekolah, banyak yang kotor dan
tidak terurus," ujarnya.

Menurut Hidayat, toilet ma-
rupakan salah satu bentuk per-
adaban.

Oleh karena itu, Hidayat
nantinya akan menenangkan
merevitalisasi toilet-toilet yang
ada di sekolah. Di Padang, ada
lebih kurang 200 sekolah.

"Kelihatannya sepele, tapi
saya yakin, dari pembenahan
toilet akan lahir siswa-siswa
yang berkarakter," ujarnya.

Hidayat meyakini karakter
siswa akan berdampak kepada
akademiknya. Manfaatnya nan-
ti akan terasa untuk Kota
Padang, ujarnya cewi

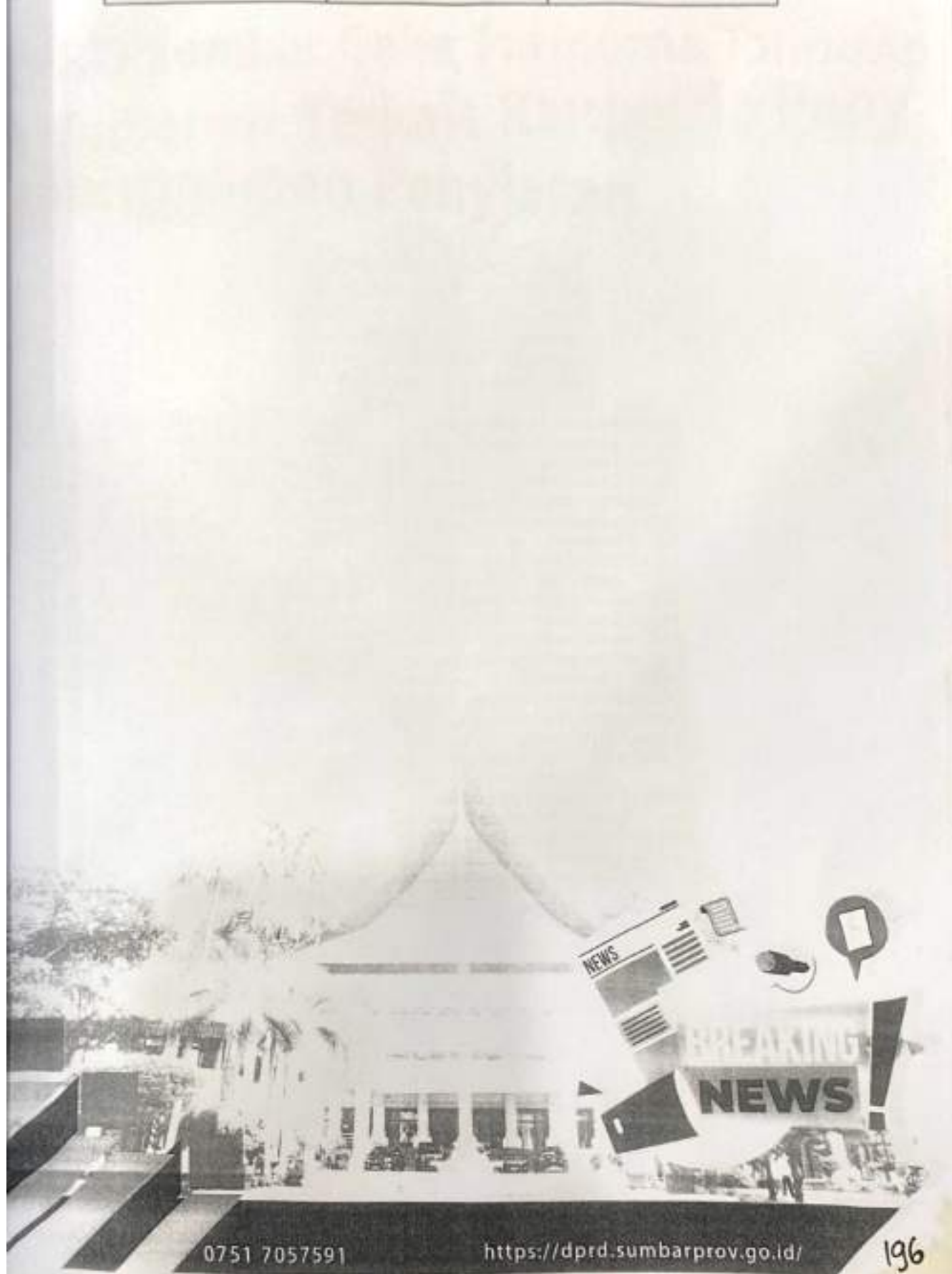




SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN



0751 7057591

<https://dprd.sumbarprov.go.id/>

196



KORAN	HADITANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	ABTU, 13 JULI 2024	6

DPRD Sumbar Gelar Paripurna Tanggapan Gubernur Terkait Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran

DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Paripurna penyampaian tanggapan gubernur tentang rancangan peraturan daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Penyiaran, baru-baru ini di ruang sidang utama DPRD Sumbar.

Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib dan didampingi wakil lainnya seperti Irsyad Syafar dan Indra Dt Rajo Lelo. Tidak hanya itu, sekretaris DPRD Sumbar Rafliis juga hadir bersama anggota dewan lainnya. Sementara dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dihadiri oleh Wakil Gubernur Audy Joinaldy.

Terkait Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib saat memimpin paripurna mengatakan, pelaksanaan penyiaran daerah mesti dipantau sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti dalam Undang-Undang (UU) nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal.

Dalam hal ini tentunya harus memiliki peluang komunikasi dan informasi yang menawarkan berbagai pesan berupa gerakan audio visual dan memiliki kemampuan mengembangkan manusia dan lingkungan sosialnya.

"Era globalisasi memberikan implikasi kepada sarana komunikasi yang semakin modern, namun disisi lain hal ini mesti diimbangi dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efektifitas pembangunan pada tingkat nasional dan daerah serta memiliki dampak nyata pada kesejahteraan untuk masyarakat," katanya.

Dia menyebut, setiap wilayah memiliki potensi masing-masing yang harus dikembangkan. Didalamnya termasuk nilai asal usul kebudayaan serta beraneka ragam kreatifitas wilayah Sumbar amat penting sebagai asset pembangunan.

Tentunya menjadi tugas bersama seluruh elemen untuk berupaya keras menggali dan mengembangkan keunggulan, sebagai identitas kearifan lokal yang menjadi dasar kebijakan dan pelaksanaan program serta kegiatan penyiaran.

Dia mengungkapkan, dalam tanggapan yang disampaikan oleh Gubernur cukup banyak catatan dan masukan dan pertanyaan terhadap Ranperda prakarsa DPRD Sumbar, tentunya perlu menjadi perhatian dari tim pembahas.

"Catatan yang disampaikan pada dasarnya usulan perbaikan dan penyempurnaan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi," katanya.

Sementara itu Wakil Gubernur Audy Joinaldy mengatakan sepakat tentang perlunya alokasi jam siaran dan sudah diatur dalam draf. Dengan Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran, nantinya lembaga siaran wajib menyiarkan siaran lokal dan alokasi jam siarannya. Untuk itu tentunya mereka juga harus membuat program lokal.

Dia berharap pemerintah daerah bisa membuat program yang berisi tentang budaya promosi wisata dan pendidikan.

Dalam muatan Ranperda mengenai jam tayang sudah diatur dan juga peran serta masyarakat. Nantinya mekanisme prosedur keberatan dari masyarakat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur (Pergub). (*)



KLIPING BERITA

WAKIL Gubernur Sumbar, Rudy Juhandy menyerahkan penghargaan Gubernur terkait Perda Penyaluran kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Sudi.



Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Sudi menerima penghargaan.



KLIPING BERITA

ANGGOTA DPRD Sumbang menghadiri rapat paripurna



PIMPINAN OPD di Lingkungan Pemprov Sumbang mengikuti rapat paripurna





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	JENIN, 15 JULI 2024	7

TERKAIT PSU DPD RI DAPIL SUMBAR

Nakil Ketua DPRD Sumbar Dorong Peningkatan Penyelenggaraan Pemilu

WAKIL Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Suwirpen Sulb, berharap penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Sumbar bisa lebih baik ke depannya. Dengan pelaksanaan yang baik, akan memberikan banyak dampak positif, antara lain efektivitas penggunaan anggaran hingga peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

Suwirpen mengungkapkan hal tersebut saat menyalurkan hak pilihnya pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sabtu (13/7), di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nomor 18, Marapalam Indah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.

"Dalam pelaksanaan PSU calon DPD RI, saya merasa penurunannya animo masyarakat untuk memilih dan datang ke TPS. Semoga dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) pada 27 November mendatang, pihak penyelenggara dapat bekerja lebih baik lagi," kata Suwirpen usai menyalurkan hak pilih di TPS 18 Marapalam.

Dia menambahkan bahwa penurunan animo masyarakat datang ke TPS harus dijadikan pelajaran dari bahan evaluasi untuk Pemilu yang lebih baik di masa depan.

Dia sebutkan, anggaran PSU Dapil Sumbar dialokasikan oleh negara sekitar Rp250 miliar. Dengan kondisi saat ini, kemungkinan pemenang PSU memiliki jumlah suara yang rendah, berbeda dengan sebelumnya.

"Sebelum PSU DPD RI, pemenang mampu meraih sekitar 590 ribu suara. Namun, saat ini kemungkinan pemenang hanya akan meraih sekitar 150 ribu suara. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak," ungkapnya.

Suwirpen menegaskan bahwa pelaksanaan PSU di Marapalam Indah berjalan lancar dan tertib, meskipun animo masyarakat menurun.

Dia berharap agar setelah PSU DPD RI ini tidak ada masalah lagi, sehingga nantinya para senator yang mewakili Sumbar di pusat dapat bekerja dengan fokus dan maksimal untuk daerah.

Suwirpen sendiri datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilih pada pukul 8.24 WIB. Saat pemungutan suara di TPS tersebut, belum banyak yang datang, bahkan informasinya hingga waktu pemungutan suara selesai tetap sedikit. Menurut data terakhir, dari 299 Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya 67 orang yang datang ke TPS tersebut untuk mengikuti PSU. "Pihaknya tetap

berharap agar PSU bisa sukses dan tidak menimbulkan gesekan sosial," tambahnya.

Suwirpen Sulb menambahkan bahwa apapun hasil yang didapatkan dari PSU harus diterima dengan lapang dada, meskipun tidak sesuai dengan harapan.

Dia juga mengajak untuk tetap menjaga kekompatan di lingkungan, meskipun ada perbedaan pandangan dalam memilih calon. Menurutnya, terpecah belah dalam kehidupan sosial dapat melemahkan masyarakat Sumbar. "Apolah hasilnya adalah kehendak yang maha kuasa," katanya.

Dia mengimbau agar masyarakat bersabar menunggu hasil resmi PSU dari KPU, dan menghindari menyebarkan berita yang tidak benar atau merugikan orang lain. Adu domba dapat menyebabkan perpecahan, terutama dalam kondisi seperti saat ini.

Sebelumnya, pelaksanaan PSU di Sumbar berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang memerintahkan KPU untuk melaksanakan PSU calon anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Sumbar. Putusan MK juga mengharuskan KPU mengikutsertakan Iman Gusman sebagai peserta. (*)





KLIPING BERITA

KORAN



WAKIL Ketua DPRD Sumbas, Suwirpen Sub bersama Sekwan dan jajaran Sekretariat DPRD Sumbas



WAKIL Ketua DPRD Sumbas, Suwirpen Sub bersama Irajod Syofar



WAKIL Ketua DPRD Sumbas, Suwirpen Sub rapat bersama stakeholder terkait



WAKIL Ketua DPRD Sumbas, Suwirpen Sub menerima penghargaan hak pilihnya





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SENIN, 15 JULI 2024	2

DPRD Sumbar Terima Kunjungan Kerja DPRD Toba

PADANG, KP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menerima kunjungan kerja dari Komisi K DPRD Kabupaten Toba, Sumatera Utara, di ruangan khusus 1 gedung DPRD Sumbar, Jumat lalu (12/7). Kunjungan ini bertujuan mempelajari sektor keuangan yang menjadi tanggung jawab Komisi C DPRD Toba.

Kedatangan delegasi DPRD Toba disambut Sekretaris Dewan (Sekwan) Rafis dan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Zardi Syahriz. Ketua Komisi C DPRD Toba, Sabaruddin Tambunan menjelaskan, komisinya memiliki fungsi dan tanggung jawab mendukung pemerintahan Kabupaten Toba agar sektor keuangan daerah kuat. Mereka juga bertugas mengawasi upaya Pemkab Toba dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kami ingin mengetahui langkah-langkah yang dilakukan DPRD Sumbar untuk memperkuat sektor keuangan di provinsi ini," kata Sabaruddin.

Menanggapi hal itu, Sekwan Rafis menjelaskan, komisi yang membidangi sektor keuangan di DPRD Sumbar adalah Komisi II. Komisi ini aktif

melaksanakan pengawasan dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. "Komisi II melaksanakan berbagai rapat kerja dengan OPD dan stakeholder untuk membahas sektor keuangan, termasuk realisasi PAD, potensi pendapatan, dan deviden dari BUMD serta aset daerah," ujar Rafis.

Selain rapat kerja, lanjutnya, Komisi II DPRD Sumbar juga aktif melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan kunjungan kerja untuk mempelajari kesuksesan daerah lain dalam mengoptimalkan sektor keuangan. Misalnya, mereka pernah melakukan kunjungan kerja untuk mempelajari Bank Jabar guna meningkatkan kontribusi Bank Nagari, bank milik Sumbar, terhadap pendapatan daerah.

"Baru-baru ini, DPRD Sumbar juga menyelesaikan kerja Panitia Khusus (Pansus) terkait pengawasan kerjasama pengelolaan aset Pemprov dengan PT Grahama Citra Wisata. Tujuan Pansus ini adalah mengoptimalkan aset daerah untuk menunjang program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat," kata Sekwan Rafis. (fal)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG-B-15	Rabu, 17 Juli 2024 (11 Muharram 1446 H)	15

KUPA-PPAS Tahun 2024 Mulai Dibahas

Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memulai pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran - plafon prioritas anggaran sementara (KUPA-PPAS) Tahun 2024.

Pembahasan dimulai pasca telah telah diserahkan nota pengantar rancangan peraturan daerah (ranperda) perubahan KUPA-PPAS Tahun 2024, Senin (15/7).

Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat rapat paripurna tersebut mengatakan terkait KUPA-PPAS Tahun 2024, DPRD menyoroti realisasi anggaran semester pertama tahun 2024.

Menurutnya, realisasi pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah (PAD) baru sebesar 38,94 persen dan realisasi belanja daerah baru sebesar 30,31 persen. SILPA tahun 2023 yang direncanakan untuk menutup deficit APBD 2024 juga tidak tercapai.

Dia menegaskan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, dan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan serta sebab lainnya.

"Memperhatikan laporan realisasi anggaran serta keadaan tersebut maka perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan Kembali dengan perkembangan yang terjadi," katanya.

Dia menambahkan, melihat perkembangan makro ekonomi daerah, SILPA APBD tahun 2023 serta realisasi anggaran semester pertama tahun 2024 terlihat bahwa kondisi keuangan daerah pada perubahan

APBD tahun 2024 tidak mengembirakan. Kondisi itu menyebabkan sulit untuk meningkatkan program, kegiatan dan alokasi anggaran dalam rangka percepatan pencapaian target kinerja RPJMD, jika tidak mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah.

"Hal ini disebabkan cukup banyak beban yang harus dikomir dalam perubahan APBD 2024, seperti pembayaran sisa bagi hasil pajak kabupaten/kota, pembayaran kegiatan tahun 2023 yang penyelesaiannya baru dapat dilakukan di tahun 2024 serta tidak mencukupinya SILPA untuk menutup deficit awal APBD 2024," ujar Supardi.

Supardi juga mengingatkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) dan Pilkada di kabupaten/kota yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang juga akan berdampak kepada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Namun demikian, kondisi tersebut tetap harus kita hadapi dengan sikap optimis, melakukan inovasi dan meningkatkan kinerja pengelolaan APBD, baik peningkatan pendapatan daerah, penggunaan belanja yang lebih efektif, efisien serta tepat sasaran," tegasnya.

Saat rapat paripurna tersebut, Wakil Gubernur Sumbar,

Audy Jomally menyampaikan, pengajuan perubahan KUA PPAS tahun 2024 didasari pada beberapa kondisi dan perkembangan yang terjadi serta perubahan asumsi perekonomian.

Menyikapi perkembangan tersebut, Pemerintah Provinsi telah menyusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi dasar bagi dilakukannya perubahan terhadap KUA PPAS.

Audy menjelaskan, disamping perubahan asumsi perekonomian, perubahan perencanaan dan penganggaran juga didasari oleh keadaan aktual yang telah terjadi sejak awal tahun sampai dengan akhir semester pertama tahun 2024. Keadaan aktual tersebut antara lain peristiwa bencana alam, sampai dengan terdapatnya hal yang bersifat pengatur dari pemerintah pusat, dinamika administrasi dan hasil audit BPK atas LKPD tahun 2023.

"Perlu menyesuaikan kebijakan umum anggaran menyikapi hal-hal yang telah terjadi dalam semester pertama tahun 2024," kata Audy.

Kemudian, perubahan juga disebabkan oleh kekurangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2023 yang dijadikan penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2024. Dia menyebutkan, dari hasil pemeriksaan BPK SILPA tahun

2023 adalah sebesar Rp180,4 miliar, sedangkan dalam APBD tahun 2024 diharapkan sebesar Rp251,4 miliar sehingga terdapat kekurangan penerimaan pembiayaan sebanyak Rp70,9 miliar lebih.

Selanjutnya, terjadinya bencana alam juga menjadi penyebab dilakukannya perubahan KUA PPAS. Beberapa bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2024 antara lain erupsi Gunung Merapi, longsor dan rusaknya tempat pembuangan sampah di Payakumbuh, banjir bandang di beberapa kabupaten dan kota serta banjir lahar dingin Gunung Merapi.

"Berikutnya juga karena adanya pengaturan dari pemerintah pusat yang memerlukan pergeseran dan perubahan anggaran, serta adanya pergeseran dan perubahan anggaran OPD dan kewajiban untuk menganggarkan Kembali DAK dan sebagainya. Ini beberapa alasan dilakukannya perubahan KUA PPAS tahun 2024," kata Audy.

Dalam rancangan perubahan KUA PPAS tahun 2024, pendapatan daerah direncanakan bertambah minimal sebanyak Rp2,25 miliar lebih menjadi Rp6,58 triliun. Kemudian belanja daerah juga bertambah dari Rp6,81 triliun pada APBD awal menjadi sebesar Rp7,03 triliun.

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



0751 7057591

<https://dprd.sumbarprov.go.id/>

204



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	RABU, 17 JULI 2024 10 Muharam 1446 H	16

PERUBAHAN KUA-PPAS APBD 2024 DISAMPAIKAN DPRD Sumbang Dorong Pemprom Berinovasi

PADANG, HALUAN - Pemerintah Provinsi (Pemprom) Sumbang sampaikan nota pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024 kepada DPRD Sumbang.

Dokumen Perubahan KUA-PPAS 2024 diserahkan oleh Wakil Gubernur Sumbang, Audy Joinaldy kepada Ketua DPRD Sumbang, Supardi dalam rapat paripurna DPRD yang digelar, Senin (15/7).

Dalam komposisi Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) 2024 nanti, cukup banyak pembiayaan daerah yang harus dipenuhi. Diantaranya pembayaran sisa bagi hasil pajak ke kabupaten/kota hingga alokasi anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Hal itu diungkapkan Ketua

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbang, Supardi saat memimpin jalannya rapat paripurna tersebut.

Ia menyampaikan, adapun melihat pada perkembangan makro ekonomi daerah serta realisasi anggaran semester pertama tahun 2024, menggambarkan kondisi keuangan daerah pada Perubahan APBD 2024 tidak mengembirakan, sehingga sulit untuk meningkatkan program dalam pencapaian target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbang. Oleh sebab itu pemetintah daerah harus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Peningkatan PAD harus diupayakan, mengingat cukup banyak beban anggaran yang harus di akomodir, diantaranya pembayaran sisa bagi hasil pajak ke kabupaten/kota,

Pembayaran kegiatan tahun 2023 yang penyelesaiannya baru dilakukan pada tahun 2024, serta tidak mencukupinya Sisa Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun lalu untuk menutup defisit awal APBD 2024," katanya.

Disamping itu, pada 27 November 2024, Sumbang akan melaksanakan pilkada serentak memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati/wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Melihat kondisi itu, tentu akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Kondisi ini harus dihadapi dengan sikap optimis serta melakukan inovasi, semakin meningkatkan kinerja dalam pengelolaan APBD, baik melalui peningkatan pendapatan daerah, penggunaan belanja serta mengedepankan efektivitas dan efisiensi," katanya.

Dari laporan realisasi anggaran pada semester satu 2024, realisasi pendapatan daerah dari PAD baru sebesar 38,94 persen dan realisasi belanja baru sebesar 30,31 persen, sementara SILPA dari APBD 2023 yang direncanakan untuk menutup defisit APBD 2024, juga tidak tercapai.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbang, Audy Joinaldy mengatakan, memenuhi amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah, Pemprom Sumbang menyusun rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

"Kami menyadari KUPA-PPAS Tahun 2024 yang disusun belumlah sepenuhnya menjawab seluruh urusan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Namun dengan memperhatikan perubahan RKPD 2024 dan kapasitas keuangan daerah, penyusunan KUPA-PPAS 2024 diupayakan dengan maksimal, dan diharapkan mengakomodir aspirasi masyarakat," tukasnya. (adv)



AUDY JOINALDY





KORAN	HARI/TANGGAL



Penyerahan rancangan Peraturan KUA-PPAS 2024 oleh Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joliansidy kepada Ketua DPRD Sumbar, Supardi dalam rapat paripurna yang digelar DPRD



Berfoto bersama



Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat memimpin jalannya rapat paripurna



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	RABU 17 JULI 2024	2

Suwirpen Suib: Jangan Ragu Laporkan Kasus Kekerasan terhadap Anak

Padang, Padak—Wakil Ketua DPRD Sumbang Suwirpen Suib prihatin terhadap beberapa kasus kekerasan yang menimpa anak-anak di Sumbang. Salah satunya kasus penganiayaan terhadap anak 13 bulan hingga meninggal oleh bapak tiri di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar). Keprihatinan tersebut diungkapkan Suwirpen saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Berbasis Masyarakat Angkatan VII di salah satu hotel di Kota Padang, Selasa (16/7).

"Kasus kekerasan terhadap anak 13 bulan yang meninggal dunia dianiaya oleh bapak tirinya, tengah menjadi sorotan masyarakat Sumbang. Ke depan kasus serupa jangan sampai terulang, seluruh pihak harus mengawasi untuk mencegah kekerasan terhadap anak," katanya.

Suwirpen yang juga politisi Partai Demokrat ini



SAMPAIKAN IMBAUAN: Wakil Ketua DPRD Sumbang Suwirpen Suib menyoroti kasus kekerasan anak yang terjadi belakangan ini dalam Bimtek Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Berbasis Masyarakat Angkatan VII di salah satu hotel di Kota Padang, Selasa (16/7).

mengimbau masyarakat jangan ragu untuk melapor kepada pihak berwenang ketika ada kasus kekerasan yang menimpa anak-anak, salah satunya DP3AP2KB. Jika tidak ada yang melaporkan siapa yang mengetahui. Apakah harus menunggu korban kekerasan meninggal dunia

dahulu?

"Kekerasan terhadap anak banyak terjadi di Sumbang, namun banyak yang memilih untuk tidak mengungkapkannya. Mungkin salah satu faktornya adalah tempat kejadian pada lingkungan keluarga, sehingga banyak masyarakat acuh. Padahal itu

harus dilaporkan untuk menyelamatkan perkembangan anak," katanya.

Salah satu fenomena yang tergolong kekerasan terhadap anak lainnya adalah banyaknya eksploitasi anak pada lampu merah yang dipaksa bekerja hingga belasan jam. Tidak hanya kekerasan yang menyebabkan keprihatinan, eksploitasi anak yang menyebabkan rasa teraniaya juga harus menjadi sorotan.

"Banyak anak-anak dibawa untuk meminta sedekah di persimpangan jalan hingga lampu merah, mereka berpuasa dan berpuasa setiap hari. Bahkan ada yang sampai sakit dan meninggal dunia," katanya.

Dia mengatakan perlindungan anak dari kekerasan merupakan tanggungjawab bersama, seluruh unsur harus terlibat untuk melindungi agar angkanya tidak terus meningkat setiap tahun. (rel/cip)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG		//
RABU, 17 JULI 2024		

fenomena Kasus Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Supardi: Karena Hilangnya Kepe- kaan Kita

PAYAKUMBUH, METRO-

Kebias DPRD Sumatera Barat, Supardi, menyebut munculnya gejala sosial di tengah-tengah masyarakat seperti kemiskinan ekstrem, stunting, LGBT, Narkoba, kenakalan remaja dan busung lapar, karena hilangnya rasa peduli atau kepekaan dari individu di masyarakat akhir-akhir ini.

"Kenapa akhir-akhir ini ada sebutan stunting, kemiskinan ekstrem, LGBT, Narkoba, kenakalan remaja dan busung lapar, karena sudah hilangnya rasa kepekaan kita," ungkap Supardi, saat membuka Bimtek pertemuan pilar-pilar sosial Kota Payakumbuh angkatan IX di salah satu hotel di Kota Bukittinggi, Senin (15/7).

Pada kegiatan yang berlangsung mulai 15-17 Juli 2024 itu, disampaikan Supardi, harusnya persoalan sosial itu di ranah minang tidak perlu terjadi. Karena masyarakat minang memiliki falsafah anak dipangku, kemanakan dibimbing, urang kampoang dipatenggang-

kan. Dirumah-rumah kadang orang minang dulu, ada yang namanya rangkiang, sebagai lumbung pangan. Sehingga anak kemanakan orang minang tidak kekurangan soal

pangan.

"Ketika ada ibu-ibu yang kelaparan, kita anggap itu bukan persoalan kita. Ketika kepekaan ini kita anggap biasa, maka lambat laun akan biasa

saja kita lihat dan rasakan. Ada masyarakat kita di ranah Minang yang sulit beli beras hari ini, halusnya ini tidak terjadi karena kita punya rumah gadang. Maka harusnya di

ranah Minang tidak ada yang namanya stunting, busung lapar, kemiskinan ekstrem," ungkap Supardi.

Dia juga mengurai soal data HIV/AIDS dan LGBT di Payakumbuh. Kemu-

dian soal pengguna narkoba di pedesaan Payakumbuh menjadi kota penyumbang tinggi karena berada di perlintasan. Selain itu angka perceraian di Payakumbuh cukup tinggi. Pengangguran dan persentase penduduk miskin juga cukup tinggi.

Untuk itu Supardi, mengajak semua elemen untuk berkolaborasi dalam menangani masalah sosial ini, termasuk harus ada rasa peduli atau peka terhadap warga sekitar tempat tinggal masing-masing. Bila rasa peka ini hilang, rasa tolong menolong tidak ada lagi, maka persoalan sosial ini akan semakin kompleks.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar, Syaifulah, diwakili Rumainur, menyebut dalam menangani masalah sosial yang akhir-akhir ini sangat kompleks, perlu sinergi dan kolaborasi semua elemen termasuk masyarakat. Dia berharap dengan adanya Bimtek bagi pilar-pilar sosial ini dapat meningkatkan SDM dalam menangani masalah sosial.

"Melalui kegiatan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam menggerakkan masyarakat di lingkungan masing-masing. Kemudian perlu koordinasi diantara pilar-pilar sosial. Dan saat ini ada 88 peserta, kita berharap ikuti dengan baik dan sungguh-sungguh. Dan kita ucapkan terimakasih kepada bapak Supardi," sebutnya.

Pada kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Sumbar ini, selain diikuti 88 orang peserta juga menghadirkan narasumber dari Widyaiswara BBPPKS Padang, Yazfinedi dengan tema 'Urgensi kolaborasi dalam penanganan permasalahan sosial'. Kemudian Dr. Agus Widiatmo, dengan tema 'Peran dan kontribusi pilar sosial dalam penyelenggaraan kesos. Kemudian juga menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial Kota Payakumbuh, yang disampaikan Kabid Sosial, Tuti Erlina dan Mellyq Novira, yang merupakan Direktur SMART Education Training Consulting, (tuss)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

BIMBINGAN TEKNIK —Ketua DPRD Sumbang, Supriadi membuka sesi diskusi menjadi narasumber dalam bentuk pertemuan pilar pilar sosial Kota Payakumbuh angkatan IX.



AMAN



0751 7057591

<https://dprd.sumbangprov.go.id/>

209



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG		3
RABU, 17 JULI 2024		



Pansus IV DPRD Jambi Kunjungi DPRD Sumbar Pelajari Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok

PADANG, METRO

Pimpinan dan Anggota Pansus IV DPRD Jambi melakukan Studi Banding ke DPRD Sumatera Barat guna mempelajari Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang telah ditetapkan di Sumatera Barat. Senin (15/7).

Kunjungan ini disambut Komisi V DPRD Sumatera Barat Hardinalis Kobal dan Dinas Kesehatan Sumatera Barat. Ketua Pansus IV DPRD Jambi Hamdani menyampaikan, kulturalisasi kawasan tanpa rokok yang ada di provinsi Sumbar menarik untuk menjadi acuan di provinsi Jambi.

"Karena Sumbar sudah merampungkan Perda KTR sejak tahun 2013 lalu, sebagai acuan dan study tiru bagi Provinsi Jambi sangatlah kami harapkan. Bukan Sumbar saja untuk sampel studi. Ajar ini provinsi Palembang juga kami lakukan kunjungan juga," kata Hamdani.

Hardinalis Kobal menyampaikan, untuk perda KTR diberlakukan aturan sesuai dengan tertuang pada Perda tahun 2012 dan aturan Menteri Kesehatan tentang bahaya rokok dan lingkungan.

Perda KTR merupakan aturan kawasan tanpa rokok sebagai perlindungan masyarakat terhadap asap rokok, karena kebiasaan merokok tidak baik terutama kepada anak-anak usia remaja, orang tua dan wanita hamil.

Biro hukum pemprov Sumbar Werry menyampaikan, memberlakukan kawasan tanpa rokok sangat susah, namun Pemprov Sumbar memberlakukan batasan waktu dan kawasan merokok agar lingkungan tidak terganggu.

Menurut biro hukum, aturan KTR diberlakukan ditempat umum, kawasan sekolah, tempat anak-anak dan balita serta saat bayi dalam kandungan. (hsb)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	RABU, 17 JULI 2024	6

WAKIL KETUA DPRD SUMBAR SUWIRPEN SUIB:

Hentikan Kekerasan Terhadap Anak, Masyarakat Harus Berani Melapor

WAKIL Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Suwirpen Suib, mengungkapkan keprihatinannya terhadap beberapa kasus kekerasan yang menimpa anak-anak di Sumbar. Salah satunya adalah kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian seorang anak berusia 13 bulan oleh bapak tirinya di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar).

Suwirpen menyoroti kasus tersebut saat membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Berbasis Masyarakat Angkatan VII yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sumbar di salah satu hotel di Kota Padang, Selasa (16/7).

"Kasus kekerasan terhadap anak yang berusia 13 bulan yang meninggal dunia akibat dianiaya oleh bapak tirinya, tengah menjadi perhatian masyarakat Sumbar. Kami berharap agar ke depannya kasus serupa tidak terulang, dan semua pihak harus bersama-sama mengawasi untuk mencegah kekerasan terhadap anak," ujarnya.

Suwirpen, yang juga politisi Demokrat, mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor kepada pihak berwenang seperti DP3AP2KB ketika mengetahui adanya kasus kekerasan terhadap anak.

Dia juga menyatakan keprihatinannya terhadap fakta bahwa banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak dilaporkan, mungkin karena faktor lingkungan keluarga yang membuat masyarakat enggan untuk mengungkapkannya.

Selain kekerasan fisik, Suwirpen juga menyoroti eksploitasi anak di lampu merah, di mana anak-anak dipaksa untuk bekerja berjam-jam. Hal ini juga menjadi salah satu sorotan serius karena mengalihkan ek-

splotasi dan ketidakadilan terhadap anak-anak.

Suwirpen menegaskan bahwa perlindungan anak dan segala bentuk kekerasan adalah tanggung jawab bersama, dan semua pihak harus terlibat aktif untuk melindungi anak-anak agar angka kekerasan terhadap mereka dapat ditekan.

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan

Anak DP3AP2KB Provinsi Sumbar, Rosmadeli SKM M Biomed, menambahkan bahwa kekerasan terhadap anak memiliki dampak yang sangat negatif, tidak hanya terhadap korban langsung tetapi juga terhadap proses tumbuh kembang anak di dalam keluarga. Dia menekankan pentingnya penegakan hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, karena itu

adalah urusan hukum yang harus diselesaikan melalui pengadilan. "Kasus kekerasan yang menimpa anak terdapat dari berbagai sisi, seperti eksploitasi seksual terhadap anak, penganiayaan orang-orang terdekat, eksploitasi anak, penganiayaan serta pembunuhan terhadap anak terhadap dilakukan orang tua," ungkapnya. (*)





KLIPING BERITA

KOR	MAN
-----	-----



WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Sub menyampikan arahan



PESERTA bintek upaya pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis masyarakat



WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Sub menyampaikan sambutan.



WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Sub bersama peserta bintek.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG		4
RABU, 17 JULI 2024		

ETUA DPRD SUMBAR SUPARDI:

Payakumbuh Menyimpan Berbagai Persoalan Sosial

gali permasalahan sosial dan mencari jalan keluar, serta menjadi motivasi bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

Ketua DPRD Sumbar Supardi, dalam sam- bukannya sekaligus membuka bintek menga- takan, Payakumbuh meskipun kota kecil, namun menyimpan berbagai persoalan sosial.

"Kenapa di Payakumbuh banyak pilar-pilar sosial? Karena Payakumbuh menyimpan per- soal sosial yang tidak terendus oleh kita ber- sama yang nantinya bisa menjadi bom waktu," ujar politisi Partai Gerindra itu.

Supardi yang juga merupakan bakal calon kuat Walikota Payakumbuh mengatakan, kota tersebut memiliki banyak pengangguran dari kalangan berpendidikan tinggi. Menurutnya, la- pekaan masyarakat semakin hari semakin ber- kurang.

"Persoalan seperti stunting dan busung lapar dianggap masalah dinas dan bukan per- soalannya kita. Kepekaan itu lambat laun menjadi biasa. Untuk itu, dalam kegiatan ini kita juga melibatkan media agar kita semua bisa peka terhadap berbagai persoalan sosial yang ada," pungkasnya. (dst)

PAYAKUMBUH, KP - Dinas Sosial Provinsi Sumbar menggelar bimbingan tek- nis (Bimtek) pertemuan pilar-pilar sosial Kota Payakumbuh angkatan IX, di Kota Bukit tinggi selama tiga hari, 15-17 Juli 2024. Kegiatan ini bagian dari program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan dihadiri Ketua DPRD Sumbar, Supardi.

Panitia penyelenggara, M. Sampurno me- nyampaikan, bimtek bertujuan untuk menyam- pikan persepsi dalam menangani berbagai ma- salah sosial di tengah masyarakat. Menurut- nya, penanganan masalah sosial memerlukan

kerja sama dari masyarakat, terutama dari pilar- pilar sosial.

ia menambahkan, selain untuk menyama- kan persepsi dalam penanganan masalah sosial, kegiatan itu juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.

"Peserta kegiatan Bimtek angkatan IX ini mencakup puluhan orang dari Kecamatan Paya- lumbuh Barat dan Lamposi Tigo Nagari, dengan menghadirkan sejumlah narasumber. Kegiatan ini merupakan pokir Ketua DPRD Sumbar dan satu-satunya yang digelar untuk warga Paya- kumbuh," tambahnya.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Sumbar melalui Kabid Pemberdayaan Sosial, Rumalnur berharap setelah bimtek, peserta atau pilar-pi- lar sosial angkatan IX Kota Payakumbuh mampu menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, mampu mengidentifikasi beba-

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN

KETUA DPRD Sumbar Supardi menyimpulkan sambutan pada birtele pertemuan pilar-pilar sosial Kota Payakumbuh angkatan IX.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Rabu, 3 Juli 2024 (26 Zulhijah 1445 H)	16

EKAM JEJAK HIDAYAT

Perjuangkan Naiknya Tunjangan Guru Honor

Padang, Singgalang
Anggota DPRD Sumbar Komisi V Hidayat menjelaskan pentingnya memperjuangkan nasib guru honor.

Pasangan Hendri Septa di Pilkada Padang 2024 itu akan berjuang untuk kesejahteraan guru terutama guru honor di Kota Padang.

Hal tersebut disebutkannya karena nasib guru honor sering terabaikan, padahal perannya sangat dibutuhkan.

"Selama menjabat jadi anggota DPRD Sumbar, komisi V yang membidangi pendidikan, saya turut memperjuangkan



HIDAYAT

kenaikan tunjangan guru honor," ujar kader Gerindra tersebut.

Ia mengatakan dulu tunjangan guru honor hanya 25 ribu/jam. Lalu tunjangan ini naik 50 ribu/jam.

"Saya mengusulkan naik 100 ribu/jam," ujarnya. Angka tersebut, sebut Hidayat, dapat meningkatkan kualitas hidup guru honor.

Angka 100 ribu rupiah per jam juga sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumbar tahun 2022 yaitu Rp2.512.539.

Meski tidak disetujui 100

ribu/jam, lanjut Hidayat, kabar baiknya, tunjangan guru honorer naik menjadi 70 ribu/jam. Hal itu sudah termuat dalam APBD Sumbar sejak 2023 lalu.

Hidayat mengatakan akan terus memperjuangkan nasib guru honorer nantinya, jika dipercaya di Kota Padang. Baginya kebijakan pemerintah daerah berperan penting untuk pro pada pendidikan dengan menaikkan upah guru honor.

Sebab, Hidayat yakin, kesejahteraan guru akan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan di masa depan.

(009)

Perjuangkan Naiknya Tunjangan Guru Honor

Padang, Singgalang

Anggota DPRD Sumbar Komisi V Hidayat menjelaskan pentingnya memperjuangkan nasib guru honor.

Pasangan Hendri Septa di Pilkada Padang 2024 itu akan berjuang untuk kesejahteraan guru terutama guru honor di Kota Padang.

Hal tersebut disebutkannya karena nasib guru honor sering terabaikan, padahal perannya sangat dibutuhkan.

"Selama menjabat jadi anggota DPRD Sumbar, komisi V yang membidangi pendidikan, saya turut memperjuangkan



HIDAYAT

kenaikan tunjangan guru honor," ujar kader Gerindra tersebut.

Ia mengatakan dulu tunjangan guru honor hanya 25 ribu/jam. Lalu tunjangan ini naik 50 ribu/jam.

"Saya mengusulkan naik 100 ribu/jam," ujarnya. Angka tersebut, sebut Hidayat, dapat meningkatkan kualitas hidup guru honor.

Angka 100 ribu rupiah per jam juga sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumbar tahun 2022 yaitu Rp2.512.539.

Meski tidak disetujui 100

ribu/jam, lanjut Hidayat, kabar baiknya, tunjangan guru honorer naik menjadi 70 ribu/jam. Hal itu sudah termuat dalam APBD Sumbar sejak 2023 lalu.

Hidayat mengatakan akan terus memperjuangkan nasib guru honorer nantinya, jika dipercaya di Kota Padang. Baginya kebijakan pemerintah daerah berperan penting untuk pro pada pendidikan dengan menaikkan upah guru honor.

Sebab, Hidayat yakin, kesejahteraan guru akan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan di masa depan.

(009)





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG		3
RABU, 3 JULI 2024		



di BIM—Jemaah Haji Kloter 8 Debarkasi Padang tiba di BIM Padang Parلمان pukul 06.35 Wib dengan Pesawat Garuda Indonesia Boeing 777 Seri 300 ER nomor pengan GA3408 dari Bandara Internasional Mohammad bin Abdul Aziz Madinah, Selasa (2/7).

Jemaah Haji Kloter 8 Tiba dengan Selamat

DANG,METRO

Jemaah Haji Kloter 8 De-
kasi Padang tiba di Ban-
da Internasional Mirang-
sa (BIM) Padang Parla-
a pukul 06.35 Wib dengan
awat Garuda Indonesia
ang 777 Seri 300 ER nomor
erhangan GA3408 dari
ndara Internasional Mo-
mad bin Abdul Aziz Ma-
ah, Selasa (2/7).
Bombongan berjumlah
urang, terdiri dari 388
ah dan 5 orang petu-
"Alhamdulillah kloter

8 tiba di BIM dengan sela-
mat, jemaah berasal dari
Kabupaten Pasaman Barat
330 orang dan Kota Padang
54 orang" ujar H. Ramza
Husmen Sekretaris PPIH
Provinsi Sumatera Barat.

"Berkat kerjasama, pe-
nyambutan jemaah secara
teknis tidak ada kendala"
kata H. Ramza yang juga
Kepala Bidang PHU ini.

Lebih lanjut H. Ramza
menyampaikan, penyam-
butan dilaksanakan secara
sederhana, namun tidak

mengurangi makna dari
sebuah penyambutan.

Menanggapi hal ini,
anggota DPRD Kabupaten
Pasaman Barat yang turut
hadir menjemput jemaah
mengapresiasi penyambu-
tan yang dilaksanakan.
"Penyambutan berjalan
lancar, meski sangat se-
derhana namun memberi-
kan makna yang menda-
lam" tutur H. Adriwidza.

Disisi lain, salah seor-
ang jemaah Kloter 8 me-
nyampaikan bahagia telah

sampai di Tanah Air, de-
ngan pelayanan yang luar
biasa dari petugas. "Baik
ketika pemberangkatan,
sampai di tanah suci, dan
hari ini sampai di tanah air,
pelayanan yang diberikan
sangat maksimal, ungkap
H. Afrizal Azhar jemaah
haji asal Pasaman Barat.

"Haji merupakan iba-
dah menguji kesabaran,
jadi apapun yang ditemui
dalam proses haji, semua-
nya ujian, terimakasih
pada petugas yang telah

memberikan pelayanan
yang luar biasa" ucapnya.

Pukul 10.28 Wib jemaah
kloter delapan diketuai
Ikhar Abdi, pembimbing
ibadah Sufrinas Alini Ali,
Dokter Cory Dwi Farwami,
Paramedis Rini Widiastuti
binti Marsal dan Meri Syah-
riyeni Syahyar diiringi lam-
baitan petugas Debarkasi
Padang bertolak ke daerah,
ditandai dengan bunyi si-
rine Patwal memandu mo-
bil jemaah sampai di dae-
rah masing-masing. (nsb)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG		3

RABU, 3 JULI 2024

DPRD Agama Kunjungi DPRD Sumbang
Sharing Informasi Pembahasan RPJPD 2025-2045

FADANG, NIITRO

Alvin, *Kembangkan Rancangan Peringkat Agama 2025*, 2045 melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat, kunjungan ini bertujuan melakukan sharing informasi tentang pentingnya informasi terhadap pembiasaan Rancangan tingkat RPPD Kabupaten Agam 2025.

Kedatangan Paman di
pembinaan Ranperda
terhadap RPPD kabupaten
Agam 2025-2045 ini diiri-
kan oleh Ketua Panitia
RPPD Provinsi Sumatera
Baru 2025-2045 Hdi Nur-
nas di ruang khusus 1
DPRD Provinsi Sumbar
Selasa (2/7).

Sebelum mengakhiri, pusat memiliki beberapa implan dari 45 indikator berpusat ke pusat, sehingga ada keanekaragaman lokal. RPPD ada keanekaragaman lokal ada kesepakatan dengan Kabupaten dan kota dan berpusat ke pusat, sehingga ada keanekaragaman lokal. RPPD ada keanekaragaman lokal ada kesepakatan dengan Kabupaten dan kota dan berpusat ke pusat, sehingga ada keanekaragaman lokal. RPPD ada keanekaragaman lokal ada kesepakatan dengan Kabupaten dan kota dan berpusat ke pusat, sehingga ada keanekaragaman lokal.

kecepatan itu sudah tidak ada, tinggal memang tidak ada. Kalau memang tidak ada, kenapa harus mengawal dan menyalurkan RP. PPD menyelaraskan itu, karena dikejar itu adalah arah kebajikan, yang positif asal Fraksi Partai Demokrat itu.

Menurut HM Nurris, pihaknya mengingatkan bab III itu adalah permasalahan dan itu harus

berkaitan erat dengan arah kehidupan dan masyarakat pokok.

"Kalau anda disitu, Sa-gallah dalam menjadikan Agama yang baik, maka akan berkembang kerdipapan," ujar HMI Nurmas.

Lanjut HMI Nurmas protes yang Volok ini, Kabupaten Agam memiliki potensi wisata, memiliki potensi ekspor unik, terutama soal

lingkungan.
"Gubernur, Sisinga bang-
tanjang Raya banyak hai-
hai lain itu adalah rawan
rawan bencana, nah kun-
tinga di Riptu," ujar PSM
Nuzrah.

Untuk diketahui, Aceh
kegiatan Riptu Provinsi
Sumatera Barat tahun
2025, 2024 dengan visi Sa-
matara Barat Mandiri, Adip-
dan Berkelanjutan bertin-

[illegible]

KUNJUNGAN KERJA—Panas Pembahasan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Pangasinan tentang Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PPD) Kabupaten Pangasinan, 2015 melanda ke DPRD Provinsi Sumatera Barat.



dakan agama dan budaya
dan mini mewujudkan
transisi dari sosial menuju
ke sumber daya manusia
berkualitas dan berdaya
saing.

rab kebanyakan I salah satunya pemenuhan pelajaran dasar, pendidikan dan perlindungan sosial, arah kebijakan II salah satunya penciptaan pertumbuhan SDN berdasarkan dan berbasis arah kebijakan III salah satunya penguatan daya saing SDN dan keberlanjutan kesejahteraan dan arah kebijakan IV salah satunya pengawasan penguasaan sumber yang unggul. Arah kebijakan selanjutnya akan dituangkan dalam 20 tahun akan datang menjadi kunci untuk mewujudkan sasaran pokok.



0751 705759



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG		3
RABU, 3 JULI 2024		



RAPAT PARIPURNA--DPRD Sumbar melakukan Rapat Paripurna tentang Penetapan Usul Prakarsa Ranperda Pelayanan Mutu Kesehatan. Senin (6/7) di gedung DPRD Sumbar.

Setiap orang Berhak Hidup Sejahtera Sumbar Butuh Perda Pengelolaan Kesehatan

PADANG, METRO

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Karena itu, negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.

Hal ini disampaikan pimpinan Rapat Paripurna DPRD Sumbar tentang Penetapan Usul Prakarsa Ranperda Pelayanan Mutu Kesehatan, Irsyad Safar, dalam pidatonya, Senin (6/7) di gedung DPRD Sumbar.

Disampaikannya, Ranperda tentang Pelayanan Mutu Kesehatan merupakan salah satu Ranperda dalam Propemperda 2024. Ranperda ini merupakan usul prakarsa yang diajukan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tergabung dalam Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat.

"Merujuk ketentuan pasal 28 huruf h UUD 1945, setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab menyediakannya," ungkap Irsyad Syafar.

Berkaitan hal tersebut, lanjutnya, Bapemperda DPRD Sumbar telah melakukan kajian, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap Ranperda tentang Pelayanan Mutu Kesehatan tersebut.

Dari hasil harmonisasi Bapemperda terhadap Ranperda Pelayanan Mutu Kesehatan yang dilakukan, diperoleh saran dan masukan bahwa judul Ranperda tentang Pelayanan Mutu Kesehatan hanya sebagian kecil menjawab masalah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan.

"Sebab itu disarankan dilakukan perubahan judul menjadi Ranperda Pengelolaan Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat yang cakupannya tentu lebih luas," jelas Irsyad Syafar.

Menurutnya, Ranperda Pengelolaan Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat dinilai lebih luas karena memuat pengelolaan kesehatan yang lebih komprehensif meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sertifikasi, Registrasi, dan Lisensi, Konsil, Kolegium & Majelis Disiplin, Perlindungan Hukum SDM Kesehatan, Perbekalan Kesehatan, Ketahanan Kefarmasian & Alat Kesehatan, Teknologi Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan, Peran Serta Masyarakat sesuai tanggung jawab Pemerintah Daerah. (hsb)

<https://uprd.sumbarprov.go.id/>

0751 7057591

219



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	RABU 3 JULI 2024	8

Beri Catatan Strategis Perda PPA 2023

SEJUMLAH catatan strategis disampaikan DPRD Sumbang sewaktu menetapkan peraturan daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) Tahun 2023 di Gedung DPRD Sumbang, Senin (1/7). Penetapan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD bersama pemerintah provinsi.

Wakil Ketua DPRD Sumbang Iryad Syafar sewaktu memimpin rapat paripurna ini menyebutkan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah sudah melakukan pembahasan terhadap Ranperda tentang PPA Sumbang Tahun 2023 pasca disampaikan pada rapat paripurna 3 Juni lalu. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

"Pembahasan ini melibatkan komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD). Lalu, dilanjutkan dengan pembahasan dan finalisasi oleh badan anggaran (Banggar) DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Pembahasan tidak hanya menyangkut pada aspek realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah atau Silpa, tetapi juga mencakup aspek efektivitas, efisien, akuntabilitas, serta capaian target kinerja program dan kegiatan yang dicapai," kata Iryad.

Nah, tambah Iryad, dari pembahasan yang telah dilakukan Banggar bersama TAPD terhadap Ranperda PPA Tahun 2023 ini, ada

beberapa poin yang menjadi catatan DPRD. Pertama, kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun 2023 belum maksimal. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan terutama PAD yang menjadi indikator kinerja utama hanya sebesar Rp 2,784 triliun atau 91,77 persen.

"Capaian ini lebih rendah dari tahun 2022. Demikian juga belanja realisasinya hanya sebesar 94,72 persen dan terdapat 55 kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp 9,1 triliun," ujarnya. Rendahnya realisasi pendapatan dan belanja daerah tersebut, akibat beberapa faktor. Diantara

antaranya, kelemahan dalam aspek perencanaan pendapatan maupun perencanaan belanja dalam bentuk program dan kegiatan, kelemahan dalam proses pelaksanaan dan pengawasan.

Pihaknya mengingatkah hasil pembahasan Ranperda PPA Tahun 2023, rekomendasi dan catatan yang diberikan DPRD, hendaknya menjadi bahan evaluasi dan bahan penyempurnaan bagi pemerintah daerah dalam pemecanan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2024 dan APBD Tahun 2025.

Politisi PKS ini mengingat ketentuan Pasal 195 ayat (1) ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD yang telah disepakati bersama kepala daerah dan DPRD, disampaikan paling lama tiga hari sejak disepakati kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dievaluasi.

"Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memenuhi batasan waktu penyampaiannya kepada Menteri Dalam Negeri, agar Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dapat segera dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri," katanya.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbang juga memberikan perhatian serius atas ranperda ini. Dia menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah belum maksimal baik pada aspek pendapatan maupun belanja daerah. Khusus pendapatan asli daerah (PAD) hanya 91,77 persen, menurut Sekretaris Dewan (Sekovan) Rafli saat membacakan laporan Banggar dalam rapat paripurna, menyebut, capaian PAD ini lebih rendah dari tahun 2022 dan kondisi kontradiksi di mana objek pajak bertambah dan pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi pen-

erimaan berkurang.

Sekprov Sumbang Hamsatri menyebutkan, batasan Banggar dan TAPD terhadap ranperda ditujukan untuk memperbaiki kelemahan ranperda. "Dari hasil pembahasan dan evaluasi yang dilaksanakan DPRD, terdapat saran, kritikan dan masukan yang konstruktif terhadap kinerja pemerintah daerah. Tentunya, kami jadikan pedoman untuk perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan," ujar dia. (*)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KLIPING

WAKIL Ketua DPRD Sumbang Insyad Syahar menandatangani kesepakatan bersama Ranperda
Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023.



SEKPROV Sumbang Hasastri mewakili gubernur menandatangani kesepakatan bersama Ranperda
Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023.



SUASANA rapat paripurna DPRD Sumbang dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 oleh pemerintah daerah dan DPRD Sumbang.





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Senin, 15 Juli 2024 (9 Muharram 1446 H)	15

DPRD SUMBAR TERIMA KUNJUNGAN DPRD TOBA

Komisi Optimalkan Pengawasan Bidang Keuangan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus aktif dan kooperatif menerima kunjungan kerja DPRD dari provinsi lain.

Pada Jumat (12/7) lalu DPRD Sumbar menerima kunjungan Komisi X DPRD Kabupaten Toba, Sumatera Utara di ruangan khusus 3 gedung DPRD Sumbar.

Kunjungan kerja Komisi C DPRD Toba tersebut untuk mempelajari tentang sektor keuangan yang menjadi bidang yang ditanggungjawab komisi tersebut.

Kedatangan mereka disambut Sekretaris Dewan (Sekwan), Rafis dan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Zardi Syahrir.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Toba, Sabaruddin Tambunan mengatakan komisi tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk mendukung pemerintahan Kabupaten agar daerah Toba bisa memiliki sektor keuangan yang kuat.

Sesuai dengan tugas

kedewan komisi C juga mengaktifkan fungsi pengawasan dalam sektor keuangan. Terutama terkait upaya Pemkab Toba memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Terkait hal tersebut, kedatangan DPRD Kabupaten Toba ingin mengetahui apa saja hal yang dilakukan komisi terkait di DPRD Sumbar untuk mendukung kuncinya sektor keuangan di Provinsi Sumbar.

Sekwan DPRD Sumbar Rafis

me mengatakan, di DPRD Sumbar, komisi yang membidangi sektor keuangan adalah komisi III.

Sesuai dengan fungsi kedewan, komisi III juga aktif melaksanakan pengawasan terkait pengawasan. Salah satunya dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Komisi melaksanakan berbagai rapat kerja dengan OPD dan stakeholder untuk membahas sektor keuangan, misal-

nya terkait realisasi PAD, potensi pendapatan, potensi deviden dari BUMD dan aset milik daerah," ujarnya.

Selain melaksanakan rapat kerja, komisi III DPRD Sumbar juga aktif melaksanakan peninjauan langsung ke lapangan. Termasuk pula melaksanakan kunjungan kerja untuk mem-

pelajari bagaimana kesuksesan daerah lain dalam mengoptimalkan sektor keuangan.

Misalnya pernah komisi III melaksanakan kunjungan kerja untuk mempelajari bank Jabar. Ini sebagai upaya untuk menyokong peningkatan sumbangsih pendapatan daerah dari bank milik Sumbar, yakni

Bank Nagari.

Selain komisi, DPRD Sumbar baru-baru ini juga menyelesaikan kerja panitia khusus (pan-sus) terkait pengawasan terhadap kerjasama pengelolaan aset pemprov dengan PT Grahas Citra Wisata. Tujuannya untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki daerah untuk menunjang program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk diketahui, pada Jumat (12/7) tersebut DPRD Sumbar juga menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar).

Kunjungan DPRD Pasbar ke DPRD Sumbar tersebut bertujuan untuk memperoleh masukan dan informasi terkait sistematis pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran, plafon penggunaan anggaran sementara (KUA-PTAS) Tahun 2024.

Kedatangan DPRD Pasbar juga disambut Sekretaris DPRD Sumbar Rafis didampingi Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Zardi Syahrir.

Dalam pertemuan dengan DPRD Pasbar tersebut, Rafis menjelaskan pasca pemprov menyerahkan pengantar raperda perubahan KUA-PPAS maka DPRD akan mulai melakukan pembahasan.

Pembahasan akan diawali dengan pembahasan komisi-komisi, yakni diantaranya rapat kerja dengan OPD terkait. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Ia mengatakan perubahan KUA-PPAS akan menjadi landasan dalam penyusunan perubahan APBD. (*)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



prd.sumbarprov.go.id/

223

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KHAZADONYO	SENIN, 15 JULI 2024 JLN. D MURWIDAM 1445 H	10

JALAN MEMBENTANGKAN PERADABAN

Fosil Tengkorak Megalithikum Dipajang di Pameran Maek

Perayaan Melayu yang meriah di Alor Gajah, Kelantan. (Ditulis oleh penulis)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN



PAMERAN Maek yang sedang berlangsung di Payakumbuh mendapat perhatian dari Ketua DPRD Sumbang Supardi yang serius memperhatikan semua yang dipajang.

NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN





KORAN

KHA7

HARI/TANGGAL

SENIN, 15 JULI 2024
SENIN, 9 MUHARRAM 1445 H

HALAMAN

5

DISKUSI INTERNASIONAL DI PAYAKUMBUH

Supardi: Cerita Tentang Peradaban Maek Masih dalam Tabir Misteri

Payakumbuh, Khazanah Ketua DPRD Sumbang Supardi, SH mengungkapkan peradaban Maek merupakan eksistensi keberadaan bagi ranah minang dan Sumatera Barat dan hingga kini cerita tentang peradaban Maek tersebut masih dalam tabir misteri dan belum terungkap.

Inspirasi peradaban Maek sejak tahun 2022 diskusikan dengan para tokoh-tokoh dan dosen, dan masyarakat Maek melihat peluang dan potensi besar ini, ujar Supardi ketika membuka Pra Festival Diskusi Internasional Hasil Riset dan FGD dengan pembicara dari Mesir, Jepang dan Indonesia di Aula Ngelau Indah Balakota Payakumbuh, Minggu (14/7) hingga Selasa besok (16/7).

Kegiatan diskusi Internasional Hasil Riset merupakan rangkaian festival yang akan diselenggarakan di Nagari Maek nantinya pada tanggal 17-20 Juli 2024.

Dikatakan Supardi, para pakar peneliti dunia dan UGM telah memulai berbagai ekskavasi terhadap tengkorak yang ditemukan, namun belum menemui titik terang baik dalam DNA maupun masa usia keberadaan peradaban Maek.

Pelaksanaan festival Maek ini, kata Supardi, mendapat support banyak orang terbaik dalam upaya mengungkap keberadaan peradaban dalam bentuk acara fes-



KETUA DPRD Sumbang Supardi bersama para tokoh-tokoh, dosen dan stakeholder memukul gendang tanda dibukanya Diskusi Internasional Hasil Riset dan FGD di Aula Ngelau Indah Balakota Payakumbuh.

tival Maek ini.

"Jika ini terungkap tentunya membuka mata dunia internasional dan ini akan memberikan dampak Luak Limapuluh Kota dan Sumatera Barat akan menjadi perhatian dunia," ungkap Supardi.

Supardi menambahkan, peneliti UGM melakukan ekskavasi tengkorak Maek pada tahun 1985, dan disisi lain pusat riset BRIN juga melakukan ek-

skavasi tahun 2005 bahwa di Dagung dangung ditemukan usia Menhir pada abad 1-8 sebelum Masehi.

"Ini jelas sebelum Islam belum masuk ke Indonesia. Dan saat ini masih menunggu akhir Juli 2024 hasil carbon dating tengkorak Maek oleh labor Australia, mudah mudahan keluar, perkiraan sementara ada 4000 tahun Sebelum Masehi.

Seperti apa Maek besar zaman itu..." jelasnya.

Sementara Sekdako Payakumbuh, Rida Ananda MSi juga mengatakan, mengali sejarah maek, memberitahu dunia ada bukti sejarah Luak Limapuluh.

"Atas nama pemerintah kota menyambut kegiatan ini karena kunjungan akan meningkat di Kota Payakumbuh Payakumbuh City of Randang, siap menyambut kedatangan

para tamu festival Maek ujarnya.

Sedangkan Asril dan Dinas Kebudayaan Sumbang yang juga salah satu pengampu Mata Kuliah Budaya Minangkabau mengungkapkan, Limapuluh Kota kaya dengan peninggalan sejarah. Naga Maek kecamatan Buk Barisan merupakan aset potensi besar wisata kebudayaan dan peradaban (Murdiansyah Eko)



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KHAZ	SENIN, 15 JULI 2024 9 MUHARRAM 1445 H	2

Suwirpen: Animo Masya- rakat Menurun

SALURKAN HAK PILIHNYA SAAT PSU

Padang, Kharzanah — Wakil Ketua DPRD Sumbang Suwirpen Sub menyalurkan hak pilihnya pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Sumbang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nomor 18 Marapalam Indah Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sabtu (13/7).

Kepada wartawan yang hadir di TPS tersebut, Suwirpen merasakan adanya penurunan animo masyarakat untuk memilih dan datang lagi ke TPS dalam pelaksanaan PSU calon DPD RI tersebut.

"Kita berharap, ke depannya pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) bisa lebih baik lagi," ujarnya.

Terutama sekali, tukuknya, dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemlitukada) 27 November mendatang, pihak penyelenggara harus bekerja lebih baik lagi.

Dia sangat menyayangkan adanya penurunan animo masyarakat datang ke TPS dalam PSU ini, sehingga harus dijadikan pelajaran dan bahan evaluasi untuk penyelenggara Pemilu agar lebih baik ke depan.

Sebab, ungkapnya, anggaran PSU yang dialokasikan negara

kurang lebih sebesar Rp250 miliar. Dengan kondisi sekarang kemungkinan yang akan menang pada PSU memiliki suara rendah, tidak sama seperti yang sebelumnya.

"Sebelum PSU DPD RI menang bisa meraih suara 500 ribu, jika melihat sekarang kemungkinan pemenuh paling bisa meraih 150 ribu suara. Jadi ini harus menjadi perhatian seluruh pihak," ungkapnya.

Suwirpen mengungkapkan, pelaksanaan PSU di Marapalam Indah berjalan lancar dan tertib, hanya animo masyarakat saja yang menurun.

Diharapkan usai PSU DPD RI sekarang tidak ada masalah lagi, sehingga nantinya para senator yang menjadi perwakilan Sumbang di pusat bisa bekerja fokus dan maksimal untuk daerah.

Saat Suwirpen datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya pada pukul 8.24 WIB dan saat dia mencoblos pada TPS ini belum banyak yang datang, bahkan informasinya hingga waktu pemungutan suara selesai juga masih sedikit.

"Kita tetap berharap agar PSU ini bisa sukses dan tidak menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan sosial," harapnya. (jer/)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

WAKIL Ketua DPRD Sumbar Sunilaw Suli menyerahkan surat suaranya sebelum memasuki bilik suara menyerahkan hak pilihnya.



0751 7057591

<https://dprd.sumbarprov.go.id/>

229



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KHAZ	BENIN, 15 JULI 2024 BENIN, 9 MUHARRAM 1445 H	2

KONSULTASI SOAL PELAKSANAAN TUGAS Komisi C DPRD Kabupaten Toba Kunjungan Kerja ke DPRD Sumbar



SEKRETARIS DPRD Sumbar, Rafis (kanan) didampingi Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Toba, Sabaruddin Tambunan menyampaikan paparannya

Padang, Khazanah — Komisi C DPRD Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara kunjungan kerja ke DPRD Sumbar dalam rangkaian koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas terkait sinkronisasi program kerja DPRD

dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Kegiatan ini mengacu pada Perpres 53 tahun 2023 tentang Standar Harja Satuan Regional untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penerapan

program kerja di daerah," ujar Sekretaris DPRD Sumbar, Rafis didampingi Kabag Persidangan dan Perundang-undangan, Zardi Syahrir serta Kasubag Humas, Publikasi, Protokol dan Perpustakaan, Dahrul Idris usai

menerima rombongan Komisi C DPRD Kabupaten Toba di ruang khusus 1, Jum'at (12/7).

Dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Toba, Sabaruddin Tambunan menanyakan tentang keuangan yang menjadi tugas dan kewenangan komisi.

Sebab, menurut dia, DPRD Sumbar menjadi tujuan konsultasi karena dinilai dalam pengelolaan administrasi keuangan maupun penggunaannya sudah sangat bagus.

"Atas pertimbangan tersebut, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Toba melakukan kunjungan kerja ke DPRD Sumbar sekaligus konsultasi untuk perbaikan di DPRD kabupaten Toba," kata Sabaruddin.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPRD Sumbar Rafis dalam kesempatan tersebut mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada anggota Komisi C DPRD kabupaten Toba dan mengungkapkan, pimpinan bersama anggota DPRD Sumbar terbuka dan merasa senang dikunjungi oleh anggota dewan dari berbagai daerah.

Karena, tujuannya, selain bertukar informasi, kunjungan anggota dewan dari berbagai daerah di Indonesia ke DPRD Sumbar jelas memberikan kontribusi bagi daerah ini. (jer/)





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SABTU 10 AGUSTUS 2018	//



SUMBAR: Foto bersama Komite C DPRD Kabupaten Toba untuk kunjungan kerja ke DPRD Sumatera Barat, Kamis.

Pengelolaan Administrasi Keuangan DPRD Sumbar Dinilai Baik

Padang, Padang — Sekelompok DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Rabu (8 Agustus) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Toba untuk melihat pengelolaan administrasi keuangan DPRD Sumbar. Ketua rombongan DPRD Sumbar, H. Rudi Hartono, mengatakan, DPRD Sumbar memiliki reputasi yang baik dalam pengelolaan administrasi keuangan. Hal ini terlihat dari laporan keuangan yang rapi dan transparan. Rudi Hartono juga menyampaikan, DPRD Sumbar telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD Sumbar telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Rombongan DPRD Sumbar juga melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Toba, H. Rudi Hartono, untuk membahas pengelolaan keuangan DPRD Kabupaten Toba. Rudi Hartono mengatakan, DPRD Kabupaten Toba telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Toba telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Sekretaris DPRD Sumbar, H. Rudi Hartono, mengatakan, DPRD Sumbar telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD Sumbar telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

sebagai informasi, DPRD Sumbar telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD Sumbar telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres • SENIN • 15 JULI 2024		1

Pameran dan Diskusi Arkeologi Pra-Event Festival Maek Dibuka Upaya Mengubah Paradigma Budaya dan Pariwisata

Payakumbuh, Padang—Pameran dan diskusi "Membenarkan Maek" resmi dibuka kemarin (14/7). Pameran ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi di Gedung Gambir Fakultas Pertanian Usand, Kota Payakumbuh. Pameran ini merupakan salah satu rangkaian pra-event Festival Maek yang bakal digelar 17-20 Juli 2024 mendatang.

Pameran ini terbuka untuk umum dan dapat dikunjungi mulai pukul 15.00-16.00 WIB. Pengunjung bakal disajikan untuk pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir, hasil riset terbaru tentang peradaban



SUPARDI
Ketua DPRD Sumbar

Maek. Maek sendiri dikenal sebagai "Negeri Seribu Menhir" yang masih menyimpan misteri tentang peradaban masa lampau di Kabupaten SO Kota.

Di sana dapat melihat timeline masa-masa awal penelitian Maek dari tahun 1980-an. Pengunjung juga bakal disajikan banyak pengetahuan terbaru berkisar soal menhir dan peradaban manusia yang mendukungnya.

Beberapa bagian kerangka manusia yang berhasil di ekskavasi pada tahun 1985 dan 1986 juga diawasi untuk ditampilkan pada pameran.

• Baca Upaya...Hal 7

Upaya Mengubah Paradigma...

Sambungan dari hal. 1

Supardi saat membuka pameran menekankan pentingnya pameran ini dalam mempromosikan budaya dan pariwisata daerah. "Kita ingin jadikan Maek sebagai perubahan paradigma. Kalau hanya keindahan alam, negara lain juga punya. Kalau Sumbar bangkit dari pariwisata, yang harus bangkit itu budayanya," ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan, festival ini kalau berhasil akan membuktikan pada dunia bahwa di Sumatera Barat terdapat situs arkeologi yang bakal mengubah narasi se-

jarah. "Selama ini kita tak acuh pada cagar budaya dari peradaban kuno ini, baru setelah 40 tahun, untuk pertama kalinya Maek di pameran," ucap Supardi.

Pembukaan ini dihadiri oleh siswa-siswa SD dan SMP dari Payakumbuh. Rafi Salah seorang siswa dari SMP Negeri 01 Kota Payakumbuh, mengatakan ia sangat antusias melihat benda peninggalan sejarah ini. "Baru sekali lihat yang seperti ini, ini baru bagi saya," katanya. Rafi juga berniat dalam helat Festival Maek ini bakal pergi berkunjung ke situs-situs tempat menhir ditemukan.

Selain itu pameran ikut

dikunjungi. Dinas Kebudayaan berbagai kabupaten kota, masyarakat Maek, tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa, jurnalis, beberapa komunitas, dan warga secara umum.

Kemarin juga dilakukan diskusi soal Kebijakan Provinsi Sumatera Barat Terkait Warisan dan Pelestarian Budaya. Diskusi ini dilakukan di aula Balai Kota Payakumbuh dengan peserta dari berbagai kalangan.

Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar Jefri Arifin mengatakan bahwa potensi budaya yang ada di Sumatera Barat mesti lebih digali ke depannya. "Kita mesti merat-

wat dan menggali potensi dari semua cagar budaya dan kebudayaan yang ada di Sumbar. Itu semua mesti dijaga dan bermanfaat bagi masyarakat," ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa beberapa provinsi lain di Indonesia telah mengubah paradigma pariwisatanya. Sebut saja Bali dan Yogyakarta. Dua provinsi itu telah menggeser cara untuk menggaet wisatawan atau turis ke daerahnya dengan menonjolkan sisi budaya.

Dengan adanya kedatangan turis ini, perekonomian masyarakat yang merawat budaya dapat bergulir. Hal ini secara tidak langsung bakal



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SENIN 15 JULI 2024	9

KETUA DPRD DUKUNG PENUH FESTIVAL MAEK

Supardi: Ajang
Membuka
Misteri

PERADARAN Matak mata pelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektual, sikap, dan keterampilan siswa dalam memahami konsep, prinsip, dan prosedur peredaran darah manusia. Matakuliah ini membahas tentang peredaran darah manusia, hewan, dan tumbuhan.

Menurut dia, para pakar peneliti di dunia dan UGM telah meminali berbagai eksplorasi terhadap teknologi yang digunakan. Namun, belum semuanya terekspansi dalam DSA maupun masa setelah kemerdekaan pendidikan Maek itu.

Pelaksanaan festival Maek itu, para Supardi, mendapat support banyak orang tua, dalam upaya mengungkap keberadaannya, padahal dalam bentuk acara festival Maek itu.

"Ia ini terungkap tentunya disebabkan mata dunia internasional dan ini akan memberikan dampak besar bagi kehidupan Koe dan masyarakat luas akan motifasi pendidikan dunia," ungkap Supardi.

pendiri UGM telah lahirkan skripsi Master pada tahun 1985. Di saat lain, penerbit riset BRIN juga menerbitkan esekripsi tahun 2006 bahwa di Gunung dangung cemrukan usia Mimbar pada abad 1 - sebetuln Maabhi.

"Ini jelas sebelum Islam be luan masuk ke Indonesia. Dan saat ini masih memnggu akhira jati 2024 hasil carhon deting tengkorak Maab oleh labor Aus tralia. Mudoh mudahan keluaran pteksinan semetaria ada 4.000 tahun Sebelum Maabhi. Seperti apa mah besar zaman itu," jelas Ma.

Sekko Payakumbuh, Bida Ahanda juga mengtakan, me ngali sejarah Maab, memberitahu dunia ada bukt sejarah Usab Lupaah.

"Mas nahu petertintah kota

Kada kebudayaan Kuala Lumpur dituangkan dalam festival ini, maka masyarakat akan mengetahui dan memahami, menyaksikan City of Bandang, siap menyambut kedatangan para tamu festival Musik, ulangnya.

Kada kebudayaan Kuala Lumpur dituangkan dalam festival ini, maka masyarakat akan mengetahui dan memahami, menyaksikan City of Bandang, siap menyambut kedatangan para tamu festival Musik, ulangnya.

HASIL RISET DAN FGD



KETUA DPRD Sumbar Supardi memberi sambutan dalam diskusi internasional hasil riset dan FGD di Aula Ngelau Indah Balai Kota Payskumbuh, kemarin (14/7).





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres • SEMIN • 15 JULI 2024		2

Penyelenggaraan Pemilu Diharapkan Lebih Baik Lagi

**Suwirpen Suib
Salurkan Hak**

Pilih PSU DPD RI

Marapalam, Padang—Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Suwirpen Suib menyerahkan hak pilihnya pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sabtu (13/7) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 18 Marapalam Indah, Kecamatan Padang Timur.

Usai menyerahkan hak pilih Suwirpen berharap, pelaksanaan pemilu ke depan bisa lebih baik.

"Dalam pelaksanaan PSU calon DPD RI, saya merasakan adanya penurunan animo masyarakat untuk memilih dan datang lagi ke TPS. Semoga, dalam pilkada 27 November mendatang, pihak penyelenggara harus bekerja lebih baik lagi," kata Suwirpen.

Dia menyayangkan adanya penurunan animo masyarakat datang ke TPS, sehingga harus dijadikan pelajaran dan bahan evaluasi untuk penyelenggara pemilu agar lebih baik ke depan. Anggaran PSU yang dialokasikan memang kurang lebih sebesar Rp 250 miliar.

Dengan kondisi sekarang kemungkinan yang akan menang.

Dengan kondisi sekarang kemungkinan yang akan menang.

• Baca Penyelenggaraan... Hal 10



SALURKAN HAK PILIH Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib menyerahkan hak pilihnya pada PSU calon DPD RI, Sabtu (13/7) di TPS Nomor 18 Marapalam Indah, Kecamatan Padang Timur.

Penyelenggaraan Pemilu Diharapkan Lebih...

Sambutan dari hal 9

pada PSU memiliki suara rendah, tidak sama seperti yang sebelumnya.

"Sebelum PSU DPD RI, pemenang bisa mencapai 500 ribu. Jika melihat sekarang kemungkinan pemenang bisa mencapai 150 ribu suara. Jadi ini harus menjadi perhatian seluruh pihak," ungkapnya.

Suwirpen mengungkapkan, pelaksanaan PSU di Marapalam Indah berjalan lancar dan tertib, hanya animo masyarakat saja yang menurun. Diharapkan ke PSU DPD RI sekarang tidak ada masalah lagi, sehingga nantinya para senator yang menjadi perwakilan Sumbar di Senat bisa bekerja lebih dan maksimal untuk daerah.

Suwirpen sendiri, datang ke TPS

untuk menyerahkan hak pilih pada pukul 08.24. Saat pemungutan suara pada TPS ini belum banyak yang datang.

Bahkan informasinya, hingga waktu pemungutan suara selesai juga masih sedikit. Menurut data terakhir dari 290 DPT hanya 67 orang yang datang ke TPS tersebut untuk mengundi PSU.

Sebelumnya, pelaksanaan PSU yang dilaksanakan di Sumbar berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan KPU untuk melakukan PSU calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumbar. Dalam keputusan MK juga memerintahkan KPU mengikutsertakan imam Gusman sebagai peserta (cip).





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Khazanah	BELASA, 2 JULI 2024	8

Ranperda Pelayanan Mutu Kesehatan Diperbaiki

Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumbar Tahun 2023 Disepakati

Padang, Khazanah — Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar mengatakan, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, salah satu fungsi strategis DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah fungsi pembentukan Perda.

Berkaitan dengan itu, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda yang koordinasi oleh Bapemperda, sesuai lingkup tugasnya.

Hal tersebut dikemukakan Irsyad Syafar saat memimpin Rapat Paripurna dengan acara Penetapan Usul Prakarsa Ranperda Pelayanan Mutu Kesehatan dan Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 dihadiri Sekdaprov Sumbar Hansasi di ruang sidang utama dewan, Senin (1/7).

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjutnya, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hak DPRD dimaksud, pada awal Mei yang lalu Anggota DPRD Sumbar yang tergabung dalam Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat, mengajukan usul prakarsa terhadap Ranperda tentang Pelayanan Mutu Kesehatan yang merupakan salah satu ranperda dalam Propemperda 2024.

Sejalan dengan kerangka hukum nasional yang mengatur tentang kesehatan dan merujuk pada berbagai Undang-Undang yang relevan, terutama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta banyaknya masalah dalam Pengelolaan Kesehatan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah antara lain

tertentang, Pelayanan Primer, Pelayanan Rujukan, Kefarmasian dan Krisis Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan, Teknologi dan Informasi Kesehatan.

"Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan diajukan usul prakarsa tentang Pelayanan Mutu Kesehatan," terang Irsyad.

Berkaitan dengan hal tersebut, naskahnya, sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kajian, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap Ranperda tentang Pelayanan Mutu Kesehatan.

Dari hasil harmonisasi Bapemperda terhadap Ranperda Pelayanan Mutu Kesehatan diperoleh saran dan masukan bahwa judul Ranperda tentang Pelayanan Mutu Kesehatan lainnya sebagian kecil menjawab masalah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan oleh sebab itu disarankan dilakukan perubahan judul menjadi Ranperda Pengelolaan Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat yang cakupannya tentu lebih luas dan memuat pengelolaan kesehatan yang lebih komprehensif meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sertifikasi, Registrasi, dan Lisensi, Konsil, Kolegium & Majelis Disiplin, Perlindungan Hukum SDM Kesehatan, Perbekalan Kesehatan, Ketahanan Kefarmasian & Alat Kesehatan, Teknologi Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan, Peran Serta Masyarakat sesuai tanggung jawab Pemerintah Daerah.

"Perbaikan judul tersebut bendanya diikuti juga dengan

perbaikan Naskah Akademik serta Ruang Lingkup Ranperda yang diatur sesuai Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," ujarnya.

Karena Undang-Undang Kesehatan masih sangat baru, lanjutnya, perlu juga ditunggu Peraturan Pelaksananya yang belum keluar sehingga ranperda yang dihasilkan nantinya lebih komprehensif.

Berkaitan dengan hal tersebut saat ini Tim Penyusun Naskah Akademik dan Draft Ranperda sedang menyelesaikan perbaikan draft ranperda sesuai masukan tersebut," jelas Irsyad.

Untuk itu, katanya, Rapat Paripurna dalam rangka penetapan usul Prakarsa Ranperda Pelayanan Mutu Kesehatan belum dapat dilanjutkan pada tahap penetapan. Selanjutnya Penetapan Usul Ranperda ini perlu diagendakan kembali dalam rapat Badan Musyawarah, setelah tim penyusun Naskah

Akademik menyelesaikan perbaikan naskah akademik dan draft ranperda dimaksud.

Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 Disepakati

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan sarana evaluasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD, maka pembahasan tidak hanya menyangkut pada aspek realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah atau SILPA, akan tetapi juga mencakup aspek efektivitas, efisien, akuntabilitas serta capaian target kinerja program dan kegiatan yang dicapai.

Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran Bersama DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, secara umum dapat disampaikan bahwa kinerja pengelolaan



KLIPING BERITA

keuangan daerah pada tahun 2023, belum maksimal.

Kondisi ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan terutama PAD yang menjadi indikator kinerja utama hanya sebesar Rp2.784.774.801.212, atau 91,77 %. Realisasi ini lebih rendah dari Tahun 2022. Demikian juga dengan belanja, realisasinya hanya sebesar 94,72 % dan terdapat 35 kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp0.125.909.209.

Rendahnya realisasi pendapatan dan belanja daerah tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kelemahan dalam aspek perencanaan baik perencanaan pendapatan maupun perencanaan belanja dalam bentuk program dan kegiatan, kelemahan dalam proses pelaksanaan serta pengawasan. Permasalahan tersebut, pada umumnya merupakan permasalahan yang terus berulang dari tahun ke tahun dan tidak

ada evaluasi yang dilakukan untuk memperbaiki kelemahan tersebut.

Hasil pembahasan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 serta rekomendasi dan catatan yang diberikan oleh DPRD sebagaimana termuat nanti dalam laporan hasil pembahasan, hendaknya menjadi bahan evaluasi dan bahan penyempurnaan oleh Pemerintah Daerah dalam perencanaan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2024 dan APBD Tahun 2025.

Setelah adanya persetujuan anggota dewan yang hadir terhadap Ranperda

Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023, maka dilakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara pihak legislatif yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar dan dari pihak eksekutif oleh Sekdaprov Sumbar Hansasri.

Pada kesempatan itu Irsyad juga mengingatkan, sehubungan masa jabatan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024 akan berakhir pada tanggal 28 Agustus 2024, sesuai dengan agenda pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024, dilakukan paling lambat Minggu ke 2 (dua) bulan Agustus 2024.

Agar tidak terjadi ketertambatan dalam pembahasan dan penetapannya, maka diminta kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mempercepat penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 kepada DPRD, agar dapat segera di bahas dan disepakati bersama. (Adv)



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar didampingi Sekdaprov Sumbar Hansasri saat menandatangani nota kesepakatan



IRSYAD SYAFAR didampingi Sekretaris DPRD Sumbar Rully Iqbal bersama Sekdaprov Sumbar Hansasri saat penandatanganan nota kesepakatan



KDAPROV Sumbar Hansasri saat menandatangani nota kesepakatan



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar menandatangani nota kesepakatan



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KHAZ	SELASA, 2 JULI 2024 SELASA, 27 DZULHIJAH 1445 H	10

WAKIL KETUA DPRD SUMBAR IRSYAD SYAFAR

Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 Belum Maksimal

Padang, Khazanah - Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar mengingatkan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan sarana evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD.

Makanya, ujar Irsyad, pembahasan tidak hanya menyangkut pada aspek realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah atau SILPA, akan tetapi juga mencakup aspek efektivitas, efisien, akuntabilitas serta capaian target kinerja program dan kegiatan yang dicapai.

Demikian disampaikan Irsyad Syafar saat memimpin Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 dihadiri Sekdaprov Sumbar Hamsari di ruang sidang utama dewan, Senin (1/7).

Dikatakan, dari pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran Bersama TAPD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, secara umum dapat disampaikan bahwa

kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2023, belum maksimal.

Kondisi ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan terutama PAD yang menjadi indikator kinerja utama hanya sebesar Rp2.784.774.801.212, atau 91,77%. Realisasi ini

lebih rendah dari Tahun 2022. Demikian juga dengan belanja, realisasinya hanya sebesar 94,72% dan terdapat 55 kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp9.125.999.209.

Rendahnya realisasi pendapatan dan belanja

daerah tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kelemahan dalam aspek perencanaan baik perencanaan pendapatan maupun perencanaan belanja dalam bentuk program dan kegiatan, kelemahan dalam proses pelaksanaan ser-

ta pengawasan.

“Ternyata masalah tersebut, pada umumnya merupakan permasalahan yang terus berulang dari tahun ke tahun dan tidak ada evaluasi yang dilakukan untuk memperbaiki kelemahan tersebut,” tandasnya.

Hasil pembahasan ter-

hadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 serta rekomendasi dan catatan yang diberikan oleh DPRD sebagaimana termuat nanti dalam laporan hasil pembahasan, katanya, hendaknya menjadi bahan evaluasi dan bahan

penyempurnaan oleh Pemerintah Daerah dalam perencanaan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2024 dan APBD Tahun 2025.

Pada kesempatan itu Irsyad juga mengingatkan, sehubungan masa jabatan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024 akan berakhir pada tanggal 28 Agustus 2024, sesuai dengan agenda pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024, dilakukan paling lambat Minggu ke 2 (dua) bulan Agustus 2024.

Agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembahasan dan penetapannya, maka diminta kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mempercepat penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 kepada DPRD, agar dapat segera di bahas dan disepakati bersama. (jer/7)

BREAKING NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN

Wakil Ketua DPRD Sumbaw Hsyad Syahar didampingi Sekdaprov Sumbaw Habsari saat memimpin rapat paripurna.



0751 7057591 <https://dprd.sumbarprov.go.id/> 239



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Selasa, 2 Juli 2024 (25 Zulhijah 1445 H)	3

Kinerja Pemprov Sumbar Belum Optimal

ADANG - DPRD Sumbar menilai kinerja Pemprov Sumbar pada 2023 belum optimal. Terutama dalam pengelolaan keuangan, bahkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun lebih sedikit dari tahun 2022.

Selain sektor keuangan, kerja pemprov juga dinilai belum baik karena masih banyak target utama dalam program unggulan (progul) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (PJMD), yang belum tercapai.

Hal tersebut merupakan sedikit dari sejumlah catatan DPRD pasca telah selesainya DPRD membahas laporan tanggungjawab pelaksanaan APBD (PPA) 2023.

Pada Anggaran (Banggar) DPRD melaporkan, pengelolaan keuangan di sektor pendapatan tidak optimal karena rendahnya PAD. PAD yang merupakan kinerja utama pendapatan realisasi hanya 91 persen.

Bahkan total nilainya lebih kecil dibanding realisasi 2022. Pada 2023 ditargetkan Rp3,03 triliun, terealisasi Rp2,7 triliun.

"Ini merupakan kondisi yang kontradiksi dimana objek pajak bertambah dan pertumbuhan ekonomi meningkat tetapi penerimaan pendapatan justru berkurang," ujar Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Rafis saat membacakan laporan Banggar tersebut dalam rapat paripurna, Senin (1/7).

Rendahnya penerimaan pendapatan dinilai Banggar DPRD karena tidak optimalnya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), kurangnya inovasi dan kreatifitas serta lemahnya koordinasi dengan kabupaten/kota untuk mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

"Selain itu, kerja sama pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga belum menguntungkan pemerintah daerah," paparnya.

Banggar menilai ada kekurangan target pendapatan yang cukup besar yaitu Rp212 miliar, tetapi pada sisi lain sisa belanja juga cukup besar yaitu Rp392 miliar. "Banggar menilai ada kecenderungan Pemprov menahan belanja. Semestinya apabila target pendapatan tidak tercapai tentu sisa belanja semakin sedikit. Kondisi ini menunjukkan cukup banyak kegiatan-kegiatan yang sengaja tidak dilaksanakan agar tidak terjadi gagal bayar," sebut Rafis.

Banggar mencatat sisa belanja operasi tersisa Rp309 miliar, belanja pegawai tersisa Rp150 miliar, terutama pada Dinas Pendidikan karena belum dibayarnya tunjangan hari raya guru daerah dan tambahan penghasilan guru serta PPPK yang lebih sedikit dari formasi.

"Besarnya sisa belanja pegawai merupakan kejadian yang terus berulang setiap

tahun," papar Rafis.

Selain itu, Banggar juga mencatat pada Tahun 2023 ada 55 paket kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan anggaran total Rp9 miliar.

Termasuk juga Banggar menyusuri program dan kegiatan yang diumumkan OPD masih cenderung copy paste atau menyalin dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar mengatakan rendahnya realisasi pendapatan dan belanja daerah tersebut, disebabkan beberapa faktor, diantaranya kelemahan dalam aspek perencanaan pendapatan maupun perencanaan belanja dalam bentuk program dan kegiatan. Kelemahan dalam proses pelaksanaan serta pengawasan.

"Permasalahan tersebut, pada umumnya merupakan permasalahan yang terus berulang dari tahun ke tahun dan tidak ada evaluasi yang dilakukan untuk memperbaiki kelemahan itu," ujarnya. (401)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Selasa, 2 Juli 2024 (25 Zulhijah 1445 H)	15

DPRD Sumbar Tetapkan Perda Tentang PPA Tahun 2023

Penetapan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD bersama pemerintah provinsi. Senin (1/7) di gedung dewan setempat.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar yang memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan sesuai dengan amanat Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa dalam rangka akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, pada rapat paripurna 3 Juni lalu, Gubernur telah menyampaikan Raperda tentang PPA Sumbar Tahun 2023 pada DPRD.

DPRD bersama pemerintah daerah pun telah melakukan pembahasan, mulai dari pembahasan komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu dilanjutkan dengan pembahasan dan finalisasi oleh badan anggaran (Banggar) DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

"Pembahasan tidak hanya menyangkut pada aspek realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah atau SILPA, akan tetapi juga mencakup aspek efektivitas, efisien, akuntabilitas serta capaian target kinerja program dan kegiatan yang dicapai," ujarnya.

Irsyad menambahkan, dari pembahasan yang telah dilakukan Banggar bersama TAPD terhadap Raperda PPA Tahun 2023 ada beberapa poin yang menjadi catatan DPRD.

Pertama, kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2023 belum maksimal. Kondisi ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan terutama PAD yang menjadi indikator kinerja utama hanya sebesar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menetapkan peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (PPA) Tahun 2023.

Rp2,784 triliun atau 91,77 persen.

Realisasi ini lebih rendah dari Tahun 2022. Demikian juga dengan belanja, realisasinya hanya sebesar 94,72 persen dan terdapat 55 kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp9,1 triliun," katanya.

Irsyad mengatakan rendahnya realisasi pendapatan dan belanja daerah tersebut, disebabkan beberapa faktor, diantaranya kelemahan dalam aspek perencanaan pendapatan maupun perencanaan belanja dalam bentuk program dan kegiatan, kelemahan dalam proses pelaksanaan serta pengawasan.

"Permasalahan tersebut, pada umumnya merupakan permasalahan yang terus berulang dari tahun ke tahun dan tidak ada evaluasi yang dilakukan untuk memperbaiki kelemahan tersebut," ujarnya.

Irsyad berharap hasil pembahasan raperda PPA Tahun 2023, rekomendasi dan catatan yang diberikan DPRD, bendanya menjadi bahan

evaluasi dan bahan penyempurnaan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2024 dan APBD Tahun 2025.

Ia menambahkan, terkait raperda PPA ini, fraksi-fraksi telah pula menyampaikan pendapat akhir fraksinya.

"Fraksi-fraksi menyetujui namun ada beberapa catatan dan masukan yang perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, agar kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih baik," tuturnya.

Irsyad menambahkan, mengingat dalam Pasal 195 ayat (1) ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ditetapkan, bahwa Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD yang telah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD, disampaikan paling lama tiga hari sejak disepakati kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dievaluasi.

"Sehubungan dengan hal





KLIPING BERITA

tersebut, kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memenuhi batasan waktu penyampaiannya kepada Menteri Dalam Negeri, agar Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dapat segera dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri," katanya.

LAPORAN BADAN ANGGARAN

Badan Anggaran (Banggar) DPRD menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah belum maksimal baik pada aspek pendapatan maupun belanja daerah.

Terutama pada aspek pendapatan daerah, penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD) hanya 91,77 persen.

"Ini lebih rendah dari Tahun 2022 dan merupakan kondisi yang kontradiksi dimana objek pajak bertambah dan pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi penerimaan berkurang," ujar Sekretaris Dewan (Sekwan).

Rafis saat membacakan laporan Banggar dalam rapat paripurna.

Demikian juga halnya dengan belanja. Pada satu sisi, terdapat kekurangan target pendapatan daerah cukup besar yaitu Rp213 miliar. Tetapi pada sisi lain, sisa belanja juga cukup besar yaitu Rp392 miliar.

"Terdapat kecenderungan menahan belanja. Semestinya apabila target pendapatan tidak tercapai, tentu saja belanja semakin sedikit. Kondisi ini menunjukkan cukup banyak kegiatan-kegiatan yang sengaja tidak dilaksanakan agar tidak terjadi gagal bayar," ujarnya.

Kemudian pada aspek efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sebagaimana terlihat LHP BPK atas laporan keuangan Tahun 2023 dan LHP sistem pengendalian internal (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, juga belum begitu baik.

Banggar menilai meskipun opini dari laporan keuangan WTP akan tetapi masih banyak terdapat temuan pada SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah 29 temuan dan 113 rekomendasi dengan kerugian daerah sebesar Rp3,4 miliar.

"Dan bahkan temuan tersebut sebagian merupakan temuan berulang yang disebabkan karena kesalahan perencanaan dan kelemahan dalam pengawasan," ujarnya.

Kemudian, pada aspek keselarasan antara realisasi anggaran dengan capaian target kinerja program dan kegiatan yang terdapat dalam LKPI.

"Meskipun capaian target kinerja program dan kegiatan telah luncur yang di atas target, akan tetapi dari target kinerja RPJMD dan output program unggulan terdapat masih cukup banyak target utamanya yang belum tercapai," ujarnya.

Sementara itu beberapa catatan dan masukan fraksi-fraksi diantaranya, pertama, fraksi-fraksi menilai secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah pemerintah provinsi Sumbar Tahun 2023 masih belum optimal. Masih banyak kelemahan-kelemahan baik pada aspek pendapatan maupun belanja daerah.

Dibaca oleh itu, fraksi-fraksi menilai gubernur perlu melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap kebijakan, sistem, SOP, SiN dan semua potensi penerimaan daerah.

Kedua, fraksi-fraksi menilai perlu dilakukan efisiensi terhadap anggaran perjalanannya, ATK, makan minum dan anggaran pendukung lainnya. Selain itu, mengoptimalkan anggaran untuk peningkatan belanja modal yang porsinya masih jauh dari alokasi yang dimanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Ketiga, fraksi meminta dalam menyusun perubahan APBD Tahun 2024 dan penyusunan APBD Tahun 2025, Pemprov dimina mempedomani catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Banggar.

Sekretaris Daerah provinsi (Sekdagprov) Sumbar, Hansnstri yang mewakili gubernur dalam rapat paripurna tersebut mengatakan dengan telah disahkannya ranperda ini, maka pemerintah provinsi akan segera menyampaikannya pada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Selain itu, apa yang disampaikan DPRD berupa catatan, masukan dan rekomendasi akan ditindaklanjuti. (*)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



243



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
PADANG	SELASA, 2 JULI 2024	6

Sepakati Ranperda APBD 2023, DPRD Sumbar Dorong Perbaikan Keuangan Daerah

DPRD Provinsi Sumbar sepakati rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 melalui sidang paripurna, Senin (1/7).

Sidang paripurna tersebut dilaksanakan di ruang sidang utama DPRD Sumbar dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar. DPRD Sumbar memberikan perhatian khusus terhadap optimalisasi pengelolaan keuangan daerah ke depan.

Irsyad Syafar menjelaskan bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) merupakan sarana evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pembahasan tidak hanya mencakup realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), tetapi juga efektivitas dan capaian target kinerja yang telah dicapai.

"Selama pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) dan TAPD terhadap Ranperda PPA, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2023 belum optimal, terutama dalam realisasi pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 91,77 persen dari target. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2022," ujarnya.

Belanja daerah juga hanya terealisasi sebesar 94,72 persen dengan 55 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan senilai lebih dari Rp9,1 miliar. Rendahnya realisasi pendapatan dan belanja daerah disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kelemahan dalam aspek perencanaan.

"Permasalahan ini secara umum berulang setiap tahun tanpa ada evaluasi yang memadai untuk memperbaiki kelemahan tersebut," tambahnya.

Irsyad Syafar menegaskan bahwa hasil pembahasan terhadap Ranperda PPA 2023 serta catatan yang diberikan oleh DPRD harus menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan bagi Pemerintah Provinsi dalam perencanaan anggaran untuk APBD perubahan tahun 2024 dan APBD tahun 2025.

Rapat paripurna DPRD Sumbar untuk mengambil keputusan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023 dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Hansastri.

Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov menyampaikan bahwa kritik, saran, dan masukan dari DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah.

"Dari hasil pembahasan dan evaluasi yang dilakukan oleh DPRD, terdapat saran, kritikan, dan masukan yang konstruktif terhadap kinerja pemerintah daerah yang akan kami jadikan pedoman untuk perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan sosial kemasyarakatan di masa yang akan datang," katanya.

Dengan disetujuinya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023 sebagai peraturan daerah, DPRD mengingatkan Pemprov Sumbar untuk segera menindaklanjutinya dengan menyampaikan keputusan ini kepada Menteri Dalam Negeri dalam waktu tidak lebih dari tiga hari. (*)





KLIPING BERITA



Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar menandatangani berita acara pengesahan Ranperda APBD 2023.



Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar didampingi Sekwan DPRD Sumbar, Rafli dan Sekdaprov Sumbar, Hansastri bersama pejabat terkait foto bersama.



Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar didampingi Sekwan DPRD Sumbar, Rafli dan Sekdaprov Sumbar, Hansastri bersama pejabat terkait foto bersama.



0751 7057591

<https://dprd.sumbarprov.go.id/>

245



KLIPING BERITA

KORAN	SELASA, 2 JULI 2024 25 Dzulhijjah 1445 H	HALAMAN
Haluan		16

SAHKAN PERDA PPA TAHUN 2023

DPRD Sumbar Tekankan Perencanaan Anggaran Harus Lebih Baik Lagi

PADANG, HALUAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyetujui rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda), melalui rapat paripurna Senin (1/7).

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, dan dilaksanakan di Ruang Sidang Utama gedung DPRD setempat.

Seiring dengan disahkannya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) Tahun 2023, sejumlah catatan strategis juga disampaikan DPRD Sumbar untuk bisa mendapat perhatian oleh pemerintah daerah.

Irsyad Syafar mengatakan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan sarana evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pembahasannya tidak hanya menyangkut pada aspek realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan hingga Silpa, tetapi mencakup aspek efektivitas dan capaian target kinerja yang dicapai.

Disebutkannya, dari pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) dan TAPD terhadap Ranperda

PPA ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian.

Pertama, kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2023 belum maksimal. Kondisi ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD hanya sebesar Rp2,7 triliun atau 91,77 persen. Realisasi ini lebih rendah dari tahun 2022.

Demikian juga dengan belanja daerah yang realisasinya hanya sebesar 94,72 persen dan terdapat 55 kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp9,1 miliar lebih. Rendahnya realisasi pendapatan dan belanja daerah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kelemahan dalam aspek perencanaan.

"Permasalahan tersebut, pada umumnya terus berulang dari tahun ke tahun dan tidak ada evaluasi yang dilakukan untuk memperbaiki kelemahan tersebut," ungkapnya.

Dia menyebutkan, hasil

pembahasan terhadap Ranperda PPA 2023 serta catatan yang dibenarkan oleh DPRD dan termuat nanti dalam laporan hasil pembahasan, hendaknya menjadi bahan evaluasi dan bahan penyempurnaan oleh Pemprov dalam perencanaan anggaran pada perubahan APBD tahun 2024 dan APBD tahun 2025.

Rapat paripurna DPRD

Provinsi Sumatera Barat untuk pengambilan keputusan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023 tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi





Sumbat, Hansari.

Dalam kesempatan itu, Sekdaprov menyampaikan kritik, saran dan masukan yang disampaikan oleh DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah.

"Dari hasil pembahasan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh DPRD, terdapat saran, kritikan dan masukan yang konstruktif terhadap kinerja pemerintah daerah yang tentunya akan kami jadikan sebagai pedoman untuk perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan di masa yang akan datang," katanya.

Dengan ditetapkannya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023 menjadi peraturan daerah, DPRD mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjutinya dengan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama tiga hari sejak disepakati. (adv)



0751 7057591 <https://dprd.sumbarprov.go.id/> 247



KLIPING BERITA



Berfoto bersama



Penandatanganan kesepakatan bersama Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023



0751 7057591

<https://dprd.sumbarprov.go.id/>

248



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	SELASA, 2 JULI 2024	8

Ranperda Pelayanan Mutu Kesehatan Dilengkapi Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumbar 2023 Ditetapkan

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Paripurna dengan acara Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023 dan Penetapan Usul Prakarsa Ranperda Pelayanan Mutu Kesehatan.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar. Ia dihadiri oleh Gubernur Sumbar yang diwakili Sekda Prov Himaesbi, beberapa unsur pimpinan DPRD beserta anggota dan unsur terkait lainnya di gedung DPRD, Serin (1/7).

Dalam sambutannya, Irsyad Syafar menyampaikan, awal Mei lalu, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tergabung dalam Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat, mengajukan usul prakarsa terhadap Ranperda tentang Pelayanan Mutu Kesehatan yang merupakan salah satu ranperda dalam Proppemperda 2024.

"Menurut ketentuan pasal 26 huruf h UUD 1945 diamanatkan bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak," ungkap Irsyad Syafar.

Selanjutnya, Ranperda usul prakarsa yang disampaikan anggota DPRD, oleh Pimpinan DPRD diteruskan kepada Bapemperda untuk dilakukan kajian

dalam rangka harmonisasi, penyiapan dan pemertanian konsep oleh Bapemperda.

Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat pun telah melakukan kajian, harmonisasi, penyiapan dan pemertanian konsep terhadap Ranperda tentang Pelayanan Mutu Kesehatan.

Dari hasil harmonisasi Bapemperda terhadap Ranperda Pelayanan Mutu Kesehatan diperoleh saran dan masukan bahwa judul Ranperda tentang Pelayanan Mutu Kesehatan hanya sebagian kecil menjawab masalah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan, oleh sebab itu disarankan dilakukan perubahan judul menjadi Ranperda Pengelolaan Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat yang cakupannya tentu lebih luas dan memuat pengelolaan kesehatan yang lebih komprehensif meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sertifikasi, Registrasi, dan Lisensi, Konsil, Kolegium & Majelis Disiplin, Perlindungan Hukum SOM Kesehatan, Perbekalan Kesehatan, Kesehatan Kefarmasian & Alat Kesehatan, Teknologi Kesehatan, Pembinaan Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan, Peran Serta Masyarakat sesuai tanggung jawab Pemerintah Daerah.

"Saat ini tim penyusun naskah akademik dan draft Ranperda sedang menyelesaikan perbaikan draft Ranperda sesuai masukan tersebut. Untuk itu Rapat Paripurna dalam rangka penetapan usul

"Penetapan usul Ranperda ini perlu diagendakan kembali dalam rapat Badan Musyawarah, setelah tim penyusun Naskah Akademik meny-

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023, dalam rangka akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, pada

linggungjawabannya Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD

DPRD bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasannya mulai dari pembahasan pendahuluan oleh Komisi Bersama OPD dan dilanjutkan dengan pembahasan dan finalisasi oleh Badan Anggaran Bersama TAPD

Pembahasan tidak hanya menyangkut pada aspek realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah atau SILPA, akan tetapi juga mencakup aspek efektivitas, efisiensi, akuntabilitas serta capaian target kinerja program dan kegiatan yang dicapai.

Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran Bersama TAPD antara lain: Kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2023, belum maksimal. Kondisi ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan terutama PAD yang menjadi indikator kinerja utama hanya sebesar Rp. 2.784.774.801,212,- atau 91,77

Realisasi lebih rendah dari Tahun 2022. Demikian juga dengan belanja, realisasinya hanya sebesar 94,72 % dan terdapat 55 kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp. 9.125.999.206,-," jelasnya.

Kemudian, rendahnya realisasi pendapatan dan belanja daerah tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kelemahan dalam aspek perencanaan baik perencanaan pendapatan maupun perencanaan belanja dalam bentuk program dan kegiatan.

Dari pendapat akhir Fraksi-Fraksi, semua Fraksi dapat meny-





KLIPING BERITA

Atas hasil pembahasan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna. Fraksi-Fraksi juga memberikan catatan dan masukan yang perlu menjadi perhatian dan diadukartai oleh Pemerintah Daerah, agar kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih baik.

Badan Anggaran juga telah menyampaikan laporan hasil pembahasannya terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, kemudian dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan dan Penetapan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Sekretaris DPRD selaku Sekretaris Badan Anggaran juga telah menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.

Atas laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda, anggota dewan telah memberikan persetujuannya, selanjutnya menetapkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 menjadi Peraturan Daerah. Konsep Keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan DPRD telah dilakukan penandatanganan dan diberikan Nomor : 12/SB/2024. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (**)



MENANDATANGANI—Wakil ketua DPRD Sumbang Irsyad Syahar menandatangani Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023 menjadi Perda.

Prakarsa Ranperda Pelayanan Mutu Kesehatan belum dapat dilanjutkan pada tahap penetapan," ungkapnya.

Isaikan perbaikan naskah akademik dan draft ranperda di-maksud," tambahnya. Terkait dengan Ranperda

rapat paripurna tanggal 3 Juni 2024 yang lalu, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan Ranperda tentang Per-



MEMIMPIN—Wakil Ketua DPRD Sumbang Irsyad Syahar memimpin sidang Rapat Paripurna.



MENANDATANGANI—Mewakil Gubernur Sumbang Sekda Prov Hanaastri menandatangani Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023 menjadi Perda.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbang	SELASA, 2 JULI 2024	9

DPRD Sumbang Tetapkan Perda Pertanggung-jawaban APBD 2023

Rakyat Sumbang — DPRD Provinsi Sumbang menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggung-jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

Keputusan DPRD dimaklumkan dengan Nomor : 12/SB/2023 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumbang terhadap Ranperda tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumbang Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan

Daerah," kata Wakil Ketua DPRD Sumbang, Irsyad Syafat, saat rapat paripurna agenda yang sama di ruang sidang utama lembaga setempat, Senin, (1/7) siang.

Ia melanjutkan, Ranperda tentang Pertanggung-jawaban APBD yang telah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk dievaluasi paling lama 3 hari sejak disepakati.

"Kami mengingatkan pemerintah daerah dapat memenuhi batasan waktu penyampaiannya kepada Menteri Dalam Negeri,

agar Ranperda tentang Pertanggung-jawaban APBD Provinsi Sumbang 2023, dapat segera dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri," ucapnya.

Menurut Irsyad, masa jabatan Anggota DPRD Provinsi Sumbang periode 2019-2024 akan berakhir pada 28 Agustus 2024. Oleh sebab itu, kesepakatan antara DPRD dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan KUA-PPAS 2025 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2024, dilakukan paling lambat minggu ke 2 Agustus 2024.

"Hal ini sesuai dengan agenda

pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019," ungkap Irsyad Syafat.

Ia mengakhiri, diminta kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mempercepat penyampaian Rancangan KUA-PPAS tahun 2025 dan Perubahan KUA-PPAS tahun 2024 kepada DPRD.

"Hal ini supaya dapat segera dibahas dan disepakati bersama, agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembahasan dan penetapannya," pungkas Irsyad Syafat. (byr)



Wakil Ketua DPRD Sumbang, Irsyad Syafat, menandatangani Kesepakatan Bersama Gubernur dan DPRD tentang Ranperda Pertanggung-jawaban APBD Sumbang 2023, saat rapat paripurna, Senin, (1/7).



KORAN

AN



HANDIYANUAR RAKYAT SUMBAR

SEKDA Provinsi Sumbar, Hansastri, menandatangani Kesepakatan Bersama Gubernur dan DPRD terhadap Ranperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan tentang APBD Sumbar 2023, saat rapat paripurna, Senin, (1/7).



HANDIYANUAR RAKYAT SUMBAR

SEKRETARIS DPRD Sumbar, Rafis, selaku Sekretaris Badan Anggaran menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Sumbar 2023, saat rapat paripurna, Senin, (1/7).



HANDIYANUAR RAKYAT SUMBAR

WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Insyad Syahar, Sekda Provinsi Sumbar, Hansastri, Sekretaris DPRD Sumbar, Rafis, foto bersama setelah menandatangani Kesepakatan Bersama Gubernur dan DPRD terhadap Ranperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan tentang APBD Sumbar 2023, saat rapat paripurna, Senin, (1/7).



HANDIYANUAR RAKYAT SUMBAR

WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Insyad Syahar, Sekda Provinsi Sumbar, Hansastri, saat memimpin rapat paripurna Ranperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan tentang APBD Sumbar 2023, saat rapat paripurna, Senin, (1/7).





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbang		9
SELASA, 2 JULI 2024		

Ranperda Pelayanan Mutu Kesehatan Disarankan Perubahan Judul

Padang, Rakyat Sumbang — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbang, Irsyad Syahat, mengatakan, lembaga ini belum bisa menetapkan Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pelayanan Mutu Kesehatan menjadi peraturan daerah (Perda), karena ada saran perubahan judul.

"Penetapan Usul Ranperda ini perlu diagendakan kembali dalam rapat Badan Musyawarah, setelah tim penyusun naskah akademik menyelesaikan perbaikan naskah akademik dan draft Ranperda tersebut," kata Irsyad Syahat, saat rapat paripurna Penetapan Usul Prakarsa DPRD tentang Ranperda Pelayanan Mutu Kesehatan, di ruang sidang utama DPRD Sumbang, Senin, (1/7) siang.

Ia melanjutkan, dari hasil harmonisasi Bapemperda terhadap Ranperda Pelayanan Mutu Kesehatan diperoleh saran dan masukan, bahwa judul Ranperda tentang Pelayanan Mutu Kesehatan, hanya sebagian kecil menjawab masalah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan.

"Oleh sebab itu, disarankan dilakukan perubahan judul menjadi Ranperda Pengelolaan Kesehatan di Provinsi Sumbang, yang cakupannya tentu lebih luas dan memuat pengelolaan

kesehatan yang lebih komprehensif," ucapnya.

Ia menyampaikan, cakupan itu meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sertifikasi, Registrasi, dan Lisensi, Konsil, Kolegium & Majelis Disiplin, Perlindungan Hukum SDM Kesehatan.

"Selain itu, Perbekalan Kesehatan, Ketahanan Kelangkaan & Alat Kesehatan, Teknologi Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan, Peran Serta Masyarakat sesuai tanggung jawab pemerintah daerah," ungkapnya.

Menurut Irsyad, perbaikan judul tersebut juga hendaknya diikuti dengan perbaikan naskah akademik serta ruang lingkup Ranperda yang diatur sesuai Amanat Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

"Selain itu, karena Undang-undang Kesehatan masih sangat baru, perlu juga ditunggu peraturan pelaksanaannya yang belum keluar sehingga Ranperda yang dihasilkan nantinya lebih komprehensif. Tim penyusun naskah akademik dan draft Ranperda sedang menyelesaikan perbaikan draft Ranperda sesuai masukan tersebut," pungkasnya. (byr)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	SENIN, 1 JULI 2024	7.

Dewan Solsel Konsultasi ke DPRD Sumbar

Padang, Rakyat Sumbar — Sekretaris DPRD Provinsi Sumbar, Rafis, mengatakan, pihaknya terus melakukan strategi dan melakukan pertemuan dengan semua pihak, agar lancar dan memuluskan kinerja kedinasan menjelang berakhirnya periode 2021-2024.

"Kita terus melakukan konsultasi dan studi banding, agar peraturan nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat," kata Rafis, saat menerima kunjungan DPRD Kabupaten Solok Selatan (Solsel, di ruang khusus I, Jumat, (28/6).

Ia menyampaikan, semakin di ujung masa bakti periode pimpinan dan anggota DPRD Sumbar agenda semakin padat dan produktif melahirkan perda bermanfaat bagi masyarakat.

"Disanya, kalau tabu (tabu) di karung ambo, tabu kalau semakin karung kan hambar dia, tetapi tabu ini semakin karung semakin manis dia, artinya kinerja kita semakin padat," ujar Rafis.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan Arnen mengatakan, jadwal pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD, paling lambat Minggu kedua Juli 2024 dan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024 disampaikan paling lambat Minggu Pertama Agustus 2024 dan penetapannya dilakukan bersamaan minggu kedua Agustus 2024.

Terhubung masa kesanggupan DPRD Tahun 2019-2024 juga akan berakhir pada bulan Agustus 2024, maka perlu dilakukan percepatan terhadap pembahasan dan penesepaan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024, agar tidak terjadi nanti keterlambatan dalam penetapannya," sebutnya.

Arnen mengatakan, pihaknya dari gabungan Komisi DPRD

Kabupaten Solok Selatan akan melaksanakan sharing informasi terkait Langkah dan strategi Percepatan Pembahasan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024.

Arnen menyampaikan, pihaknya juga melakukan konsultasi Bapemperda DPRD Kabupaten Solok Selatan sedang melakukan proses penyusunan Ranperda usul pemecatan DPRD, karena sesuai dengan tugas dan wewenang Bapemperda sebagaimana diatur dalam Pasal 52 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

"Ranperda telah melalui beberapa tahap penyusunan, perlu dilakukan penyempurnaan dan penajaman materi Bapemperda. Konsultasi dan koordinasi Penyempurnaan dan Penajaman Materi Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Prolegda," pungkasnya. (byr/ref)



SEKRETARIS DPRD Sumbar, Rafis, saat menerima kunjungan DPRD Kabupaten Solok Selatan (Solsel, di ruang khusus I, Jumat, (28/6).



KORAN

HARI/TANGGAL

HALAMAN

KHAZ

SENIN, 1 JULI 2024
SENIN, 24 DZULHIJAH 1445 H

2

TERKAIT PENETAPAN ANGGARAN DAN BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Solok Selatan Konsultasi ke DPRD Provinsi Sumbar



SEKRETARIS DPRD Sumbar H. Rafli, SH, MM didampingi Kabag Persidangan dan Perundangan Zardi Syahrir saat menerima rombongan anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan

Padang, Khazanah — Pimpinan beserta anggota komisi dan juga anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Solok Selatan (Solse), Jumat (28/6) beraudiensi ke DPRD Sumbar menanyakan terkait berbagai hal.

Kedatangan rombongan DPRD Kabupaten Solok Selatan ini diterima Sekretaris DPRD Sumbar H. Rafli, SH, MM di ruang khusus I gedung putih itu.

Dalam kesempatan itu, Rafli mengukir bahwa semakin diujung masa bakti periode anggota DPRD Sumbar, agenda sensasi padat dan produktif melahirkan perda bermanfaat bagi masyarakat.

"Biasanya, kalau tebu di kampung saya, semakin ke ujung

kan hambar dia, tapi kalau ini semakin ke ujung semakin manis dia. Artinya, kinerja kita itu semakin padat," ujar seloroh Rafli disambut tepuk tangan hadirin.

Menurut Rafli disebut-sebut bakal bertaring di Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan ini, pihaknya melakukan strategi melakukan pertemuan dengan semua pihak, agar lancar dan mulusnya kinerja di lembaga dewan.

"Kita terus melakukan konsultasi dan studi banding, agar peraturan nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat, sesuai visi dan misi kepala daerah Sumatera Barat Sumbar Madani, berdaya saing, meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak

Mulia, Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing," ujar Rafli.

Ikut mendampingi Kabag Persidangan dan Perundangan Zardi Syahrir, Kasubag Humas dan Protokol Dahrul Idris dan staf sekretariat DPRD Sumbar dan staf sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan Armen mengatakan, jadwal pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD, paling lambat Minggu kedua Juli 2024 dan Rancan-

gan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024 disampaikan paling lambat Minggu Pertama Agustus 2024 dan penetapannya dilakukan bersamaan Minggu kedua Agustus 2024.

Berhubung masa keranggotaan DPRD Tahun 2019-2024 juga akan berakhir pada bulan Agustus 2024, maka perlu dilakukan percepatan terhadap pembahasan dan penetapan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024, agar tidak terjadi nanti keterlambatan dalam penetapannya.

Lebih lanjut Armen mengatakan, gabungan Komisi DPRD Kabupaten Solok Selatan akan melaksanakan sharing informasi terkait langkah dan strategi Percepatan Pembahasan KUA PPAS Tahun 2025 dan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024. Selain itu Armen juga mengungkapkan, pihaknya juga melakukan konsultasi Bapemperda DPRD Kabupaten Solok.

Selatan yang sedang melakukan proses penyusunan Ranperda usul prakarsa DPRD.

Karena, tugas dan wewenang Bapemperda sebagaimana diatur dalam Pasal 52 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Ranperda telah melalui beberapa tahap penyusunan, perlu dilakukan penyempurnaan dan penajaman materi Bapemperda. Konsultasi dan koordinasi Penyempurnaan dan Penajaman Materi Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Prolegda," ujarnya. (jer/?)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SENIN, 1 JULI 2024 24 Dzulhijjah 1445 H	6.

Dewan Sebut Berantas Judol Tanggung Jawab Semua Pihak

PADANG, HALUAN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Rahmat Saleh menyatakan, pemberantasan judi online (judol) merupakan tanggungjawab semua pihak.

Rahmat Saleh mengatakan, judol sudah menjadi penyakit masyarakat yang mencolok masyarakat di semua kalangan, terutama tak luput di Sumbar. Mulai dari kalangan intelektual hingga anak muda, orang tua sampai anak-anak.

"Judi online ini sudah menjadi ancaman serius bagi kehidupan di Indonesia. Kita perlu peran aktif dari semua pihak, termasuk tokoh adat, masyarakat, tokoh agama, dan terutama pemerintah, untuk memberantas penyakit masyarakat ini," katanya, Sabtu (29/6) kemarin.

Menurutnya, upaya pemberantasan judi online harus dimulai dari langkah kecil, dari kelompok-kelompok kecil di tingkat nagari dan kecamatan, hingga penegakan hukum yang kuat di tingkat pusat.

"Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum terhadap pengasut judi online. Kita tidak boleh kalah dengan mereka," kata Rahmat yang juga Anggota DPR RI terpilih 2024-2029 dari PKS itu.

Rahmat Saleh juga menyoroti peran penting Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), terutama dalam memblokir situs-situs judol tersebut.

"Situs-situs ini adalah pintu awal maraknya judi online. Kemenkominfo harus bertanggung jawab memblokirnya, kemudian membuat aturan kongkrit untuk mengantisipasinya," katanya.

Tak hanya itu, Rahmat Saleh juga meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku judi online. Tindakan tegas ini diperlukan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari bahaya judi online.

Pernyataan ini selaras dengan kekhawatiran banyak pihak tentang maraknya judi online yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. "Diharapkan dengan upaya bersama dari semua pihak, penyakit masyarakat ini dapat diberantas dan Indonesia terhindar dari dampak negatifnya," ucapnya. (h/idi)



Rahmat Saleh





KLIPING KORAN



**Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang Telp. (0751) 7057391 - 705753
Fax. (0751) 7059328 Padang 25133, Sumatera Barat**